



Katalog BPS: 9199007



LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2017



BADAN PUSAT STATISTIK



LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2017

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2017

ISSN : 1858-0963
No. Publikasi : 07330.1710
Katalog BPS : 9199007
Ukuran Buku : 17,6x25 cm
Jumlah Halaman : xx+178 hlmn

Naskah :
Subdirektorat Indikator Statistik

Gambar Kulit :
Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh :
CV NARIO SARI

Dilarang mengumumkan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<http://www.bps.go.id>

TIM PENYUSUN

Pengarah :
Sentot Bangun Widoyono

Editor :
Ali Said
Sofaria Ayuni

Penulis :
Sofaria Ayuni
Chairul Anam
Nia Setiyawati
Riyadi
Adwi Hastuti
Putri Larasaty
Aprilia Ira Pratiwi

Pengolahan Data/Penyiapan Draft :
Chairul Anam
Putri Larasaty

Desain/layout :
Chairul Anam
Yogi Ariawan

Kontributor Data :
- Direktorat Neraca Produksi
- Direktorat Neraca Pengeluaran
- Direktorat Statistik Harga
- Direktorat Statistik Distribusi
- Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

<http://www.bps.go.id>

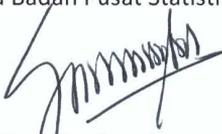
KATA PENGANTAR

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2017 merupakan publikasi rutin tahunan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini memberikan gambaran perkembangan kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2016 dan yang sedang berjalan di tahun 2017, yang dicerminkan melalui indikator makro terpilih.

Statistik yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari data yang dihimpun oleh BPS dan institusi lain seperti Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan instansi lainnya yang dapat memberikan gambaran perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan ekonomi maritim, perdagangan luar negeri, sektor moneter, investasi, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Akhirnya, penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Saran membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang, dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2017
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xiii
Penjelasan Umum	xv
Penjelasan Teknis	xvi
Singkatan	xix
BAB I. TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA	1
Perekonomian Global Tidak Sesuai Perkiraan	3
Ekonomi Negara Maju: Tumbuh Melambat dan Inflasi Meningkat.....	5
Ekonomi Negara Berkembang : Tumbuh Melambat dan Inflasi Terkendali	7
Prospek Perekonomian Dunia	10
Gambaran Umum Perekonomian Indonesia	14
Indeks Daya Saing Indonesia	17
Prospek dan Tantangan Perekonomian Indonesia di Tahun 2017.....	20
BAB II. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA	25
Penerimaan Negara.....	28
Pengeluaran Negara	31
Perekonomian Indonesia di Tahun 2017	34
BAB III. PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL	37
Perekonomian Indonesia Kembali Tumbuh	39
PDB Menurut Lapangan Usaha	40
PDB Menurut Penggunaan.....	44
Pertumbuhan Ekonomi Spasial	48
PDB Per Kapita	50
Capaian Kinerja Perekonomian Indonesia Triwulan I 2017	51
BAB IV. PERKEMBANGAN POROS EKONOMI MARITIM INDONESIA ...	55
Indonesia Sebagai Poros Ekonomi Maritim.....	57
Potensi Maritim Indonesia	58
Maritim Masa Depan Indonesia.....	62
BAB V. INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT	65
Inflasi Inti dan Non Inti.....	67
Perkembangan Inflasi Nasional Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	69
Inflasi Kota-Kota di Indonesia.....	73

Pengaruh Inflasi Terhadap Perekonomian.....	76
Tingkat Inflasi Negara ASEAN	78
BAB VI. EKSPOR, IMPOR DAN NERACA PERDAGANGAN INDONESIA..	81
Perkembangan Ekspor.....	83
Perkembangan Impor.....	89
Neraca Perdagangan Indonesia.....	94
BAB VII. KINERJA SEKTOR MONETER	95
Perkembangan Uang Beredar (M2)	97
Peredaran Uang Primer dan Komponennya.....	101
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah	103
Pergerakan Suku Bunga.....	107
BAB VIII. INVESTASI DAN PERDAGANGAN SAHAM.....	113
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	116
Penanaman Modal Asing (PMA)	120
Bursa Efek Indonesia (BEI).....	123
Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia.....	126
BAB IX. PARIWISATA	129
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Melalui Pintu Masuk/Bandara	133
Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan	135
Akomodasi Pariwisata	137
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap	140
BAB X. KONDISI KETENAGAKERJAAN	145
Angkatan Kerja Sebagai Modal Pembangunan.....	147
Variasi Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi	152
Potret Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan	154
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Masih Dominan Dalam Penyerapan Tenaga kerja	156
Upah Pekerja	157
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Diiringi Dengan Penciptaan Lapangan Kerja Yang Memadai	161
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia.....	162
Tenaga Kerja Informal Masih Mendominasi Ketenagakerjaan Indonesia.....	165
BAB XI. PENUTUP	169

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2012–2016	4
Tabel 1.2. Laju Inflasi Dunia, Negara-Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2012–2016	8
Tabel 1.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Dunia, Negara-Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2017–2018	12
Tabel 1.4. Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia, Tahun 2012–2016	15
Tabel 1.5. Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Dengan Beberapa Negara Lainnya ¹ , Tahun 2013/2014–2016/2017.....	18
Tabel 1.6. Nilai dan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Menurut Pilar Daya Saing, Tahun 2014/2015–2016/2017	20
Tabel 1.7. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia (persen), Tahun 2017 dan 2018	21
Tabel 2.1. Penerimaan APBN, Tahun 2013-2017 (miliar rupiah)	28
Tabel 2.2. Pengeluaran APBN, Tahun 2013–2017 (miliar rupiah).....	32
Tabel 3.1. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013–2016	42
Tabel 3.2. Produk Domestik Bruto Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013–2016	43
Tabel 3.3. Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan, Tahun 2013-2016	47
Tabel 3.4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen), Tahun 2014–2016	48
Tabel 3.5. Peranan Wilayah Dalam Pembentukan PDB Nasional (persen), Tahun 2014–2016	50
Tabel 3.6. Produk Domestik Bruto per Kapita (ribu rupiah), Tahun 2012–2016	51
Tabel 3.7. Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I–2017	52
Tabel 3.8. Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran, Triwulan I–2017 ...	53
Tabel 5.1. Inflasi dan Sumbangan Inflasi Inti dan Non Inti, Tahun 2014–2015	68
Tabel 5.2. Laju Inflasi Indonesia Gabungan 82 Kota Menurut Kelompok Barang Kebutuhan (2012=100) (persen), Tahun 2014–2017	70

Tabel 5.3.	Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional (persen), Tahun 2015 dan 2016.....	72
Tabel 5.4.	Laju Inflasi 82 Kota di Indonesia ¹ (2012=100), Tahun 2013–2016	74
Tabel 6.1.	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Migas dan Non-Migas (juta US\$), Tahun 2014–2017	84
Tabel 6.2.	Nilai Ekspor Komoditi Penting Indonesia (juta US\$), Tahun 2014–2017	86
Tabel 6.3.	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), Tahun 2014–2017.....	87
Tabel 6.4.	Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$), Tahun 2014–2017	88
Tabel 6.5.	Nilai Impor Indonesia Menurut Migas dan Non-Migas (juta US\$), Tahun 2014–2017	90
Tabel 6.6.	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi (juta US\$), Tahun 2014–2017	91
Tabel 6.7.	Nilai Impor Indonesia (CIF) Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), Tahun 2014–2017	91
Tabel 6.8.	Impor Indonesia Menurut Negara Asal (juta US\$), Tahun 2014–2017	93
Tabel 6.9.	Neraca Perdagangan Indonesia (juta US\$), Tahun 2014–2017	94
Tabel 7.1.	Perkembangan Uang Beredar (miliar rupiah), Tahun 2015 – Maret 2017.....	100
Tabel 7.2.	Perkembangan Uang Primer (miliar rupiah), Tahun 2015 – Maret 2017.....	102
Tabel 7.3.	Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, Tahun 2015–Maret 2017	106
Tabel 7.4.	Perkembangan Suku Bunga PUAB, SBI, BI Rate, dan Volume SBI, Tahun 2015-Maret 2017	110
Tabel 8.1.	Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (miliar rupiah), Tahun 2014– 2016	116
Tabel 8.2.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Pulau (miliar rupiah), Tahun 2014– 2016	118
Tabel 8.3.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor (juta US \$), Tahun 2014– 2016	120
Tabel 8.4.	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang Disetujui Pemerintah Menurut Pulau (juta US\$), Tahun 2014– 2016	122

Tabel 8.5.	Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2013–2016	124
Tabel 8.6.	Jumlah dan Nilai Perdagangan Saham yang Dilakukan oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2013–2016	126
Tabel 9.1.	Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Melalui 19 Pintu Masuk Utama (orang), Tahun 2011–2017	133
Tabel 9.2.	Wisatawan yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan, Tahun 2012–2016	137
Tabel 9.3.	Banyaknya Usaha, Kamar, dan Tempat Usaha pada Usaha Akomodasi Dirinci Menurut Klasifikasi Akomodasi, Tahun 2015 dan 2016.....	138
Tabel 9.4.	Banyaknya Usaha, Kamar, dan Tempat Usaha pada Hotel Bintang Dirinci Menurut Provinsi, Tahun 2015 dan 2016 ...	139
Tabel 9.5.	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Menurut Provinsi (persen), Tahun 2012–2016	140
Tabel 9.6.	Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (hari), Tahun 2012–2016	142
Tabel 10.1.	Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013–2017	148
Tabel 10.2.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013–2017	150
Tabel 10.3.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2013–2017	151
Tabel 10.4.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, Tahun 2013–2017	153
Tabel 10.5.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2013–2017	155
Tabel 10.6.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2013–2017 .	156
Tabel 10.7.	Rata-Rata UMP (ribu rupiah), dan Pertumbuhan UMP (persen), Tahun 2006–2017	158
Tabel 10.8.	Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Tahun 2014–2017	159
Tabel 10.9.	Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Jenis Kelamin (persen), Tahun 2014–2017	160
Tabel 10.10.	Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha, Tahun 2014–2016.....	162
Tabel 10.11.	Produktivitas Menurut Provinsi (juta rupiah per pekerja), Tahun 2012–2015	163
Tabel 10.12.	Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha (juta rupiah per pekerja), 2013–2016	165
Tabel 10.13.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, Tahun 2013–2017.....	166

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju, dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), 2012–2016.....	3
Gambar 1.2.	Perkembangan Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), 2012–2016	6
Gambar 1.3	Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN (persen), 2012–2016	9
Gambar 1.4	Perkembangan Laju Inflasi di Beberapa Negara ASEAN (persen), 2012–2016	9
Gambar 1.5	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), Tahun 2017 dan 2018	11
Gambar 1.6	Proyeksi Inflasi Dunia, Negara Maju dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), 2017 dan 2018	13
Gambar 1.7.	Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia dengan Beberapa Negara Berkembang di kawasan ASEAN, Tahun 2014/2015–2016/2017	19
Gambar 1.8.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Indonesia Menurut IMF (persen), Tahun 2017 dan 2018	22
Gambar 2.1.	Kontribusi Penerimaan Negara, Tahun 2017	30
Gambar 3.1.	Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013–2016	40
Gambar 3.2.	Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan, Tahun 2013–2016	44
Gambar 3.3.	Kontribusi PDB Menurut Penggunaan (Persen), Tahun 2016.....	45
Gambar 4.1.	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDB Perikanan (persen), Tahun 2012–2016 ^{xx}	58
Gambar 4.2.	Volume Produksi Perikanan di Indonesia, Tahun 2012–2016	59
Gambar 4.3.	Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Produk Perikanan Indonesia, Tahun 2011–2015	60
Gambar 4.4.	Potensi Lahan Budidaya.....	61
Gambar 5.1.	Laju Inflasi Indonesia, Tahun 2016–2017	71
Gambar 5.2.	Laju Inflasi Negara ASEAN (persen), Tahun 2014–2016	79
Gambar 6.1.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia, Tahun 2014–2016	84
Gambar 6.2.	Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Indonesia Menurut Sektor Komoditas, Tahun 2016	85
Gambar 6.3.	Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang, Tahun 2016	87
Gambar 6.4.	Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan, Tahun 2016.....	89
Gambar 6.5.	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi, Tahun 2016	90
Gambar 6.6.	Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang, Tahun 2016	92

Gambar 6.7.	Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal, Tahun 2016	93
Gambar 7.1.	Jumlah Uang Beredar (miliar rupiah), Tahun 2011–2016	99
Gambar 7.2.	Perkembangan Nilai Tukar Mata Uang Utama, Tahun 2016 – Maret 2017	104
Gambar 7.3.	Perkembangan PUAB Rupiah Pagi, dan BI <i>Rate</i> , Tahun 2016 – Maret 2017.....	108
Gambar 7.4.	Perkembangan SBI, BI <i>Rate</i> , dan Volume SBI, Tahun 2016 – Maret 2017.....	111
Gambar 8.1.	Nilai Investasi PMDN yang Terealisasi Menurut Sektor (persen), Tahun 2016	117
Gambar 8.2.	Nilai Investasi PMDN yang Terealisasi Menurut Pulau, (persen), Tahun 2016	119
Gambar 8.3.	Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Sektor (persen), Tahun 2016	121
Gambar 8.4.	Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Pulau (persen, 2016	123
Gambar 8.5.	Jumlah dan Nilai Transaksi Saham di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2013–2016.....	125
Gambar 9.1.	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Melalui Bandara (orang), Tahun 2012–2016	134
Gambar 9.2.	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Hotel Berbintang di 17 Provinsi (persen), Tahun 2016	142
Gambar 9.3.	Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia Pada Hotel Berbintang di 17 Provinsi (hari), Tahun 2016	143
Gambar 10.1.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, Tahun 2013–2017	167

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda yang digunakan dalam publikasi ini, adalah sebagai berikut :

Data belum tersedia : ...

Data tidak tersedia : -

Data dapat diabaikan : 0

Tanda desimal : ,

<http://www.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. Daya saing menurut *World Economic Forum* (WEF) adalah daya saing suatu negara/ekonomi dengan pendekatan makro. Indeks daya saing diukur dari 12 pilar dan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok faktor, yaitu persyaratan dasar, penopang efisiensi, dan inovasi dan kecanggihan bisnis.
2. Penghitungan PDB atas dasar harga konstan yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000, sejak tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010. Penghitungan PDB dengan tahun dasar baru tersebut telah dihitung mundur sampai dengan tahun 2010.
3. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
4. Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) sejak Juni 2008 sampai Desember 2013 mencakup 66 kota di seluruh Indonesia, meliputi 774 komoditas barang dan jasa, dan menggunakan tahun 2007 sebagai tahun dasar. Sejak Januari 2014 sampai sekarang, data IHK mencakup 82 kota di seluruh Indonesia, meliputi 859 komoditas barang dan jasa, dan menggunakan tahun 2012 sebagai tahun dasar.
5. Uang Kartal: adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah.
6. Uang Giral: Simpanan rupiah milik penduduk pada sistem moneter yang terdiri atas rekening giro, kiriman uang (*transfer*) dan kewajiban segera lainnya antara lain simpanan berjangka yang telah jatuh waktu.
7. Uang Kuasi: Simpanan rupiah milik penduduk pada sistem moneter yang untuk sementara waktu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan dalam rupiah dan valuta asing, dan giro dalam valuta asing.
8. M1 : adalah uang beredar dalam arti sempit yaitu meliputi uang kartal dan uang giral.
M2 : adalah uang beredar dalam arti luas yaitu meliputi uang kartal, uang giral ditambah dengan uang kuasi.
9. Pencatatan Statistik Ekspor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang tertentu (PEBT), dan pencatatan Statistik Impor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang diterima BPS dari kantor-kantor Bea dan Cukai.
10. Sistem pengolahan adalah *Carry over* yaitu dokumen dari satu bulan tertentu penerimaannya ditutup setelah satu bulan pada bulan berikutnya, dokumen yang datang sesudah tanggal penutupan dianggap sebagai

transaksi bulan berikutnya.

11. Beberapa Klasifikasi jenis/kelompok barang yang digunakan dalam statistik Ekspor dan Impor adalah:
 - a. *Harmonized System* (HS), untuk keperluan pengenaan tariff.
 - b. *Standard International Trade Clasification* (SITC), penyusunannya ditekankan untuk keperluan Statistik Ekonomi.
 - c. *International Standard Industrial Classification* (ISIC), untuk mengelompokkan lapangan usaha yang ada dalam kegiatan ekonomi atau asal lapangan usaha suatu komoditi dihasilkan.
 - d. *Broad Economic Category* (BEC), untuk mengetahui penggunaan akhir dari suatu barang yaitu barang konsumsi, bahan baku dan penolong, dan barang modal.
12. Sejak September 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) digabung (*merger*) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
13. Tamu Asing adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh suatu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.
14. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah banyaknya malam kamar yang dihuni dibagi dengan banyaknya malam yang tersedia dikalikan 100 persen.
15. Rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap ke akomodasi.
16. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun lebih.
17. Pekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan, paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
18. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja (pekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
20. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

-
21. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. TKK diukur sebagai persentase orang yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
 22. Produktivitas pekerja menurut provinsi diukur dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap provinsi.
 23. Produktivitas pekerja menurut kategori lapangan usaha diukur dengan membagi PDB pada masing-masing kategori lapangan usaha dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap kategori lapangan usaha.
 24. Penduduk yang bekerja menurut sektor formal/informal, ditentukan berdasarkan status dalam pekerjaan utama, yaitu;
 - a. Sektor Formal: Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.
 - b. Sektor informal : Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

<http://www.bps.go.id>

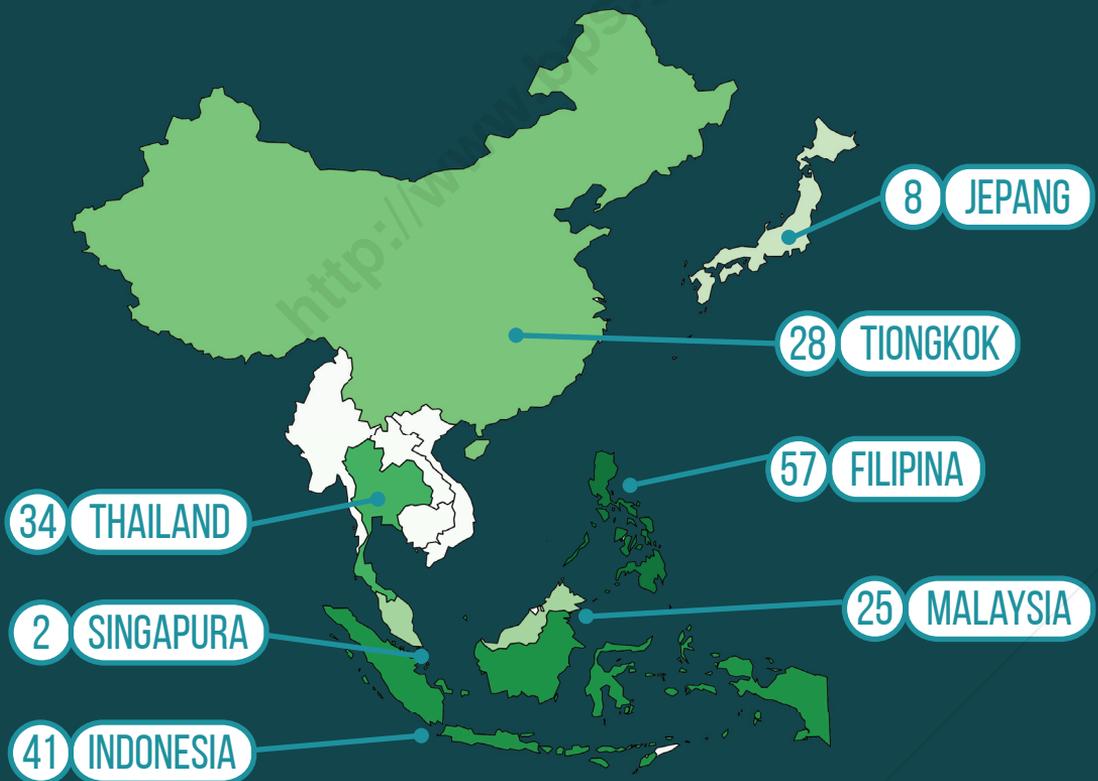
SINGKATAN

ADB	:	<i>Asian Development Bank</i>
ADO	:	<i>Asian Development Outlook</i>
ACFTA	:	<i>ASEAN China Free Trade Agreement</i>
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	:	<i>Association South East Asia Nation</i>
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
BI	:	Bank Indonesia
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
bps	:	<i>basis points</i>
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CIF	:	<i>Cost Insurance and Freight</i>
DTW	:	Daerah Tujuan Wisata
GKG	:	Gabah Kering Giling
IHK	:	Indek Harga Konsumen
IHSG	:	Indek Harga Saham Gabungan
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
I - O	:	Input - Output
KHM	:	Kebutuhan Hidup Minimum
KHL	:	Kebutuhan Hidup Layak
NTP	:	Nilai Tukar Petani
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PUAB	:	Pasar Uang Antar Bank
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SBH	:	Survei Biaya Hidup
SITC	:	<i>Standard International Trade Classification</i>
TKK	:	Tingkat Kesempatan Kerja
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPK	:	Tingkat Penghunian Kamar
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UMP	:	Upah Minimum Provinsi
Valas	:	Valuta Asing (<i>Foreign Currency</i>)
WEO	:	<i>World Economic Outlook</i>
Wisman	:	Wisatawan Mancanegara

<http://www.bps.go.id>

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA **1**

PERBANDINGAN PERINGKAT INDEKS DAYA SAING INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA ASIA, 2016/2017



<http://www.bps.go.id>



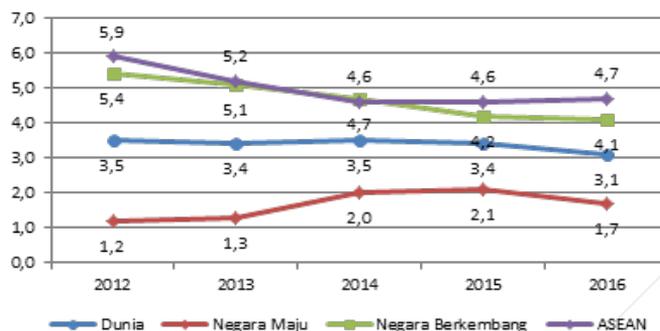
Perekonomian Global Tidak Sesuai Perkiraan

Pada tahun 2016 perekonomian dunia kembali dihadapkan pada beberapa risiko yang mengganggu kondisi ekonomi global yaitu pertumbuhan ekonomi yang menurun, rendahnya harga komoditas, dan ketidakpastian di pasar keuangan yang masih tinggi. Risiko tersebut juga sudah pernah dihadapi perekonomian dunia pada tahun 2015 yang lalu. Proses pemulihan ekonomi pun kembali berjalan lambat dan tidak sesuai dengan perkiraan IMF. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2016 tercatat sebesar 3,1 persen atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 yang mencapai 3,4 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 juga lebih rendah dari perkiraan IMF (April 2016) sebesar 3,2 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tidak terlepas dari melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dapat dikatakan melemah karena hanya mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7 persen atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2015 sebesar 2,1 persen. Hal tersebut disebabkan hampir di seluruh negara maju mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama Amerika Serikat, negara-negara maju di Kawasan Eropa, dan Jepang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang pada tahun 2016 tercatat sebesar 4,1 persen atau sedikit melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya yang mencapai 4,2 persen. Walaupun melambat, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang masih tetap lebih tinggi dibanding di negara maju.

Belum kuatnya pertumbuhan ekonomi dunia memberikan dampak kepada rendahnya harga komoditas global terutama pada komoditas energi seperti minyak bumi yang mengalami penurunan harga yang cukup drastis. Selain minyak bumi, komoditas yang mengalami penurunan harga mencakup antara lain komoditas industri manufaktur, komoditas minuman (*beverages*), bahan baku pertanian (*agricultural raw materials*), dan logam (*metal*). Sementara itu hanya komoditas makanan (*food*) yang mengalami kenaikan harga.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju, dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), Tahun 2012–2016



Sumber: WEO April 2017 dan ADO April 2017

Di tengah menurunnya harga komoditas dunia dan perekonomian yang tumbuh melambat, laju inflasi dunia tetap stabil pada kisaran 2,8 persen atau sama seperti tahun sebelumnya. Namun, inflasi dunia ini lebih rendah dari inflasi pada 2012 yang mencapai 4,1 persen, tahun 2013 sebesar 3,7 persen, tahun 2014 sebesar 3,2 persen. Laju inflasi dari kelompok negara maju menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar 0,3 persen menjadi sebesar 0,8 persen pada tahun 2016. Sebaliknya, laju inflasi di negara-negara berkembang mengalami penurunan yaitu dari 4,7 persen pada tahun 2015 menjadi 4,4 persen pada tahun 2016. Dari kondisi kenaikan harga tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa memang telah terjadi perlambatan laju inflasi di negara-negara berkembang, namun secara nilai laju inflasi di negara-negara berkembang lebih tinggi dibanding di negara-negara maju.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2012–2016

Kelompok Negara	2012	2013	2014	2015	2016
A, Dunia ¹⁾	3,5	3,4	3,5	3,4	3,1
B, Negara-negara maju¹⁾	1,2	1,3	2,0	2,1	1,7
Amerika Serikat	2,2	1,7	2,4	2,6	1,6
Jepang	1,5	2,0	0,3	1,2	1,0
Inggris	1,3	1,9	3,1	2,2	1,8
Korea Selatan	2,3	2,9	3,3	2,8	2,8
Kanada	1,7	2,5	2,6	0,9	1,4
Australia	3,6	2,1	2,8	2,4	2,5
Kawasan Eropa	-0,9	-0,3	1,2	2,0	1,7
Jerman	0,7	0,6	1,6	1,5	1,8
Perancis	0,2	0,6	0,6	1,3	1,2
Italia	-2,8	-1,7	0,1	0,8	0,9
Spanyol	-2,9	-1,7	1,4	3,2	3,2
Belanda	-1,1	-0,2	1,4	2,0	2,1
C, Negara-negara berkembang¹⁾	5,4	5,1	4,7	4,2	4,1
Sub-Sahara Afrika	4,3	5,3	5,1	3,4	1,4
Asia	7,0	6,9	6,8	6,7	6,4
Tiongkok	7,9	7,8	7,3	6,9	6,7
India	5,5	6,5	7,2	7,9	6,8
Amerika Latin dan Karibia	3,0	2,9	1,2	0,1	-1,0
Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan	5,4	2,3	2,8	2,7	3,9
Eropa	2,4	4,9	3,9	4,7	3,0
Negara-negara Persemakmuran	3,5	2,1	1,1	-2,2	0,3
D, Negara-negara ASEAN²⁾	5,9	5,2	4,6	4,6	4,7
Malaysia	5,5	4,7	6,0	5,0	4,2
Filipina	6,7	7,1	6,2	5,9	6,8
Singapura	3,9	5,0	3,6	1,9	2,0
Thailand	7,2	2,7	0,9	2,9	3,2
Indonesia ³⁾	6,0	5,6	5,0	4,9	5,0
Vietnam	5,2	5,4	6,0	6,7	6,2

Catatan : 1), *World Economic Outlook* (WEO) April 2017

2), *Asian Development Outlook* (ADO) 2017

3), Indikator Ekonomi, BPS

Sumber : IMF, ADB, dan BPS

Ekonomi Negara Maju : Tumbuh Melambat dan Inflasi Meningkat

Kondisi ekonomi di negara-negara maju pada tahun 2016 ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih lambat dari tahun 2015 dengan tekanan inflasi yang meningkat. Tercatat tingkat pertumbuhan ekonomi di negara maju tahun 2016 sebesar 1,7 persen atau melambat dari tahun sebelumnya sebesar 2,1 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar negara-negara yang masuk ke dalam kategori negara maju mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama dari negara Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara maju di Kawasan Eropa.

Salah satu negara maju dengan kekuatan ekonomi yang besar yaitu Amerika Serikat. Seperti halnya dengan negara-negara maju yang lainnya, perekonomian Amerika Serikat dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Ekonomi Amerika Serikat hanya tumbuh sebesar 1,6 persen atau lebih rendah dari tahun 2015 yang sebesar 2,6 persen. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini juga masih dibawah perkiraan IMF (April 2016) sebesar 2,4 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat terjadi karena proses pemulihan ekonomi yang berjalan tidak sesuai dengan harapan terkait menurunnya kinerja investasi pada pertengahan tahun yang mengakibatkan investasi melemah. Investasi yang melemah ini dipengaruhi oleh melambatnya investasi pada sektor minyak dan pertambangan terkait harga komoditas yang cenderung melemah. Selain itu, investasi yang berjalan melambat juga dipengaruhi oleh besarnya pembelian properti oleh para investor.

Dari sisi kenaikan harga atau inflasi, inflasi Amerika Serikat pada 2016 tercatat mengalami peningkatan dari 0,1 persen pada tahun 2015 menjadi 1,3 persen pada tahun 2016. Angka inflasi tahun 2016 ini dapat dikatakan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan target inflasi sebesar 2 persen. Meningkatnya inflasi di Amerika Serikat lebih disebabkan oleh naiknya harga komoditas dan naiknya harga jasa kesehatan dan perumahan.

Menuju Kawasan Eropa (*Euro Area*), perekonomian negara maju di kawasan ini menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi negara maju di Kawasan Eropa tercatat sebesar 1,7 persen pada tahun 2016 atau melambat dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,0 persen. Perlambatan perekonomian disebabkan adanya pelemahan di sisi ekspor setelah adanya kejadian Brexit serta transisi politik yang terjadi di Eropa. Sementara itu dari sisi inflasi terjadi peningkatan kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas energi.

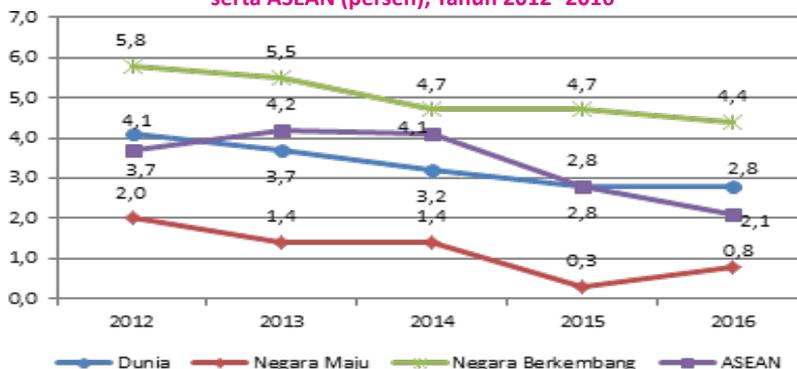
Berbeda dengan kondisi ekonomi secara umum negara maju di Kawasan Eropa yang melambat, Jerman justru menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Jerman justru menjadi pondasi utama pertumbuhan ekonomi di Kawasan Eropa ini. Pertumbuhan ekonomi Jerman pada tahun 2016 tercatat sebesar 1,8 persen atau meningkat dibandingkan

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang sebesar 1,5 persen. Hal ini juga mencatatkan nilai pertumbuhan ekonomi Jerman berada pada level terkuat dalam lima tahun terakhir¹. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jerman didorong oleh peningkatan konsumsi sektor swasta dan tingginya belanja pengungsi. Walaupun demikian, terdapat kondisi yang dapat melemahkan ekonomi seperti menyusutnya permintaan mitra dagang utama dan pasar dari negara berkembang.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi juga terjadi di Inggris. Sepanjang tahun 2016, Inggris mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8 persen atau melambat bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 2,2 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Inggris merupakan pengaruh risiko dari peristiwa Brexit. Meskipun Mark Carney Gubernur *Bank of England* menyatakan Brexit bukan lagi sebagai ancaman kestabilan perekonomian Inggris, tetapi Carney mengakui bahwa Brexit merupakan salah satu penyebab kemungkinan melambatnya perekonomian Inggris tahun 2017².

Beralih menuju ke negara maju di Asia yaitu Jepang. Perekonomian Jepang pada tahun 2016 juga tidak luput dari melambatnya pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Jepang tercatat hanya tumbuh sebesar 1,0 persen atau melambat dari 1,2 persen pada tahun 2015. Melemahnya perekonomian Jepang diakibatkan oleh masih terbatasnya pemulihan kinerja konsumsi, investasi serta ekspor neto. Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok turut menurunkan permintaan mesin dan barang-barang lainnya dari Jepang pada tahun 2016 sehingga mengakibatkan kinerja ekspor terganggu. Namun, sedikit pemulihan di Tiongkok pada akhir tahun telah ikut membantu meningkatkan kinerja sektor ekspor. Dari sisi kenaikan harga, Jepang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,1 persen padahal pada tahun sebelumnya Jepang mengalami inflasi sebesar 0,8 persen.

Gambar 1.2
Perkembangan Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), Tahun 2012–2016



Sumber: WEO April 2017 dan ADO April 2017

¹ <https://ekbis.sindonews.com/read/1170429/35/ekonomi-jerman-tumbuh-tercepat-dalam-lima-tahun-1484224669>.

² <https://sekolahforex.id/carney-brexit-bukan-lagi-ancaman-utama-bagi-perekonomian-inggris>

Ekonomi Negara Berkembang : Tumbuh Melambat dan Inflasi Terkendali

Kondisi perekonomian global yang melambat juga dipengaruhi oleh melambatnya perekonomian di negara-negara berkembang. Perkembangan ekonomi di negara berkembang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 4,1 persen atau sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yang sebesar 4,2 persen. Angka pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ini sudah sesuai dengan perkiraan dari IMF (April 2016).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang hanya terjadi di empat kawasan saja sementara dua kawasan menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Beberapa kawasan yang mengalami peningkatan ekonomi termasuk kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan yang meningkat dari 2,7 persen menjadi 3,9 persen; dan kawasan negara-negara Persemakmuran yang meningkat dari -2,2 persen menjadi 0,3 persen. Sementara itu, di kawasan Sub-Sahara Afrika, kawasan Asia, kawasan Eropa, dan kawasan Amerika Latin dan Karibia mencatatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan di kawasan Amerika Latin dan Karibia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif (Tabel 1.1).

Bila dilihat berdasarkan negara, perekonomian di India tercatat melambat dan tekanan inflasi yang relatif stabil bila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi India pada 2016 melambat dari 7,9 persen pada 2015 menjadi 6,8 persen. Perlambatan ekonomi ini diduga disebabkan oleh pengaruh dari kebijakan pemerintah yang mengumumkan penarikan status tender hukum beberapa nilai mata uang yang ada sehingga berakibat pada krisis tunai selama 2 bulan dan aktivitas ekonomi yang tegang bergantung pada uang tunai. Faktor berikutnya yaitu pertumbuhan investasi yang melambat, meskipun investasi masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi India. Investasi yang melambat menyebabkan menurunnya produksi khususnya untuk komponen produksi barang modal. Selain itu, kinerja beberapa sektor yang melambat seperti sektor industri, sektor pertambangan (menurunnya produksi minyak dan gas bumi) serta sektor konstruksi turut berpengaruh pada perlambatan ekonomi. Dari sisi inflasi, tetap terjaga pada kisaran 4,9 persen. Inflasi yang tetap terjaga tersebut didorong oleh relatif stabilnya inflasi bahan bakar domestik dan inflasi inti sepanjang tahun 2016.

Menuju ke Tiongkok, tercatat ekonomi negara tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB melambat dari 6,9 persen pada tahun 2015 menjadi 6,7 persen pada tahun 2016. Namun demikian, pertumbuhan ini masih sesuai dengan kisaran sasaran pertumbuhan ekonomi dari pemerintah Tiongkok sebesar 6,5-7,0 persen dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan pada awal tahun sebesar 6,3 persen. Hal ini juga dapat dikatakan lebih tinggi dari perkiraan IMF (April 2016) yang

sebesar 6,3 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok seakan seperti melanjutkan tren sejak 2010 karena ekonomi Tiongkok mengubah model pertumbuhannya yang utamanya didorong oleh sektor konsumsi dan sektor jasa. Kebijakan ini berakibat pada penurunan kinerja investasi. Selain itu, menurunnya angkatan kerja turut memperlambat ekonomi Tiongkok. Sementara itu, inflasi Tiongkok tercatat 2,0 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi 2015 sebesar 1,4 persen. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan dalam negeri yang masih cukup kuat terutama pada harga komoditas nonmakanan walaupun tekanan inflasi dari bahan pangan menurun.

Dari kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi pada kawasan ini pada tahun 2016 tercatat sebesar 4,7 persen atau sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,6 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN disebabkan oleh meningkatnya perekonomian dari Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Sementara itu dari kenaikan harga, laju inflasi di kawasan ASEAN selama tahun 2016 mencapai 2,1 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2015 yang

Tabel 1.2. Laju Inflasi Dunia, Negara-negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2012–2016

Kelompok Negara		2012	2013	2014	2015	2016
A,	Dunia ¹⁾	4,1	3,7	3,2	2,8	2,8
B,	Negara-negara maju¹⁾	2,0	1,4	1,4	0,3	0,8
	Amerika Serikat	2,1	1,5	1,6	0,1	1,3
	Jepang	-0,1	0,3	2,8	0,8	-0,1
	Inggris	2,8	2,6	1,5	0,1	0,6
	Korea Selatan	2,2	1,3	1,3	0,7	1,0
	Kanada	1,5	0,9	1,9	1,1	1,4
	Australia	1,7	2,5	2,5	1,5	1,3
	Kawasan Eropa	2,5	1,3	0,4	0,0	0,2
	Jerman	2,1	1,6	0,8	0,1	0,4
	Perancis	2,2	1,0	0,6	0,1	0,3
	Italia	3,3	1,2	0,2	0,1	-0,1
	Spanyol	2,4	1,4	-0,1	-0,5	-0,2
	Belanda	2,8	2,6	0,3	0,2	0,1
C,	Negara-negara berkembang¹⁾	5,8	5,5	4,7	4,7	4,4
	Sub-Sahara Afrika	9,3	6,6	6,3	7,0	11,4
	Asia	4,6	4,6	3,5	2,7	2,9
	Tiongkok	2,6	2,6	2,0	1,4	2,0
	India	9,9	9,4	5,9	4,9	4,9
	Amerika Latin dan Karibia	4,6	4,6	4,9	5,5	5,6
	Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan	9,8	9,1	6,8	5,7	5,1
	Eropa	6,1	4,5	4,1	3,2	3,2
	Negara-negara Persemakmuran	6,2	6,5	8,1	15,5	8,3
D,	Negara-negara ASEAN²⁾	3,7	4,2	4,1	2,8	2,1
	Malaysia	1,7	2,1	3,1	2,1	2,1
	Filipina	3,2	2,9	4,1	1,4	1,8
	Singapura	4,6	2,4	1,0	-0,5	-0,5
	Thailand	3,0	2,2	1,9	-0,9	0,2
	Indonesia ³⁾	4,3	8,4	8,4	3,4	3,0
	Vietnam	9,1	6,6	4,1	0,6	2,7

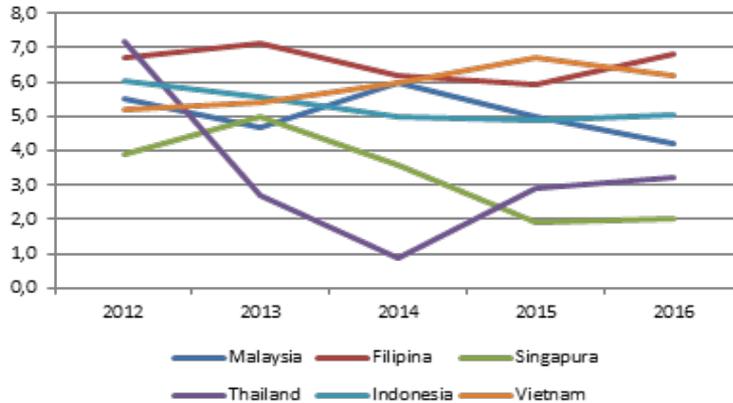
Catatan : 1), *World Economic Outlook* (WEO) April 2017

2), *Asian Development Outlook* (ADO) 2017

3), Indikator Ekonomi, BPS

Sumber : IMF, ADB, dan BPS

Gambar 1.3
Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN (persen),
Tahun 2012–2016

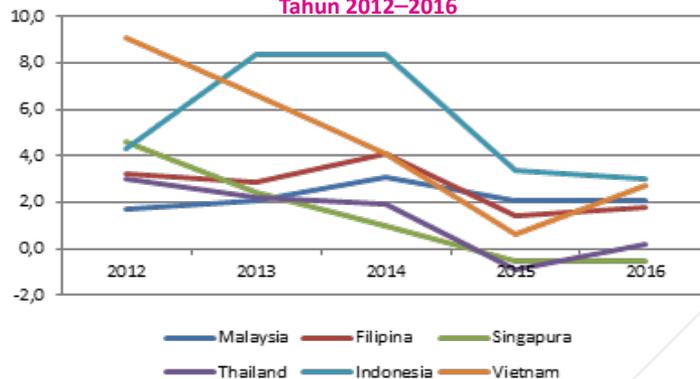


Sumber: ADO April 2017

tercatat sebesar 2,8 persen. Laju inflasi tertinggi terjadi di Myanmar dengan inflasi sebesar 6,5 persen, sedangkan laju inflasi terendah terjadi di Thailand yaitu sebesar 0,2 persen. Sementara negara yang mengalami deflasi antara lain Singapura (-0,5 persen), dan Brunei Darussalam (-0,7 persen).

Menuju ke Singapura, pemulihan di bidang manufaktur dan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Singapura dari 1,5 persen pada tahun 2015 menjadi 2,0 persen pada tahun 2016. Selain itu, permintaan eksternal menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Secara riil, ekspor barang dan jasa dapat tumbuh sehingga meningkatkan ekspor neto. Selanjutnya dari sisi kenaikan harga, Singapura mengalami deflasi yang lebih besar pada tahun 2016 karena indeks harga konsumen turun rata-rata 0,5 persen. Penurunan indeks harga terutama terjadi pada sektor perumahan dan utilitas, diikuti oleh komunikasi dan transportasi.

Gambar 1.4
Perkembangan Laju Inflasi di Beberapa Negara ASEAN (persen),
Tahun 2012–2016



Sumber: ADO April 2017

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Thailand tercatat sebesar 3,2 persen pada tahun 2016 atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,9 persen. Pertumbuhan ekonomi Thailand didorong oleh tumbuhnya sektor pertanian terutama karena peningkatan cuaca pada paruh kedua tahun 2016, masih kuatnya pertumbuhan sektor konstruksi, relatif stabilnya kinerja sektor industri manufaktur, kinerja sektor pariwisata dan akomodasi seperti ekspansi di hotel, restoran, dan bisnis pariwisata lainnya. Dari sisi inflasi tercatat menunjukkan peningkatan dari minus 0,9 persen pada tahun 2015 menjadi 0,2 persen pada tahun 2016. Peningkatan laju inflasi tidak terjadi pada kelompok makanan dan minuman. Tekanan inflasi yang rendah itu karena kekeringan mereda dan kenaikan harga untuk makanan segar melambat di babak kedua.

Beralih ke Malaysia, basis ekonomi yang terdiversifikasi dan nilai tukar yang fleksibel dapat membantu melindungi ekonomi dari kemerosotan di pasar minyak dan komoditas global selama 2 tahun terakhir. Namun, pertumbuhan ekonomi Malaysia melambat dari 5,0 persen pada tahun 2015 menjadi 4,2 persen pada tahun 2016. Perlambatan ekonomi ini disebabkan oleh perlambatan investasi, pengeluaran pemerintah yang lebih lemah, dan penurunan ekspor barang dan jasa neto. Selain itu, menyusutnya output pertanian karena cuaca buruk, pertumbuhan pertambangan yang merosot, dan permintaan yang lemah untuk mobil serta turunnya pengolahan kelapa sawit menekan pertumbuhan manufaktur menyebabkan lambatnya ekonomi Malaysia. Indeks harga konsumen relatif stabil dari tahun sebelumnya sebesar 2,1 persen, meskipun sempat naik tipis di awal tahun 2016 dan dapat mereda kemudian.

Pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan ditunjukkan oleh Vietnam dengan pertumbuhan ekonomi di atas enam persen. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonominya melambat dari 6,7 persen pada tahun 2015 menjadi 6,2 persen di tahun 2016. Perlambatan ekonomi ini disebabkan menurunnya kinerja sektor pertanian akibat terganggunya produksi akibat cuaca buruk dan sektor pertambangan mengalami kontraksi akibat menurunnya harga minyak internasional dan umur ladang minyak bumi dalam negeri yang sudah tua. Di sisi inflasi, indeks harga konsumen meningkat menjadi 2,7 persen pada tahun 2016, naik dari 0,6 persen di tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak internasional, kenaikan harga pangan karena kekeringan, dan penyesuaian ke atas untuk biaya pendidikan dan perawatan kesehatan publik.

Prospek Perekonomian Dunia

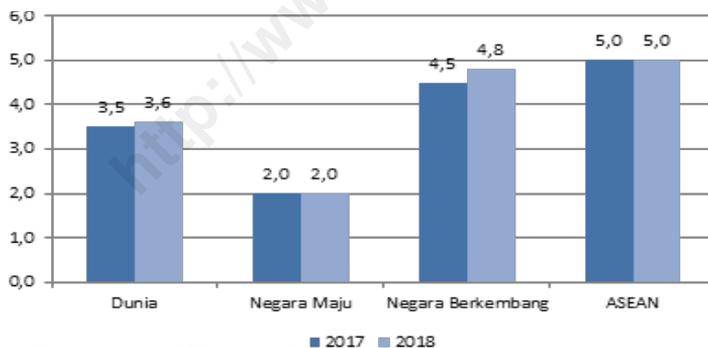
Sepanjang tahun 2016 perekonomian dunia sudah dihadapkan pada ketidakpastian kondisi ekonomi. Prospek pada tahun 2017 juga diperkirakan akan menghadapi kondisi yang hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ketidakpastian bahkan bisa saja menjadi lebih berat. Menurut Chatib Basri, Bank Dunia dan IMF atau lembaga lain dengan fungsi yang sama mengalami kesulitan dalam membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia karena adanya ketidakpastian yang sangat besar. Ketidakpastian itu antara lain

datang dari Eropa dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan dari Tiongkok yang tengah mencari peran untuk kestabilan ekonomi jangka panjang³.

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih akan bisa mengalami peningkatan. Ekonomi dunia yang pada tahun 2016 yang tumbuh sebesar 3,1 persen diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar 3,5 persen pada tahun 2017 dan berlanjut menjadi sebesar 3,6 persen pada tahun 2018. Bila dilihat dari pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang, IMF memproyeksikan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 perekonomian negara maju dan berkembang akan meningkat. Selain pertumbuhan ekonomi, IMF juga memproyeksikan meningkatnya inflasi dunia. Pada tahun 2017 inflasi dunia diproyeksikan naik menjadi sebesar 3,5 persen dan perlahan menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 3,4 persen.

Perekonomian di negara-negara maju diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 2,0 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2016 yang sebesar 1,7 persen. Tren meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan proyeksi meningkatnya laju inflasi di negara-negara maju. Inflasi di negara-negara maju diproyeksikan sebesar 2,0 persen pada tahun 2017 dan melambat kembali menjadi 1,9 persen pada tahun berikutnya.

Gambar 1.5
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju dan Negara Berkembang
serta ASEAN (persen), Tahun 2017 dan 2018



Sumber: WEO April 2017 dan ADO April 2017

Dilihat berdasarkan negara-negara anggota kelompok negara maju, terdapat beberapa negara maju yang diproyeksikan pertumbuhan ekonominya akan meningkat dan berada di atas dua persen, yaitu Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, Australia, dan Spanyol. Pertumbuhan di Amerika Serikat diproyeksikan akan stabil pada besaran 2,3 persen pada 2017 dan 2,5 persen pada tahun 2018. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan sebesar 2,7 persen pada tahun 2017 dan 2,8 persen pada tahun 2018, serta pertumbuhan ekonomi Australia pada tahun 2017 dan 2018 diproyeksikan masing-masing sebesar 3,1 persen dan 3,0 persen.

³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3404657/ekonomi-global-di-2017-ketidakpastiannya-sangat-besar>

Di kawasan Eropa, secara umum diproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 akan tetap sama seperti tahun 2016 sebesar 1,7 persen dan akan sedikit melambat menjadi 1,6 persen pada tahun 2018. Tetap terjaganya pertumbuhan ekonomi negara maju di kawasan Eropa tidak terlepas dari masih tumbuhnya ekonomi di hampir semua negara maju terutama Spanyol yang tumbuh di atas dua persen. Dari sisi inflasi, diproyeksikan akan terjadi kenaikan harga di kawasan Eropa dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 1,7 persen dan sedikit melambat tahun 2018 sebesar 1,5 persen.

Selanjutnya Jepang, diproyeksikan akan tetap mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2 persen pada 2017 atau sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang sebesar 1,0 persen. Namun, pada

Tabel 1.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Dunia, Negara-negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2017–2018

Kelompok Negara	Pertumbuhan Ekonomi		Inflasi	
	2017	2018	2017	2018
A. Dunia ¹⁾	3,5	3,6	3,5	3,4
B. Negara-negara maju¹⁾	2,0	2,0	2,0	1,9
Amerika Serikat	2,3	2,5	2,7	2,4
Jepang	1,2	0,6	1,0	0,6
Inggris	2,0	1,5	2,5	2,6
Korea Selatan	2,7	2,8	1,8	1,9
Kanada	1,9	2,0	2,0	2,1
Australia	3,1	3,0	2,0	2,4
Kawasan Eropa	1,7	1,6	1,7	1,5
Jerman	1,6	1,5	2,0	1,7
Perancis	1,4	1,6	1,4	1,2
Italia	0,8	0,8	1,3	1,3
Spanyol	2,6	2,1	2,4	1,4
Belanda	2,1	1,8	0,9	1,4
C. Negara-negara berkembang¹⁾	4,5	4,8	4,7	4,4
Sub-Sahara Afrika	2,6	3,5	10,7	9,5
Asia	6,4	6,4	3,3	3,3
Tiongkok	6,5	6,2	2,4	2,3
India	7,5	7,5	4,8	5,1
Amerika Latin dan Karibia	1,1	2,0	4,2	3,7
Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan	2,6	3,4	7,6	7,4
Eropa	3,0	3,3	5,7	5,5
Negara-negara Persemakmuran	1,7	2,1	5,7	5,3
D. Negara-negara ASEAN²⁾	5,0	5,0	3,3	3,5
Malaysia	4,4	4,6	3,3	2,7
Philipina	6,4	6,6	3,5	3,7
Singapura	2,2	2,3	1,0	1,5
Thailand	3,5	3,6	1,8	2,0
Indonesia	5,1	5,3	4,3	4,5
Vietnam	6,5	6,7	4,0	5,0

Catatan: ¹⁾ *World Economic Outlook (WEO) April 2017*

²⁾ *Asian Development Outlook (ADO) 2017*

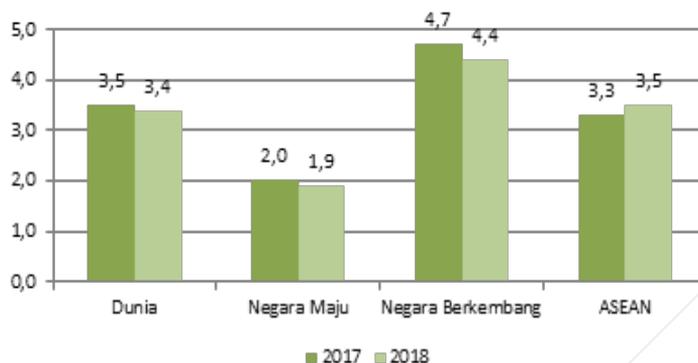
Sumber: IMF dan ADB

tahun 2018 ekonomi Jepang diproyeksikan akan mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 0,6 persen. Dari sisi inflasi, IMF memproyeksikan tekanan inflasi di Jepang mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tekanan inflasi di Jepang sebesar 1,0 persen dan akan menurun menjadi 0,6 persen pada tahun 2018.

Beralih ke negara-negara berkembang, ekonomi negara-negara berkembang pada tahun 2017 diproyeksikan akan berada di atas empat persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, proyeksi pertumbuhan ekonominya pun mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 4,5 persen pada tahun 2017 dan 4,8 persen pada tahun 2018. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara berkembang tidak terlepas dari proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Sub-Sahara Afrika; Amerika Latin dan Karibia; dan Negara-negara Persemakmuran yang mengalami peningkatan. Walaupun di kawasan Asia relatif tetap proyeksi pertumbuhan ekonominya, namun masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas enam persen karena didorong oleh tingginya pertumbuhan ekonomi di India dan Tiongkok. Dari sisi kenaikan harga, tekanan inflasi di negara berkembang diproyeksikan sebesar 4,7 persen pada tahun 2017 dan 4,4 persen pada tahun 2018. Masih tetap tingginya inflasi di negara berkembang tidak terlepas dari tingginya tekanan inflasi di kawasan Sub-Sahara Afrika sebesar 10,7 persen di tahun 2017 dan 9,50 persen di tahun 2018.

Di Kawasan Asia sendiri, pertumbuhan ekonomi disokong dua raksasa ekonomi yaitu Tiongkok dan India. Ekonomi Tiongkok diproyeksikan tumbuh sebesar 6,5 persen pada tahun 2017 (melambat dari tahun 2016 sebesar 6,7 persen) dan akan terus melambat hingga tahun 2018 yang sebesar 6,2 persen. Berbeda halnya dengan ekonomi Tiongkok, India justru akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi India diproyeksikan akan tumbuh di atas Tiongkok yaitu dengan pertumbuhan sebesar 7,5 persen (meningkat dari tahun 2016 sebesar 6,8 persen).

Gambar 1.6
Proyeksi Inflasi Dunia, Negara Maju, dan Berkembang
serta ASEAN (persen), Tahun 2017 dan 2018



Sumber: WEO April 2017 dan ADO April 2017

Selanjutnya untuk di kawasan ASEAN, ADB memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ini akan tumbuh sebesar 5,0 persen pada tahun 2017 dan 2018 atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 4,7 persen. Selain itu, ADB juga memproyeksikan bahwa hampir semua negara anggota ASEAN akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 kecuali negara Filipina. Negara ASEAN pada tahun 2018 diproyeksikan yang akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi di atas enam persen akan dicapai di negara Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos dan Kamboja. Dari sisi inflasi, ASEAN diproyeksi akan mengalami peningkatan tekanan inflasi yaitu menjadi sebesar 3,3 persen pada tahun 2017 dan kembali meningkat menjadi 3,5 persen pada tahun 2018. Negara dengan inflasi tertinggi di ASEAN diproyeksikan akan dialami oleh negara Myanmar dengan tekanan inflasi sebesar 7,0 persen pada tahun 2017 dan bahkan meningkat lagi menjadi 7,5 persen pada tahun 2018.

Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Di tengah-tengah perekonomian global yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang belum kuat, rendahnya harga komoditas global dan ketidakpastian keuangan dunia yang tinggi, perekonomian Indonesia ternyata mampu bertahan tetap tumbuh cukup tinggi di atas lima persen. Hal ini disebabkan oleh struktur permintaan dalam negeri yang tetap dominan dan kuat serta berbagai macam kebijakan pemerintah yang mampu merespon gejala perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat meningkat dari 4,9 persen pada tahun 2015 menjadi 5,0 persen pada tahun 2016. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh tetap terjaganya stabilitas ekonomi dalam negeri. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tekanan inflasi, menurunnya defisit transaksi berjalan, tetap terkendalinya nilai tukar rupiah, dan terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Dari sisi pendapatan perkapita selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, berdasarkan harga berlaku PDB per kapita mencapai Rp 48,57 juta atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2015 yang sebesar Rp 45,73 juta. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan PDB per kapita sebesar Rp 2,84 juta per tahun.

Dari sisi perdagangan luar negeri, pada tahun 2016 Indonesia mencatatkan adanya penurunan nilai ekspor dan impor. Namun demikian neraca perdagangan luar negeri mencatatkan adanya surplus neraca perdagangan dan bahkan mengalami peningkatan surplus bila dibandingkan dengan tahun 2015. Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan adanya surplus sebesar US\$ 7,67 miliar, kemudian meningkat menjadi US\$ 9,53 miliar pada tahun 2016. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia pada tahun 2016 mencapai US\$ 145,19 miliar atau turun sebesar 3,44 persen dari ekspor tahun 2015 yang sebesar US\$ 150,37 miliar. Ekspor migas hanya US\$ 13,11 miliar turun dari tahun lalu yang mencapai US\$ 18,57 miliar, sedangkan ekspor non-migas mencapai US\$ 132,08 miliar atau naik tipis dari tahun lalu yang mencapai US\$ 131,79 miliar. Sementara itu, nilai

Tabel 1.4. Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia, Tahun 2012–2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,03	5,56	5,01	4,88	5,02
2. Inflasi (%)	4,36	8,38	8,36	3,35	3,02
3. PDB Harga Konstan 2010 (Triliun Rp)	7 727,08	8 156,50	8 564,87	8 982,51	9 433,03
4. PDB per Kapita Harga Berlaku (Ribu Rp)	35 105,21	38 365,92	42 479,65	45 730,88	48 566,23
5. Neraca Perdagangan Luar Negeri (Juta US \$):					
a. Ekspor (Juta US\$)	190 020,3	182 551,8	175 980,0	150 366,3	145 186,2
b. Impor (Juta US\$)	198 689,5	186 628,6	178 178,8	142 694,4	135 652,9
6. Investasi					
a. PMDN (Miliar Rp)	92 182,01	128 150,56	156 126,16	179 465,87	216 230,80
b. PMA (Juta US\$)	24 564,67	28 617,50	28 529,70	29 275,94	28 964,10
7. Suku Bunga Deposito Berjangka Bank Umum 1 Bulan (%) ¹⁾	5,58	7,92	8,58	7,60	6,46
8. Jumlah Wisatawan Asing (Ribu orang) ²⁾	7 569,38	8 327,22	8 966,98	9 487,74	10 570,29
9. Produksi Padi (GKG): ³⁾					
a. Sawah (Juta Ton)	65,19	67,39	67,10	71,77	-
b. Ladang (Juta Ton)	3,87	3,89	3,74	3,63	-
10. Penduduk Miskin (Juta) ⁴⁾	29,13	28,07	28,28	28,59	28,01
11. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,13	6,17	5,94	6,18	5,61

Catatan: ¹ Kondisi Desember
² Masuk melalui 19 pintu masuk utama
³ Angka Ramalan II
⁴ Hasil Susenas Triwulan I 2012-2016

Sumber: BPS, Bank Indonesia, BKPM, Kementerian Pariwisata

impor Indonesia pada tahun 2016 mencapai US\$ 135,65 miliar atau turun 4,93 persen dibanding pada tahun 2015. Impor migas pada tahun 2016 mencapai US\$ 18,74 miliar, atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 24,61 miliar, sedangkan nilai impor non-migasnya hanya US\$ 116,91 miliar, sedikit naik dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 118,08 miliar.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan ekspor. Penurunan ekspor pada tahun 2016 lebih disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang sedang mengalami perlambatan. Akan tetapi, Kementerian Perdagangan mengklaim kinerja ekspor tahun 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2015. Pemerintah akan mengusahakan dan berupaya untuk meningkatkan ekspor terutama nonmigas di satu sisi dan di sisi lain berusaha menekan impor.

Dari sisi kenaikan harga barang, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada 2016 sebesar 3,02 persen. Tingkat inflasi ini menjadi yang terendah sejak 2010. Inflasi pada 2011 tercatat sebesar 3,79 persen, lebih rendah dari 2012

yang sebesar 4,36 persen. Kemudian pada tahun 2013 naik tajam ke 8,38 persen dan di 2014 masih terbilang tinggi yaitu 8,36 persen. Namun pada tahun 2015 tingkat inflasi mengalami penurunan yang drastis menjadi 3,35 persen. Hingga pada tahun 2016 tingkat inflasi tercatat paling rendah yaitu sebesar 3,02 persen. Sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang dominan pada tingkat inflasi antara lain cabai merah, rokok kretek, bawang merah, tarif angkutan dan lain-lain.

Berlanjut ke sektor produksi padi, berdasarkan pra angka ramalan II (Aram II) yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan) yang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi tahun 2016 mencapai 79,14 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 4,96 persen dibandingkan tahun lalu. Produksi padi nasional ini merupakan angka tertinggi selama Indonesia merdeka. Kenaikan angka produksi padi ini melanjutkan tren peningkatan produksi padi selama dua tahun terakhir sepanjang masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pada 2015 produksi padi meningkat 6,42 persen dari 70,85 juta ton menjadi 75,40 juta ton dibandingkan 2014. Atas keberhasilan meningkatkan produksi ini, Indonesia mampu menjadikan tahun 2016 tidak impor beras. Kenaikan produksi terjadi di Pulau Jawa sebanyak 1,22 juta ton dan di luar Pulau Jawa sebanyak 2,52 juta ton. Kenaikan produksi terjadi karena naiknya luas panen seluas 919.098 hektar (ha) atau meningkat 6,52 persen dari 14,12 juta ha menjadi 15,04 juta ha.

Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang 2016 yang masuk melalui 19 pintu masuk utama tercatat sebesar 10,57 juta orang dan melalui pintu masuk lainnya sebesar 1,45 juta orang sehingga total wisman mencapai 12,02 juta orang. Jumlah itu sudah melebihi dari target pemerintah yaitu 12 juta wisman. Jumlah kunjungan wisman 2016 tumbuh 15,54 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yang hanya 10,41 juta. Demi menarik perhatian kunjungan wisatawan untuk datang ke Indonesia, berbagai prestasi telah ditorehkan sektor pariwisata Indonesia. Pariwisata Indonesia selama tahun 2016 mendapat 31 penghargaan dari 22 negara. Beberapa penghargaan diantaranya adalah menang 12 kategori di *World Halal Tourism Awards* yang digelar di Abu Dhabi, penghargaan *'The Outstanding Liveboard Diving Destination'* di *Diving and Resort Travel Expo Hong Kong*, *'The Famous Next Travel Destination'* dari *China Travel and Leisure*, hingga *Travel Weekly Asia* menempatkan *Wonderful Indonesia* sebagai *The Best Destination Marketing 2016* di Singapura. Penghargaan tersebut bisa menjadi rapor kinerja pariwisata dan menjadi salah satu standar dan menjadi penilaian penting. Penghargaan akan semakin membuat baik citra negeri ini dan menarik perhatian dunia.

Di bidang ketenagakerjaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2016 berkontribusi pada perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 6,18 persen pada 2015 menjadi 5,61 persen pada 2016. Hal ini disebabkan oleh naiknya jumlah pekerja penuh waktu. Selain itu, didukung juga oleh naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama tahun 2016 kondisi ketenagakerjaan

juga memperlihatkan bahwa perekonomian domestik mampu menyerap tambahan tenaga kerja sekitar 3,5 juta orang. Lapangan usaha yang berhasil menyerap tenaga kerja cukup tinggi diantaranya jasa-jasa, keuangan, transportasi, dan perdagangan. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan daya serap tenaga kerja di lapangan usaha transportasi dan perdagangan yaitu adanya perkembangan bisnis online baik dari aspek *e-commerce* maupun aspek jasa transportasi berbasis aplikasi.

Penduduk bekerja pada Agustus 2016 sebanyak 118,41 juta orang atau bertambah 3,06 juta orang dibanding keadaan Agustus 2015. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah, yaitu SMP ke bawah (60,24 persen) dan Menengah (27,52 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sekitar 12,24 persen. Dilihat dari lapangan kerja, kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama di Sektor Jasa Masyarakat sebanyak 1,52 juta orang (8,47 persen), Sektor Perdagangan sebanyak 1,01 juta orang (3,93 persen), dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebanyak 500 ribu orang (9,78 persen).

Terkait tingkat kemiskinan, data BPS menyebutkan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 580 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2015 sebesar 8,29 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,21 persen pada Maret 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016. Menurunnya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh inflasi yang rendah dan tetap terkendali, rata-rata harga kebutuhan pokok yang turun, tingkat pengangguran terbuka juga menurun, dan peningkatan pendapatan penduduk secara umum. Sementara itu, harga komoditas pangan yang relatif stabil juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan.

Dilihat dari Garis Kemiskinan, pada periode Maret 2015-Maret 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,14 persen yaitu dari Rp 330.776,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp 354.386,- per kapita per bulan pada Maret 2016. Sementara itu bila dilihat dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, pada periode yang sama ketimpangan pendapatan juga menurun pada 2016 sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta perbaikan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Rasio Gini mengalami penurunan dari 0,402 pada 2015 menjadi 0,397 pada tahun 2016. Penurunan ketimpangan pendapatan terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Indeks Daya Saing Indonesia

World Economic Forum (WEF) telah merilis *Global Competitiveness Report 2016-2017* pada bulan September 2016. Menurut laporan WEF tersebut peringkat daya saing dunia dalam urutan 10 teratas masih didominasi

oleh negara-negara di Eropa. Peringkat pertama masih diduduki oleh Swiss, diikuti oleh Singapura, Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman. Selain Singapura, Jepang juga menjadi wakil dari Asia yang berhasil masuk pada posisi 10 teratas tahun 2016/2017. Sementara itu, posisi Indonesia berada pada urutan 41, turun 4 tingkat pada tahun 2015. Dibandingkan dengan negara-negara setingkat BRICS, peringkat daya saing Indonesia masih dapat dikatakan lebih unggul dari Rusia (peringkat ke-43), Afrika Selatan (peringkat ke-47), Meksiko (peringkat ke-51), Turki (peringkat ke-55), dan Brazil (peringkat ke-81).

Diantara negara-negara ASEAN, Singapura menjadi negara ASEAN yang menduduki posisi peringkat teratas yaitu di peringkat ke 2, disusul oleh Malaysia (peringkat 25) dan Thailand (peringkat 34). Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya posisi Indonesia turun 4 posisi. Penurunan

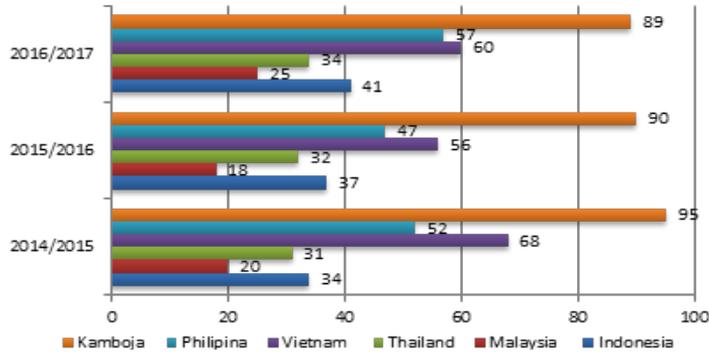
Tabel 1.5. Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Dengan Beberapa Negara Lainnya¹, Tahun 2013/2014–2016/2017

Negara	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Swiss	1	1	1	1
Swedia	6	10	9	6
Singapura	2	2	2	2
Amerika Serikat	5	3	3	3
Jerman	4	5	4	5
Jepang	9	6	6	8
Finlandia	3	4	8	10
Belanda	8	8	5	4
Norwegia	11	11	11	11
Denmark	15	13	12	12
Kanada	14	15	13	15
Hongkong SAR	7	7	7	9
Inggris Raya	10	9	10	7
Tiongkok	29	28	28	28
India	60	71	55	39
Afrika Selatan	53	56	49	47
Brazil	56	57	75	81
Turki	44	45	51	55
Meksiko	55	61	57	51
Rusia	64	53	45	43
Indonesia	38	34	37	41
Malaysia	24	20	18	25
Thailand	37	31	32	34
Vietnam	70	68	56	60
Filipina	59	52	47	57
Brunei Darussalam	26	-	-	-
Kamboja	88	95	90	89
Timor-Leste	138	136	-	-

Catatan :¹ 2013/2014 (148), 2014/2015 (144) dan 2015/2016 (140), 2016/2017 (138).

Sumber : *The Global Competitiveness Report 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 and 2016/2017 (138)*

Gambar 1.7
Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Dengan Beberapa Negara Berkembang di Kawasan ASEAN, 2014/2015 - 2016/2017



peringkat juga dialami oleh Thailand (2 tingkat), Malaysia (7 tingkat). Filipina dan Laos adalah negara yang mengalami penurunan paling tinggi hingga mencapai 10 tingkat. Hanya Kamboja yang berhasil menaikkan peringkatnya 1 tingkat ke peringkat 89. Beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya peringkat daya saing negara-negara ASEAN yaitu perlambatan ekonomi dan meningkatnya sejumlah permasalahan politik.

Bila dilihat menurut kelompok pilar pembentuk daya saing, pilar inovasi dan kecanggihan bisnis mampu naik 1 tingkat dari peringkat 33 ke 32. Hal ini disebabkan pemerintah telah melakukan berbagai reformasi pada lingkungan bisnis. Selanjutnya pada pilar penopang efisiensi, meskipun secara nilai naik sedikit dari 4,3 menjadi 4,4, namun secara peringkat pilar ini justru turun peringkat dari 46 menjadi 49.

WEF mencatat bahwa Indonesia telah melakukan dengan baik dalam hal pasar keuangan (naik 7 tingkat dari peringkat 49 ke peringkat 42). Begitu juga dengan efisiensi pasar tenaga yang naik 7 tingkat ke peringkat 108. Pada kelompok pilar ini, aspek yang menempati penurunan peringkat terbesar yaitu aspek kesiapan teknologi (turun sebanyak 6 tingkat ke peringkat 91) karena penetrasi ICT tetap rendah, hanya seperlima dari populasi menggunakan internet dan hanya ada satu koneksi *broadband* untuk setiap 100 orang. Selanjutnya pada kelompok pilar persyaratan dasar mengalami penurunan 3 tingkat menjadi peringkat ke-52. Hal ini disebabkan karena menurunnya peringkat aspek pendidikan dasar dan kesehatan berada pada urutan ke 100 turun hingga 20 tingkat, sementara aspek lainnya hanya turun satu hingga tiga tingkat saja.

Dikutip dari beberapa sumber, beberapa faktor yang menghambat daya saing Indonesia diantaranya masalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai, akses terhadap pembiayaan, dan inflasi. Permasalahan tersebut hendaknya mendapatkan penanganan serius dari pemerintah agar dapat meningkatkan daya saing pada masa yang akan datang.

Tabel 1.6. Nilai dan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Menurut Pilar Daya Saing, Tahun 2014/2015–2016/2017

Pilar Daya Saing	2014/2015		2015/2016		2016/2017	
	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat
Persyaratan Dasar	4,9	46	4,8	49	4,8	52
Institusi	4,1	53	4,1	55	4,1	56
Infrastruktur	4,4	56	4,2	62	4,2	60
Makroekonomi	5,5	34	5,5	33	5,5	30
Kesehatan dan Pendidikan Dasar	5,7	74	5,6	80	5,3	100
Penopang Efisiensi	4,4	46	4,3	46	4,4	49
Pendidikan Tinggi	4,5	61	4,5	65	4,5	63
Efisiensi Pasar Barang	4,5	48	4,4	55	4,4	58
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	3,8	110	3,7	115	3,8	108
Pasar Keuangan	4,4	42	4,2	49	4,3	42
Kesiapan Teknologi	3,6	77	3,5	85	3,5	91
Besaran Pasar	5,3	15	5,7	10	5,7	10
Inovasi dan Kecanggihan Bisnis	4,2	30	4,1	33	4,2	32
Kecanggihan Bisnis	4,5	34	4,4	36	4,3	39
Inovasi	3,9	31	3,9	30	4,0	31
Indeks Daya Saing	4,6	34	4,5	37	4,5	41

Sumber: *The Global Competitiveness Report 2014/2015, 2015/2016, dan 2016/2017*

Setidaknya tiga alasan penting mengapa daya saing Indonesia turun. Pertama, dampak paket kebijakan ekonomi belum bisa dirasakan dalam jangka pendek. Kedua, meski Indonesia terus berbenah, negara lain lebih cepat. Ketiga, terdapat banyak faktor non-struktural yang belum disentuh reformasi. Raimanu (2016) menyebutkan paling tidak ada tiga persoalan yang perlu diperhatikan yaitu: efisiensi pasar tenaga kerja yang berada di peringkat ke 108, pendidikan dasar dan kesehatan yang menempati peringkat ke 100 serta pendidikan tinggi dan pelatihan di peringkat ke 63⁴.

Prospek dan Tantangan Perekonomian Indonesia di Tahun 2017

Pada tahun 2017 ini, banyak terjadi perubahan di berbagai sektor, salah satunya ekonomi global. Perubahan ekonomi global ini secara langsung juga mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia. Meskipun perekonomian Indonesia diperkirakan akan dapat bertahan terhadap berbagai persoalan ekonomi, masih tetap perlu terus dikelola dengan baik. Berbagai macam tantangan baik yang bersumber dari risiko global dan tantangan dari dalam negeri apabila tidak segera diantisipasi maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai perkiraan dan akan berdampak pada gangguan stabilitas perekonomian nasional.

⁴Analisis Daya Saing Indonesia Tahun 2016-2017: Sebuah Analisis Kebijakan Manajemen oleh Gusstiawan Raimanu. Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Tadulako

Tabel 1.7. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia (persen), Tahun 2017 dan 2018

Indikator	2017	2018
Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾	5,0-5,4	5,1-5,5
Pertumbuhan Ekonomi ²⁾	5,1	5,3
Pertumbuhan Ekonomi ³⁾	5,1	5,3
Inflasi ¹⁾	4,0±1,0	3,5±1,0
Inflasi ²⁾	4,5	4,5
Inflasi ³⁾	4,3	4,5

Catatan: ¹⁾ Bank Indonesia (BI) : "Laporan Perekonomian Indonesia 2016"

²⁾ *International Monetary Fund (IMF): "World Economic Outlook Database, April 2017"*

³⁾ *Asian Development Bank (ADB): "Asian Development Outlook (ADO) 2017"*

Pada tahun 2017, menurut proyeksi Bank Indonesia, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh berada pada kisaran 5,0-5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh permintaan dalam negeri seperti konsumsi dan investasi disamping membaiknya kinerja ekspor. Kuatnya konsumsi swasta ditopang oleh keyakinan rumah tangga yang tetap baik, sedangkan investasi meningkat karena terus berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah dan mulai bergulirnya investasi swasta sejalan dampak positif peningkatan harga komoditas. Sementara itu, ekspor diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang meningkat dan naiknya harga komoditas global. Stabilitas ekonomi diperkirakan juga tetap terkendali dan diikuti dengan intermediasi perbankan yang membaik⁵. Dari sisi inflasi, tekanan laju inflasi 2017 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,0±1 persen. Hal tersebut didorong oleh dampak kenaikan harga energi serta pengaruh kenaikan inflasi kelompok administred, sedangkan inflasi inti masih terkendali.

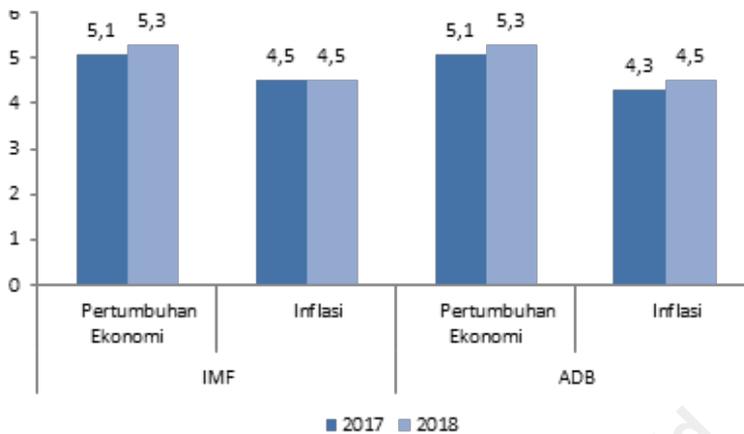
Sementara itu, menurut IMF, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh pada tahun 2017 sebesar 5,1 persen dan meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018. Hal ini ditopang oleh kenaikan bertahap investasi swasta menyusul membaiknya komoditas, kemudian juga karena suku bunga rendah, dan pulihnya permintaan barang dari luar negeri yang disokong membaiknya kondisi perdagangan global. Dalam pernyataannya, IMF menyimpulkan Indonesia telah mengelola stabilitas makroekonomi, dan mampu menyesuaikan kondisi dengan dinamika terbaru ekonomi global. IMF juga memproyeksikan laju inflasi Indonesia sebesar 4,5 persen pada tahun 2017 dan akan tetap sama hingga akhir tahun 2018. Hal itu terjadi karena berkurangnya alokasi subsidi listrik dan imbas dari harga komoditas yang mulai pulih⁶.

Selanjutnya, selain IMF dan Bank Dunia, *Asian Development Bank (ADB)* juga melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angka proyeksi ADB sama persis dengan proyeksi IMF. Menurut ADB, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 dan 2018 ditopang oleh peningkatan investasi

⁵⁾ Bank Indonesia. 2017. Laporan Perekonomian Indonesia 2016. Jakarta

⁶⁾ <http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/eN47d0rK-imf-prediksi-inflasi-indonesia-capai-4-5-di-2017>

Gambar 1.8
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Indonesia menurut IMF (persen),
Tahun 2017 dan 2018



Sumber: WEO April 2017 dan ADO April 2017

swasta dan ekspor, serta belanja infrastruktur publik yang lebih tinggi. Pengeluaran rumah tangga akan meningkat tahun ini, didorong oleh pulihnya harga komoditas, perluasan program Dana Desa, dan juga peningkatan upah minimum. Belanja infrastruktur publik diperkirakan akan meningkat pada 2017, selaras dengan alokasi anggaran pemerintah. Investasi swasta juga diperkirakan naik karena bertambahnya pendapatan dari ekspor komoditas dan dampak dari reformasi struktural yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan regulasi serta membuka sektor-sektor baru bagi investor asing⁷. Dari sisi Inflasi, ADB memperkirakan inflasi Indonesia akan berada pada nilai 4,3 persen pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 4,5 persen pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh naiknya harga komoditas, kenaikan harga yang diatur pemerintah seperti tarif listrik terutama untuk golongan 900 VA⁸.

Berikut beberapa tantangan yang diproyeksikan akan memengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia ke depan menurut beberapa sumber:

1. Dalam laporan bertajuk *Indonesia Economic Quarterly*, Bank Dunia menyatakan beberapa risiko eksternal yang dapat memberikan risiko penurunan atau *downside risk* yang signifikan antara lain perubahan besar dalam kebijakan perdagangan di antara negara-negara maju. Selain itu, ada pula perubahan yang tidak terduga dalam kebijakan moneter di Amerika Serikat. Risiko lainnya adalah ketidakpastian politik Eropa terkait proses keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dan ketidakpastian terkait pemilihan umum di beberapa negara Eropa (Belanda dan Perancis). Dari dalam negeri, beberapa risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya inflasi di dalam negeri.

⁷ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/06/140000526/adb.prediksi.pertumbuhan.ekonomi.indonesia.5.1.persen.tahun.ini>

⁸ <http://www.harianterbit.com/hantereekonomi/read/2017/04/06/80677/0/21/ADB-Prediksi-Inflasi-Indonesia-2017-Capai-42-Persen>

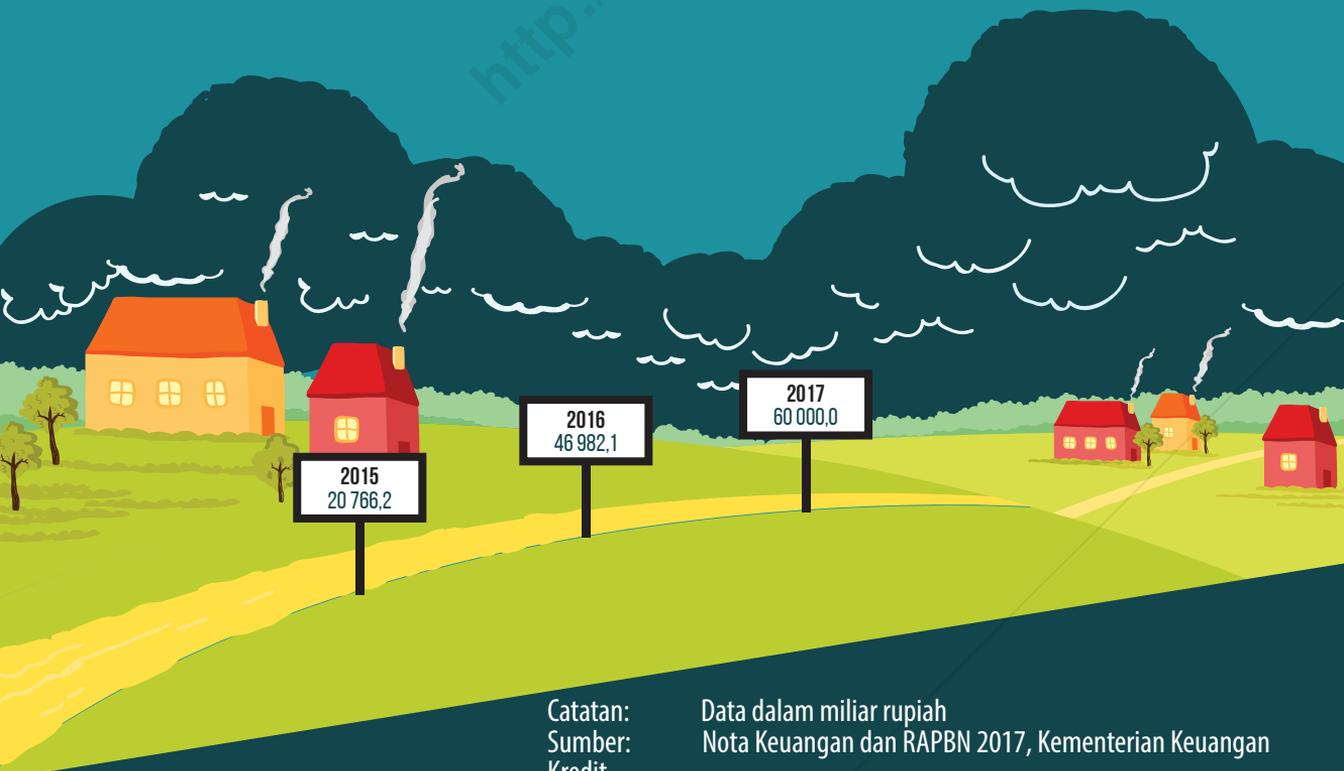
2. Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa ada 4 tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia pada tahun 2017 ini. Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Yoga Affandi mengemukakan empat tantangan tersebut antara lain risiko kenaikan inflasi (kenaikan pada komponen harga yang diatur pemerintah, biaya STNK, tarif listrik, pulsa telepon), tekanan nilai tukar, inflasi akan memberikan dampak lebih pada daya beli masyarakat berpendapatan rendah, dan rigiditas suku bunga pinjaman. Sementara itu, tantangan perekonomian juga dipicu oleh empat risiko global yaitu pemulihan pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global yang tidak sesuai perkiraan, kebijakan perdagangan internasional di negara maju yang menjadi lebih protektif, kombinasi kebijakan makroekonomi AS terutama kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang lebih, dan inflasi global yang naik jika kenaikan harga komoditas dunia terus terjadi.
3. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Parjiono, Ph.D, menyampaikan bahwa beberapa tantangan yang harus dihadapi perekonomian Indonesia selama 2017 yaitu tingkat permintaan yang lemah, harga komoditas yang rendah, *economic rebalancing Tiongkok*, isu geopolitik, kebijakan ekonomi AS di bawah pemerintahan baru, kenaikan suku bunga *The FED*, dan perbaikan arus modal dari EMEs.
4. Pengamat Ekonomi Prasetijono Widjojo mengatakan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari dalam negeri diantaranya tingkat kemiskinan yang masih tinggi, penduduk Indonesia yang hidup di atas garis kemiskinan masih rentan terhadap goncangan ekonomi, kesenjangan (tingkat rasio gini) yang cukup tinggi, tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi, dan kondisi fiskal yang masih dihadapkan pada persoalan belum optimalnya penerimaan negara dan belanja. Sementara tantangan dari luar negeri yaitu perlambatan ekonomi global, masih berlanjutnya ketidakpastian di Eropa pasca Brexit, perubahan politik di Amerika Serikat, dan harga komoditas yang masih belum pulih.

<http://www.bps.go.id>



PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA **2**

**PEMERINTAH KONSISTEN
DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA
HAL INI BISA DILIHAT MENINGKATNYA
ANGGARAN DANA DESA**



Catatan:
Sumber:
Kredit

Data dalam miliar rupiah
Nota Keuangan dan RAPBN 2017, Kementerian Keuangan

Gambar vector: Freepik dari www.freepik.com

<http://www.bps.go.id>

Di tengah perkembangan kondisi perekonomian global yang ditandai dengan ketidakpastian pergerakan harga komoditas dunia dan persaingan perekonomian yang semakin ketat, utamanya di era pasar bebas, perekonomian Indonesia di tahun 2016 masih mampu tumbuh mencapai 5,02 persen sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,3 persen namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tersebut tidak terlepas dari faktor global, terutama terkait dengan perbaikan harga komoditas dan juga faktor dari dalam negeri yang terdorong oleh adanya perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah diantaranya dari sisi permintaan yaitu dengan mendorong sumber pertumbuhan ekonomi tidak hanya pada konsumsi, melainkan pada investasi dan ekspor. Dari sisi penawaran yaitu dengan mendorong peranan industri manufaktur/pengolahan dan jasa, serta kebijakan perekonomian yang sifatnya menyebar, dimana kegiatan perekonomian tidak lagi terpusat di Pulau Jawa tetapi mulai mengarah keluar Jawa terutama ke Kawasan Timur Indonesia. Selain itu juga di tahun 2016 pendapatan per kapita Indonesia juga mengalami perbaikan menjadi US\$ 3.605,06.

Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian di tahun 2016, kebijakan ekonomi diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan difokuskan pada wilayah luar Jawa dan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan sejak akhir tahun 2015 dan berlanjut hingga tahun 2017 ini. Kebijakan yang dibuat diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang dapat menjamin pemerataan yang mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan ketimpangan antar penduduk serta ketimpangan wilayah antara Jawa dan Luar Jawa. Pemerintah dalam pembiayaan penganggaran perencanaan pembangunan ke depan memprioritaskan pada (1) mewujudkan kedaulatan pangan dalam mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, serta peningkatan produksi ikan nasional; (2) membangun infrastruktur (bandara dan penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Sumatera); (3) mendukung industri kedirgantaraan yang bertujuan sebagai modal kerja, dan (4) membangun industri pertahanan nasional.

Perencanaan keuangan yang disusun dalam RAPBN 2017, disesuaikan dengan target dan capaian yang ada dalam RPJMN. Dalam menghadapi kondisi perekonomian di luar dan di dalam negeri di tahun 2017 pemerintah membuat asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam RAPBN dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan perekonomian terkini baik ekonomi global maupun domestik sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,3 persen
- Tingkat inflasi berada di level 4,0 persen
- Tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan sebesar 5,3 persen
- Nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp 13.300 per US\$
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sebesar US\$ 45 per barel
- *Lifting* minyak diperkirakan sebesar 780 ribu barel per hari
- *Lifting* gas diperkirakan sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Selanjutnya, dengan tetap mencermati dinamika perekonomian global maupun domestik, RAPBN 2017 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2017. RKP tahun 2017 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Sejalan dengan itu, tema RKP tahun 2017 ditetapkan: *“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah”*.

Pembangunan infrastruktur dipandang penting dan sangat urgen sehingga anggaran dalam dua tahun terakhir sebagian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur memiliki *multiplier effect* yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Harapannya dengan mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata diseluruh Indonesia dapat memberi dampak terhadap bertambahnya lapangan pekerjaan di berbagai wilayah yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan antarwilayah.

Penerimaan Negara

Penerimaan Negara adalah sumber utama dalam pendanaan program-program pembangunan nasional. Penerimaan Negara yang sudah ditargetkan pemerintah selama ini belum dapat sepenuhnya mencukupi target pengeluaran selama setahun. Untuk itu pemerintah terus menggali berbagai sumber pendapatan, agar penerimaan negara dapat meningkat terus. Pemerintah selalu berharap dari penerimaan tersebut dapat digunakan seoptimal mungkin untuk memenuhi pengeluaran Negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dan pembangunan di dalam negeri dari utang ke negara lain/pihak luar.

Penerimaan Negara pada tahun anggaran 2015 mencapai Rp 1.508,02 triliun lebih rendah dibandingkan penerimaan pada tahun 2014. Pemerintah selalu berusaha agar pendapatan negara sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan nasional terus meningkat setiap

Tabel 2.1. Penerimaan APBN, Tahun 2013-2017 (miliar rupiah)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
				APBNP	APBN
A. Penerimaan Negara dan Hibah	1 438 891,1	1 550 490,8	1 508 020,4	1 786 225,0	1 737 629,4
1. Penerimaan Dalam Negeri	1 432 058,6	1 545 456,3	1 496 047,3	1 784 249,9	1 736 256,7
1. Penerimaan Pajak	1 077 306,7	1 146 865,8	1 240 418,9	1 539 166,2	1 495 893,8
2. Penerimaan bukan pajak	354 751,9	398 590,5	255 628,5	245 083,6	240 362,9
2. Hibah	6 832,5	5 034,5	11 973,0	1 975,2	1 372,7

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBNP 2017

tahunnya. Pada APBNP 2016 target penerimaan Negara mencapai Rp 1.786,22 triliun, meningkat 18,45 persen dari tahun sebelumnya. Dalam RAPBN 2017 pemerintah menargetkan Pendapatan Negara sebesar Rp 1.737,63 Triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan APBNP tahun sebelumnya atau turun sekitar 2,72 persen. Anggaran yang tersedia di tahun 2017 akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang produktif, menciptakan lapangan kerja, untuk pengentasan kemiskinan, serta untuk mengatasi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan.

Postur penerimaan Negara terdiri dari komponen penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dari ke tiga komponen penerimaan tersebut yang persentasenya sangat kecil adalah penerimaan dari hibah. Karena hibah yang diterima oleh Negara/pemerintah sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah, karena itu hibah tidak bisa diandalkan sebagai penerimaan yang utama.

Hibah yang diterima Pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri adalah tanpa ada persyaratan yang memberatkan Negara berdasarkan *MoU* pemberi donor dengan pemerintah Indonesia. Penerimaan dari hibah oleh pemerintah diutamakan untuk membiayai program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi bagi masyarakat.

Hibah yang diterima negara pada tahun 2015 adalah yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu mencapai Rp 11,97 triliun. Pada tahun 2016 penerimaan dari hibah hanya sebesar Rp 1,97 triliun, sedangkan di tahun 2017 penerimaan dari hibah ditargetkan hanya mencapai sebesar Rp 1,37 triliun turun sekitar 30,50 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016.

Pajak masih menjadi primadona penerimaan Negara, karena itu Pemerintah terus berusaha menggenjot dan menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Penerimaan dari pajak sebagai salah satu sumber untuk pembiayaan pembangunan, selain itu penerimaan dari pajak juga digunakan untuk membiayai program-program Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2017 adalah tahun konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun sisi pembiayaan anggaran. Sehingga kebijakan pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2017 adalah optimalisasi pendapatan Negara sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian bangsa. Di bidang pendapatan negara, pemerintah melakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan. Pajak masih menjadi andalan untuk penerimaan negara, pemerintah berharap dimasa yang akan datang pembiayaan APBN dapat terjaga dengan penerimaan pajak yang pasti.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* yang telah dilaksanakan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah dalam

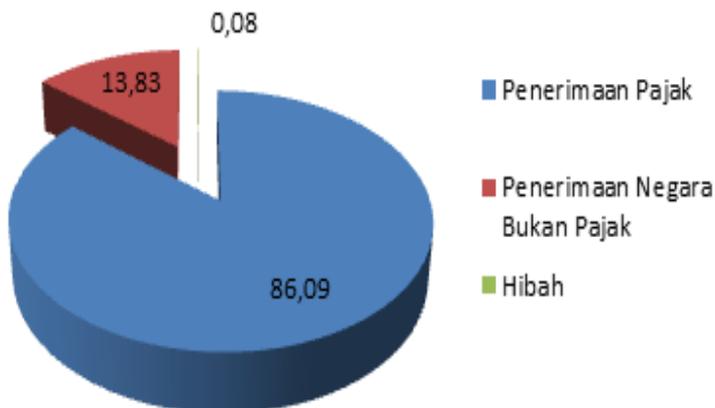
rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan ini ditempuh untuk mendukung penerimaan dan perbaikan sistem perpajakan ke depan. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak di masyarakat, serta memperluas basis subjek pajak untuk mendukung penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan.

Pada APBNP tahun 2016, pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp 1.368 triliun, atau 11 persen lebih tinggi dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015. Namun sampai akhir tahun 2016 penerimaan yang diperoleh pemerintah dari pajak mencapai Rp 1.539,17 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 24,08 persen dari penerimaan pajak tahun 2015. Tingginya penerimaan pajak di tahun 2016 dipicu oleh keberhasilan dari kebijakan pemerintah dalam melaksanakan *Tax Amnesty*. Pemerintah berharap dengan semakin banyaknya penerimaan Negara dari pajak secara rutin setiap tahun sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari utang.

Dalam RAPBNP 2017 penerimaan Negara dari pajak ditargetkan sebesar Rp 1.495,89 triliun atau menurun sebesar 2,8 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016. Menurunnya penerimaan perpajakan di tahun 2017 terutama dipengaruhi adanya kebijakan-kebijakan yang penerimaannya sudah diperoleh di tahun 2016 dalam kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Di samping itu, penerimaan perpajakan juga dipengaruhi perkembangan harga komoditas dunia yang belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, penyempurnaan berbagai peraturan perpajakan, serta melanjutkan kebijakan pengampunan pajak sampai bulan Maret 2017.

Kontribusi pajak pada APBNP 2016 sebesar 86,17 persen dari total penerimaan Negara lebih tinggi dibanding kontribusi pajak pada tahun 2015 yang mencapai 82,25 persen. Penurunan target penerimaan pajak di tahun

Gambar 2.1
Kontribusi Penerimaan Negara, tahun 2017



2017 membuat kontribusi pajak mengalami penurunan menjadi sekitar 86,09 persen dibanding tahun lalu. Sedangkan untuk komponen penerimaan Negara bukan pajak dan hibah masing masing kontribusinya mencapai 13,83 persen dan 0,08 persen.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2017, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan, antara lain kebijakan peningkatan *tax ratio*, meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga iklim investasi, mendorong hilirisasi industri dalam negeri, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan penanggulangan penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Selanjutnya, penerimaan Negara yang berasal dari bukan pajak yang meliputi antara lain Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan bagian laba dari BUMN, serta pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, dan lain-lain. Penerimaan Negara yang berasal dari bukan pajak sejak tahun 2015 mengalami penurunan sekitar 35,87 persen atau hanya sebesar Rp 255,63 triliun, penurunan terus berlanjut di tahun 2016, yaitu turun sekitar 4,12 persen hanya masuk sebesar Rp 245,08 triliun sebagai penerimaan Negara. Pada RAPBN 2017 penerimaan bukan pajak hanya ditargetkan sebesar Rp 240,36 triliun lebih rendah dari tahun lalu.

Pengeluaran Negara

Penerimaan yang diterima Negara akan digunakan sebagai pengeluaran untuk membiayai program-program pemerintah dan pembangunan di dalam negeri. Anggaran pengeluaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang direncanakan di dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Sementara itu, di bidang pembiayaan anggaran dalam beberapa tahun terakhir, dilakukan penghematan pada pembiayaan investasi dengan fokus pada kemandirian BUMN dan pembangunan infrastruktur dengan mencari sumber pembiayaan yang lebih murah. Pemerintah selalu berharap agar pengeluaran Negara dapat seimbang dengan penerimaan/pemasukan yang diterima. Namun selama ini APBN masih selalu mengalami defisit.

Pengeluaran untuk Belanja Negara pada 2016 mencapai Rp 2.082,95 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari APBNP 2015 yang mencapai Rp 1.806,52 triliun atau naik sekitar 15,30 persen. Pada tahun 2017 untuk belanja Negara ditargetkan anggaran mencapai Rp 2.070,47 triliun atau turun sekitar 0,60 persen dari APBNP tahun lalu.

Komponen pengeluaran yang dianggarkan di APBN terdiri dari pengeluaran untuk pemerintah pusat dan pengeluaran untuk daerah. Pengeluaran untuk pemerintah pusat mengambil porsi yang lebih besar di atas 60 persen dibanding pengeluaran untuk daerah. Anggaran untuk pemerintah pusat pada APBNP 2016 mencapai Rp 1.306,70 triliun atau sekitar 62,73 persen

dari total anggaran belanja Negara. Anggaran pengeluaran tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya atau naik sekitar 10,43 persen. Dalam RAPBN 2017 target anggaran belanja Negara turun atau lebih rendah dari tahun lalu namun sebaliknya target untuk pengeluaran pemerintah pusat mengalami kenaikan sekitar 0,29 persen atau menjadi Rp 1.310,44 triliun.

Pengeluaran pemerintah pusat meliputi pengeluaran untuk kementerian/ lembaga serta belanja non kementerian/ lembaga. Pengeluaran untuk kementerian/ lembaga mengambil porsi yang cukup besar dalam pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program/ kebijakan dari kementerian/ lembaga.

Anggaran belanja pemerintah pusat sebagian besar digunakan untuk pengeluaran kementerian/ lembaga. Pada tahun 2013 dan 2014 pengeluaran untuk kementerian/ lembaga masih dibawah Rp 600 triliun, namun mulai tahun anggaran 2015 terjadi kenaikan yang sangat signifikan anggaran belanja kementerian dan lembaga yaitu mencapai Rp 732,14 triliun atau naik sekitar 26,85 persen. Pada tahun anggaran 2016 anggaran belanja kementerian/ lembaga kembali meningkat sekitar 4,87 persen atau naik menjadi Rp 767,81 triliun.

Namun dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah mulai memberlakukan pengetatan dan penghematan anggaran terutama dikementerian/ lembaga. Terlihat dari pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah disemua kementerian dan lembaga pada tahun 2016. Dalam RAPBN 2017 besaran belanja Negara yang di targetkan pemerintah lebih rendah dari APBNP 2016. Selanjutnya, anggaran pembiayaan untuk Kementerian dan Lembaga ditargetkan hanya sebesar Rp 758,38 triliun atau turun sekitar 1,23 persen dibanding APBNP 2016,

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam RAPBN 2017, belanja negara dilakukan seefisiensi mungkin dan penajaman pada belanja operasional, namun tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja. Maka dengan adanya pemotongan anggaran Kementerian/ lembaga harus mampu melakukan penghematan anggaran dan anggaran yang digunakan harus seefektif dan

Tabel 2.2. Pengeluaran APBN, Tahun 2013–2017 (miliar rupiah)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
				APBNP	APBN
B. Belanja Negara	1 650 563,7	1 777 182,9	1 806 515,2	2 082 948,9	2 070 465,9
1. Pengeluaran Pemerintah Pusat	1 137 162,9	1 203 577,2	1 183 303,7	1 306 696,0	1 310 439,3
1. Belanja K/L	582 940,2	577 164,8	732 137,1	767 809,9	758 378,0
2. Belanja Non K/L	554 222,7	626 412,3	451 166,6	538 886,1	552 061,3
2. Pengeluaran untuk daerah	513 260,4	573 703,1	623 139,6	776 252,9	760 026,7
1. Transfer ke daerah	513 260,4	573 703,1	602 373,4	729 270,8	700 026,7
2. Dana Desa	-	-	20 766,2	46 982,1	60 000,0

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBNP 2017

seefisien mungkin dengan tidak mengurangi pemberian pelayanan pada masyarakat.

Belanja negara untuk tahun 2017 lebih diprioritaskan pada anggaran di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Pembiayaan kesehatan mendapat perhatian pemerintah saat ini dalam menyusun anggaran untuk kementerian/lembaga di tahun 2017 adalah dimana pemerintah menetapkan untuk pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Sementara itu, pemerintah tetap mempertahankan pemenuhan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari belanja Negara.

Pengeluaran pemerintah pusat lainnya adalah pengeluaran non Kementerian/Lembaga, dimana anggaran untuk pos tersebut pada tahun 2014 mencapai Rp 626,41 triliun. Akan tetapi, pada tahun anggaran 2015 pengeluaran non Kementerian/Lembaga hanya mencapai Rp 451,17 triliun, terjadi penurunan yang signifikan sebesar 27,98 persen. Pada penyusunan RAPBN 2017 pengeluaran untuk non kementerian/lembaga ditargetkan sebesar Rp 552,06 triliun lebih besar dari APBNP 2016 yang sebesar Rp 538,89 triliun.

Pengeluaran untuk non kementerian dan lembaga sebagian besar diposkan untuk membiayai pembayaran bunga hutang dan sisanya untuk subsidi. Targer pengeluaran subsidi RAPBN 2017 mencapai Rp 174,91 triliun atau menurun sekitar 1,60 persen dari APBNP 2016 (Rp 177,75 triliun). Pemerintah berusaha untuk mengurangi anggaran Negara untuk pembiayaan subsidi, khususnya adalah subsidi energi. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani subsidi adalah mengurangi subsidi di bidang energi (BBM dan Listrik) dan mengalihkan sebagian anggaran subsidi energi ke subsidi non energi yaitu untuk kesejahteraan penduduk miskin melalui program perlindungan sosial yaitu program-program bantuan langsung ke masyarakat, antara lain Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), beras untuk keluarga kurang sejahtera, dan beasiswa Bidik Misi, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima.

Selanjutnya, anggaran belanja Negara yang mendapat perhatian cukup tinggi dari pemerintah adalah pengeluaran untuk daerah. Pada APBNP tahun 2015 Pengeluaran untuk daerah dianggarkan sebesar Rp 623,14 triliun atau meningkat 8,62 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran untuk daerah pada APBNP 2016 mencapai sebesar Rp 776,25 triliun dan untuk tahun anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 760,03 triliun atau turun sekitar 2,09 persen.

Salah satu program pemerintah dan kabinet kerja adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintahan Kabinet Kerja mulai menyediakan anggaran dalam APBNP 2015 berupa dana desa yang tujuannya adalah guna untuk membangun fasilitas umum di desa yang dapat membuat desa menjadi lebih maju. Kenaikan anggaran pengeluaran untuk daerah sebagian digunakan

untuk meningkatkan alokasi Dana Desa. Dana Desa, sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal, diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

Pada saat pertama kali dimunculkan, pos untuk anggaran dana desa disediakan dana sebesar Rp 20,77 triliun pada tahun 2015. Alokasi untuk dana desa pada APBNP 2016 sebesar Rp 46,98 triliun atau naik hingga 126,24 persen dari tahun lalu. Pada RAPBN 2017 untuk alokasi dana desa ditargetkan sebesar Rp 60,00 triliun atau lebih tinggi 27,71 persen dari alokasi yang dianggarkan tahun lalu.

Upaya penghematan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Kabinet Kerjanya mulai menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan. Penyerapan anggaran belanja K/L, terutama untuk infrastruktur dalam Semester I tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Di samping itu, indikator di bidang kesejahteraan sosial mengalami perbaikan, tingkat pengangguran berkurang, serta akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, RAPBN 2017 disusun dengan penuh kehati-hatian dan disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal. RAPBN tahun 2017 dirancang oleh pemerintah secara lebih realistis, kredibel, dan efisien. Harapannya agar pembiayaan APBN di masa yang akan datang akan lebih pasti dan terjaga. Dengan demikian kinerja yang baik yang sudah dicapai di tahun 2016 akan kembali terulang di tahun 2017.

Perekonomian Indonesia di Tahun 2017

Adapun tema RKP tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Sumber penerimaan Negara masih menjadi tantangan ekonomi Indonesia pada tahun 2017. Untuk mewujudkan RKP dan sesuai dengan target anggaran yang tersedia maka arah kebijakan yang dilakukan pemerintah di tahun 2017 antara lain:

- Peningkatan ekspor non migas barang dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi dengan produk yang lebih bervariasi;
- Penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/fasilitas investasi;
- Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dan PNPB;
- Menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan PNPB;
- Melakukan reformasi kelembagaan.

Yang perlu diwaspadai di tahun 2017 adalah perkembangan ekonomi global dan perkembangan perekonomian Negara-negara maju yang diperkirakan tetap masih akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2017, terutama Negara-negara mitra dagang Indonesia.

Selain itu perekonomian Indonesia juga akan dipengaruhi oleh masih berlanjutnya ketidakpastian di Eropa pasca Brexit, perubahan politik di Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump yang diyakini akan berdampak luas, dan harga komoditas yang masih belum sepenuhnya pulih.

Dari dalam negeri, yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya inflasi di dalam negeri, karena adanya kenaikan tarif listrik dan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, hal lain yang dipandang sebagai risiko terhadap pertumbuhan ekonomi adalah penerimaan dari program amnesti pajak yang cukup tinggi di tahun 2016, namun tidak diikuti di tahun 2017 dimana penerimaan secara keseluruhan dari amnesti pajak melemah pada tahun 2017. Intinya pemerintah harus mampu menjaga kestabilan perekonomian di dalam negeri dan tetap berusaha untuk mampu menjadi Negara yang mandiri.

Harapannya perekonomian Indonesia di tahun 2017 masih dapat tumbuh dengan tetap menjaga dan mengantisipasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah tingkat konsumsi, belanja pemerintah, investasi, dan juga ekspor. Karena pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada konsumsi. Oleh sebab itu, daya beli masyarakat harus diikuti terus, agar konsumsi ini tetap berada pada posisi yang diinginkan. Untuk belanja pemerintah pun harus hati-hati.

Selain konsumsi dan belanja pemerintah, dua kunci penting lain terkait yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan juga ekspor. Dari sisi ekspor, di tahun 2017 kemungkinan ekspor Indonesia masih mengalami penurunan akibat pengaruh pasar atau Negara tujuan ekspor yang masih lesu, namun masih ada peluang dari sisi investasi. Investasi merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Mendatangkan investor baru dan mempertahankan investor lama, merupakan bagian penting yang harus dilakukan pemerintah.

Langkah yang dilakukan pemerintahan di tahun 2017 adalah mempercepat pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana anggaran yang mengacu pada target Pembangunan di tahun 2017 difokuskan pada :

1. Dimensi Pembangunan SDM yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental.
2. Dimensi Pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, kedaulatan energi, pembangunan pariwisata, serta percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pembangunan Strategi pemerataan dan kewilayahan meliputi: penyediaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil, penguatan koperasi, serta pengembangan kewirausahaan, perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan,
4. Dimensi pembangunan politik, hukum dan keamanan.

<http://www.bps.go.id>

PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL **3**



Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mulai tumbuh dari 5 tahun terakhir sebesar **5,02%**

Pertumbuhan disokong oleh tingginya permintaan domestik

Dari sisi produksi **Jasa Keuangan dan Asuransi** mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding sektor lainnya sebesar **8,90%**

Dari sisi konsumsi **Pengeluaran Konsumsi LNPRT** meningkat tajam seiring adanya Pilkada sebesar **6,62%**

<http://www.bps.go.id>

Perekonomian Indonesia Kembali Tumbuh

Perekonomian Indonesia diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), dan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan 2010. Perekonomian Indonesia bergerak tumbuh setelah dalam kurun waktu 2011-2015 cenderung melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali melonjak untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir pada tahun 2016, yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 yang tercatat sebesar 4,88 persen. Ekonomi Indonesia mampu kembali tumbuh karena stabilnya mata uang Rupiah dan turunnya angka inflasi meski berada pada dinamika perekonomian global.

Meskipun tumbuh, tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar 5,20 persen. Ekonomi Indonesia tahun 2016 mampu tumbuh dengan ditopang oleh permintaan domestik. Namun, dari sisi ekspor masih terbilang lemah. Pertumbuhan ini lebih dipengaruhi oleh faktor internal, diantaranya inflasi yang terkendali dan adanya stimulus fiskal. Sementara untuk faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dunia masih belum stabil, baik dari sisi permintaan (*demand*) yang masih lemah maupun harga komoditas yang rendah, dan juga *economic rebalancing* dari negara Tiongkok lebih cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Nilai PDB Indonesia jika dihitung atas dasar harga berlaku, hanya bertambah sekitar 7-10 persen selama tahun 2013-2016. Peningkatan nilai tambah dari lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi cukup menggembirakan dan berhasil menopang ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan 8,90 persen. Sementara itu dari sisi penggunaan, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumahtangga yakni sebesar 6,62 persen.

Ditinjau dari sisi target pemerintah, APBN tahun 2017 menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,3 persen. Ada tiga pilar utama yang disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pertama adalah melakukan optimalisasi pendapatan negara yang diarahkan pada perluasan basis pendapatan, namun tetap selaras dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi. Kedua, mengelola belanja negara secara produktif dan berkualitas yang diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Ketiga, menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran dengan kebijakan penghematan pada pembiayaan investasi. Fokus pemerintah adalah pada kemandirian BUMN dan infrastruktur melalui sumber pembiayaan murah.

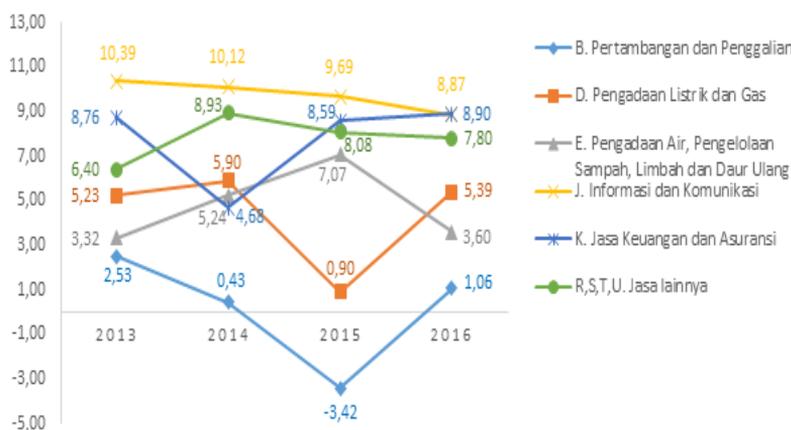
Perekonomian Indonesia yang mulai tumbuh kembali dan diperkirakan semakin *solid* tetap perlu terus dikelola dengan baik karena beberapa tantangan masih mengemuka dan dapat menurunkan prospek ekonomi ke depan. Masih tidak stabilnya perekonomian global dan lemahnya ekspor mendorong pemerintah untuk berupaya menerapkan kebijakan yang tepat, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil dan meningkat. Bagaimanapun tumbuhnya perekonomian Indonesia akan berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan pada tahun 2017.

PDB Menurut Lapangan Usaha

Di sisi produksi, tumbuhnya ekonomi Indonesia pada tahun 2016 didukung oleh tingginya pertumbuhan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen. Meskipun bukan salah satu kontributor utama dalam PDB namun pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha ini terus meningkat setiap tahunnya. Jasa perantara bank, bank umum, dan BPR tumbuh 9,57 persen di 2015 menjadi 9,82 persen di 2016. Subsektor perbankan menguasai 60-70 persen sektor jasa keuangan. Subsektor jasa keuangan lainnya seperti pergadaian, modal ventura, perusahaan pembiayaan tumbuh tinggi dari 7,98 persen menjadi 9,24 persen. Pesatnya pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan konsumen dan konsumsi swasta.

Secara umum, pada tahun 2016 pertumbuhan PDB terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha. Selain Jasa Keuangan dan Asuransi, lapangan usaha informasi dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 8,87 dan Jasa Lainnya sebesar 7,80 persen (lihat Gambar 3.1). Disamping itu, ada tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan PDB terendah yaitu Pertambangan dan Penggalian (B),

Gambar 3.1
Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013–2016



Sumber : Badan Pusat Statistik

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O), dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A).

Pada tahun 2016 Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian meski mengalami pertumbuhan terkecil tetapi termasuk dalam lima besar penyumbang perekonomian Indonesia dengan *share* terhadap PDB sebesar 7,21 persen. Pertumbuhan positif pada sektor ini dipengaruhi oleh mulai meningkatnya permintaan dan harga akan komoditas ini di pasar global. Disamping itu, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E) turut menarik perhatian. Pada tahun 2016, pertumbuhan pada kategori lapangan usaha E ini turun cukup tajam dari 7,07 persen pada 2015 menjadi 3,60 persen pada 2016.

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2016 masih didominasi oleh Industri Pengolahan, seperti yang terlihat pada Tabel 3.1. Secara bertahap, perekonomian Indonesia telah beralih dari negara agraris yang didominasi pertanian menjadi negara berbasis industri. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi Industri Pengolahan selama 2013-2016 yang selalu berada di posisi puncak dengan persentase di atas 20 persen. Industri Pengolahan memegang peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Industri ini berperan dalam penciptaan lapangan kerja yang cukup signifikan meskipun masih lebih rendah dibanding penyerapan tenaga kerja pada usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor ini juga mampu memberikan devisa dari aktivitas ekspor melalui industri padat karya, padat modal, hingga yang membutuhkan pengetahuan dan berbasis teknologi tinggi.

Selama tahun 2016, Industri Pengolahan tumbuh 4,29 persen dan yang semakin berkembang yaitu Industri Makanan dan Minuman dan Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki yang tumbuh mencapai diatas 8 persen. Kemenperin menetapkan target pertumbuhan Industri Pengolahan tahun 2016 sebesar 5,70 persen. Dibandingkan dengan capaiannya, target ini memang masih jauh tetapi pemerintah telah berupaya memberikan kebijakan penyediaan energi dengan harga murah dan infrastruktur pendukung. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah berencana menambah jumlah industri besar dan sedang sebanyak 9 ribu unit dalam lima tahun mendatang dengan tenaga kerja yang diserap berkisar 3 juta orang. Dari jumlah tersebut, 50 persen diarahkan bisa tumbuh di luar Jawa. Industri kecil juga direncanakan bertambah 20 ribu unit selama 2015-2019.

Lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap total PDB tahun 2016 sebesar 13,45 persen yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Berdasarkan angka sangat sementara, kategori ini tahun 2016 tumbuh sebesar 3,25 persen. Kebijakan sektor ini diarahkan untuk mengejar target kedaulatan pangan yang dicetuskan dalam nawacita. Untuk mewujudkannya,

Tabel 3.1. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013–2016

Lapangan Usaha	2013	2014	2015 *	2016 **
PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 275 048,40	1 409 655,70	1 555 746,90	1 668 997,80
	13,36	13,34	13,49	13,45
B. Pertambangan dan Penggalian	1 050 745,80	1 039 423	881 694,10	893 946,90
	11,01	9,83	7,65	7,21
C. Industri Pengolahan	2 007 426,80	2 227 584	2 418 376,40	2 544 576
	21,03	21,08	20,97	20,51
D. Pengadaan Listrik dan Gas	98 686,80	114 905,10	131 250,30	142 771,60
	1,03	1,09	1,14	1,15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7 209	7 840,60	8 546,40	8 947,50
	0,08	0,07	0,07	0,07
F. Konstruksi	905 990,50	1 041 949,50	1 177 084,10	1 287 659,30
	9,49	9,86	10,21	10,38
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 261 145,60	1 419 239,40	1 535 287,80	1 635 959,80
	13,21	13,43	13,31	13,19
H. Transportasi dan Pergudangan	375 305,90	466 968,90	579 059,60	647 154,30
	3,93	4,42	5,02	5,22
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	289 498,30	321 062,10	341 555,80	362 232
	3,03	3,04	2,96	2,92
J. Informasi dan Komunikasi	341 009,40	369 457,30	405 991,90	449 141
	3,57	3,50	3,52	3,62
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	370 131,90	408 438,80	465 019,90	520 926,40
	3,88	3,86	4,03	4,20
L. Real Estate	264 275	294 573,40	327 601,40	348 297,80
	2,77	2,79	2,84	2,81
M,N, Jasa Perusahaan	144 604,10	165 990,60	190 267,90	211 623,60
	1,51	1,57	1,65	1,71
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	372 195	404 629,60	450 233,10	478 636,20
	3,90	3,83	3,90	3,86
P. Jasa Pendidikan	307 862,30	341 818,40	388 041,80	418 258,30
	3,22	3,23	3,36	3,37
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96 881,30	109 147,20	122 928,20	132 427,50
	1,01	1,03	1,07	1,07
R,S,T,U, Jasa lainnya	140 315,50	163 548,80	190 579,50	212 220,10
	1,47	1,55	1,65	1,71
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	9 308 331,60	10 306 232,40	11 169 265,10	11 963 776,10
	97,51	97,51	96,86	96,43
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	237 802,40	263 472,90	362 451,80	443 033,70
	2,49	2,49	3,14	3,57
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9 546 134	10 569 705,30	11 531 716,90	12 406 809,80
	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

pemerintah berupaya untuk mendorong pengembangan pertanian yang lebih modern dengan memanfaatkan penggunaan alat mesin pertanian canggih dalam bercocok tanam, dan juga dengan aktifitas alih fungsi lahan pertanian.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi lapangan usaha ketiga dengan kontribusi tertinggi terhadap PDB.

Lapangan usaha ini diperkirakan tumbuh 4,8 persen pada tahun 2016. Akan tetapi, realisasinya ternyata jauh dari yang diharapkan dan hanya dapat tumbuh 3,93 persen pada 2016. Pemerintah berupaya meningkatkan perdagangan dengan pengembangan pasar di dalam dan luar negeri. Untuk peningkatan perdagangan dalam negeri, distribusi barang dagang, khususnya bahan makanan, diatur agar lebih efisien. Regulasi di bidang perdagangan

Tabel 3.2. Produk Domestik Bruto Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013–2016

Lapangan Usaha	2013	2014	2015 *	2016 **
PDB Harga Konstan Tahun 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 083 141,80	1 129 052,70	1 171 578,70	1 209 687,20
	4,20	4,24	3,77	3,25
B. Pertambangan dan Penggalian	791 054,40	794 489,50	767 327,20	775 485,60
	2,53	0,43	-3,42	1,06
C. Industri Pengolahan	1 771 961,90	1 854 256,70	1 934 533,20	2 017 555,10
	4,37	4,64	4,33	4,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	88 805,10	94 047,20	94 894,80	100 009,90
	5,23	5,90	0,90	5,39
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 539,90	6 882,50	7 369	7 634,60
	3,32	5,24	7,07	3,60
F. Konstruksi	772 719,60	826 615,60	879 163,90	925 062,50
	6,11	6,97	6,36	5,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 119 272,10	1 177 297,50	1 207 751,10	1 255 224,90
	4,81	5,18	2,59	3,93
H. Transportasi dan Pergudangan	304 506,20	326 933	348 773,80	375 764,40
	6,97	7,36	6,68	7,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	243 748,30	257 815,50	268 922,40	282 200,40
	6,80	5,77	4,31	4,94
J. Informasi dan Komunikasi	349 150,10	384 475,60	421 741,40	459 169,60
	10,39	10,12	9,69	8,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	305 515,10	319 825,50	347 308,60	378 234,70
	8,76	4,68	8,59	8,90
L. Real Estate	244 237,50	256 440,20	266 979,60	278 472,90
	6,54	5	4,11	4,30
M,N. Jasa Perusahaan	125 490,70	137 795,30	148 395,50	159 321,70
	7,91	9,81	7,69	7,36
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	289 448,90	296 329,70	310 054,20	319 953
	2,56	2,38	4,63	3,19
P. Jasa Pendidikan	250 016,20	263 685	283 020,10	293 877,60
	7,44	5,47	7,33	3,84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84 621,40	91 357,10	97 463	102 338,30
	7,96	7,96	6,68	5
R,S,T,U. Jasa lainnya	123 083,10	134 070,10	144 902,40	156 198,50
	6,40	8,93	8,08	7,80
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	7 953 312,30	8 351 368,70	8 700 178,90	9 096 190,90
	5,20	5	4,18	4,55
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	203 185,50	213 497,90	282 332,40	336 843,50
	21,80	5,08	32,24	19,31
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	8 156 497,80	8 564 866,60	8 982 511,30	9 433 034,40
	5,56	5,01	4,88	5,02

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

disusun untuk memberi perlindungan baik terhadap konsumen melalui standarisasi produk maupun kepada produsen dengan peraturan perdagangan *e-commerce*. Sementara itu untuk perdagangan luar negeri, kebijakan yang ditempuh adalah pengembangan ekspor produk olahan nonmigas agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

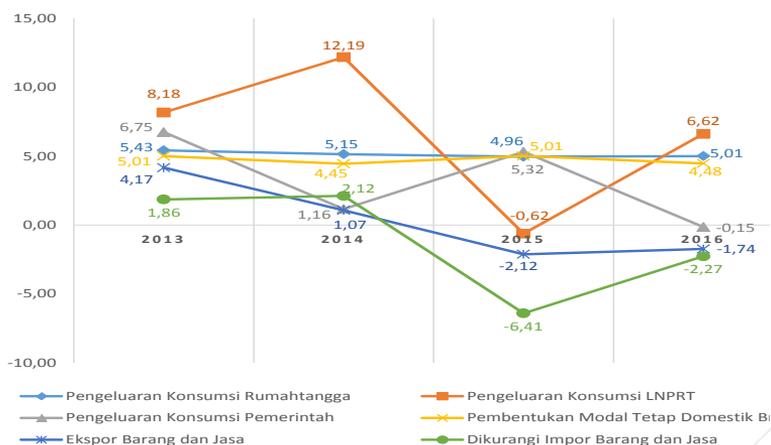
PDB Menurut Penggunaan

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan. Komponen pembentuk PDB dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2016 adalah konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 6,62 persen diikuti konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,01 persen, dan PMTB sebesar 4,48 persen.

Konsumsi LNPRT mengalami pasang surut pertumbuhan selama tahun 2013-2016. Pada tahun 2016, konsumsi LNPRT tumbuh karena sejalan dengan berbagai persiapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2017. Pertumbuhan konsumsi LNPRT 2016 ini cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar -0,62 persen. Sementara itu, Konsumsi rumah tangga tetap stabil karena tingkat inflasi yang rendah dan adanya perbaikan taraf konsumsi masyarakat. Komponen konsumsi rumah tangga selama 2013-2016 terlihat selalu stabil tumbuh sekitar 5 persen. Secara keseluruhan, penggunaan PDB mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 di tahun 2016.

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) tumbuh pada kisaran 4 hingga 5 persen selama tahun 2013-2016. Investasi kapital yang diindikasikan

Gambar 3.2
Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan, Tahun 2013–2016

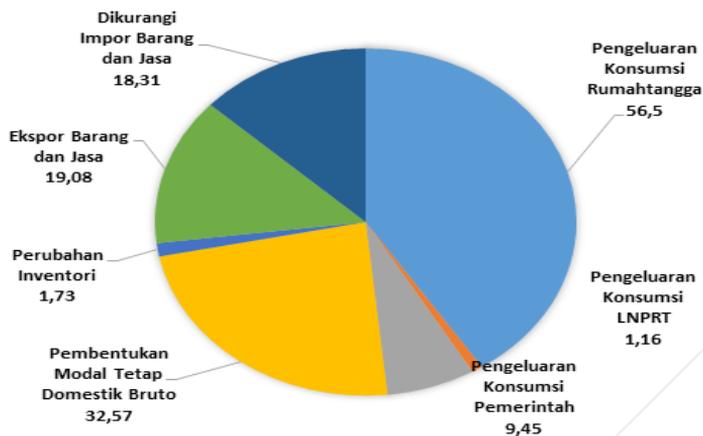


dengan PMTB merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia menjadi cermin iklim usaha yang kondusif. Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha dinilai menjadi salah satu poin yang akan meningkatkan jumlah investor di Indonesia. Pemerintah juga memberikan keringanan pajak untuk investasi industri yang berorientasi ekspor, industri kereta api dan pengiriman, dan untuk penelitian dan pembangunan.

Sementara itu pada tahun 2016 ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,74 persen. Hal ini terjadi lebih disebabkan karena menurunnya dua harga komoditi yang menjadi andalan ekspor Indonesia yaitu minyak kelapa sawit dan batubara. Melambatnya nilai ekspor ini juga ditengarai karena melemahnya ekonomi global khususnya negara-negara tujuan ekspor kedua komoditas tersebut. Negara tujuan ekspor Indonesia terbesar untuk komoditas batubara ialah Tiongkok, sementara untuk tujuan utama komoditas minyak kelapa sawit adalah India. Kedua negara tersebut tidak hanya menjadi negara tujuan ekspor terbesar Indonesia melainkan juga sebagai negara yang mengonsumsi komoditas tersebut terbesar di dunia. Pertumbuhan ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada hasil dari sumber daya alam, meskipun pertumbuhannya sedikit meningkat dari tahun 2015. Ekspor Indonesia masih belum pulih karena ketidakpastian perekonomian global. Diharapkan pada tahun 2017, ekspor Indonesia dapat kembali pulih.

Jika ditinjau berdasarkan kontribusi terhadap pembentukan PDB dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama pembentuk PDB dengan kontribusi lebih dari 50 persen selama tahun 2013-2016. PDB tahun 2016 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 56,50 persen, pembentukan modal tetap domestik bruto

Gambar 3.3
Kontribusi PDB Menurut Penggunaan (persen), Tahun 2016



32,57 persen, ekspor 19,08 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 9,45 persen, dan pengeluaran konsumsi LNPRT 1,16 persen.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga telah meningkat setiap tahun selama 2013-2016 meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, seperti yang terlihat pada Tabel 3.3. Untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan kebijakan struktural terkait pengembangan sentra produksi dan tata niaga bahan pangan pokok guna mencegah gejala kenaikan harga. Pemerintah juga berupaya mendorong penguatan daya beli masyarakat yang diharapkan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui kebijakan penyesuaian Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu peningkatan daya beli masyarakat juga didukung oleh perluasan cakupan dan paket manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenagakerjaan, khususnya untuk penduduk rentan dan pekerja informal.

Pada tahun 2016, PMTB tumbuh sebesar 4,48 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan tahun lalu yang diharapkan sebesar 7,3 persen. Kinerja pertumbuhan PMTB terutama didukung lingkungan eksternal yang lebih kondusif, kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan belanja infrastruktur pemerintah, dan kebijakan insentif perpajakan. Terkait kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah antara lain penguatan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur investasi dan usaha, peningkatan kualitas layanan, pengembangan sistem investasi, peningkatan persaingan usaha yang sehat dan mendukung iklim investasi. Mulai meningkatnya belanja infrastruktur juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan PMTB di tahun 2016.

Sementara itu, pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,15 persen pada 2016. Penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah ini terjadi akibat restrukturisasi APBN terkait penghematan belanja pemerintah. Penghematan anggaran dan belanja negara merupakan upaya untuk mengembalikan neraca keuangan negara yang lebih realistis. Usaha penghematan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang sempat lesu pada tahun 2015 ditengah krisis perekonomian global dan merosotnya ekspor Indonesia. Selain itu, pada tahun 2016 prioritas pemerintah lebih kepada pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional melalui peningkatan konektivitas nasional, ketahanan energi dan perumahan pemukiman. Untuk pembangunan infrastruktur ini, pemerintah juga mengencarkan penerimaan pajak melalui kebijakan *tax amnesty*.

Kinerja ekspor dan impor diharapkan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi global dan kenaikan harga beberapa komoditas pada tahun 2016. Namun, berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa ekspor Indonesia masih mengalami penurunan atau tumbuh negatif sebesar 1,74 persen. Peningkatan ekspor baru terjadi pada kuartal akhir yaitu periode Oktober-Desember akibat

peningkatan harga komoditas non migas, sehingga belum mampu menutupi lemahnya ekspor pada kuartal I hingga III 2016. Pemerintah berupaya meningkatkan aktivitas perdagangan internasional dengan membuka pasar ekspor baru, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan fasilitas ekspor untuk mendorong permintaan untuk produk Indonesia. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk mendorong partisipasi sektor industri yang berorientasi ekspor sebagai upaya untuk memperluas tujuan ekspor dan meningkatkan daya saing produk.

Tabel 3.3. Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan, Tahun 2013–2016

PDB Penggunaan (Seri 2010)	2013	2014	2015*	2016**
PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (%)				
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5 321 087,63	5 915 194,23	6 477 576,63	7 009 577,50
	55,74	55,96	56,17	56,50
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	103 929,00	124 242,00	130 950,57	144 470,14
	1,09	1,18	1,14	1,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	908 574,3	996 197,44	1 124 812,06	1 172 420,34
	9,52	9,43	9,75	9,45
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3 051 496,15	3 436 923,74	3 782 142,93	4 040 497,83
	31,97	32,52	32,80	32,57
5. Perubahan Inventori	178 090,5	220 230,64	158 753,93	214 104,70
	1,87	2,08	1,38	1,73
6. Ekspor Barang dan Jasa	2 283 776,66	2 501 424,83	2 439 106,82	2 367 331,78
	23,92	23,67	21,15	19,08
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 359 212,11	2 580 508,04	2 389 632,65	2 271 177,86
	24,71	24,41	20,72	18,31
Diskrepansi Statistik	58 391,9	-43 999,55	-191 993,39	-270 414 63
	0,61	-0,42	-1,61	-2,18
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9 546 134,00	10 569 705,30	11 531 716,90	12 406 809,80
	100,00	100,00	100,00	100,00
PDB Harga Konstan (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (%)				
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4 423 416,9	4 651 018,44	4 881 903,69	5 126 499,28
	5,43	5,15	4,96	5,01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	88 618,00	99 420,00	98 799,99	105,340,99
	8,18	12,19	-0,62	6,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	727 812,07	736,283,11	775,427,37	774,298 48
	6,75	1,16	5,32	-0,15
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2 654 375,04	2 772 470,77	2 911 470,93	3 041,825,19
	5,01	4,45	5,01	4,48
5. Perubahan Inventori	124 453,56	163 582,63	112 847,91	139 588,84
	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	2 026 113,68	2 047 887,10	2 004 416,35	1 969 635,44
	4,17	1,07	-2,12	-1,74
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1 945 867,32	1 987 113,92	1 859 711,51	1 817 548,77
	1,86	2,12	-6,41	-2,27
Diskrepansi Statistik	57 575,86	81 318,46	57 356,58	93 394,95
	-	-	-	-
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	8 156 497,80	8 564 866,60	8 982 511,30	9 433 034,40
	5,56	5,01	4,88	5,02

Catatan: * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sejalan dengan nilai ekspor, impor juga masih mengalami kontraksi sebesar 2,27 persen pada tahun 2016. Untuk mendongkrak pertumbuhan impor, kebijakan diarahkan pada upaya untuk menarik investor guna menumbuhkan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku sehingga akan mendorong perbaikan neraca perdagangan. Fasilitas perdagangan dengan sistem on-line juga akan dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penerbitan perizinan (Nota Keuangan, 2016).

Pertumbuhan Ekonomi Spasial

Pemulihan perekonomian Indonesia didorong oleh membaiknya ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta Maluku dan Papua pada tahun 2016. Di wilayah tersebut tercatat pertumbuhan ekonomi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 3.4). Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan sebesar 2,01 persen tumbuh meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 1,37 persen. Ekonomi di Pulau Sumatera tumbuh 4,29 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,53 persen. Sedangkan ekonomi Maluku dan Papua terus tumbuh selama tiga tahun terakhir. Peningkatan ekonomi di tiga pulau tersebut karena adanya perbaikan ekspor pada triwulan IV dan meningkatnya kinerja sektor pertambangan dalam produksi pertambangan migas dan produksi batubara. Sementara perekonomian di Pulau Jawa terlihat relatif stabil yang masih ditopang oleh sektor Industri Manufaktur.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2016 sebagian besar disumbang oleh provinsi Riau dan Sumatera Utara. Ekonomi Sumatera terutama didorong oleh meningkatnya investasi dan membaiknya ekspor. Investasi yang meningkat didukung oleh besarnya pengeluaran pemerintah pada 2016 sejalan dengan kegiatan proyek infrastruktur berskala

**Tabel 3.4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen),
Tahun 2014–2016**

Wilayah Pulau	2014	2015 ^x	2016 ^{xx}
Sumatera	4,60	3,53	4,29
Jawa	5,57	5,47	5,59
Bali dan Nusa Tenggara	5,90	10,45	5,89
Kalimantan	3,37	1,37	2,01
Sulawesi	6,87	8,19	7,42
Maluku dan Papua	4,54	6,35	7,45
Indonesia	5.01	4.88	5,02

Catatan : ^x Angka sementara

^{xx} Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

besar seperti Jalan Tol Trans Sumatera, *Light Rapid Transit* (LRT) di Sumatera Selatan, dan pembangunan beberapa bandara udara di daerah Sumatera. Kinerja ekspor berbagai daerah di Sumatera membaik ditopang oleh ekspor antar daerah seiring dengan meningkatnya permintaan minyak sawit domestik untuk kebutuhan biodiesel. Ekspor ke luar negeri juga membaik didorong oleh beberapa komoditas berbasis sumber daya alam yang cukup dominan dalam ekspor Sumatera seperti kelompok bahan bakar mineral dan pelumas, kelompok bahan mentah, serta kelompok minyak nabati dan hewani.

Perekonomian Jawa, yang memiliki pangsa paling besar dalam perekonomian nasional, pada 2016 tumbuh sebesar 5,59 persen, sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,47 persen. Membaiknya pertumbuhan ekonomi Jawa didorong oleh meningkatnya kinerja ekonomi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta yang bersumber dari menguatnya konsumsi domestik terutama konsumsi rumah tangga. Kinerja ekspor Jawa turut berkontribusi pada membaiknya ekonomi Jawa tahun 2016. Meningkatnya kinerja ekspor didorong oleh meningkatnya ekspor antar daerah dan membaiknya permintaan produk manufaktur dari negara mitra dagang utama. Beberapa komoditas ekspor utama Jawa yang mencatat tren meningkat sejak awal tahun 2016 antara lain bahan kimia, serta minuman dan rokok.

Perekonomian wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 2,01 persen pada 2016. Perbaikan laju pertumbuhan ekonomi terjadi di hampir seluruh provinsi di Kalimantan. Pada awal paruh pertama 2016, perekonomian Kalimantan masih menghadapi tekanan seiring dengan masih terbatasnya perbaikan harga komoditas ekspor batubara dan menurunnya produksi gas di Kalimantan Timur. Kinerja ekspor Kalimantan baru mulai kembali tumbuh positif pada triwulan II 2016, didukung oleh perbaikan ekspor batubara seiring dengan meningkatnya permintaan dari Tiongkok. Perbaikan kinerja ekspor Kalimantan terus berlanjut pada paruh kedua tahun 2016 sehingga menopang kinerja ekonomi Kalimantan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, perbaikan ekspor Kalimantan ditopang oleh kenaikan ekspor komoditas utama, khususnya batubara, pada paruh kedua 2016 seiring dengan meningkatnya harga di pasar global. Membaiknya kinerja ekspor juga diikuti oleh meningkatnya investasi, terutama investasi nonbangunan oleh korporasi swasta yang mulai tumbuh positif pada akhir tahun 2016.

Perekonomian Kawasan Timur Indonesia (KTI) tercatat masih tumbuh cukup tinggi rata-rata sebesar 7 persen pada 2016. Secara keseluruhan pertumbuhan KTI melambat dari tahun sebelumnya, hanya Maluku Papua yang mengalami kenaikan tingkat pertumbuhan. Melambatnya pertumbuhan KTI didorong oleh pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara yang melambat. Perlambatan ini disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang melambat akibat masih berlanjutnya proses konsolidasi pelaku usaha dalam merespons upaya hilirisasi sektor pertambangan. Selain itu, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh investasi yang menurun dan upaya

**Tabel 3.5. Peranan Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional (persen),
Tahun 2014–2016**

Wilayah Pulau	2014	2015 ^x	2016 ^{**}
Sumatera	23,02	22,18	22,03
Jawa	57,39	58,34	58,49
Bali dan Nusa Tenggara	2,87	3,07	3,13
Kalimantan	8,77	8,15	7,85
Sulawesi	5,64	5,91	6,04
Maluku dan Papua	2,31	2,36	2,46
33 Provinsi	100,00	100,00	100,00

Catatan : ^x Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

konsolidasi terkait kendala teknis kegiatan produksi tambang di beberapa daerah basis produksi tambang seperti di Papua dan Nusa Tenggara Barat. Sebaliknya, konsumsi menguat terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga. Namun, pada pertengahan hingga akhir tahun 2016, konsumsi di wilayah KTI tumbuh melambat dipengaruhi oleh konsumsi pemerintah yang terbatas seiring langkah penghematan anggaran. Sementara itu, kinerja ekspor mulai membaik di akhir paruh kedua 2016 didukung oleh kenaikan harga komoditas tambang dan upaya pelaku usaha untuk mengoptimalkan kuota ekspor tambang mineral di akhir tahun.

Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi lebih dari 50 persen dalam membentuk PDB nasional. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Pulau Jawa terus mengalami peningkatan kontribusi, dari 57,39 persen pada tahun 2014 menjadi 58,49 persen pada tahun 2016. Posisi kedua diduduki oleh Pulau Sumatera yang menyumbang sebesar 22 persen selama 2014-2016 terhadap PDB Nasional. Pulau lain di Indonesia yang mengalami peningkatan kontribusi meskipun nilainya kecil adalah Pulau Sulawesi dari angka 5 persen pada tahun 2014 menjadi 6 persen pada tahun 2016. Pulau Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi mencapai 3,13 persen pada tahun 2016. Pulau Kalimantan mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB nasional selama tahun 2013-2015. Sementara itu, Pulau Maluku dan Papua merupakan wilayah/Pulau di Indonesia dengan kontribusi yang paling kecil terhadap PDB nasional.

PDB Per Kapita

Salah satu indikator kesejahteraan suatu negara yang selalu menjadi perhatian adalah pendapatan perkapita. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan PDB per kapita tidak selalu sejalan, tetapi dapat pula bertolak belakang. Selama tahun 2012-2016, PDB per Kapita Indonesia selalu

Tabel 3.6. Produk Domestik Bruto per Kapita (ribu rupiah), Tahun 2012–2016

PDB per Kapita	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
2012	35 105,20	31 484,50
2013	38 366,00	32 781,00
2014	41 915,90	33 965,40
2015 ^x	45 140,70	35 161,90
2016 ^{xx}	47 957,40	36 462,50

Catatan : ^x Angka sementara

^{xx} Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

meningkat. PDB per kapita di Indonesia merangkak naik dari Rp 35,10 juta pada 2012 menjadi Rp 47,96 juta pada tahun 2016 jika dihitung atas dasar harga berlaku atau Rp 36,46 juta jika dihitung atas dasar harga konstan. Nilai PDB per kapita diperoleh dari nilai PDB dibagi dengan jumlah penduduk.

Pendapatan perkapita cenderung selalu meningkat. Namun pendapatan per kapita dapat bias pada suatu kelompok tertentu yang mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah jika terdapat kesenjangan yang semakin melebar saat terjadi peningkatan pendapatan, baik kesenjangan antar wilayah, antar sektor ekonomi, maupun kesenjangan pendapatan antar individu. Kesenjangan antar wilayah di Indonesia sangat terlihat ketika melihat kontribusi ekonomi di Pulau Jawa dalam pembentukan PDB dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia.

Distribusi pendapatan yang tidak merata/kesenjangan pendapatan terlihat dari hampir 25 persen PDB dimiliki oleh orang-orang kaya yang jumlahnya hanya 0,02 persen dari total penduduk (Indonesia-*Investments*,2017). Hal ini mencerminkan masih timpangnya kesejahteraan ekonomi antar penduduk di Indonesia. Percepatan pembangunan di beberapa sektor (ritel, otomotif, dan properti), persediaan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang berkembang pesat, upah buruh dan biaya produksi yang rendah menjadi potensi yang mendukung perekonomian Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun jika dikelola dengan bijaksana.

Capaian Kinerja Perekonomian Indonesia Triwulan I 2017

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2017 mencapai Rp 3.227,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.377,5 triliun. Perlambatan ekonomi masih dialami Indonesia di awal tahun ini, dimana laju pertumbuhan PDB triwulan I 2017 dibanding triwulan IV 2016 (*qtoq*) mengalami penurunan 0,34 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi berasal dari faktor musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih

dapat tumbuh sebesar 15,59 persen. Pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 2,21 persen, dan Jasa lainnya sebesar 1,89 persen. Namun pertumbuhan ini belum cukup menahan kontraksi ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDB seperti Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi.

PDB Indonesia pada triwulan I-2017 jika dibandingkan dengan triwulan I-2016 (*yoy*) tumbuh 5,01 persen. Pertumbuhan ini didukung hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi 0,49 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai kategori Informasi dan Komunikasi (9,10 persen), diikuti Jasa Lainnya (8,01 persen), Transportasi dan Pergudangan (7,65 persen), dan Jasa Kesehatan-kegiatan sosial (7,13 persen). Jika dilihat struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha masih belum menunjukkan perubahan berarti. Hal ini ditandai dengan lapangan usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; serta Perdagangan Besar dan Eceran yang masih

Tabel 3.7. Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I-2017

Lapangan Usaha	Nilai PDB (triliun rupiah)		Struktur PDB (Persen)	Laju Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2017 (<i>yoy</i>) (persen)
	Harga Berlaku	Harga Konstan		Tw I 2017 to TW IV 2016	Tw I 2017 to TW I 2016	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	438,5	306,5	13,59	15,59	7,12	0,90
Pertambangan dan Penggalian	257,8	194,9		-0,78	-0,49	-0,04
Industri Pengolahan	660,8	510,8	7,99	0,52	4,21	0,91
Pengadaan Listrik dan Gas	39,0	24,8	20,47	-3,45	1,60	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,3	2,0	1,21	0,69	4,39	0,00
Konstruksi	330,8	234,6	0,07	-4,43	6,26	0,61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	425,3	317,3	10,25	-0,24	4,77	0,64
Transportasi dan Pergudangan	167,0	96,3	13,18	-1,53	7,65	0,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	93,7	72,4	5,17	0,35	4,68	0,14
Informasi dan Komunikasi	122,2	119,4	2,90	0,28	9,10	0,45
Jasa Keuangan dan Asuransi	138,0	97,3	3,79	1,65	5,73	0,23
Real Estate	91,6	71,4	4,28	1,79	3,67	0,11
Jasa Perusahaan	56,8	41,6	2,84	2,21	6,80	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	114,7	78,3	1,76	-7,57	0,58	0,02
Jasa Pendidikan	101,1	71,6	3,55	-10,37	4,11	0,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,5	26,6	3,13	-1,69	7,13	0,08
Jasa lainnya	57,0	41,0	1,07	1,89	8,01	0,13
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	3 131,1	2 306,8	97,02	0,80	4,88	4,74
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	96,1	70,7	2,98	-27,19	9,37	0,27
PRODUK DOMESTIK BRUTO	3 227,2	2 377,5	100,00	-0,34	5,01	5,01

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik

dominan. Sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa Industri Pengolahan menjadi sumber penciptaan PDB tertinggi yaitu sebesar 0,91 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan sebesar 0,90 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,64 persen, serta Konstruksi sebesar 0,61 persen.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan triwulan I-2017 dibandingkan triwulan sebelumnya (*qtq*) terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,04 persen; diikuti Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,02 persen; dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,93 persen. Struktur PDB menurut pengeluaran masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi lebih dari 50 persen. Komponen pengeluaran lain yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (31,56 persen), Ekspor Barang dan Jasa (20,50 persen), Impor (18,72 persen), dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (6,58 persen), sedangkan Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil. Jika dilihat dari sumber penciptaannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2017 sebesar 5,01 persen berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,71 persen, diikuti pengeluaran ekspor barang dan jasa sebesar 1,71 persen, dan sisanya berasal dari komponen pengeluaran lainnya sebesar 0,59 persen.

Tabel 3.8. Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran, Triwulan I-2017

Lapangan Usaha	Nilai PDB (triliun rupiah)		Struktur PDB (Persen)	Laju Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2017 (yoy) (persen)
	Harga Berlaku	Harga Konstan		Tw I 2017 to TW IV 2016	Tw I 2017 to TW I 2016	
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 837,5	1 309,1	56,94	0,14	4,93	2,71
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	38,3	27,1	1,19	-1,71	8,02	0,09
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	212,4	142,2	6,58	-45,54	2,71	0,17
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	1 018,4	760,6	31,56	-5,42	4,81	1,54
5 Perubahan Inventori	68,3	43,8	2,11	-	-	-
6 Ekspor Barang dan Jasa	661,7	520,4	20,50	0,41	8,04	1,71
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	604,2	464,8	18,72	-4,59	5,02	0,98
Diskrepansi Statistik ¹	-5,2	39,1	-0,16	-	-	-
Produk Domestik Bruto (PDB)	3 227,2	2 377,5	100,00	-0,34	5,01	5,01

Catatan : ¹ Selisih PDB Lapangan Usaha dan Pengeluaran
Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik

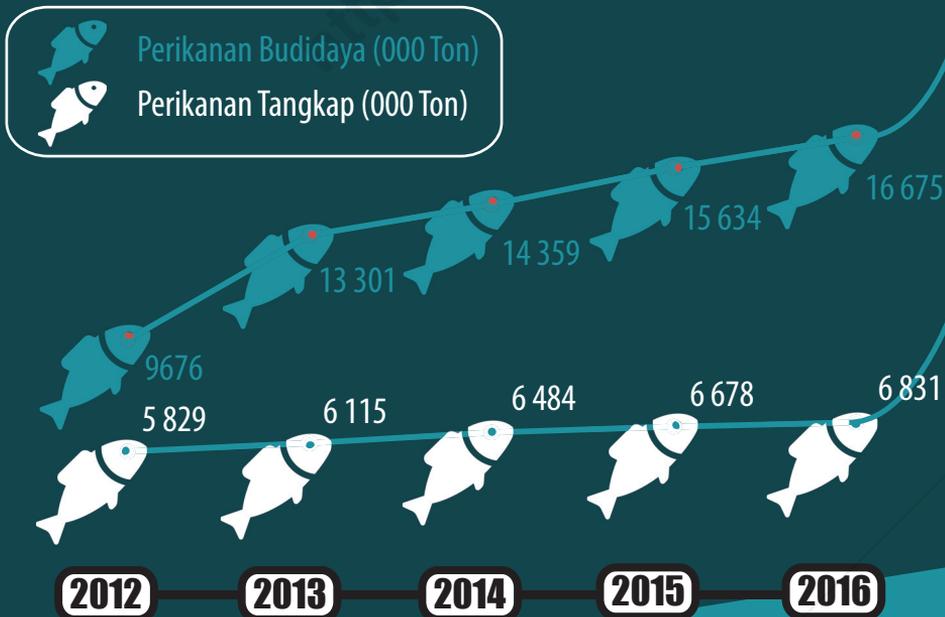
<http://www.bps.go.id>

PERKEMBANGAN POROS EKONOMI MARITIM INDONESIA

4



PRODUKSI PERIKANAN TERUS MENINGKAT SEPANJANG 2012-2016



<http://www.bps.go.id>

Indonesia Sebagai Poros Ekonomi Maritim

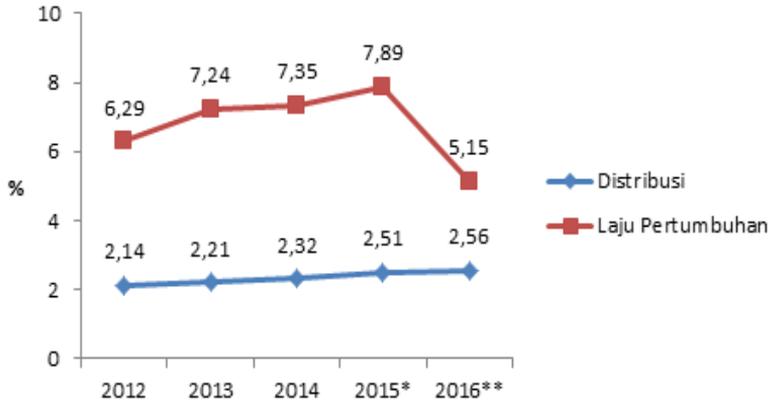
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Rahardjo Adisasmita (2013) menyebutkan ekonomi maritim memiliki terminologi yang mirip dengan ekonomi kepulauan, ekonomi kelautan, dan ekonomi archipelago, dimana semuanya membahas tentang pentingnya laut, perdagangan antar pulau, kegiatan di pelabuhan, industri galangan kapal, penangkapan ikan, wisata bahari, dan lainnya.

Luas laut dibanding daratan di dunia kurang lebih 70 banding 30. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara yang memiliki wilayah perairan yang luas untuk memajukan sektor maritimnya. Indonesia kaya akan potensi maritim yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sumberdaya maritim yang melimpah dapat menjadi modal dasar pembangunan. Keanekaragaman sumber daya kelautan menjadi dasar yang telah mengubah orientasi pembangunan Indonesia menuju poros maritim. Maritim diharapkan menjadi sektor unggulan yang menopang roda perekonomian nasional.

Dalam pidato Presiden tanggal 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia kembali ke asalnya, dari laut dan kembali menjadikan laut sebagai kekuatan bangsa. Sektor maritim diharapkan menjadi sektor unggulan yang menjadi cita-cita baru bagi bangsa Indonesia. Visi ini diusung Jokowi bukan tanpa dasar. Landasan utama yaitu mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau terbanyak dan wilayah lautan terluas di kawasan Asia Tenggara. Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Disamping itu, Indonesia berada pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudra sehingga berada pada jalur pelayaran dunia. Letak strategis ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia untuk dapat dimanfaatkan. Ditambah lagi, pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit. Momentum ini akan sangat baik dalam menunjang cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia (2015).

Namun selama ini, sektor kelautan dan perikanan seperti masih dipandang sebelah mata. Potensi yang ada belum tergalai secara optimal. Sektor maritim masih belum memberi dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Masyarakat lebih banyak bergantung pada sumberdaya di daratan. Di sisi lain, eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan menimbulkan dampak buruk bagi keberlangsungan sumber daya maritim ke depan. Oleh sebab itu, gaung Indonesia sebagai poros maritim dikumandangkan tahun 2014 di bawah pemerintahan Kabinet Kerja sebagai upaya menghidupkan kembali ruh Indonesia sebagai negara maritim, dengan mempertimbangkan aspek kelestarian dan keberlanjutan.

Gambar 4.1
Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDB Perikanan (Persen),
Tahun 2012-2016^x



Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Potensi Maritim Indonesia

a. PDB Subsektor Perikanan

KKP menargetkan capaian PDB subsektor perikanan tahun 2016 sekitar 8 persen. Namun BPS mencatat, pertumbuhan PDB perikanan tahun 2016 melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan penurunan produksi rumput laut yang ada di dalam lautan dan hasil perikanan budidaya yang juga menurun karena curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2016 (Yodik, 2017). Meskipun tidak mencapai target dan menurun dibandingkan tahun 2015, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, menyebutkan bahwa pertumbuhan ini masih bagus karena masih di atas PDB nasional. Untuk tahun 2017, KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan sebesar 9,5 persen dengan ditopang dari target nilai ekspor hasil perikanan (Ningsih, 2017).

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, sebenarnya subsektor perikanan mampu memberikan kontribusi lebih terhadap PDB Indonesia. Namun karena data yang dimanipulasi, seperti banyak perusahaan perikanan besar yang memalsukan dokumen operasional, subsektor perikanan hanya mampu berkontribusi kurang dari 3 persen terhadap PDB nasional. Kondisi ini sangat disayangkan melihat Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang didukung luas wilayah perairan namun belum dimanfaatkan secara optimal.

b. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Tahun 2017, total produksi perikanan ditargetkan menembus angka 29,40 juta ton. Perikanan budidaya masih dominan dibandingkan perikanan tangkap dengan kontribusi yang terus meningkat setiap tahun. Capaian produksi perikanan budidaya tahun 2016 sebesar 16,68

juta ton, masih dibawah target pemerintah sebesar 19,46 juta ton. Namun jika dibandingkan tahun 2015, produksi perikanan budidaya tahun 2016 berhasil tumbuh 6,6 persen. Tahun 2017, produksi perikanan budidaya diperkirakan menurun seiring curah hujan yang masih tinggi. Guna mengantisipasi penurunan yang tajam, KKP menyiapkan komoditas yang kebal terhadap curah hujan, seperti ikan lele dan nila. Disamping itu, revitalisasi keramba jaring apung dengan mengisi jaring dari ikan-ikan yang berasal dari pemerintah juga akan dilakukan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong produksi perikanan budidaya mencapai target di tahun 2017 sebesar 21,9 juta ton (KS, 2017).

Gambar 4.2
Volume Produksi Perikanan di Indonesia, Tahun 2012-2016



Sumber : <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/index.php?m=5>

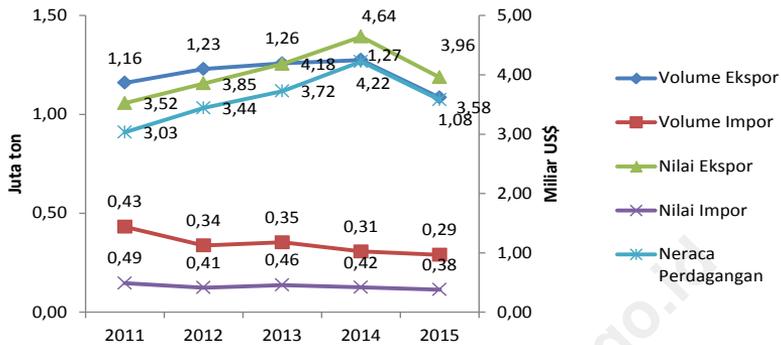
Tahun 2016, produksi perikanan menembus angka 6,83 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai ini juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 6,5 juta ton. Dibandingkan tahun 2015, produksi perikanan tangkap meningkat 2,29 persen pada tahun 2016. Untuk tahun 2017, perikanan tangkap ditargetkan sebesar 6,6 juta ton. Estimasi potensi perikanan tangkap di Indonesia sebesar 9,9 juta ton berdasarkan kajian stok ikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP di sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di seluruh Indonesia tahun 2016 (akr, 2017). Melalui pengelolaan di seluruh WPP, diharapkan subsektor perikanan di Indonesia dapat lebih tertata dan kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga.

c. Ekspor dan Impor Produk Perikanan

Tren ekspor produk perikanan Indonesia menunjukkan peningkatan sejak tahun 2011 hingga 2014. Namun pada tahun 2015, KKP mencatat volume ekspor perikanan 1,08 juta ton atau menurun 14,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor perikanan juga menurun 14,77 persen dengan nilai US\$ 3,96 miliar. Angka ini di bawah target pemerintah sebesar US\$ 5,86 miliar. Penurunan ekspor perikanan disebabkan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan moratorium izin eks kapal asing untuk beroperasi di perairan Indonesia sejak November 2014. Tahun 2017, KKP mematok target ekspor produk perikanan mencapai US\$ 7,62 miliar. Optimisme ini didukung

peningkatan produksi perikanan dan pasar ekspor yang semakin terbuka lebar. Untuk menembus target ekspor tahun ini, pemerintah berencana menggelar lima pameran internasional di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Belgia, dan Dubai (Putra, 2017).

Gambar 4.3
Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Produk Perikanan Indonesia,
Tahun 2011-2015^x



Sumber: KKP, 2015

Berbanding terbalik dengan ekspor, impor perikanan menunjukkan tren yang menurun selama tahun 2011-2015. Tercatat rata-rata penurunan volume dan nilai impor perikanan pertahun sebesar 8,94 persen dan 5,65 persen selama 2011-2015. Pemerintah memang tengah membatasi impor produk perikanan yang masih mampu dipenuhi dalam negeri. Impor yang terus menurun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan ikan di dalam negeri dan meningkatkan produksi nasional.

Jika ditinjau dari nilainya, nilai impor produk perikanan pada tahun 2015 hanya mencapai US\$ 0,38 miliar atau 9,6 persen dari nilai ekspor produk perikanan secara keseluruhan sebesar US\$ 3,96 miliar. Nilai ekspor yang lebih tinggi dari nilai impor menyebabkan neraca perdagangan Indonesia bernilai positif, yang berarti terdapat surplus perdagangan untuk produk perikanan. Hal ini tidak lepas dari kinerja produksi perikanan tangkap dan budidaya yang terus mengalami pertumbuhan.

d. Sumberdaya Kelautan

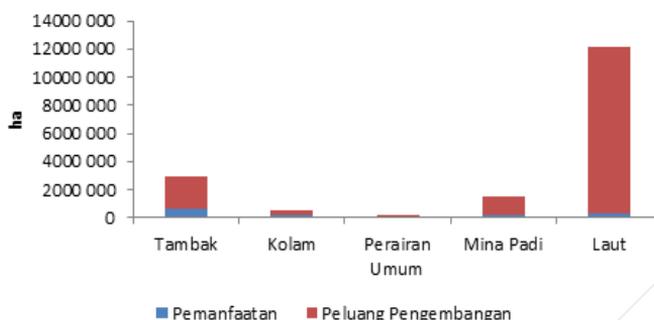
Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia merupakan potensi yang berpeluang mendukung ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menambah devisa negara. Sumberdaya kelautan dapat berasal dari sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan laut, dan jasa kelautan. Potensi sumberdaya kelautan terdiri dari dua poin utama yaitu potensi fisik dan potensi pembangunan. Potensi fisik meliputi luas daratan 1,91 juta km², perairan pedalaman dan kepulauan seluas 3,09 juta km², perairan laut teritorial seluas 0,28 juta km², perairan Zona Ekonomi Eksklusif

seluas 2,97 juta km², perairan landas kontinen seluas 2,75 juta km², panjang garis pantai 99.093 km, dan jumlah pulau 17.504 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015). Sementara itu, potensi pembangunan merupakan peluang yang dilihat dari sudut pandang pembangunan, meliputi: 1) sumberdaya yang dapat diperbaharui (perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, industri bioteknologi kelautan, dan pulau-pulau kecil); 2) sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (minyak bumi dan gas, bahan tambang dan mineral); 3) energi kelautan (pasang-surut, gelombang, angin, *Ocean Thermal Energy Conversion*); 4) jasa lingkungan (pariwisata, perhubungan, kepelabuhanan, dan penampung atau penetralisir limbah) (Prof.Dr.Ir.H.Tridoyo Kusumastanto).

Perikanan merupakan sumberdaya kelautan yang menyimpan potensi paling besar untuk diberdayakan, terutama perikanan budidaya. Perikanan budidaya merupakan sektor unggulan yang terus dioptimalkan guna mendongkrak kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional. Secara umum, total potensi lahan budidaya mencapai 17,32 juta ha, namun baru 7,24 persen atau 1,25 juta ha yang telah dimanfaatkan. Sementara itu, 92,76 persen lahan budidaya menunggu untuk dikembangkan. Dari seluruh jenis lahan budidaya yang ada, laut merupakan lahan budidaya dengan potensi yang paling dominan, mencapai 69,98 persen dengan luas 12,12 juta ha. Menyusul berikutnya, tambak dengan potensi sebesar 2,96 juta ha, mina padi sebesar 1,54 juta ha, kolam sebesar 0,54 juta ha, dan perairan umum sebesar 0,16 juta ha.

Laut menyimpan potensi yang masih terbuka lebar untuk dikelola secara optimal dengan prinsip ramah lingkungan, termasuk untuk perikanan budidaya. Beberapa komoditas budidaya laut bahkan sudah menembus pasar Internasional, seperti kakap putih dan kerapu. Luas lahan budidaya laut yang telah dimanfaatkan baru sebesar 0,28 juta ha atau 2,32 persen dari potensi lahan budidaya laut. Dengan pengembangan secara intensif, budidaya laut (marikultur) dapat menjadi industri yang menjanjikan. Bukan hanya dari produk yang dihasilkan, usaha marikultur juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan.

Gambar 4.4
Potensi Lahan Budidaya



Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, KKP

Saat ini, KKP tengah mengembangkan modernisasi teknologi perikanan budidaya yaitu budidaya laut lepas pantai atau Keramba Jaring Apung (KJA) *offshore* sebagai program prioritas di tahun 2017. Pembangunan KJA *offshore* merupakan bentuk peningkatan pemanfaatan laut sebagai lahan potensi budidaya dan diharapkan dapat mendongkrak produksi kakap putih secara signifikan. Menurut rencana, KJA *offshore* akan difokuskan terlebih dahulu di tiga lokasi yang dinilai strategis, yaitu Kepulauan Karimunjawa, Pangandaran, dan Kota Sabang.

Maritim Masa Depan Indonesia

Tak diragukan lagi bahwa kemaritiman Indonesia sedang tumbuh pesat. Poin pertama yang menjadi rujukan yaitu pertumbuhan subsektor perikanan (5,15 persen) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (5,02 persen) pada tahun 2016. Subsektor perikanan tetap tumbuh ditengah perlambatan ekonomi global. Kondisi ini tidak lepas dari neraca perdagangan perikanan nasional, kinerja industri perikanan, dan investasi sektor perikanan yang semakin membaik. Poin kedua, regulasi yang tegas terkait penangkapan ikan di laut berhasil meningkatkan produksi ikan dan tangkapan nelayan. Negara berusaha mengatur dan melindungi kedaulatan maritim melalui beberapa peraturan seperti penenggelaman kapal, Permen KP No 56 Tahun 2014 tentang moratorium izin untuk kapal eks-asing, Permen KP No 57 Tahun 2014 tentang pelarangan *transshipment* untuk ke luar negeri, Permen KP No 02 Tahun 2015 tentang pelarangan pukut hela dan pukut tarik, serta Permen KP No 01 Tahun 2014 tentang pelarangan ekspor kepiting, lobster, dan rajungan bertelur.

Sektor maritim tumbuh bukan tanpa masalah dan kendala. Masalah yang dihadapi terkait perikanan tangkap yaitu eksploitasi berlebihan dan polusi laut. Jika dibiarkan dalam jangka lama, hal ini akan berdampak buruk bagi kelestarian biota laut dan penurunan jumlah tangkapan ikan nelayan. Permasalahan yang masih ditemui di pelabuhan laut yaitu inefisiensi produktivitas barang-barang yang melalui pelabuhan laut. Hal ini dikarenakan sistem pendukung yang belum siap seperti tempat penampungan belum memadai, waktu bongkar muat barang yang tidak efektif, dan birokrasi yang berbelit-belit. Konektivitas maritim terkendala dari segi aspek internal kepelabuhanan dan aspek eksternal, seperti ketersediaan infrastruktur, energi, teknologi dan informasi, pendanaan, dan kemauan pemerintah (Adam, 2015). Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa seluruh permasalahan dan kendala yang ada tidak menutupi potensi ekonomi maritim Indonesia. Perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, jasa pelabuhan, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi lepas pantai, kehutanan pesisir, perdagangan, pelayaran, dan pariwisata merupakan peluang sektor maritim yang menunggu untuk dikembangkan.

Sebagai langkah pertama, pembangunan infrastruktur terus digenjot untuk konektivitas antarpulau. Kemenristekdikti menyebutkan bahwa hingga tahun 2014, jumlah pelabuhan dan terminal di Indonesia mencapai 2.154, terdiri dari 111 pelabuhan komersial, 1.129 pelabuhan non-komersial, dan

lebih dari 914 terminal khusus. Jumlah industri galangan kapal mencapai 250 perusahaan. Dari sisi penegakan hukum, jumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan tahun 2015 terkait kelautan dan perikanan di Indonesia mencapai 335 buah. Sebagai bagian dari pengawasan, pemerintah terus menambah armada pengawasan dan tahun 2015 sudah ada 31 buah kapal pengawas.

Capaian yang telah diraih merupakan awal dari sebuah proses untuk mencapai visi baru. Kerangka kebijakan yang sistematis dan tepat sasaran perlu disusun untuk menggiring percepatan pembangunan. Dalam buku rekomendasi kebijakan “Indonesia Poros Maritim Dunia, Membangun Indonesia Menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, dan Kuat” karangan Dwi Soetjipto (2016), menyebutkan ada lima kebijakan utama yang diusulkan. Pertama, mendorong investasi sektor maritim yang lebih besar. Kedua, membangun infrastruktur maritim berupa kapal dan pelabuhan. Ketiga, memberikan kemudahan dan tawaran investasi serta dukungan perbankan untuk meningkatkan investasi laut. Keempat, meningkatkan sumber daya terdidik di sektor maritim dengan pendirian dan penambahan jurusan perguruan tinggi ke arah sektor maritim. Kelima, mengadakan riset berskala industri di sektor energi terbarukan berbasis laut.

Pakar maritim dan mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat, Alfred Thayer Mahan menyebutkan beberapa prinsip untuk mencapai ekonomi tangguh di sektor maritim bagi suatu negara (Prasetyo, 2016). Pertama, pengembangan industri pelayaran komersial. Kedua, mendorong pesaing untuk membangun angkatan laut yang independen dari armada komersial pada waktu tertentu. Ketiga, dengan mengamankan wilayah perairan nasional.

Pembangunan maritim membantu efektivitas dan efisiensi aktivitas perekonomian. Transportasi laut dan industri maritim merupakan aspek penting dalam mendukung Indonesia menjadi poros maritim (Bappenas, 2016). Transportasi merupakan poin penting untuk menjamin konektivitas antarpulau. Disamping infrastruktur transportasi, pembangunan sistem yang mengiringi juga diperlukan, seperti sistem logistik dan distribusi. Presiden Jokowi menekankan pembangunan tol laut agar segera diselesaikan untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah sekitar.

Saat ini pemerintah sedang gencar membangun tol laut dan sistem-sistem pendukungnya melalui proyek-proyek pembangunan. Bappenas telah menetapkan beberapa proyek pendukung tol laut. Pertama, pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis. Kedua, *short sea shipping* seperti pengadaan kapal dan pelabuhan sumur. Ketiga, fasilitas kargo umum dan bulk sebagai rencana induk pelabuhan nasional. Keempat, pengembangan pelabuhan non komersial sejumlah 1.481 pelabuhan. Kelima, pengembangan pelabuhan komersial lainnya sejumlah 83 pelabuhan. Keenam, transportasi multimoda dengan membangun akses jalan, kereta pelabuhan, dan kereta pesisir. Ketujuh, revitalisasi industri galangan kapal sejumlah 12 galangan kapal, serta pengadaan kapal sebagai proyek terakhir.

Secara umum (Adam, 2015), dukungan kebijakan untuk mendukung konektivitas maritim mencakup beberapa hal sebagai berikut: 1) perencanaan kebijakan, salah satunya dengan membangun jaringan sarana dan prasarana sebagai penghubung semua pulau di Indonesia; 2) perbaikan kondisi infrastruktur, meliputi pelabuhan laut, udara, dan jalan serta jaringan listrik dan telekomunikasi yang efisien; 3) peningkatan kapasitas SDM maritim; 4) koordinasi antar instansi, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan, KKP membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), membangun infrastruktur, memperluas pangsa pasar. Dari sisi finansial, melalui program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guidline*), OJK berupaya agar akses keuangan dapat menjangkau masyarakat luas, terutama nelayan. Dengan kerjasama dan kemauan yang keras dari pemerintah, pengusaha, pelaku usaha, investor, lembaga swadaya, masyarakat, dan stakeholder terkait, target pertumbuhan PDB tahun 2017 sebesar 9 persen diharapkan dapat tercapai.

<http://www.bps.go.id>

INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT **5**



**BAHAN MAKANAN
PENYUMBANG TERBESAR
INFLASI 2016**

1,21%

<http://www.bps.go.id>



Inflasi adalah indikator yang menunjukkan fluktuasi harga barang dan jasa di masyarakat. Inflasi mengukur perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Angka inflasi yang positif mengindikasikan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga dapat berimbas pada berkurangnya kemampuan masyarakat memperoleh barang dan jasa tersebut. Tingkat inflasi yang menurun dan tetap positif menunjukkan kenaikan harga yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Menurut teori kuantitas, pertumbuhan beredarnya uang di masyarakat merupakan salah satu penyebab inflasi. Jumlah uang beredar yang meningkat mendorong meningkatnya harga barang dan jasa. Dengan demikian, teori ini berpendapat bahwa bank sentral berperan penting dalam menjaga stabilitas inflasi. Bank sentral memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi dengan mempertahankan kestabilan jumlah uang beredar. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat harga juga akan meningkat dengan cepat yang berujung pada meningkatnya inflasi.

Tingkat inflasi biasanya diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Para pemangku kebijakan di bank sentral selalu memantau IHK terkait dengan pemilihan kebijakan moneter. IHK memberikan informasi perubahan harga barang dan jasa yang dibeli/dibelanjakan oleh konsumen dalam kurun waktu tertentu. Inflasi digambarkan melalui kenaikan harga barang dan jasa yang diukur dari perubahan IHK. Data harga konsumen dalam penyusunan IHK mencakup barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Cakupan data IHK telah mengalami perkembangan. Penghitungan IHK sejak Juni 2008 sampai dengan Desember 2013 mencakup 66 kota di seluruh Indonesia yang meliputi 774 komoditas barang dan jasa dan menggunakan tahun 2007 sebagai tahun dasar. Namun, sejak Januari 2014 sampai dengan sekarang, data IHK mencakup 82 kota di seluruh Indonesia, meliputi 859 komoditas barang dan jasa, dan menggunakan tahun 2012 sebagai tahun dasar.

Inflasi Inti dan Inflasi Non Inti

Di Indonesia, inflasi dikelompokkan berdasarkan faktor yang memengaruhinya. Disagregasi inflasi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu inflasi inti dan inflasi non inti. Inflasi inti merupakan inflasi yang konsisten dan dipengaruhi oleh kondisi fundamental ekonomi serta kebijakan moneter. Faktor fundamental yang dimaksud, antara lain interaksi permintaan dan penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Inflasi inti disebut juga dengan *core inflation* atau *underlying inflation*.

Kemudian, inflasi non inti adalah komponen inflasi yang cenderung tinggi pergerakannya dan dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Inflasi non inti juga disebut dengan inflasi sesaat atau *noises inflation*. Inflasi non inti terdiri dari inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered prices*). Inflasi komponen bergejolak dominan dipengaruhi oleh perubahan harga dalam kelompok bahan makanan, sedangkan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah dominan dipengaruhi oleh kebijakan harga pemerintah.

Inflasi sepanjang tahun 2016 di Indonesia terutama disumbang oleh inflasi inti dan komponen bergejolak. Inflasi inti merupakan kelompok penyumbang inflasi tertinggi, yaitu sebesar 1,88 persen. Tidak berbeda dari tahun sebelumnya (2015), inflasi komponen yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter ini juga menjadi penyumbang inflasi umum terbesar. Sementara itu, inflasi kelompok *administered prices* menjadi penyumbang yang terendah, yaitu hanya 0,02 persen. Fluktuasi dari harga *administered prices* yang sangat kecil menjadikannya penyumbang inflasi terendah.

Tabel 5.1. Inflasi dan Sumbangan Inflasi Inti dan Non Inti, Tahun 2014–2016

Tahun	Inflasi Inti		Bergejolak		Harga Diatur Pemerintah	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
2014	4,93	3,09	10,88	1,88	17,57	3,39
2015	3,95	2,41	4,84	0,86	0,39	0,08
2016	3,07	1,88	5,92	1,12	0,21	0,02

Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2014-2016, angka inflasi inti di Indonesia terus mengalami perlambatan. Secara tahunan, inflasi inti melambat dari 4,93 persen (2014), menjadi 3,95 persen (2015), hingga menjadi 3,07 persen (2016). Terkendalinya inflasi inti menunjukkan tercapainya kontrol bank sentral melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter tersebut ditujukan untuk mengendalikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap inflasi inti.

Rendahnya inflasi inti tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu tekanan eksternal, kesenjangan *output*, dan ekspektasi inflasi. Faktor tekanan eksternal yang melemah seperti harga komoditas global yang rendah dan stabilnya nilai tukar berpengaruh terhadap penurunan inflasi inti. Kemudian, terbatasnya permintaan domestik (konsumsi domestik) juga menyebabkan menurunnya inflasi inti. Penurunan inflasi inti ini juga terjadi karena membaiknya ekspektasi inflasi, yaitu stabilnya perkiraan pelaku ekonomi mengenai perubahan harga barang dan jasa di masa mendatang.

Berbeda dengan inflasi inti, inflasi kelompok *volatile food* meningkat satu angka di tahun 2016, dari 4,84 persen (2015) menjadi 5,92 persen (2016). Padahal inflasi *volatile food* sudah sangat berhasil dikontrol di tahun

2015. Tekanan inflasi *volatile food* yang meningkat ini disebabkan adanya gangguan pasokan karena faktor cuaca. Gangguan pasokan akan mendorong keterbatasan pemenuhan kebutuhan pangan yang berujung pada melonjaknya harga bahan pangan.

Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah sangat tinggi di tahun 2016 memberikan andil yang terbesar terhadap inflasi *volatile food*. Intensitas curah hujan yang tinggi atau yang biasa disebut dengan dampak La Nina menyebabkan kedua komoditas tersebut mudah rusak dan busuk. Ditambah lagi, produksi cabai yang mudah busuk akibat adanya serangan hama. Komoditas lain yang menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi *volatile food* adalah bawang putih, ikan segar, cabai rawit, minyak goreng, dan kentang (Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, 2017).

Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai bank sentral akan terus melakukan pemantauan inflasi yang disebabkan oleh pangan. Laju inflasi *volatile food* akan ditekan melalui penguatan infrastruktur logistik pangan, terutama pergudangan untuk penyimpanan komoditas. Kemudian, pemangku kebijakan akan membangun sistem data lalu lintas barang khususnya komoditas pangan, serta penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam stabilitas harga (Fajriah, 2017).

Secara khusus, Kementerian Perdagangan telah membangun sistem untuk mendukung pemerintah dalam menjaga pasokan pangan komoditas atau memperlancar distribusi pangan untuk menekan angka inflasi. Sistem Pasar Lelang Komoditas (PLK) Terpadu diintegrasikan dengan Sistem Resi Gudang (SRG) yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan serta mengatasi kendala jarak dan waktu. Integrasi ini juga dapat meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar lokal ataupun global dan mencukupi kebutuhan pangan antardaerah (Merdeka.com, 2016). Selain itu, untuk jangka menengah, pemerintah telah menyiapkan kebijakan terkait pembiayaan di bidang pangan dan penyediaan alat serta mesin pertanian (Pikiran-Rakyat.com, 2016).

Selanjutnya, di tengah penyesuaian subsidi harga BBM, LPG, dan tarif listrik, komponen *administered prices* mengalami inflasi yang terus menurun hingga 0,21 persen di tahun 2016. Rendahnya inflasi *administered prices* juga didukung oleh menurunnya harga minyak dunia. Menurunnya harga minyak dunia ini disebabkan adanya kelebihan pasokan secara global. Di sisi lain, permintaan terhadap minyak juga menurun akibat adanya perlambatan ekonomi dan efisiensi di negara maju (Finance.detik.com, 2017).

Perkembangan Inflasi Nasional Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Inflasi telah menjadi perhatian utama bagi para pelaku ekonomi dan pemangku kebijakan. Inflasi dapat berdampak positif dan negatif bergantung pada besaran dari inflasi itu sendiri. Inflasi yang terkontrol

akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, karena pendapatan nasional akan meningkat dan masyarakat terdorong untuk menabung dan berinvestasi. Di sisi lain, inflasi yang tinggi akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian. Peningkatan harga yang cepat akan menurunkan daya beli masyarakat, memperlebar kesenjangan pendapatan, mengurangi investasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Perkembangan inflasi dapat menjadi indikator tercapainya target perekonomian yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Laju inflasi Indonesia sepanjang 2016 tercatat sebesar 3,02 persen. Angka tersebut merupakan angka inflasi tahunan yang terendah sejak 2010. Sebagaimana tahun sebelumnya, capaian inflasi tahun 2016 ini tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia yang sebesar 4 persen dengan deviasi ± 1 persen. Hal ini menunjukkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas moneter telah berhasil dalam mengendalikan inflasi.

Tabel 5.2. Laju Inflasi Indonesia Gabungan 82 Kota Menurut Kelompok Barang Kebutuhan (2012=100) (persen), Tahun 2014–2017

Tahun/Bulan	Bahan Makanan	Makanan		Perumahan,		Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan O.R	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	Umum
		Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	Sandang	Bahan Bakar				
2014	10,57	8,11	7,36	3,08	5,71	4,44	12,14	8,36	
2015	4,93	6,42	3,34	3,43	5,32	3,97	-1,53	3,35	
2016	5,69	5,38	1,90	3,05	3,92	2,73	-0,72	3,02	
Januari	2,20	0,51	0,53	0,26	0,36	0,15	-1,11	0,51	
Februari	-0,58	0,63	-0,45	0,64	0,26	0,06	-0,15	-0,09	
Maret	0,69	0,36	-0,07	0,55	0,30	0,03	-0,22	0,19	
April	-0,94	0,35	-0,13	0,22	0,31	0,03	-1,60	-0,45	
Mei	0,30	0,58	0,02	0,44	0,27	0,03	0,21	0,24	
Juni	1,62	0,58	0,15	0,70	0,34	0,03	0,63	0,66	
Juli	1,12	0,54	0,24	0,44	0,37	0,51	1,22	0,69	
Agustus	-0,68	0,41	0,41	0,40	0,39	1,18	-1,02	-0,02	
September	-0,07	0,34	0,29	0,13	0,33	0,52	0,19	0,22	
Oktober	-0,21	0,24	0,56	-0,31	0,29	0,10	-0,03	0,14	
November	1,66	0,25	0,16	-0,01	0,30	0,02	0,07	0,47	
Desember	0,50	0,45	0,18	-0,46	0,32	0,05	1,12	0,42	
2017									
Januari	0,66	0,47	1,09	0,33	0,50	0,12	2,35	0,97	
Februari	-0,31	0,39	0,75	0,52	0,26	0,08	0,15	0,23	
Maret	-0,66	0,31	0,30	0,18	0,21	0,08	-0,13	-0,02	

Sumber : Indikator Ekonomi

Kemudian, inflasi *month to month* di tahun 2016 selalu berada di bawah angka satu persen. Di sisi lain, deflasi juga terjadi pada bulan Februari, April, dan Agustus 2016. Deflasi tertinggi terjadi pada April 2016, yaitu mencapai 0,45 persen. Penurunan harga energi menjadi salah satu penyebab deflasi April 2016. Secara khusus, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menjadi penyumbang terbesar terjadinya deflasi pada April 2016 dan mengalami deflasi sebesar 1,6 persen. Hal ini berkaitan dengan kebijakan

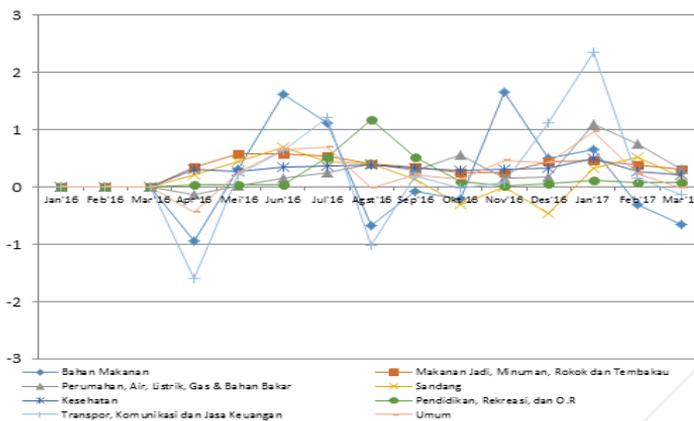
pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar. Penurunan harga BBM tersebut mendorong menurunnya tarif angkutan umum. Tidak hanya itu, tarif angkutan udara juga mengalami penurunan yang merupakan dampak lanjutan dari penurunan tarif batas atas dan batas bawah yang diputuskan oleh pemerintah (Suryowati, 2016).

Di awal tahun 2017, inflasi *month to month* terus mengalami penurunan. Pada Januari 2017, inflasi hampir menyentuh angka satu persen yaitu 0,97 persen. Namun demikian, pada Maret 2017 terjadi deflasi sebesar 0,02 persen dengan kelompok bahan makanan sebagai penyumbang deflasi terbesar di bulan tersebut.

Berdasarkan kelompok barang kebutuhan, hanya ada satu kelompok yang mengalami deflasi di sepanjang tahun 2016 yaitu transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dengan deflasi sebesar 0,72 persen. Fakta tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya meski angka deflasi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini didorong oleh rendahnya harga minyak dunia yang berdampak pada penurunan tarif angkutan. Di sisi lain, kelompok barang kebutuhan yang mengalami inflasi tertinggi sepanjang tahun 2016 adalah kelompok bahan makanan dengan inflasi sebesar 5,69 persen. Cabai merah merupakan komoditas yang menyumbang inflasi terbesar sepanjang tahun 2016.

Untuk inflasi *month to month*, sebagian besar kelompok barang kebutuhan mengalami inflasi dari Januari 2016 hingga Maret 2017. Akan tetapi, terdapat dua kelompok barang yang terlihat jelas mengalami deflasi selama kurun waktu tersebut, yaitu bahan makanan dan transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Perkembangan laju inflasi kedua kelompok barang tersebut juga sangat bergejolak. Kelompok sandang juga sempat mengalami deflasi di akhir tahun 2016 dengan besaran deflasi yang tidak mencapai satu persen.

Gambar 5.1
Laju Inflasi Indonesia, Tahun 2016–2017



Sumber: Indikator Ekonomi

Pergejolakan laju inflasi kelompok bahan makanan ini cukup tinggi. Pada April 2016, kelompok bahan makanan mengalami deflasi 0,94 persen, kemudian mengalami inflasi cukup tinggi pada Juni 2016, lalu kembali mengalami deflasi pada Agustus 2016, dan mengalami inflasi tinggi hingga 1,66 persen pada November 2016. Hal ini dikarenakan harga bahan makanan yang sangat berfluktuasi. Harga bahan makanan ini sangat bergantung pada pasokannya, dimana pasokan juga bergantung pada berbagai macam faktor, seperti kondisi cuaca, musim, gangguan hama, dan distribusi.

Kemudian, kelompok kedua dengan laju inflasi yang cukup fluktuatif adalah transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Selama Januari hingga April 2016, kelompok ini mengalami deflasi, lalu mengalami inflasi pada Juli 2016, kemudian mengalami deflasi pada Agustus 2016, dan mengalami inflasi kembali pada Desember 2016. Bahkan inflasi kelompok ini cukup tinggi pada Januari 2017, yaitu mencapai 2,35 persen. Inflasi yang tinggi ini disebabkan oleh kenaikan biaya perpanjangan dan administrasi STNK, BPKB, dan lainnya (Chandra, 2017).

Kedua kelompok barang kebutuhan tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dan Bank Indonesia dalam menentukan langkah strategis untuk menjaga inflasi di 2017 mendatang. Untuk menjaga inflasi bahan makanan, pemangku kebijakan akan melakukan penguatan kerja sama daerah, mendorong diversifikasi pada konsumsi pangan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas, dan memperbaiki pola tanam pangan. Kemudian untuk menjaga inflasi transportasi, pembuat kebijakan akan mengendalikan dampak lanjutan dari penyesuaian kebijakan pengendalian tarif angkutan umum. Selain itu, BI dan pemerintah akan melakukan sekuensi kebijakan *administered price*, salah satunya dengan implementasi konversi beberapa jenis subsidi langsung menjadi transfer tunai.

Jika dilihat dari sisi andil atau sumbangannya, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan kelompok dengan penyumbang

Tabel 5.3. Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional (persen), Tahun 2015 dan 2016

Kelompok	Sumbangan terhadap Inflasi	
	2015	2016
Umum	3,35	3,02
Bahan Makanan	0,98	1,21
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	1,07	0,91
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,85	0,46
Sandang	0,23	0,2
Kesehatan	0,24	0,17
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	0,32	0,21
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	-0,34	-0,14

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS)

deflasi di tahun 2016. Fakta tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya. Namun, kelompok dengan penyumbang inflasi terbesar bergeser dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau di tahun 2015 menjadi kelompok bahan makanan di tahun 2016. Kelompok bahan makanan menyumbang inflasi sebesar 1,21 persen. Hal ini didorong oleh pergejolan kenaikan harga bahan pangan yang terjadi di masyarakat.

Penyumbang inflasi terbesar kedua adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Kelompok tersebut memiliki andil sebesar 0,91 persen dan cukup menonjol jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. Inflasi pada kelompok ini disebabkan adanya kenaikan cukai rokok secara berkala yang diterapkan sejak awal tahun 2016 (*Koran-jakarta.com*, 2016).

Perkembangan inflasi yang bergejolak menunjukkan bahwa para pemangku kebijakan harus berusaha mengendalikan inflasi. Pengendalian inflasi ini tidak bisa terlepas dari koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kelembagaan terkait inflasi, seperti Tim Pengendali Inflasi dan Kelompok kerja Nasional TPID harus terus diperkuat.

Inflasi Kota-Kota di Indonesia

Inflasi nasional disumbang oleh inflasi daerah. Kondisi inflasi di daerah sangat bervariasi. Oleh karena itu, untuk mencapai target pada inflasi nasional dibutuhkan penanganan khusus di tingkat daerah, sinergi antardaerah, dan koordinasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat. Peran pengendalian stabilitas harga di tingkat daerah salah satunya berada pada Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pemerintah daerah dan TPID telah berhasil dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Selama tahun 2013-2016, pengendalian inflasi daerah sangat signifikan, yaitu turun hingga empat angka. Sepanjang tahun 2013, inflasi di 66 kota berada pada kisaran 4,63 persen hingga 12,02 persen. Kemudian, sepanjang tahun 2016 inflasi di 82 kota telah berhasil ditekan dan berada pada rentang 0,35 persen hingga 7,78 persen.

Pada tahun 2016, terdapat 47 kota dengan inflasi di bawah angka nasional dan sisanya sebanyak 35 kota dengan angka inflasi sama atau di atas inflasi nasional. Jumlah tersebut lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana terdapat 46 kota dengan inflasi di bawah inflasi nasional. Inflasi daerah telah berhasil ditekan dan dikendalikan setiap tahunnya. Namun demikian, kesenjangan angka inflasi daerah ini harus terus diperhatikan demi tercapainya target inflasi nasional.

Inflasi di sebagian besar kota di wilayah timur mengalami penurunan. Pada tahun 2015, inflasi kota-kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara berada pada rentang 4-9 persen. Akan tetapi, di tahun 2016, inflasi kota-kota tersebut berhasil ditekan hingga rentang 1-4 persen. Begitu pula untuk kota-kota di

Provinsi Papua dan Papua Barat, inflasi kota tersebut berada pada kisaran 2-7 persen (tahun 2015) dan menurun menjadi kisaran 0-6 persen (tahun 2016).

Tabel 5.4. Laju Inflasi 82 Kota Di Indonesia¹ (2012=100), Tahun 2013–2016

Kota	2013	2014	2015	2016
1. Meulaboh	-	8,20	0,58	3,77
2. Banda Aceh	6,39	7,83	1,27	3,13
3. Lhokseumawe	8,27	8,53	2,44	5,60
4. Sibolga	10,08	8,36	3,34	7,39
5. Pematang Siantar	12,02	7,94	3,36	4,76
6. Medan	10,09	8,24	3,32	6,60
7. Padang Sidempuan	7,82	7,38	1,66	4,28
8. Padang	10,87	11,90	0,85	5,02
9. Bukittinggi	-	9,24	2,79	3,93
10. Tembilahan	-	10,06	2,06	2,58
11. Pekanbaru	8,83	8,53	2,71	4,19
12. Dumai	8,60	8,53	2,63	3,98
13. Bungo	-	8,99	1,29	3,11
14. Jambi	8,74	8,72	1,37	4,54
15. Palembang	7,04	8,38	3,05	3,68
16. Lubuklinggau		9,34	3,47	2,74
17. Bengkulu	9,94	10,85	3,25	5,00
18. Bandar Lampung	7,56	8,36	4,65	2,75
19. Metro	-	6,50	2,67	2,92
20. Tanjung Pandan	-	13,14	0,88	4,92
21. Pangkal Pinang	8,71	6,81	4,66	7,78
22. Batam	7,81	7,61	4,73	3,61
23. Tanjung Pinang	10,09	7,49	2,46	3,06
24. Jakarta	8,00	8,95	3,30	2,37
25. Bogor	8,55	6,83	2,70	3,60
26. Sukabumi	8,03	8,38	2,20	2,57
27. Bandung	7,97	7,76	3,93	2,93
28. Cirebon	7,86	7,08	1,56	1,87
29. Bekasi	9,46	7,68	2,22	2,47
30. Depok	10,97	7,49	1,87	2,60
31. Tasikmalaya	6,89	8,09	3,53	2,75
32. Cilacap	-	8,19	2,63	2,77
33. Purwokerto	8,50	7,09	2,52	2,42
34. Kudus	-	8,59	3,28	2,32
35. Surakarta	8,32	8,01	2,56	2,15
36. Semarang	8,19	8,53	2,56	2,32
37. Tegal	5,80	7,40	3,95	2,71
38. Yogyakarta	7,32	6,59	3,09	2,29
39. Jember	7,21	7,52	2,31	1,93
40. Banyuwangi	-	6,59	2,15	1,91
41. Sumenep	6,62	8,04	2,62	2,19
42. Kediri	8,05	7,49	1,71	1,30
43. Malang	7,92	8,14	3,32	2,62

Lanjutan Tabel 5.4.

Kota	2013	2014	2015	2016
44. Probolinggo	7,98	6,79	2,11	1,53
45. Madiun	7,52	7,40	2,75	2,25
46. Surabaya	7,52	7,90	3,43	3,22
47. Tangerang	10,02	10,03	4,28	2,65
48. Cilegon	7,98	9,93	3,94	4,22
49. Serang	9,16	11,27	4,67	3,26
50. Singaraja	-	10,32	2,97	4,57
51. Denpasar	7,35	8,03	2,70	2,94
52. Mataram	9,27	7,18	3,25	2,47
53. Bima	10,42	7,37	4,11	3,11
54. Maumere	6,24	4,00	3,89	3,62
55. Kupang	8,84	8,32	5,07	2,31
56. Pontianak	9,48	9,38	6,17	3,88
57. Singkawang	6,15	9,66	4,00	2,58
58. Sampit	7,25	7,90	5,72	2,46
59. Palangka Raya	6,45	6,63	4,20	1,91
60. Tanjung	-	8,80	6,69	2,18
61. Banjarmasin	6,98	7,16	5,03	3,68
62. Balikpapan	8,56	7,43	6,26	4,13
63. Samarinda	10,37	6,74	4,24	2,83
64. Tarakan	10,35	11,91	3,42	4,31
65. Manado	8,12	9,67	5,56	0,35
66. Palu	7,57	8,85	4,17	1,49
67. Bulukumba	-	9,45	2,17	1,48
68. Watampone	6,86	8,22	0,97	1,50
69. Makassar	6,24	8,51	5,18	3,18
70. Parepare	6,31	9,38	1,58	2,11
71. Palopo	5,25	8,95	3,38	2,74
72. Kendari	5,92	7,40	1,64	3,07
73. Bau-Bau	-	11,37	3,95	1,71
74. Gorontalo	5,84	6,14	4,30	1,30
75. Mamuju	5,91	7,88	5,07	2,23
76. Ambon	8,81	6,81	5,92	3,28
77. Tual	-	11,48	8,58	2,97
78. Ternate	9,78	9,34	4,52	1,91
79. Manokwari	4,63	5,70	2,77	5,75
80. Sorong	7,93	6,83	6,17	2,95
81. Merauke	-	12,31	5,76	0,82
82. Jayapura	8,27	7,98	2,79	4,13
Indonesia	8,38	8,36	3,35	3,02

Catatan : ¹ Sebelum tahun 2014 merupakan laju inflasi 66 kota (2007=100)

Sumber : Indikator Ekonomi

Berdasarkan dari agregat inflasi di Kota Ambon dan Kota Tual, inflasi di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2016 adalah 3,26 persen. Angka tersebut merupakan angka terendah secara rata-rata historis dalam lima tahun terakhir. Inflasi Maluku ini juga terjaga di bawah sasaran pengendalian inflasi Maluku tahun 2016 sebesar 5,5±1 persen. Terkendalinya laju inflasi Maluku pada tingkat

yang rendah dan stabil ini didorong oleh perbaikan struktural ekonomi Maluku, yaitu peningkatan produksi dan efisiensi distribusi. Upaya tersebut terus dilakukan melalui sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

Dari sisi peningkatan produksi, Maluku terus mengurangi ketergantungan dari daerah lain. Upaya yang dilakukan antara lain perluasan areal tanaman pangan dan penyaluran berbagai bantuan sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan, serta pembinaan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) hortikultura di Pulau Ambon. Dari sisi distribusi, BULOG dan dinas terkait terus menjaga kecukupan stok dan keterjangkauan harga. Pemerintah dan Bank Indonesia juga melakukan transparansi pembentukan harga melalui implementasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) online yang dapat diakses masyarakat (*Tribun-Maluku.com*, 2017).

Bahkan angka inflasi daerah terendah juga berada pada kota di wilayah timur, yaitu Kota Manado. Angka inflasi Manado terus menurun sejak tahun 2014 yang sebesar 9,67 persen menjadi 5,56 persen (2015), kemudian menurun lagi hingga 0,35 persen (2016). Hal ini disebabkan adanya pergerakan harga bahan pangan seiring dengan membaiknya pasokan. Dengan demikian, harga bahan pokok strategis cenderung stabil di sepanjang tahun. Terkendalinya inflasi Manado ini juga didukung dari semakin baiknya sinergi dan upaya pengendalian inflasi oleh TPID (*TribunManado.co.id*, 2017).

Kemudian, inflasi di kota-kota Pulau Jawa sepanjang tahun 2016 cenderung stabil jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar angka inflasinya berada di bawah angka inflasi nasional. Kota dengan inflasi tertinggi di Pulau Jawa adalah Kota Cilegon (4,22 persen), sedangkan kota dengan inflasi terendah di Pulau Jawa adalah Kota Kediri (1,30 persen).

Sementara itu, inflasi di kota-kota Pulau Sumatera sepanjang tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Dari 23 kota di Pulau Sumatera, 19 kota diantaranya memiliki inflasi di atas inflasi nasional. Tidak hanya itu, tiga kota dengan inflasi tertinggi juga berada pada pulau ini, yaitu Pangkal Pinang (7,78 persen), Sibolga (7,39 persen), dan Medan (6,60 persen). Angka inflasi Pangkal Pinang yang sebesar dua kali lipat dari angka inflasi nasional disebabkan oleh distribusi pasokan bahan kebutuhan pokok yang terhambat karena faktor cuaca dan jalur distribusi yang cukup panjang. Di sisi lain, produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menekan angka inflasi, TPID melalui Bank Indonesia mulai menjalankan program pembudidayaan komoditas hortikultura untuk terwujudnya kemandirian pangan di daerah (*KOMPAS.com*, 2016).

Pengaruh Inflasi terhadap Perekonomian

Kestabilan ekonomi merupakan salah satu hal yang menjadi konsentrasi suatu negara. Harga barang dan jasa yang naik atau turun secara signifikan dan terus menerus akan mengganggu kestabilan perekonomian suatu negara.

Kebijakan ekonomi makro memiliki peran penuh dalam menjaga kestabilan perekonomian negara.

Kondisi perekonomian dengan kenaikan harga-harga umum secara cepat dan terus menerus disebut bahwa perekonomian mengalami inflasi. Kenaikan harga secara umum ini bersumber dari terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Inflasi juga adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dari barang-barang. Dari situ dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan harga yang terjadi akibat inflasi didorong adanya ketidakseimbangan antara arus barang dan arus uang, antara produksi dan pembelanjaan masyarakat, atau antara *supply* dan *demand*.

Ketidakseimbangan antara arus uang dan barang berasal dari empat faktor, yaitu produksi, permintaan, harga, dan uang. Dari segi produksi, terganggunya jumlah produksi sebagai *supply* akan menyebabkan naiknya harga umum. Di sisi lain, kelebihan permintaan masyarakat sebagai akibat dari perubahan pola konsumsi akan membuat barang semakin langka dan harga pun melonjak. Kemudian, dari sisi harga, seperti kenaikan upah/gaji dan kenaikan harga-harga bahan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah juga mendorong naiknya harga umum. Yang terakhir, dari segi uang, jumlah uang yang beredar yang meningkat akibat tidak terserap oleh usaha dan masyarakat juga menyebabkan inflasi (Gilarso, 2004).

Berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu inflasi karena dorongan biaya (*cost-push inflation*) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (*demand-pull inflation*). *Cost-push inflation* disebabkan karena kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan kurs valuta asing, atau kenaikan upah, sehingga kondisi tersebut mendorong industri untuk menaikkan harga guna menutupi naiknya biaya produksi. Sementara itu, *demand-pull inflation* disebabkan oleh permintaan masyarakat yang tinggi atau meningkat terlalu cepat sehingga industri tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Permintaan yang berlebih tersebut akan mengganggu keseimbangan antara *supply* dan *demand* serta mengakibatkan harga-harga umum naik.

Inflasi memberikan dampak di segala bidang, salah satunya perekonomian. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif atau negatif, tergantung dari besaran inflasi yang dialami suatu negara. Inflasi yang lunak (*mild inflation*) atau berada pada kisaran 2-5 persen masih dapat dikatakan stabil dan justru dapat mendorong dunia usaha untuk mengembangkan bisnisnya sehingga lapangan kerja baru akan tercipta. Sementara itu, laju inflasi yang lebih dari 5 persen atau di atas 10 persen (*double digit*) akan berdampak buruk bagi keberlangsungan perekonomian dan pembangunan negara tersebut.

Menurut Chand (2016), terdapat tiga efek utama dari inflasi terhadap pembangunan negara, yaitu efek terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan, efek terhadap produksi, dan efek lainnya (investasi, nilai tukar mata uang, kondisi moneter, dan sosial). Pertama, perubahan nilai riil dari pendapatan/upah/gaji yang disebabkan inflasi akan menyebabkan pergeseran distribusi pendapatan.

Masyarakat dengan pendapatan yang menengah dan minim akan lebih tidak mampu memenuhi kebutuhannya dikarenakan harga komoditas yang terus meningkat. Hal tersebut juga menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Sementara itu, para pengusaha cenderung memperoleh pendapatan yang meningkat selama kenaikan harga. Kedua, inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya jumlah produksi, karena harga yang naik membuat turunnya daya beli masyarakat dan menurunnya permintaan produk di pasaran. Ketiga, inflasi juga mendorong menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat. Kemudian, harga yang naik cepat akan menurunkan nilai tukar mata uangnya.

Tidak hanya itu, inflasi juga berefek pada kehidupan sosial masyarakat. Inflasi menyebabkan melebarnya jurang antara orang kaya dan orang miskin. Inflasi yang tinggi juga bisa mendorong terjadinya kriminalitas. Tergier dengan keuntungan, orang akan melakukan pembunuhan, pemalsuan, spekulasi, dan lain-lain. Korupsi juga akan cenderung meningkat. Kondisi itu semua tentunya akan mengurangi efisiensi ekonomi.

Oleh karena itu, tingkat inflasi harus dikendalikan dan dipantau. Langkah-langkah yang diambil dalam pengendalian inflasi bergantung pada faktor penyebabnya. Inflasi akibat meningkatnya permintaan dapat dikontrol melalui kebijakan Bank Sentral dengan mengurangi jumlah peredaran uang atau meningkatkan suku bunga. Kemudian inflasi akibat dorongan harga dapat dikendalikan dengan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Tingkat Inflasi Negara ASEAN

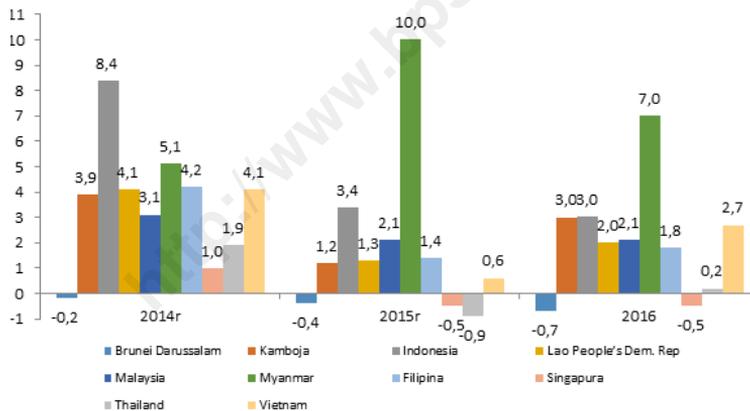
Inflasi memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terlalu rendah akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi yang terlalu tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat yang berujung pada lambatnya perputaran perekonomian. Oleh karena itu, inflasi telah menjadi perhatian di seluruh negara demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara tersebut.

Tingkat inflasi di negara ASEAN sangat beragam. Menurut IMF, dalam perkembangannya, laju inflasi di negara ASEAN selama tahun 2014-2016 pun cukup fluktuatif. Negara ASEAN yang cenderung dapat menekan dan mengendalikan inflasi antara lain Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2016 terdapat dua negara yang berada pada tingkat deflasi, yaitu Brunei Darussalam dan Singapura. Deflasi yang terjadi di Brunei Darussalam terus mengalami peningkatan, yaitu dari 0,2 persen di tahun 2014, lalu meningkat menjadi 0,4 persen di tahun 2015, dan meningkat lagi menjadi 0,7 persen di tahun 2016. Untuk deflasi di Singapura, besaran deflasi masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 0,5 persen. Berbeda dengan Thailand, yang dapat mengendalikan tingkat inflasi, dari yang semula mengalami deflasi tertinggi di ASEAN pada tahun 2015, yaitu sebesar 0,9 persen menjadi mengalami inflasi 0,2 persen (2016).

Deflasi ini dapat mengancam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Para investor tidak akan tertarik untuk berinvestasi. Selain itu, para pengusaha juga cenderung tidak akan melakukan pengembangan usahanya. Hal ini disebabkan karena rendahnya insentif yang diperoleh. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tidak terciptanya lapangan kerja yang baru.

Kemudian, negara ASEAN dengan tingkat inflasi tertinggi adalah Myanmar. Meski demikian, Myanmar perlahan sudah mulai mengendalikan tingkat inflasinya ditunjukkan dengan turunnya laju inflasi dari 10,0 persen (2015) menjadi 7,0 persen (2016). Kemudian negara dengan tingkat inflasi tertinggi kedua adalah Indonesia dan Kamboja, dengan tingkat inflasi yang sama yaitu 3,0 persen. Inflasi di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah siap bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, tingkat inflasi Kamboja meningkat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2015. Walaupun begitu, angka inflasi tersebut masih dalam kendali pemerintah Kamboja ditunjukkan dengan pertumbuhan PDB di negara tersebut yang sebesar 7,2 persen di tahun 2016 (*Trading Economics, 2016*).

Gambar 5.2
Laju Inflasi Negara ASEAN (persen), Tahun 2014–2016



Sumber : *World Economic Outlook* (IMF) dan Indikator Ekonomi

<http://www.bps.go.id>

EKSPOR, IMPOR DAN NERACA PERDAGANGAN INDONESIA

6



Meskipun nilai ekspor **menurun** di 3 tahun terakhir, namun neraca perdagangan luar negeri terus **meningkat**

<http://www.bps.go.id>

Hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) menunjukkan terdapat 26,71 juta usaha/perusahaan non pertanian di Indonesia. Dari seluruh usaha yang ada, sebanyak 12,33 juta usaha/perusahaan atau 46,17 persen bergerak pada lapangan usaha perdagangan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di lapangan usaha perdagangan tercatat sebanyak 22,37 juta tenaga kerja atau 31,81 persen dari seluruh tenaga kerja non pertanian di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan merupakan sektor unggulan dan potensial untuk dikembangkan karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan diharapkan akan menghasilkan output yang besar pula.

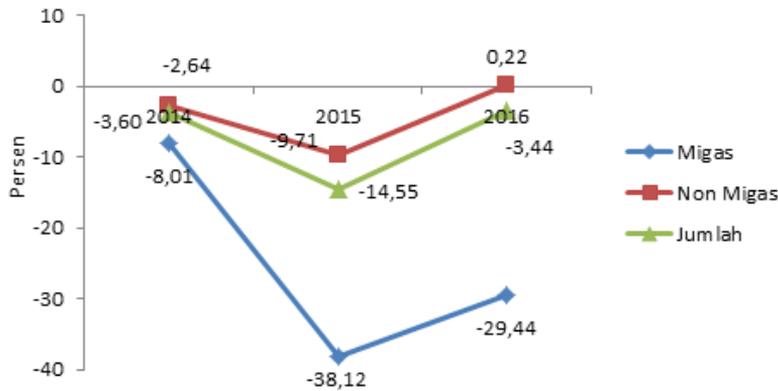
Setiap negara tidak pernah terlepas dari aktivitas perdagangan, yang terbagi menjadi perdagangan domestik dan perdagangan luar negeri atau ekspor impor. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan setiap negara untuk mencukupi barang dan jasa bagi penduduknya yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Dari kegiatan ekspor impor, negara akan memperoleh pendapatan negara melalui devisa. Ekspor dan impor merupakan indikator penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui peningkatan ekspor dan menekan impor, pendapatan negara akan bertambah dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap negara akan berusaha mengembangkan nilai ekspor dan komoditi unggulannya. Hal ini harus disadari karena dunia saat ini tengah bergerak ke arah industrialisasi, salah satunya ditandai dengan substitusi impor ke promosi ekspor.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi (5,1 persen) lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia (3,5 persen) pada tahun 2017. Momentum ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja ekspor impor. Harga komoditi dan perekonomian global yang semakin membaik diharapkan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan di Indonesia. Sayangnya, permintaan global tahun 2016 masih lemah ditandai dengan penurunan ekspor dan impor. Perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang Indonesia dianggap sebagai penyebab penurunan ini. Kinerja ekspor dan impor yang terus merosot merupakan hal yang perlu diwaspadai karena dapat mencerminkan turunnya daya saing ekspor Indonesia.

Perkembangan Ekspor

Nilai ekspor Indonesia masih menunjukkan tren pertumbuhan yang negatif dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir seperti ditunjukkan pada Gambar 6.1. Meskipun demikian, tahun 2016 tampak adanya perbaikan nilai ekspor dengan penurunan yang tidak setajam tahun 2015. Bahkan ekspor non migas berhasil tumbuh positif setelah dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan negatif. Tahun 2016, pemerintah menargetkan ekspor tumbuh 9 persen. Nyatanya BPS mencatat, tahun 2016 nilai ekspor Indonesia menurun 3,44 persen dibandingkan tahun 2015. Hal ini dipengaruhi penurunan nilai ekspor migas yang cukup tinggi sebesar 29,44 persen. Kepala BPS, Suhariyanto (2017) menyebutkan ekspor yang masih lemah pada tahun 2016 disebabkan

Gambar 6.1
Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia, Tahun 2014–2016



melemahnya beberapa harga komoditi seperti kopi, lada hitam, lada putih, kakao, rumput laut, dan tanaman obat. Disamping itu, ekonomi global yang belum pulih menyebabkan penurunan permintaan ekspor terhadap produk Indonesia.

Komoditi unggulan ekspor Indonesia masih berada di sektor non migas. Pada Tabel 6.1 tampak bahwa nilai ekspor non migas menembus angka US\$ 132,08 miliar atau 90,97 persen dari nilai ekspor seluruhnya. Nilai ekspor non migas juga berhasil tumbuh 0,22 persen pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, setelah terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah hendaknya cermat dalam mengamati komoditi ekspor mana yang naik dan komoditi mana yang turun sehingga dapat dilakukan diversifikasi produk ekspor dan membuka peluang pasar untuk negara lain. Tahun 2016, tercatat adanya peningkatan kinerja ekspor non migas yang ditopang oleh peningkatan ekspor sektor industri. Pemerintah dapat menjadikan ini sebagai

Tabel 6.1. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Migas dan Non-Migas (juta US\$), Tahun 2014–2017

Ekspor	2014	2015	2016	2017 (Jan - Maret)
Migas	30 018,8	18 574,4	13 105,5	3 980,9
Minyak Mentah	9 215,0	6 479,4	5 196,7	1 401,0
Hasil Minyak	3 623,5	1 754,2	872,0	438,7
Gas	17 180,3	10 340,8	7 036,8	2 141,2
Non Migas	145 961,2	131 791,9	132 080,7	36 713,1
Sektor Pertanian	3 373,2 ^r	3 726,5	3 407,0	854,4
Sektor Industri	119 753,8 ^r	108 603,5	110 504,1	30 625,1
Sektor Tambang dan Lainnya	22 834,2 ^r	19 461,9	18 169,6	5 233,6
Jumlah	175 980,0	150 366,3	145 186,2	40 694,0

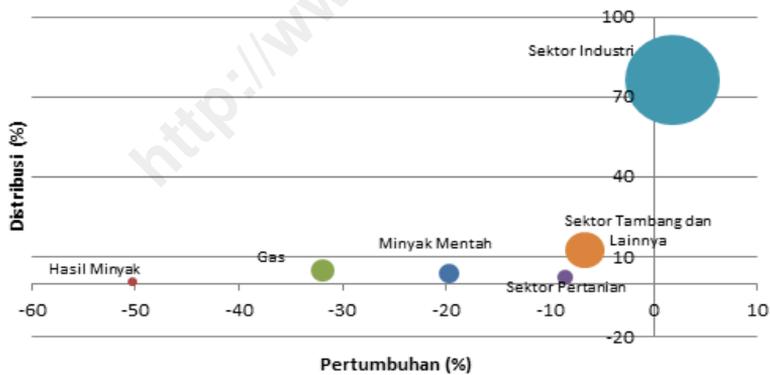
Sumber : Indikator Ekonomi Maret 2017, BPS

peluang untuk meningkatkan produksi pertanian dan menyalurkannya sebagai bahan baku industri pengolahan.

Pada triwulan pertama 2017, BPS mencatat nilai ekspor Indonesia sebesar US\$ 40,69 miliar atau meningkat 21,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ekspor ini didukung oleh peningkatan ekspor migas sebesar 15,03 persen dan ekspor non migas sebesar 21,80 persen. Penguatan kinerja ekspor yang cukup signifikan pada triwulan pertama 2017 menunjukkan mulai pulihnya permintaan ekspor Indonesia di pasar dunia.

Sektor industri berperan paling dominan dibandingkan sektor lain dari keseluruhan ekspor di Indonesia. Gambar 6.2 menunjukkan bahwa hanya ekspor sektor industri yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2016. Ekspor sektor industri juga memiliki kontribusi terbesar (76,11 persen) dengan nilai US\$ 110,50 miliar dari total ekspor. Berbanding terbalik dengan sektor industri, ekspor hasil minyak menunjukkan performa yang kurang menggembirakan, dengan pertumbuhan negatif (-50,29 persen) dan kontribusi yang paling kecil dibandingkan sektor lainnya (0,60 persen) dengan nilai US\$ 0,87 miliar.

Gambar 6.2
Pertumbuhan, Distribusi, dan Nilai Ekspor Indonesia
Menurut Sektor Komoditas, Tahun 2016



1. Ekspor Komoditi Penting

Ekspor non migas memegang peranan penting dalam kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Ekspor non migas dibagi menjadi tiga, yaitu ekspor hasil pertanian, ekspor hasil industri, dan ekspor hasil tambang (tidak termasuk migas). Tahun 2016, tercatat ekspor hasil pertanian menurun 8,57 persen dibandingkan tahun 2015. Komoditi penting ekspor hasil pertanian dengan nilai ekspor tertinggi yaitu kopi; tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah; serta buah-buahan. Sebagian besar komoditi ekspor hasil pertanian mengalami penurunan nilai ekspor pada tahun 2016, sementara komoditi

buah-buahan menunjukkan peningkatan positif. Pada triwulan pertama 2017, ekspor hasil pertanian tercatat mengalami peningkatan 22,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ekspor hasil industri menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2016 yang ditopang dari peningkatan komoditi ekspor alat-alat listrik dan hasil industri lainnya. Pada triwulan pertama 2017, ekspor hasil industri berhasil tumbuh 20,14 persen dibandingkan triwulan pertama 2016. Komoditi minyak kelapa sawit merupakan komoditi unggulan ekspor hasil industri, selain pakaian jadi dari tekstil dan hasil industri logam dasar. Pertumbuhan ekspor non migas, khususnya industri, dapat mendongkrak pertumbuhan ekspor secara keseluruhan. Oleh sebab itu, komoditi ekspor non migas harus semakin gencar dipromosikan, salah satunya melalui pameran di negara mitra dagang.

Ekspor hasil tambang (tidak termasuk migas) tercatat mengalami penurunan 6,64 persen pada tahun 2016. Hal ini dipengaruhi penurunan komoditi ekspor batu bara dan hasil tambang lainnya, sementara komoditi ekspor bijih tembaga mengalami peningkatan 29,38 persen. Pada triwulan pertama 2017, ekspor hasil tambang tercatat meningkat 32,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini mungkin dipengaruhi pelanggaran ekspor mineral mentah yang dimulai Januari 2017 sehingga mendorong pertumbuhan ekspor barang tambang yang sebelumnya anjlok sepanjang tahun 2016. Sebelumnya pemerintah menetapkan larangan ekspor mineral mentah tanpa melalui proses pengolahan dan pemurnian. Dengan adanya relaksasi ini, bijih tembaga merupakan mineral yang akhirnya diperbolehkan untuk diekspor tanpa pengolahan dan pemurnian terlebih dahulu.

Tabel 6.2. Nilai Ekspor Komoditi Penting Indonesia (juta US\$), Tahun 2014–2017

Komoditas Ekspor	2014	2015	2016	2017 (Jan- Maret)
Ekspor Hasil Pertanian	3 373,2	3 726,5	3 407,0	854,4
Kopi	1 030,6	1 189,7	997,5	274,0
Tanaman Obat, Aromatik, dan Rempah-rempah	492,3	516,5	498,5	151,8
Buah-buahan	184,7	248,9	343,9	74,8
Biji Kakao	196,5	114,8	79,7	5,9
Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap	149,5	171,8	128,1	28,1
Hasil Pertanian Lainnya	1 319,6	1 484,8	1 359,3	319,8
Ekspor Hasil Industri	119 753,8	108 603,5	110 504,1	30 625,1
Minyak Kelapa Sawit	18 615,0	16 427,0	15 955,6	5 504,0
Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	6 256,0	6 410,9	6 136,2	1 705,6
Alat-alat Listrik	5 013,1	4 510,4	4 615,0	1 216,6
Karet Remah	4 595,1	3 564,1	3 177,1	1 436,5
Hasil Industri Logam Dasar	6 500,9	6 075,5	5 988,9	1 532,8
Hasil Industri Lainnya	78 773,7	71 615,6	74 631,4	19 229,6
Ekspor Hasil Tambang (Tidak Termasuk Migas)	22 827,7	19 456,0	18 164,7	5 232,2
Batu Bara	18 697,7	14 717,3	12 794,2	3 385,0
Bijih Tembaga	1 683,6	3 277,2	4 240,0	444,6
Hasil Tambang Lainnya	2 446,4	1 461,5	1 130,5	1 402,6

Sumber : Indikator Ekonomi April 2017, BPS

Tabel 6.3. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), Tahun 2014–2017

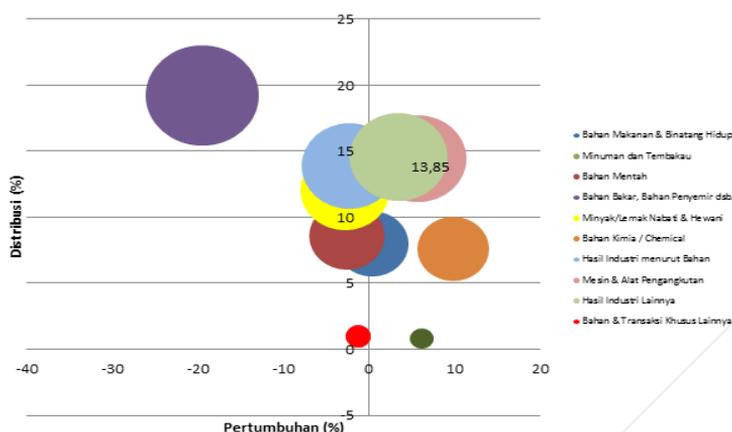
SITC	Golongan Barang	2014	2015	2016	2017 (Jan-Maret)
0	Bahan Makanan & Binatang Hidup	12 070	11 601	11 639	2 951
1	Minuman dan Tembakau	1 101	1 075	1 141	308
2	Bahan Mentah	13 073	12 766	12 436	3 507
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb.	51 070	34 649	27 887	8 942
4	Minyak/Lemak Nabati & Hewani	20 205	18 006	17 490	6 006
5	Bahan Kimia / Chemical	13 164	10 047	11 035	3 234
6	Hasil Industri menurut Bahan	22 684	20 586	20 115	5 015
7	Mesin & Alat Pengangkutan	21 779	19 801	20 929	5 138
8	Hasil Industri Lainnya	19 302	20 429	21 128	5 267
9	Bahan & Transaksi Khusus Lainnya	1 532	1 406	1 387	327
Jumlah		175 980	150 366	145 186	40 695

Sumber : Indikator Ekonomi April 2017, BPS

Ditinjau menurut kode SITC, golongan bahan bakar, bahan penyemir, dsb (SITC 3) merupakan komoditi ekspor dengan nilai tertinggi tahun 2016, disusul komoditi hasil industri lainnya (SITC 8) dan komoditi mesin dan alat pengangkutan (SITC 7). Seiring penurunan total nilai ekspor selama periode 2014-2016, sebagian golongan barang menurut kode SITC untuk ekspor juga mengalami penurunan, kecuali golongan hasil industri lainnya (SITC 8). Pada triwulan pertama 2017, kode SITC 0 sampai SITC 7 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan hanya kode SITC 8 dan SITC 9 yang mengalami pertumbuhan negatif.

Gambar 6.3 menunjukkan bahwa terdapat empat golongan barang dengan pertumbuhan positif pada tahun 2016, yaitu SITC 0, SITC 1, SITC 5, SITC 7, dan SITC 8. Golongan barang bahan bakar, bahan penyemir, dan sebagainya (SITC 3)

Gambar 6.3
Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang, Tahun 2016



merupakan komoditi unggulan dengan kontribusi nilai ekspor tertinggi (19,21 persen). Namun golongan barang ini juga merupakan komoditi dengan penurunan paling signifikan (-19,52 persen) diantara komoditi lainnya pada tahun 2016.

2. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Pasar ekspor Indonesia mengalami perluasan di kawasan ASEAN, Tiongkok, dan Eropa pada tahun 2016. Hal ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor ke negara-negara tersebut. Negara tujuan ekspor dengan peningkatan terbesar tahun 2016 yaitu Tiongkok dengan penambahan nilai ekspor sebesar US\$ 1,74 miliar atau 11,59 persen. Tiongkok, Amerika Serikat

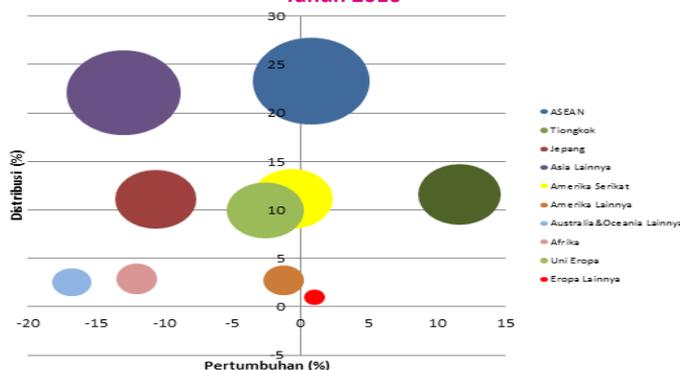
**Tabel 6.4. Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$),
Tahun 2014–2017**

Negara Tujuan	2014	2015	2016	2017 (Jan-Maret)
1. ASEAN	39 668,1 (22,54)	33 577,0 (22,33)	33 830,3 (22,30)	9 229,3 (22,68)
(Malaysia)	9 730,0 (5,53)	7 630,9 (5,07)	7 121,7 (4,91)	2 144,6 (5,27)
(Thailand)	5 783,1 (3,29)	5 507,3 (3,66)	5 394,1 (3,72)	1 571,5 (3,86)
(Singapura)	16 728,3 (9,51)	12 632,6 (8,40)	11 861,0 (8,17)	2 975,8 (7,31)
2. Tiongkok	17 605,9 (10,00)	15 046,4 (10,01)	16 790,8 (11,57)	5 712,4 (12,71)
3. Jepang	23 117,5 (13,14)	18 020,9 (11,98)	16 098,6 (11,09)	4 154,1 (10,21)
4. Asia Lainnya	43 880,6 (24,93)	36 903,2 (24,54)	32 095,2 (22,11)	9 479,3 (23,29)
5. Amerika Serikat	16 530,1 (9,39)	16 240,8 (10,80)	16 141,4 (11,12)	4 421,7 (10,87)
6. Amerika Lainnya	4 505,5 (2,56)	3 996,6 (2,66)	3 946,8 (2,72)	1 107,5 (2,72)
7. Australia & Oceania Lainnya	5 738,4 (3,26)	4 433,5 (2,95)	3 687,6 (2,54)	776,8 (1,91)
8. Afrika	6 262,3 (3,56)	4 759,4 (3,17)	4 186,1 (2,88)	1 341,7 (3,30)
9. Uni Eropa	16 918,9 (9,61)	14 842,5 (9,87)	14 454,8 (9,96)	4 115,6 (10,11)
(Inggris)	1 658,6 (0,94)	1 527,1 (1,02)	1 590,4 (1,10)	349,6 (0,86)
(Belanda)	3 984,6 (2,26)	3 442,2 (2,29)	3 254,9 (2,24)	1 042,6 (2,56)
(Jerman)	2 821,6 (1,60)	2 664,2 (1,77)	2 638,7 (1,82)	640,8 (1,57)
10. Eropa Lainnya	1 752,7 (1,00)	2 546,0 (1,69)	3 954,5 (2,72)	895,8 (2,20)
Jumlah	175 980,0 (100,00)	150 366,3 (100,00)	146 186,2 (100,00)	40 694,0 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap total

Sumber : Indikator Ekonomi April 2017, BPS

Gambar 6.4
Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan, Tahun 2016



dan Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia. Oleh sebab itu, perkembangan ekonomi pada ketiga negara ini sangat memengaruhi kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Pada triwulan pertama 2017, kontribusi ketiga negara ini mencapai sepertiga dari nilai ekspor keseluruhan.

Gambar 6.4 menunjukkan bahwa negara tujuan ekspor dengan pertumbuhan nilai positif hanya terjadi di negara ASEAN, Tiongkok, dan Eropa lainnya. Pertumbuhan ekspor tertinggi dicapai Tiongkok, sementara kontribusi nilai terbesar disumbang dari negara-negara di kawasan ASEAN. Sayangnya, Jepang sebagai salah satu negara tujuan utama ekspor mengalami penurunan nilai cukup signifikan (10,67 persen) pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Begitu pula Australia dan Oceania lainnya yang menunjukkan penurunan nilai ekspor paling tinggi (-16,82 persen) dibandingkan kawasan lainnya.

Ekspor ditargetkan tumbuh pada posisi 7,3 persen tahun 2017. Target ini dicanangkan seiring prediksi pemulihan kondisi perekonomian mitra dagang, seperti Tiongkok. Sudah menjadi tugas bersama bagi pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholder terkait untuk terus mengembangkan ekspor melalui beberapa strategi, seperti mempertahankan pasar utama, mengembangkan pasar baru, dan membentuk perwakilan perdagangan luar negeri, seperti pameran, membuka toko di luar negeri, dan sebagainya agar produk Indonesia lebih dikenal dan dapat diserap pasar Asia dan pasar dunia. Dengan demikian, kinerja ekspor diharapkan dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada tahun 2017.

Perkembangan Impor

Sejalan dengan ekspor, kinerja impor juga mengalami penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. BPS mencatat, tahun 2016 nilai impor Indonesia menurun 4,93 persen dibandingkan tahun 2015. Turunnya nilai impor Indonesia menunjukkan hal yang positif, berarti Indonesia sudah dapat menekan atau mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.

Tabel 6.5. Nilai Impor Indonesia Menurut Migas dan Non-Migas (juta US\$),
Tahun 2014–2017

Ekspor	2014	2015	2016	2017 (Jan - Maret)
Migas	45 961,9	24 613,2	18 739,3	6 578,2
Non Migas	132 216,9	118 081,2	116 913,6	30 027,7
Jumlah	178 178,8	142 694,4	135 652,9	36 605,9

Sumber : Indikator Ekonomi April 2017, BPS

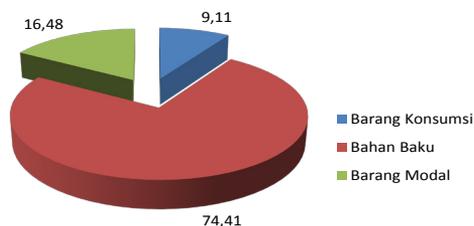
Tahun 2014 nilai impor migas mencapai US\$ 45,96 miliar, dan di tahun 2016 nilai impor migas dapat ditekan hingga hanya mencapai US\$ 18,74 miliar saja. Sejalan dengan impor migas, impor nonmigas juga dapat dikendalikan oleh pemerintah. Nilai impor nonmigas tahun 2014 mencapai US\$ 132,22 miliar, dan 2 tahun kemudian tepatnya di tahun 2016 nilai impor nonmigas hanya mencapai US\$ 116,91 miliar.

Pada triwulan pertama 2017, nilai impor Indonesia tumbuh 14,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan impor migas sebesar 68,81 persen dan impor non migas sebesar 7,06 persen. Tahun 2017, impor dibatasi tumbuh maksimum 5 persen. Impor sebaiknya diarahkan untuk industri yang beorientasi ekspor, bukan untuk industri yang memasarkan produknya di dalam negeri.

1. Impor Menurut Golongan Barang Ekonomi

Ditinjau dari golongan barang ekonomi pada tahun 2016, impor Indonesia didominasi oleh bahan baku dengan kontribusi sebesar 74,41 persen, disusul barang modal sebesar 16,48 persen, dan barang konsumsi 9,10 persen. Pada triwulan pertama 2017, nilai impor bahan baku sudah mencapai 27,73 miliar US\$, tingginya impor bahan baku dinilai dapat menggerakkan sektor industri tanah air.

Gambar 6.5
Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi, Tahun 2016



Tabel 6.6. Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi (Juta US\$), Tahun 2014-2017

Impor	2014	2015	2016	2017 (Jan-Maret)
Barang Konsumsi	12 667,2	10 876,5	12 351,7	3 249,7
Bahan Baku	136 208,6	107 080,7	100 945,7	27 729,8
Barang Modal	29 303,0	24 737,3	22 355,4	5 626,3
Jumlah	178 178,8	142 694,4	135 652,8	36 605,8

Sumber : Indikator Ekonomi April 2017, BPS

Tahun 2016, impor bahan baku menurun 5,73 persen dan impor barang modal menurun 9,63 persen. Sementara itu, impor barang konsumsi menunjukkan peningkatan dengan tumbuh 13,56 persen. Pada triwulan pertama 2017, impor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dengan ditopang peningkatan impor barang konsumsi 3,07 persen, impor bahan baku 18,06 persen, dan impor barang modal 6,09 persen. Menteri Perdagangan menyebutkan bahwa peningkatan impor bahan baku dan barang modal di awal tahun 2017 merupakan sinyal positif adanya pertumbuhan industri domestik. Sementara itu, peningkatan impor barang konsumsi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama bulan puasa hingga lebaran (Kementerian Perdagangan, 2017).

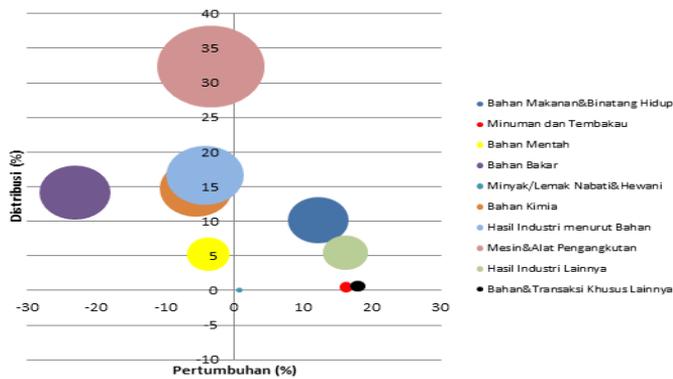
Golongan barang mesin dan alat pengangkutan (SITC 7) masih mendominasi impor Indonesia tahun 2016 dengan kontribusi 32,36 persen, disusul golongan hasil industri menurut bahan (SITC 6) sebesar 16,69 persen, dan golongan bahan kimia (SITC 5) sebesar 14,73 persen. Pada triwulan pertama 2017, golongan barang dengan kode SITC 0, SITC 1, dan SITC 4 mengalami penurunan dibandingkan triwulan pertama 2016, sementara golongan barang lainnya mengalami pertumbuhan positif. Penurunan paling signifikan terjadi pada golongan barang minuman dan tembakau (SITC 1) sebesar 20,81 persen pada triwulan pertama 2017 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 6.7. Nilai Impor Indonesia (CIF) Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), Tahun 2014–2017

SITC	Golongan Barang	2014	2015	2016	2017 (Jan-Maret)
0	Bahan Makanan & Binatang Hidup	14 588	12 245	13 746	3 232
1	Minuman dan Tembakau	789	562	653	179
2	Bahan Mentah	9 191	7 357	7 078	2 078
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb.	43 928	25 027	19 241	6 843
4	Minyak/Lemak Nabati & Hewani	170	152	153	39
5	Bahan Kimia	23 728	21 170	19 987	5 511
6	Hasil Industri menurut Bahan	26 867	23 646	22 642	5 606
7	Mesin & Alat Pengangkutan	52 157	45 439	43 901	11 189
8	Hasil Industri Lainnya	6 736	6 388	7 419	1 803
9	Bahan & Transaksi Khusus Lainnya	26	705	833	163
	Jumlah	178 179	142 693	135 653	36 606

Sumber : Indikator Ekonomi April 2017, BPS

Gambar 6.6
Pertumbuhan, Distribusi, dan Nilai Impor Indonesia
Menurut Golongan Barang, Tahun 2016



Gambar 6.6 menunjukkan bahwa terdapat lima kelompok barang dengan pertumbuhan nilai impor positif pada tahun 2016, yaitu SITC 0, SITC 1, SITC 4, SITC 8, dan SITC 9. Pertumbuhan nilai impor tertinggi terjadi pada golongan bahan dan transaksi khusus lainnya (SITC 9) sebesar 17,95 persen, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada golongan bahan bakar (SITC 3) yang menurun hingga 23,12 persen. Kontribusi nilai impor paling tinggi ditopang oleh impor golongan mesin dan alat pengangkutan (SITC 7) dengan nilai US\$ 43,90 miliar. Namun golongan barang ini mengalami penurunan tahun 2016 sebesar 3,39 persen dibandingkan tahun 2015.

2. Impor Menurut Negara Asal

Melalui perdagangan bebas, pasar dunia semakin terbuka untuk mensuplai barang dan jasa ke negara lain, termasuk Indonesia. Tak mengherankan jika produk impor asal Negeri Tirai Bambu (Tiongkok) makin mendominasi pasar tanah air. Kontribusi nilai impor dari Tiongkok terus menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2014. Tiongkok menjadi negara pengimpor utama barang dan jasa ke Indonesia dengan nilai mencapai US\$ 30,80 miliar atau hampir seperempat dari total nilai impor pada tahun 2016. Angka ini hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2016 sebesar US\$ 16,79 miliar. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok. Pada triwulan pertama 2017, nilai impor dari hampir seluruh negara pengimpor mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

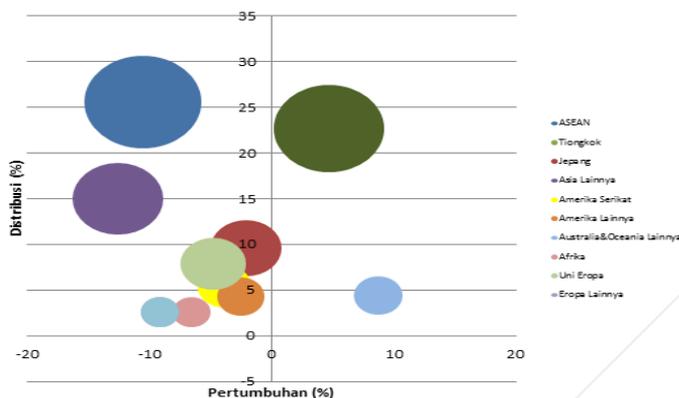
Gambar 6.7 menunjukkan bahwa dari pertumbuhan positif nilai impor pada tahun 2016 berasal dari negara Tiongkok dan Australia dan Oceania lainnya, sementara nilai impor negara lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Nilai impor dari Tiongkok meningkat 4,72 persen dibandingkan tahun 2015, sementara nilai impor dari Australia dan Oceania meningkat 8,71 persen. Produk dari negara ASEAN dan Tiongkok menyumbang kontribusi nilai

Tabel 6.8. Impor Indonesia Menurut Negara Asal (juta US\$),
Tahun 2014–2017

Negara Asal	2014	2015	2016	2017 (Jan-Maret)
1. ASEAN	50 726,0 (28,47)	38 794,9 ⁹ (27,19)	34 697,0 (25,58)	9 907,9 (27,07)
(Thailand)	9 781,0 (5,49)	11 181,3 (7,84)	8 666,9 (6,39)	2 161,8 (5,91)
(Malaysia)	10 855,4 (6,09)	8 105,7 (5,68)	7 200,9 (5,31)	2 281,3 (6,23)
(Singapura)	25 185,7 (14,14)	16 602,2 (11,63)	14 548,3 (10,72)	4 375,5 (11,95)
2. Tiongkok	30 624,3 (17,19)	29 410,9 (20,61)	30 800,5 (22,71)	7 781,6 (21,26)
3. Jepang	17 007,6 (9,55)	13 263,5 (9,30)	12 984,8 (9,57)	3 418,8 (9,34)
4. Asia Lainnya	34 863,1 (19,57)	23 300,9 ⁹ (16,33)	20 357,0 (15,01)	6 360,2 (17,37)
5. Amerika Serikat	8 170,1 (4,59)	7 593,2 (5,32)	7 298,4 (5,38)	1 872,8 (5,12)
6. Amerika Lainnya	6 647,6 (3,73)	5 943,5 ⁵ (4,17)	5 793,9 (4,27)	1 125,3 (3,07)
7. Australia & Oceania	6 522,3 (3,66)	5 480,2 ² (3,84)	5 957,7 (4,39)	1 599,4 (4,37)
8. Afrika	5 469,0 (3,07)	3 739,2 (2,62)	3 492,9 (2,57)	859,4 (2,35)
9. Uni Eropa	12 691,4 (7,12)	11 282,8 (7,91)	10 742,2 (7,92)	2 891,6 (7,90)
(Jerman)	4 091,2 (2,30)	3 471,7 (2,43)	3 159,5 (2,33)	751,6 (2,05)
(Italia)	1 722,9 (0,97)	1 368,2 (0,96)	1 387,2 (1,02)	788,9 (2,16)
(Perancis)	1 332,5 (0,75)	1 336,9 (0,94)	1 362,0 (1,00)	418,4 (1,14)
10. Eropa Lainnya	5 457,5 (3,06)	3 885,7 ⁷ (2,72)	3 528,6 (2,60)	788,9 (2,16)
Jumlah	178 178,8 (100,00)	142 694,8 (100,00)	135 653,0 (100,00)	36 605,9 (100,00)

Sumber : Indikator Ekonomi April 2017, BPS

Gambar 6.7
Pertumbuhan, Distribusi, dan Nilai Impor Indonesia
Menurut Negara Asal, Tahun 2016



impur terbesar terhadap impur keseluruhan, dengan nilai hampir setengah dari keseluruhan nilai impur Indonesia.

Neraca Perdagangan Indonesia

Tren yang positif pada neraca perdagangan Indonesia diharapkan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Sejak tahun 2015, neraca perdagangan telah mencapai titik balik dengan menghasilkan surplus US\$ 7,67 miliar. Kondisi ini terus diikuti dengan performa menggembirakan dari kinerja perdagangan tahun 2016 yang mencatatkan surplus US\$ 9,53 miliar. Surplus ini merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir, dengan ditopang dari surplus non migas sebesar US\$ 15,17 miliar dikurangi defisit perdagangan migas sebesar US\$ 5,63 miliar. Capaian ini sejalan dengan program pemerintah terkait peningkatan ekspor nasional.

Pada triwulan pertama 2017, kinerja perdagangan berhasil membukukan surplus sebesar US\$ 4,09 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama pada triwulan pertama 2016 sebesar US\$ 1,66 miliar. Surplus yang cukup tinggi di awal 2017 ditopang dari surplus perdagangan non migas sebesar US\$ 6,68 miliar dikurangi defisit perdagangan migas sebesar US\$ 2,60 miliar. Neraca perdagangan yang tumbuh positif merupakan modal potensial yang akan mendorong kinerja ekonomi nasional. Melalui peningkatan komoditi ekspor yang bernilai tambah tinggi, permintaan ekspor akan semakin meningkat dan pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian nasional.

**Tabel 6.9. Neraca Perdagangan Indonesia (juta US\$),
Tahun 2014–2017**

Tahun	Migas	Non Migas	Jumlah
2014	- 15 943,1	13 744,3	- 2 198,8
2015	- 6 038,8	13 710,7	7 671,9
2016	- 5 633,8	15 167,1	9 533,3
2017 (Jan-Maret)	- 2 597,3	6 685,4	4 088,1

Sumber : Indikator Ekonomi Maret 2017, BPS

KINERJA SEKTOR MONETER 7



<http://www.bps.go.id>

Kinerja sistem keuangan Indonesia menunjukkan kinerja yang baik di tengah gejolak perekonomian global yang masih berisiko. Perekonomian Indonesia mampu bertahan dan tetap menunjukkan perkembangan yang baik, salah satunya dalam hal moneter. Kinerja yang baik tersebut tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia dalam melakukan penguatan kebijakan sistem moneter seperti pengelolaan uang rupiah, pengendalian nilai tukar dan suku bunga pada tahun 2016.

Kinerja pengelolaan uang rupiah menunjukkan adanya peningkatan pada 2016. Hal tersebut salah satunya tercermin dari perkembangan indikator uang kartal yang diedarkan (UYD). Posisi UYD pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp 612,5 triliun atau tumbuh 4,38 persen jika dibandingkan dengan posisi akhir 2015 sebesar Rp 586,8 triliun. Meskipun demikian, pertumbuhan uang kartal yang diedarkan (UYD) pada 2016 mengalami perlambatan dibandingkan dengan 2015 yang mencapai 11,02 persen. Perlambatan ini didorong oleh aktivitas perekonomian yang masih dalam masa konsolidasi.

Dari sisi kondisi nilai tukar rupiah, pada tahun 2016 rupiah mengalami penguatan terhadap dolar disertai volatilitas yang menurun. Penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh adanya perbaikan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mengalami surplus. Surplusnya NPI akibat dari menurunnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal finansial akibat dari meningkatnya aliran modal asing yang masuk ke Indonesia. Kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian domestik turut mempengaruhi meningkatnya aliran masuk modal asing. Selain itu, berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia mengenai nilai tukar yang turut andil dalam penguatan nilai tukar rupiah.

Selanjutnya, perkembangan suku bunga domestik masih sesuai dengan arah kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Pada awal tahun 2016 Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau *BI Rate* di level 7,25 persen atau lebih rendah dari *BI rate* di akhir tahun 2015 yang sebesar 7,50 persen. Hal ini ditetapkan karena untuk menjaga target inflasi di kisaran 4,0 persen plus minus 1,0 persen pada 2016. Sepanjang tahun 2016 *BI Rate* telah mengalami penurunan sebanyak enam kali karena masih terbukanya ruang pelonggaran kebijakan moneter dan semakin meredanya ketidakpastian pasar. Selain itu, penurunan suku bunga dilakukan pada kondisi stabilitas makroekonomi yang terus berlanjut, tercermin dari inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Bank Indonesia juga meyakini bahwa pelonggaran kebijakan moneter akan memperkuat kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan stimulus pertumbuhan dan percepatan implementasi reformasi struktural.

Perkembangan Uang Beredar (M2)

Salah satu instrumen untuk mengetahui kinerja sektor keuangan yaitu dengan instrumen jumlah uang yang beredar (M2) di masyarakat.

Jumlah uang yang beredar (M2) selalu menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Hingga akhir periode tahun 2016 peningkatan laju uang beredar di masyarakat tercatat sebesar 10,03 persen (*yoy*) atau naik sebesar Rp 456,2 triliun. Peningkatan jumlah uang yang beredar di akhir tahun 2016 bila dibandingkan pada akhir tahun 2015 disebabkan karena meningkatnya jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Tercatat jumlah uang kartal yang beredar mengalami peningkatan sebesar Rp 38,6 triliun (8,22 persen), uang giral bertambah sebesar Rp 143,6 triliun (24,51 persen), serta uang kuasi bertambah sebesar Rp 273,8 triliun (7,87 persen).

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar M2 pada akhir tahun 2015 sebesar Rp 4.548,8 triliun dan pada akhir tahun 2016 sebesar Rp 5.005,0 triliun. Bila dilihat menurut komponen uang beredar, uang kuasi merupakan penyumbang uang beredar yang paling besar. Pada tahun 2015 jumlah uang yang beredar disumbang oleh uang kuasi sebesar 76,50 persen, diikuti uang giral sebesar 12,88 persen, uang kartal sebesar 10,32 persen serta surat berharga lainnya sebesar 0,29 persen. Sementara itu, pada tahun 2016 jumlah uang yang beredar disumbang oleh uang kuasi sebesar 75,00 persen, diikuti uang giral sebesar 14,58 persen, uang kartal sebesar 10,15 persen serta surat berharga lainnya sebesar 0,27 persen.

Sepanjang tahun 2016 jumlah uang beredar tertinggi tercatat berada pada bulan Desember karena adanya permintaan dari masyarakat yang meningkat terkait perayaan hari besar keagamaan atau natal dan libur akhir tahun (menyambut tahun baru). Bila dilihat dari pertumbuhan *yoy*-nya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi akhir November. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa jumlah uang yang beredar pada Desember 2016 tumbuh 10,03 persen (*yoy*), lebih rendah dari November 2016 yang tumbuh sebesar 9,35 persen (*yoy*). Pertumbuhan uang beredar (*yoy*) pada bulan Desember dan November merupakan pertumbuhan tertinggi selama tahun 2016.

Bila dilihat dari pertumbuhan *month on month (mom)* setiap bulannya terlihat bahwa pertumbuhan uang beredar tertinggi dicapai pada bulan Desember 2016 yaitu tumbuh sebesar 2,80 persen dibanding bulan November 2016 atau naik sebesar Rp 136,3 triliun. Posisi berikutnya dicapai pada bulan Juni 2016 dengan pertumbuhan sebesar 2,67 persen (*mom*) dibanding bulan Mei 2016 atau naik sebesar Rp 123,4 triliun. Kenaikan pada bulan Juni ini disebabkan karena permintaan uang kartal yang meningkat terkait hari raya idul fitri dan persiapan masuk sekolah.

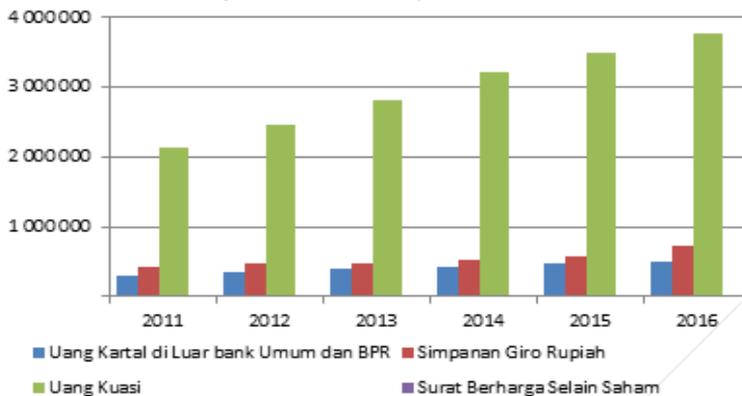
Sementara itu komponen uang M1 yang beredar pada akhir tahun 2016 mencatatkan sebesar Rp 1.055,4 triliun atau mempunyai kontribusi sebesar 24,73 persen dari total uang M2 yang beredar. Jumlah M1 yang beredar pada akhir tahun ini meningkat sebesar 17,32 persen bila dibandingkan dengan akhir tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang kartal di luar bank umum dan BPR serta simpanan giro rupiah. Bila dilihat berdasarkan setiap bulannya, catatan tertinggi untuk jumlah uang M1 yang beredar juga berada pada bulan Desember 2016.

Beralih ke peredaran uang kartal di luar bank umum dan BPR, jumlah uang kartal yang beredar mencapai angka tertingginya berada di bulan Juni 2016. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan uang untuk memenuhi kebutuhan liburan sekolah, kegiatan di bulan Ramadhan dan hari raya idul fitri serta persiapan anak sekolah memasuki tahun ajaran baru. Tercatat jumlah uang kartal di luar bank umum dan BPR yang beredar sebesar Rp 511,3 triliun atau meningkat sekitar 24,79 persen (*yoy*) dibandingkan dengan jumlah uang kartal di bulan Juni 2015. Ini juga merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2016. Memasuki akhir tahun 2016, di bulan Desember 2016 jumlah uang kartal mencatatkan tertinggi kedua karena terkait meningkatnya permintaan akan uang untuk kebutuhan liburan tahun baru dan perayaan natal. Tercatat uang kartal yang beredar mencapai Rp 508,1 triliun atau meningkat sebesar 8,22 persen (*yoy*).

Salah satu komponen M1 lainnya yaitu uang giral juga mencatatkan jumlah tertinggi pada akhir tahun. Jumlah uang giral pun mempunyai nilai yang lebih besar daripada uang kartal. Hingga akhir tahun 2016 komposisi uang giral tercatat sebesar 58,94 persen terhadap jumlah M1. Berdasarkan Table 7.1 hingga akhir tahun 2016 jumlah uang giral sebesar Rp 729,5 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 3,35 persen bila dibandingkan dengan bulan November 2016 yang sebesar Rp 705,9 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, uang giral mencatatkan pertumbuhan sebesar 24,51 persen, dimana jumlah uang giral pada Desember 2015 sebesar Rp 585,9 triliun.

Berlanjut ke komponen uang kuasi yang merupakan komponen M2 yang paling besar diantara komponen lainnya. Uang kuasi mempunyai kontribusi terhadap jumlah M2 sebesar 75,00 persen pada akhir tahun 2016 dengan jumlah uang kuasi sebesar Rp 3.753,8 triliun. Jumlah ini juga merupakan yang tertinggi sepanjang tahun 2016. Bila dilihat dari pertumbuhannya, uang kuasi mengalami pertumbuhan sebesar 2,24 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan tumbuh sebesar 7,87 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015.

Gambar 7.1
Jumlah Uang Beredar (miliar rupiah), Tahun 2011–2016



Sumber: SEKI Edisi April 2017, Bank Indonesia (data diolah)

Memasuki awal tahun 2017, jumlah uang beredar M2 mengalami penurunan karena menurunnya permintaan uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Penurunan M2 pada akhir Januari 2017 sebesar 1,36 persen karena disebabkan oleh menurunnya permintaan uang kartal sebesar 7,45 persen, uang giral turun sebesar 1,13 persen dan uang kuasi turun sebesar 0,60 persen. Tercatat jumlah uang beredar M2 pada awal tahun sebesar Rp 4.936,9 triliun sedangkan uang kartal sebesar Rp 470,2 triliun, uang giral sebesar Rp 721,2 triliun, serta uang kuasi sebesar Rp 3.731,1 triliun. Hingga akhir triwulan I atau Maret 2017 jumlah uang M1 dan M2 menunjukkan peningkatan.

**Tabel 7.1 Perkembangan Uang Beredar (Miliar Rupiah),
Tahun 2015–Maret 2017¹**

Akhir Periode	M2					Jumlah
	M1		Uang Kuasi	Surat Berharga Selain Saham	Jumlah	
	Uang Kartal	Uang Giral				
2015						
Januari	391 256	526 824	918 079	3 233 881	22 866	4 174 826
Februari	387 889	539 958	927 848	3 278 945	11 331	4 218 123
Maret	382 005	575 576	957 580	3 275 499	13 282	4 246 361
April	395 687	563 690	959 376	3 302 204	14 131	4 275 711
Mei	406 499	574 416	980 915	3 293 147	14 307	4 288 369
Juni	409 713	629 805	1 039 518	3 305 641	13 643	4 358 802
Juli	431 460	600 446	1 031 906	3 325 908	15 394	4 373 208
Agustus	423 101	603 222	1 026 323	3 362 148	15 615	4 404 085
September	428 860	634 178	1 063 039	3 426 343	19 221	4 508 603
Oktober	435 065	601 246	1 036 311	3 391 260	15 508	4 443 078
November	437 756	613 435	1 051 191	3 386 209	14 925	4 452 325
Desember	469 379	585 906	1 055 285	3 478 059	13 399	4 546 743
2016						
Januari	439 872	606 385	1 046 257	3 436 492	15 613	4 498 361
Februari	422 149	613 401	1 035 551	3 473 033	13 368	4 521 951
Maret	420 214	644 524	1 064 738	3 483 694	13 441	4 561 873
April	435 296	653 916	1 089 212	3 479 713	12 952	4 581 878
Mei	440 660	678 108	1 118 768	3 483 442	11 852	4 614 062
Juni	511 295	673 034	1 184 329	3 539 326	13 796	4 737 451
Juli	474 246	670 255	1 144 501	3 573 997	11 882	4 730 380
Agustus	466 502	669 047	1 135 548	3 596 408	14 070	4 746 027
September	469 542	656 504	1 126 046	3 599 248	12 336	4 737 631
Oktober	467 318	675 468	1 142 786	3 622 679	13 014	4 778 479
November	476 850	705 880	1 182 730	3 671 427	14 494	4 868 651
Desember	508 124	729 519	1 237 643	3 753 809	13 525	5 004 977
2017						
Januari	470 250	721 249	1 191 500	3 731 093	14 289	4 936 882
Februari	462 413	733 624	1 196 037	3 732 699	14 184	4 942 920
Maret	468 847	746 915	1 215 762	3 783 327	17 894	5 016 983

Catatan :¹ Akhir periode

Sumber : SEKI Edisi April 2017, Bank Indonesia

Bila dibandingkan secara *yoy*, pertumbuhan M2 pada Maret 2017 meningkat sebesar 9,98 persen, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2017 yang sebesar 9,31 persen (*yoy*).

Pertumbuhan M2 yang meningkat bersumber dari komponen uang kuasi dan surat berharga selain saham. Faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan M2 yaitu akselerasi pertumbuhan kredit perbankan terutama dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Akselerasi pertumbuhan kredit perbankan telah sejalan dengan masih berlanjutnya proses transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang mendorong penyaluran kredit seiring dengan meningkatnya dana pihak ketiga masyarakat.

Peredaran Uang Primer dan Komponennya

Peredaran uang primer di masyarakat sangat tergantung pada permintaan uang dari masyarakat. Biasanya permintaan uang akan meningkat apabila konsumsi masyarakat meningkat pada waktu-waktu tertentu. Seperti contoh pada saat liburan anak sekolah, perayaan kegiatan keagamaan selama Ramadhan, pelaksanaan hari raya idul fitri dan hari natal, serta kegiatan awal masuk tahun ajaran baru di dunia pendidikan. Selain kondisi tersebut, faktor membaiknya perekonomian domestik juga turut mendorong peningkatan uang beredar. Selain itu, faktor kenaikan harga-harga kebutuhan pokok juga turut andil dalam peningkatan uang beredar.

Menurut Bank Indonesia, uang primer merupakan kewajiban bank sentral (BI) kepada bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), dan sektor swasta (tidak termasuk Pemerintah Pusat dan luar negeri). Komponen uang primer terdiri dari uang kartal yang diedarkan (berupa uang kartal di bank umum dan BPR serta kas bank umum dan BPR), saldo giro positif bank umum pada BI (dalam rupiah), giro sektor swasta di BI, serta SBI dan SDBI yang digunakan dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum sekunder.

Pada akhir tahun 2016 peredaran uang primer yang dikeluarkan oleh BI mencapai Rp 989,6 triliun atau meningkat sebesar 4,61 persen dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2015. Jumlah peredaran uang primer sepanjang tahun 2016 mencatatkan pencapaian tertinggi pada bulan Juni 2016 yaitu sebesar Rp 990,2 triliun. Jumlah uang primer yang beredar tersebut didominasi oleh uang kartal yang diedarkan sekitar 51,63 persen senilai Rp 511,3 triliun dan giro bank umum sekitar 26,89 persen senilai Rp 266,3 triliun.

Salah satu komponen uang primer yaitu uang kartal yang dikenal di masyarakat dengan uang kertas maupun uang logam. Masyarakat menggunakan uang kartal ini sebagai alat pembayaran untuk membeli kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan uang kartal cenderung mengalami penurunan di awal tahun dan meningkat kembali pada pertengahan tahun. Namun, kembali mengalami penurunan selepas pertengahan tahun dan meningkat kembali menjelang akhir tahun. Hal ini tidak terlepas dari permintaan uang kartal yang dipengaruhi oleh aktivitas kegiatan masyarakat di momen-momen tertentu sepanjang tahun yang berbeda-beda setiap bulannya.

**Tabel 7.2 Perkembangan Uang Primer (Miliar Rupiah),
Tahun 2015–Maret 2017¹**

Akhir Periode	Uang Kartal Yang Diedarkan		Giro Bank	Giro Perusahaan & Perorangan	SBI	Jumlah
	Uang Kartal	Kas Bank				
2015						
Januari	391 256	80 648	292 186	880	89 541	854 510
Februari	387 889	77 721	285 038	244	100 241	851 132
Maret	382 005	80 608	285 976	32	99 720	848 341
April	395 687	84 584	294 991	90	98 357	873 709
Mei	406 499	78 347	293 744	95	96 606	875 290
Juni	409 713	96 874	292 691	139	82 650	882 067
Juli	431 460	107 706	293 972	770	74 621	908 529
Agustus	423 101	90 910	298 519	758	74 718	888 006
September	428 860	89 440	302 056	65	66 076	886 497
Oktober	435 065	85 105	303 373	703	66 943	891 189
November	437 756	88 847	317 666	32	50 870	895 171
Desember	469 534	117 228	308 756	366	50 031	945 916
2016						
Januari	439 872	88 662	285 308	35	70 911	884 788
Februari	422 149	89 060	289 438	36	79 393	880 077
Maret	420 214	88 336	254 276	100	101 323	864 248
April	435 296	84 724	261 227	873	103 914	886 034
Mei	440 660	94 055	260 686	875	102 492	898 768
Juni	511 295	130 704	266 293	870	81 080	990 242
Juli	474 246	93 648	268 048	1 539	93 890	931 372
Agustus	466 502	89 020	274 325	37	93 180	923 063
September	469 542	93 665	277 646	62	89 868	930 783
Oktober	467 318	91 731	270 776	748	99 965	930 538
November	476 850	90 545	277 418	107	98 512	943 432
Desember	508 124	104 421	288 824	361	87 835	989 565
2017						
Januari	470 250	94 046	284 260	31	102 405	950 992
Februari	462 413	90 765	286 147	23	109 049	948 398
Maret	468 847	93 901	290 976	30	111 725	965 480

Catatan :¹ Akhir periode

Sumber : Sumber : SEKI Edisi April 2017, Bank Indonesia

Bila dilihat berdasarkan setiap triwulan, pada Triwulan I 2016 jumlah uang kartal yang diedarkan cenderung menurun pada awal triwulan hingga akhir triwulan. Penurunan tersebut merupakan dampak dari terjadinya arus balik uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia setelah periode Natal dan liburan akhir tahun 2015. Pada bulan Januari 2016 jumlah uang kartal yang diedarkan tercatat sebesar Rp 439,9 triliun atau menurun sebesar 6,32 persen bila dibandingkan dengan bulan Desember 2015. Penurunan terus berlanjut pada bulan Februari dan Maret 2016. Hingga akhir bulan Maret 2016 uang kartal yang diedarkan tercatat sebesar Rp 420,2 triliun.

Penurunan jumlah uang kartal yang diedarkan pada triwulan I 2016 tidak berlanjut ke triwulan berikutnya. Justru memasuki triwulan II 2016, jumlah uang kartal yang diedarkan mengalami peningkatan. Hingga akhir Juni 2016 uang kartal yang diedarkan meningkat sebesar 21,67 persen dibanding akhir Maret 2016 menjadi sebesar Rp 511,3 triliun. Peningkatan pertumbuhan

ini seiring dengan meningkatnya permintaan uang tunai dari sektor konsumsi rumah tangga karena memasuki periode bulan Ramadhan 2016, persiapan hari raya idul fitri, serta liburan anak sekolah.

Memasuki triwulan III 2015 pasca Ramadhan 2016, peredaran uang kartal mengalami penurunan. Pada bulan Juli uang kartal yang diedarkan sebesar Rp 474,2 triliun atau turun sebesar 7,25 persen dibanding bulan sebelumnya dan menurun hingga akhir September menjadi sebesar Rp 469,5 triliun. Penurunan ini masih berlanjut pada awal triwulan IV tahun 2016. Pada awal triwulan IV 2016, masih menurun dibanding bulan sebelumnya. Namun, penurunan tidak berlanjut memasuki November dan Desember 2016. Peningkatan mulai terjadi pada bulan November yaitu uang kartal yang diedarkan sebesar Rp 476,8 triliun atau meningkat sebesar 2,04 persen bila dibandingkan dengan akhir Oktober 2016. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga akhir Desember 2016 yaitu tercatat sebesar Rp 508,1 triliun atau meningkat sebesar 6,56 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan jumlah uang kartal yang diedarkan di akhir tahun 2016 tersebut disebabkan oleh meningkatnya kegiatan ekonomi pada periode Natal dan liburan akhir tahun 2016.

Salah satu komponen pendukung uang primer lainnya adalah Giro Perusahaan dan Perorangan. Sepanjang tahun 2016, perkembangan Giro Perusahaan dan perorangan cenderung berfluktuatif. Pada akhir bulan Juli 2016, tercatat Giro Perusahaan dan Perorangan sebesar Rp 1.539 miliar yang merupakan perolehan nilai tertinggi sepanjang tahun 2016, kemudian menurun drastis di bulan Juli dan perlahan sedikit meningkat hingga akhir tahun 2016. Begitu pula yang terjadi dengan SBI yang berfluktuasi sepanjang tahun 2016. Jumlah SBI tertinggi berada di bulan April 2016 sebesar Rp 103,9 triliun dan cenderung menurun hingga Desember 2016.

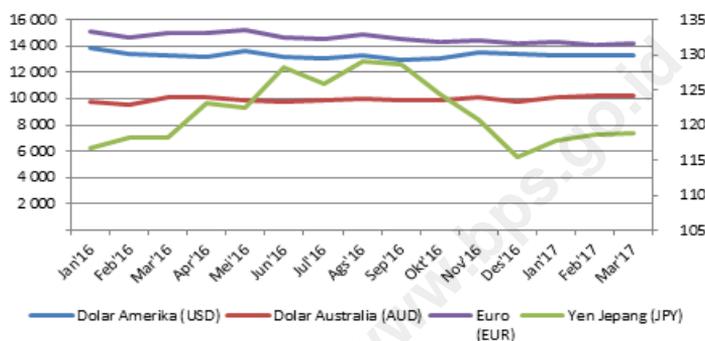
Memasuki awal tahun 2017, perkembangan pengelolaan uang rupiah secara umum masih tetap menunjukkan searah dengan perkembangan ekonomi domestik, khususnya dari sektor konsumsi rumah tangga. Pada akhir Triwulan I posisi uang kartal yang diedarkan sebesar Rp 468,8 triliun, atau tumbuh 11,57 persen (yoy), tetapi mengalami penurunan sebesar 7,73 persen dibandingkan pada akhir Triwulan IV 2016 yaitu bulan Desember 2016. Penurunan ini disebabkan karena dampak dari terjadinya arus balik uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia setelah periode Natal dan liburan akhir tahun 2016. Sementara itu, nilai Giro Perusahaan dan Perorangan pada awal tahun mengalami penurunan yang sangat drastis bila dibandingkan pada bulan Desember 2016. Pada akhir Januari 2017 tercatat nilai giro perusahaan dan perorangan hanya sebesar Rp 31 miliar atau jauh dari kondisi akhir Desember 2016 yang sebesar Rp 361 miliar.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Secara umum, kondisi nilai tukar rupiah pada tahun 2016 menunjukkan adanya penguatan dengan disertai menurunnya volatilitas nilai tukar. Secara

rata-rata, nilai tukar rupiah menguat 0,65 persen dari Rp 13.392 per US\$ pada tahun 2015 menjadi Rp 13.305 per US\$ pada tahun 2016. Secara *point-to-point*, nilai tukar rupiah juga menunjukkan adanya penguatan sebesar 2,60 persen (*yoy*) dari Rp 13.795 per US\$ di akhir Desember 2015 menjadi ke level Rp 13.436 per US\$ di akhir Desember 2016. Volatilitas rupiah juga menurun dari 11,1 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 8,4 persen pada tahun 2016. Penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh membaiknya kinerja Neraca pembayaran Indonesia. Selain itu, meningkatnya aliran modal asing turut menguatkan nilai tukar rupiah. Tentunya ini merupakan dampak positif dari telah diterapkannya berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait nilai tukar.

Gambar 7.2
Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, Tahun 2016 - Maret 2017



Sumber: SEKI Edisi April 2017, Bank Indonesia (data diolah)

Selama tahun 2016, penguatan nilai tukar rupiah terjadi pada tiga triwulan pertama 2016, namun memasuki triwulan terakhir mengalami pelemahan. Pada awal triwulan I tahun 2016 nilai tukar berada di level Rp 13.846 dan bergerak terus menguat hingga akhir triwulan I 2016. Pada akhir triwulan I 2016, nilai tukar rupiah berada di level Rp 13.276 per US\$ atau mengalami penguatan sebesar 3,76 persen dibanding nilai tukar rupiah pada akhir triwulan IV tahun 2015 yang sebesar Rp 13.795 per US\$. Penguatan nilai tukar rupiah ini cukup memberikan angin segar mengingat di saat yang bersamaan gejolak perekonomian global dari berbagai risiko eksternal yang masih menghantui perekonomian nasional.

Penguatan nilai tukar rupiah tetap berlanjut pada triwulan II 2016. Walaupun demikian, penguatan nilai tukar rupiah dalam besaran yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya atau lebih terbatas. Pada awal triwulan II tahun 2016 posisi nilai tukar rupiah berada di level Rp 13.204 per US\$ dan terus menguat hingga akhir Juni 2016 yang berada di level Rp 13.180. Pada akhir Juni ini nilai tukar rupiah berhasil menguat 0,72 persen (*qta*) dibanding akhir triwulan I 2016. Penguatan nilai tukar rupiah ini dipengaruhi oleh persepsi positif dari para investor akan kondisi perekonomian domestik dan tetap terkendalinya risiko perekonomian. Selain itu, nilai tukar rupiah tetap menguat ditopang oleh sentimen positif domestik atas pengesahan UU amnesti pajak yang memberikan pengaruh pada peningkatan

optimisme penanaman modal di Indonesia. Walaupun mengalami penguatan, besarnya lebih rendah dari penguatan di triwulan sebelumnya. Terbatasnya penguatan nilai tukar dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti adanya sinyal kenaikan *Fed Funds Rate* (FFR) dan kekhawatiran atas hasil referendum di Inggris yang keluar dari Uni Eropa.

Memasuki triwulan III 2016, penguatan nilai tukar rupiah masih berlanjut. Pada bulan Juli 2016 posisi nilai tukar rupiah berada di level Rp 13.094 per US\$ atau menguat sebesar 0,65 persen dibanding bulan sebelumnya. Walaupun sempat terdepresiasi pada Agustus 2016, nilai tukar rupiah kembali meningkat menjadi Rp 12.998 per US\$ atau menguat sebesar 1,38 persen dibanding akhir triwulan II 2016. Penguatan terutama didorong sentimen positif atas program amnesti pajak periode pertama yang berakhir pada September 2016. Pada akhirnya sentimen positif tersebut mendorong peningkatan aliran dana masuk ke Indonesia.

Penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi dari awal tahun hingga triwulan III 2016 tidak berlanjut ke akhir tahun 2016. Pada triwulan IV 2016, rupiah justru mendapat tekanan dan mengalami depresiasi karena adanya faktor eksternal. Nilai tukar rupiah pada akhir triwulan IV 2016 tercatat di level Rp 13.436 per US\$ atau terdepresiasi sebesar 3,37 persen (*qtq*) dibanding triwulan III 2016. Beberapa faktor eksternal yang memengaruhi terdepresiasinya nilai tukar rupiah diantaranya perkembangan positif ekonomi AS dan hasil Pemilihan Presiden AS yang berbeda dengan ekspektasi pasar. Nilai tukar mata uang dolar secara global pun mengalami penguatan hingga akhir. Diperkuat kembali dengan kenaikan FFR pada pertengahan Desember 2016 turut menambah tekanan terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia sepanjang tahun 2016 cenderung berfluktuatif dengan tren sedikit menguat hingga akhir tahun. Pada awal tahun 2016 pada bulan Januari 2016 nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia berada di level Rp 9.827 per dolar Australia dan mengalami depresiasi hingga bulan Maret 2016 ke level Rp 10.162 per dolar Australia. Pada akhir Maret ini merupakan nilai tukar rupiah tertinggi terhadap dolar Australia. Pada bulan berikutnya terlihat nilai tukar cenderung fluktuatif. Pada akhir Desember 2016 posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia berada di level Rp 9.724 per dolar Australia. Bila dibandingkan dengan bulan November 2016 posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada akhir Desember 2016 mengalami apresiasi sebesar 4,21 persen (*mtm*), sedangkan bila dibandingkan dengan akhir triwulan III 2015 rupiah terapresiasi sebesar 1,90 persen (*qtq*) dan terapresiasi sebesar 3,38 persen (*yoy*) dibandingkan posisi pada akhir tahun 2015.

Berbeda dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia yang cenderung fluktuatif, nilai tukar rupiah terhadap Yen Jepang menunjukkan adanya pelemahan dari awal tahun hingga akhir triwulan III 2016, namun memasuki triwulan IV 2016 hingga akhir tahun 2016 menunjukkan penguatan. Pada awal tahun 2016 nilai tukar rupiah terhadap Yen Jepang mencapai level

Tabel. 7.3. Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, Tahun 2015–Maret 2017¹

Akhir Periode	Dolar Amerika (USD)	Dolar Australia (AUD)	Yen Jepang (JPY)	Euro EUR
2015				
Januari	12 625	9 830	107	14 307
Februari	12 863	10 012	108	14 412
Maret	13 084	10 003	109	14 165
April	12 937	10 335	109	14 381
Mei	13 211	10 130	107	14 476
Juni	13 332	10 218	109	14 920
Juli	13 481	9 846	109	14 750
Agustus	14 027	10 005	116	15 761
September	14 657	10 270	122	16 492
Oktober	13 639	9 686	113	14 973
November	13 840	9 939	113	14 640
Desember	13 795	10 064	115	15 070
2016				
Januari	13 846	9 827	117	15 139
Februari	13 395	9 541	118	14 647
Maret	13 276	10 162	118	15 030
April	13 204	10 091	123	15 030
Mei	13 615	9 853	123	15 177
Juni	13 180	9 816	128	14 651
Juli	13 094	9 872	126	14 512
Agustus	13 300	10 013	129	14 834
September	12 998	9 912	129	14 579
Oktober	13 051	9 917	124	14 307
November	13 563	10 152	121	14 443
Desember	13 436	9 724	115	14 162
2017				
Januari	13 343	10 100	118	14 290
Februari	13 347	10 255	119	14 127
Maret	13 321	10 186	119	14 228

Catatan :¹ Akhir periode

Sumber : Sumber : SEKI Edisi April 2017, Bank Indonesia

Rp 117 per Yen Jepang. Nilai tukar terus melemah hingga ke level tertinggi yaitu Rp 129 per Yen Jepang pada bulan Agustus dan September 2016. Setelah mencapai ke level tertinggi tersebut, nilai tukar rupiah terhadap Yen Jepang cenderung terus mengalami penguatan pada bulan-bulan akhir menjelang akhir tahun. Hingga akhir tahun 2016 nilai tukar rupiah terhadap Yen Jepang berada di posisi Rp 115 per Yen Jepang.

Sebagaimana pergerakan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia yang fluktuatif cenderung menguat, sepanjang tahun 2016 nilai tukar rupiah terhadap euro juga berfluktuasi dan cenderung menguat pada akhir tahun. Pada Januari 2016 posisi nilai tukar rupiah terhadap euro berada di level Rp 15.139 per euro dan cenderung menguat hingga April 2016 sebelum melemah kembali menjadi Rp 15.177 per euro pada Mei 2016. Pada bulan Mei ini nilai tukar rupiah berada di posisi terlemah sepanjang tahun 2016. Setelah mencapai posisi tertinggi ini, nilai tukar rupiah kembali menguat dan

terus menguat hingga akhir tahun. Di akhir tahun ini posisi rupiah terhadap euro menguat sebesar 1,95 persen (*mtm*) dibanding November 2016, dan menguat sebesar 2,86 persen (*qtq*) terhadap triwulan III 2016 dan terapresiasi sebesar 6,03 persen terhadap triwulan IV tahun 2015.

Memasuki triwulan I tahun 2016, posisi nilai tukar rupiah menunjukkan adanya penguatan rupiah terhadap US\$, tetapi melemah terhadap Euro, dolar Australia dan Yen Jepang. Posisi nilai tukar rupiah terhadap US\$ pada akhir Januari 2017 berada di level Rp 13.343 per US\$ dan mengalami sedikit penguatan hingga akhir Maret 2017 ke level Rp 13.321 per US\$. Hal ini menunjukkan bahwa rupiah menguat sebesar 0,86 persen (*qtq*) terhadap akhir Desember 2016. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya mengalami pelemahan. Nilai tukar rupiah terhadap Euro pada akhir semester I 2017 yang berada di level Rp 14.228 per Euro juga dapat dikatakan mengalami pelemahan sebesar 0,47 persen (*qtq*) bila dibandingkan dengan akhir tahun 2016. Sementara itu, untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia dan Yen Jepang mengalami pelemahan (*qtq*) masing-masing sebesar 4,75 persen (Rp 10.186 per dolar Australia) dan 3,48 persen (Rp 119 per Yen).

Pergerakan Suku Bunga

BI *Rate* merupakan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu sikap kebijakan moneter. BI *Rate* ini diumumkan ke publik yang selanjutnya menjadi acuan bagi industri perbankan Indonesia dalam menentukan tingkat suku bunga. Penetapan BI *Rate* ini tentu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dalam perekonomian, seperti inflasi. Apabila inflasi ke depan akan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, Bank Indonesia akan menaikkan BI *Rate*. Sebaliknya, Bank Indonesia akan menurunkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

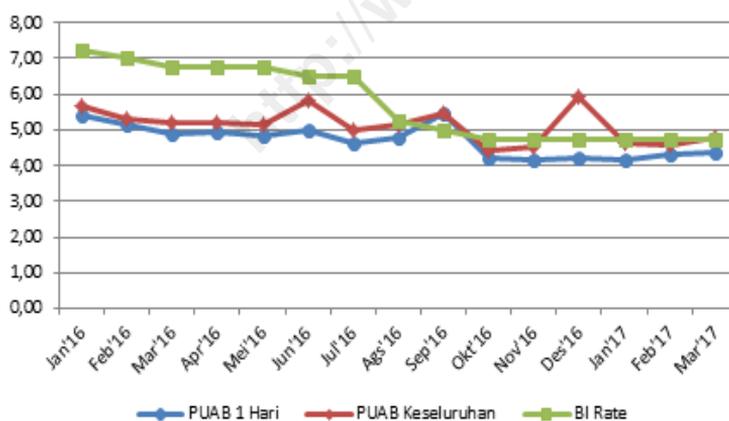
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14 Januari 2016 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI *Rate*) sebesar 25 bps menjadi 7,25 persen. BI menyatakan ruang pelonggaran kebijakan moneter semakin terbuka dan meredanya ketidakpastian pasar pasca kenaikan *Fed Fund Rate* pada Desember 2015. Ketidakpastian pasar keuangan global yang sudah mereda setelah pengumuman kenaikan *Fed Fund Rate*, sejak awal telah diantisipasi pasar sehingga tidak menimbulkan gejolak pasar pada keuangan global.

Selanjutnya pada bulan Februari 2016, BI *Rate* kembali diturunkan sebesar 25 bps menjadi 7 persen sejalan dengan meredanya tekanan inflasi dan risiko keuangan global. Menurut Gubernur BI, bank sentral mengambil keputusan tersebut untuk menjaga likuiditas di sistem perekonomian cukup untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Selain itu, penurunan suku bunga dan penurunan likuiditas akan mempercepat transmisi ke perekonomian serta

diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Selanjutnya, pada Maret 2016 BI kembali memutuskan untuk menurunkan BI *Rate* sebesar 25 basis poin (*bps*) menjadi 6,75 persen dari sebelumnya sebesar 7 persen. Hal ini terkait dengan terjaganya stabilitas makroekonomi dengan laju inflasi yang rendah. Selain itu, meredanya risiko di pasar keuangan global juga menjadi pertimbangan BI untuk menurunkan BI *Rate*.

Penurunan BI *Rate* tidak berlanjut di Bulan April 2017. BI *Rate* dipertahankan di level 6,75 persen sejalan dengan upaya BI untuk mencapai sasaran inflasi 2016 sebesar 4 ± 1 persen dan tetap konsisten dengan upaya mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik, di tengah masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global. Bank Indonesia akan melanjutkan upaya penguatan kerangka operasi moneter melalui penerapan struktur suku bunga operasi moneter secara konsisten. Selain itu, pihaknya juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi, penguatan stimulus pertumbuhan, dan pelaksanaan reformasi struktural berjalan dengan baik, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada bulan berikutnya, BI *Rate* juga masih dipertahankan di level 6,75 persen. Bank Sentral menilai transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga, berjalan semakin baik, demikian pula dengan persiapan implementasi reformulasi suku bunga acuan.

Gambar 7.3
Perkembangan PUAB Rupiah Pagi dan BI Rate, Tahun 2016–Maret 2017



Sumber : Sumber : SEKI Edisi April 2017, Bank Indonesia (data diolah)

Setelah dua bulan dipertahankan, BI *Rate* kembali turun sebesar 25 bps menjadi 6,50 persen berlaku efektif sejak 17 Juni 2016. Hal ini dilakukan mengingat stabilitas makroekonomi terus berlanjut. Kondisi ini tercipta ditandai dengan inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Posisi BI *Rate* ini pun tetap dipertahankan sampai Juli 2016.

Memasuki bulan Agustus 2016, BI memperkenalkan reformulasi suku bunga acuan dari *BI Rate* menjadi *BI 7-day Repo Rate* (*BI 7-day RR Rate*). Suku bunga acuan ini mulai berlaku efektif pada 19 Agustus 2016. *BI 7-day Repo Rate* sebagai bagian dari suku bunga operasi moneter atau *term structure*. Dengan demikian, dalam struktur tenor operasi moneter, suku bunga kebijakan akan bergeser. Sebelumnya, tenor operasi moneter adalah satu tahun atau 360 hari, namun tenor menjadi lebih pendek, yakni 7 hari. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Selain itu, Bank Indonesia juga akan menjaga koridor suku bunga yang simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (*DF Rate*) dan batas atas koridor (*LF Rate*) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas *BI 7-day RR Rate*.

BI memutuskan *BI 7-day RR Rate* pada bulan Agustus 2016 sebesar 5,25 persen. Hal ini dilakukan untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah masih melemahnya pertumbuhan ekonomi global. Bank Indonesia memandang bahwa dengan terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya inflasi yang terkendali pada kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan yang membaik, dan nilai tukar yang relatif stabil, maka ruang bagi pelonggaran moneter masih terbuka.

Pada bulan berikutnya, BI memutuskan untuk menurunkan *BI 7-day RR Rate* sebesar 25 bps menjadi 5,00 persen pada bulan September 2016 dan kembali turun sebesar 25 bps dari 5,00 persen menjadi 4,75 persen. Pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan *BI 7-day RR Rate* tersebut sejalan dengan berlanjutnya stabilitas makroekonomi. Di tengah masih lemahnya perekonomian global, pelonggaran kebijakan moneter tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat upaya untuk mendorong permintaan domestik guna terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

Mendekati akhir tahun 2016, BI memutuskan untuk mempertahankan *BI 7-day RR Rate* selama dua bulan yaitu bulan November dan Desember 2016 yaitu tetap sebesar 4,75 persen. Hal ini sejalan dengan kehati-hatian Bank Indonesia dalam merespon meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global pasca pemilihan umum (Pemilu) di AS, di tengah stabilitas makroekonomi dalam negeri yang tetap terjaga. BI juga akan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Selain itu, BI juga memandang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan oleh perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Kondisi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada triwulan I 2016 ditandai oleh likuiditas yang lebih longgar. Suku bunga PUAB baik pada sesi pagi maupun sore di awal tahun menurun dibanding akhir tahun 2015. Penurunan berlanjut hingga akhir

tiwulan I 2016. Memasuki Triwulan II 2016, kondisi likuiditas di pasar uang dapat dikatakan tetap terjaga. Suku bunga PUAB yang cenderung menurun di pertengahan triwulan II 2016 kembali mengalami peningkatan pada bulan Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh pola musiman bulan Ramadhan. Namun, kondisi tersebut kembali normal pasca libur Lebaran, seiring dengan kembali masuknya uang kartal ke perbankan.

Tabel 7.4 Perkembangan Suku Bunga PUAB, SBI, BI Rate, dan Volume SBI, Tahun 2015–Maret 2017

Akhir Periode	Pasar Uang Antar Bank Rupiah Pagi		Pasar Uang Antar Bank Rupiah Sore		BI Rate ²	SBI 9 Bulan	Volume SBI ¹ (Milyar Rp)
	1 Hari	Keseluruhan	1 Hari	Keseluruhan			
2015 Januari	5,85	5,91	5,84	5,93	7,75	6,93	88 290
Februari	5,65	5,75	5,65	5,76	7,50	6,67	87 290
Maret	6,81	6,84	6,45	6,52	7,50	6,65	87 290
April	5,80	5,89	5,74	5,86	7,50	6,65	77 290
Mei	5,60	5,75	5,60	5,68	7,50	6,65	69 290
Juni	5,63	5,76	5,67	5,75	7,50	6,65	64 290
Juli	5,63	5,75	5,62	5,68	7,50	6,65	52 015
Agustus	5,75	5,91	5,74	5,89	7,50	6,75	52 770
September	7,18	7,23	8,12	7,96	7,50	7,10	39 575
Oktober	5,96	6,25	5,87	6,18	7,50	7,10	34 310
November	5,86	6,28	5,87	6,05	7,50	7,10	32 244
Desember	7,58	7,96	7,33	7,66	7,50	7,10	26 394
2016 Januari	5,40	5,66	5,40	5,71	7,25	6,65	31 526
Februari	5,14	5,31	5,11	5,23	7,00	6,55	37 448
Maret	4,89	5,22	4,86	5,08	6,75	6,60	50 756
April	4,94	5,18	4,99	5,14	6,75	6,60	55 086
Mei	4,86	5,16	4,86	5,10	6,75	6,60	49 311
Juni	5,00	5,85	4,84	5,35	6,50	6,40	45 181
Juli	4,62	5,00	4,62	4,85	6,50	6,40	49 511
Agustus	4,80	5,14	4,79	5,19	5,25	6,40	52 292
September	5,45	5,46	5,45	5,46	5,00	6,15	54 377
Oktober	4,19	4,43	4,19	4,43	4,75	5,90	54 005
November	4,17	4,52	4,17	4,27	4,75	5,90	49 393
Desember	4,20	5,92	-	6,04	4,75	5,90	37 572
2017 Januari	4,14	4,64	4,10	4,34	4,75	5,90	33 242
Februari	4,31	4,55	4,24	4,29	4,75	5,50	29 387
Maret	4,37	4,80	4,31	4,54	4,75	-	24 757

Catatan : ¹ Akhir periode

² Mulai Agustus 2016 suku bunga acuan berubah menjadi BI 7-day RR Rate

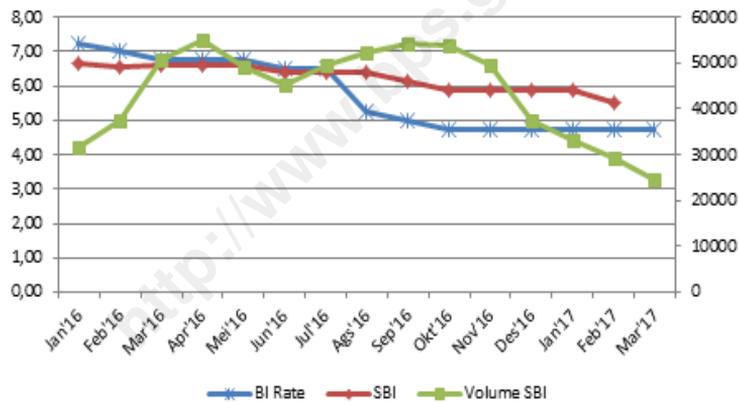
Sumber : SEKI Edisi April 2017, Bank Indonesia

Selanjutnya di Triwulan III 2016, kondisi pasar uang mendapat tekanan, namun likuiditas di pasar uang tetap terjaga. Suku bunga PUAB cenderung mengalami peningkatan hingga akhir triwulan. Peningkatan suku bunga PUAB dipengaruhi oleh belum optimalnya belanja pemerintah, sedangkan kontraksi pemerintah terus meningkat. Berlanjut ke triwulan IV 2016, kondisi likuiditas di pasar uang masih tetap terjaga meski sempat terjadi tekanan yang bersifat musiman pada akhir tahun. Tekanan likuiditas tersebut disebabkan

oleh meningkatnya kebutuhan akhir tahun. Secara umum, suku bunga PUAB mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan BI *7-day RR Rate* pada bulan Oktober 2016.

Bank Indonesia melakukan operasi moneter untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang. Operasi moneter tersebut ditempuh melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Facilities*. Salah satu instrumen dalam OPT adalah penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tenor 9 bulan. Pada awal tahun 2016 ketika BI *Rate* berada di level 7,25 persen pada Januari 2016, bunga SBI berada pada level 6,65 persen dan mampu menyerap Rp 31,53 triliun uang yang beredar di masyarakat. Volume SBI meningkat setiap bulannya hingga bulan April 2016 hingga mencapai Rp 55,09 triliun. Volume SBI pada bulan April ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang tahun 2016. Dua bulan kemudian turun berturut turut seiring dengan penurunan BI *Rate* dan SBI 9 bulan. SBI kembali meningkat hingga bulan September sebelum akhirnya menurun kembali menjelang akhir tahun yaitu menjadi sebesar Rp 37,57 triliun.

Gambar 7.4
Perkembangan SBI, BI Rate, dan Volume SBI, Tahun 2016–Maret 2017



Sumber: SEKI Edisi April 2016, Bank Indonesia (data diolah)

Memasuki tahun 2017, BI menetapkan untuk mempertahankan BI *7-day RR Rate* tetap sebesar 4,75 persen. Keputusan tersebut terus dipertahankan hingga bulan Maret 2017. Hal ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan tetap mengoptimalkan pemulihan ekonomi domestik. Sementara itu, kondisi likuiditas perbankan dapat dikatakan masih memadai. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi PUAB yang stabil disertai adanya penurunan suku bunga. Kondisi suku Bunga PUAB terlihat lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. BI *7-day RR Rate* yang tetap cenderung diikuti dengan penurunan SBI dan volume SBI. Pada Januari 2017, SBI bergerak menurun menjadi 5,90 persen. Sementara itu, volume SBI di bulan tersebut juga menurun menjadi Rp 33,24 triliun rupiah. Penurunan volume SBI terus berlanjut pada dua bulan berikutnya. Hingga Maret 2017, volume uang yang terserap sebesar Rp 24,76 triliun.

<http://www.bps.go.id>

INVESTASI DAN PERDAGANGAN SAHAM **8**

PEMODAL LOKAL DAN ASING
CENDERUNG BERINVESTASI
DI SEKTOR INDUSTRI



PMDN 49,38%



PMA 57,61%

<http://www.bps.go.id>

Pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Bruto (PDB), dimana salah satu komponen pembentuknya adalah investasi. Semakin besar investasi akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Selain itu investor dari luar melihat bahwa Indonesia mempunyai potensi yang menjadi kekuatan daya saing dengan negara lain, yaitu sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja muda cukup banyak tersedia, pasar domestik yang besar dan terus tumbuh, serta dukungan pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dan peran Indonesia di tingkat internasional. Didukung dengan stabilitas politik yang terjaga selama beberapa tahun menjadi modal Indonesia untuk dapat menarik investor dari luar negeri.

Untuk menarik investasi dalam dan luar negeri, Pemerintah telah menyiapkan enam langkah penguatan investasi. Pertama, BKPM akan meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha. Kemudian, mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi perizinan. Ketiga, pemerintah akan memberikan insentif dan memfasilitasi investasi. Keempat, mendirikan Forum Investasi yang terdiri dari pejabat lintas kementerian dan *stakeholders* untuk memonitor dan mengatasi permasalahan investasi. Kelima, mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif. Dan terakhir, peningkatan persaingan usaha yang sehat.

Realisasi investasi Tahun 2016 melebihi 3,0 persen dari target realisasi investasi. Capaian realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2016 sebesar Rp 612,8 triliun (dari target yang ditetapkan sebesar Rp 594,8 triliun), merupakan pertanda yang baik dan cukup positif. Selain karena kinerja investasi tetap menunjukkan geliat pertumbuhan di tengah-tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan regional, juga menunjukkan investasi memberikan dampak positif pula, antara lain peningkatan penyerapan lapangan kerja. Makna strategis dari capaian positif realisasi investasi ini juga menunjukkan kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia, serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan dapat terjaga dengan baik. (Siaran Pers, News Ticker, BKPM)

Peningkatan aliran investasi ini juga dibarengi dengan perbaikan kualitas investasi dalam hal peralihan investasi pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi, serta penyebaran lokasi investasi. Aliran investasi secara bertahap telah mengalami pergeseran dari investasi pada sumber daya alam seperti pertambangan, beralih ke industri manufaktur seperti kimia dasar, dan barang kimia. Dari sisi lokasi, aliran investasi secara bertahap bergerak ke berbagai lokasi proyek di luar Jawa sesuai dengan Program Pemerintah melalui MP3EI yang mendorong pembangunan kawasan dan infrastruktur pendukung pada koridor-koridor di luar koridor Jawa. Apabila kecenderungan perbaikan pertumbuhan investasi ini dapat dipertahankan, maka investasi akan menjadi salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

BKPM mencatat, kinerja perekonomian Indonesia dalam 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dimana investasi domestik yang terealisasi sepanjang tahun 2015 mencapai Rp 179 465,87 miliar terjadi kenaikan 13,01 persen dibanding tahun 2014 yang baru mencapai Rp 156 126,16 miliar. Peningkatan nilai investasi domestik juga diikuti dengan meningkatnya jumlah proyek yang menyerap nilai investasi tersebut, jumlah proyek yang terserap meningkat dari 1.652 proyek pada tahun 2014 naik menjadi 5.100 proyek pada tahun 2015, suatu peningkatan yang sangat signifikan sekali (67,61 persen).

Tabel 8.1. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (miliar rupiah), Tahun 2014–2016

Sektor	2014		2015		2016	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	263	13 379,94	474	13 112,83	668	21 671,03
		(8,57)		(7,31)		(10,02)
Pertambangan	50	3 140,69	124	3 946,83	134	6 033,62
		(2,01)		(2,20)		(2,79)
Industri	942	59 034,72	2 525	89 045,29	3 541	106 783,69
		(37,81)		(49,62)		(49,38)
Listrik, Gas dan Air	68	36 296,78	247	21 946,84	472	22 794,52
		(23,25)		(12,23)		(10,54)
Konstruksi	27	12 097,63	178	17 165,45	365	14 039,12
		(7,75)		(9,56)		(6,49)
Perdagangan dan Reparasi Hotel & Restoran	142	2 249,22	920	5 403,89	1 392	6 073,29
		(1,44)		(3,01)		(2,81)
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	46	15 715,00	213	21 333,87	364	26 769,57
		(10,07)		(11,89)		(12,38)
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	45	13 111,80	212	6 509,94	324	9 192,79
		(8,40)		(3,63)		(4,25)
Jasa Lainnya	69	1 100,37	207	1 000,92	251	2 873,22
		(0,70)		(0,56)		(1,33)
Jumlah	1 652	156 126,16	5 100	179 465,87	7 511	216 230,85
		(100,00)		(100,00)		(100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jumlah investasi yang dialirkan oleh masyarakat ataupun perusahaan domestik sepanjang tahun 2016 mencapai Rp 216.230,85 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 20,49 persen, kenaikan ini lebih tinggi dari kenaikan tahun sebelumnya. Begitupula dengan jumlah proyek yang mampu menyerap nilai investasi di tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 47,27 persen menjadi 7.511 proyek.

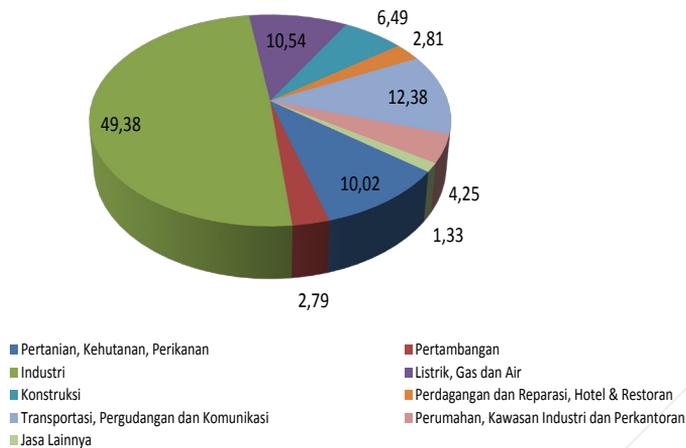
Sektor industri masih menjadi primadona yang diincar oleh para investor domestik dibanding sektor lainnya. Selama tiga tahun terakhir dari

2014 hingga akhir 2016 memperlihatkan realisasi nilai investasi PMDN yang mampu terserap pada sektor industri. Pada tahun 2014 investasi yang terserap di sektor industri sebesar Rp 59 034,72 miliar (37,81 persen), meningkat menjadi Rp 89 045,29 miliar (49,38 persen) kemudian meningkat lagi di tahun 2016 menjadi Rp 106.783,70 miliar (49,38 persen). Peningkatan nilai investasi juga diikuti dengan besarnya jumlah proyek di sektor industri, pada tahun 2014 jumlah proyek yang menyerap investasi domestik di sektor industri sebanyak 942 proyek, naik menjadi 2.525 proyek di tahun 2015, dan kembali meningkat menjadi 3.541 proyek pada tahun 2016.

Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi adalah sektor yang cukup diminati investor domestik selain industri. Pada tahun 2016 sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi mampu menyerap investasi sebanyak Rp 26.769,57 miliar (12,38 persen). Posisi ketiga adalah sektor Listrik, Gas dan Air, yang mampu menyerap investasi pada tahun 2016 sebesar Rp 22.794,52 (10,54 persen) atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,86 persen. Meskipun Indonesia sebagai negara agraris, dimana sebagian besar penduduk masih banyak yang bekerja disektor tersebut, ternyata sektor pertanian belum mampu menarik banyak investor domestik untuk menanamkan modalnya. namun pada tahun 2016 sektor pertanian mampu menyerap investasi sebesar Rp 21.671,00 miliar atau sekitar 10,02 persen dari total nilai investasi, dan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 13.112,83 miliar, atau naik 65,27 persen.

Dari Tabel 8.1. terlihat bahwa di sepanjang tahun 2016, hampir semua sektor menunjukkan peningkatan jumlah proyeknya, begitu pula dengan nilai investasinya. Kecuali sektor konstruksi, dimana jumlah proyek yang menyerap nilai investasi domestik menunjukkan peningkatan dari 178 proyek menjadi 365 proyek pada tahun 2016. Namun nilai proyek yang terserap di sektor

Gambar 8.1
Nilai Investasi PMDN Yang Terealisasi Menurut Sektor (persen), Tahun 2016



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

konstruksi mengalami penurunan dari Rp 17.165,45 miliar menjadi menjadi Rp 14.039,12 miliar di tahun 2016, atau turun sekitar 18,21 persen.

Melihat kemajuan investasi dalam negeri, tampaknya perlu dipertahankan *treatment* yang telah berjalan dengan baik. Selain itu perlu ditingkatkan pula upaya-upaya untuk menjaga eksistensi perusahaan-perusahaan yang sudah ada, agar mereka tetap betah dan dapat menjalankan kegiatan usahanya di lokasi-lokasi tersebut dengan rasa aman. Salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi investasi bodong yang sering merugikan masyarakat.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tengah mempersiapkan paket kebijakan ekonomi jilid XIII. Dalam racikan paket kebijakan yang tengah digodok tersebut, pemerintah akan fokus memperpendek prosedur investasi yang harus dilalui pemodal. Selama ini deregulasi baru pada tingkat penyederhanaan izin investasi, izin usaha, logistik, ekspor, impor, masuk ke setiap sektor per sektor termasuk di daerah.

Sementara itu, untuk mendukung peningkatan investasi di luar Pulau Jawa ini diperlukan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah pusat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk lebih memberikan kemudahan bagi para investor.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diberi tugas oleh pemerintah terus berusaha untuk mendorong pergeseran investasi dari Pulau

Tabel 8.2. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Pulau (miliar rupiah), Tahun 2014–2016

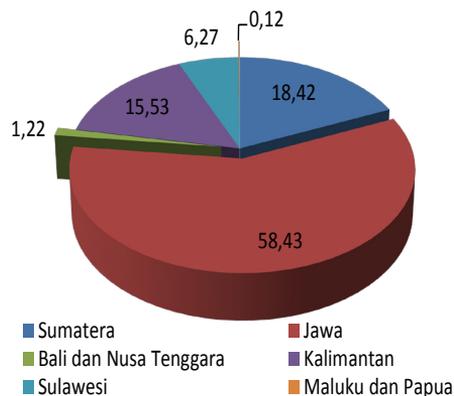
Sektor	2014		2015		2016	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Sumatera	442	29 560,85 (18,93)	939	37 751,70 (21,04)	1 415	39 823,62 (18,42)
Jawa	914	97 057,09 (62,17)	3 155	103 758,36 (57,82)	4 336	126 353,98 (58,43)
Bali dan Nusa Tenggara	31	468,87 (0,30)	85	2 893,88 (1,61)	156	2 647,28 (1,22)
Kalimantan	143	21 419,54 (13,72)	433	20 007,12 (11,15)	832	33 588,42 (15,53)
Sulawesi	92	7 113,48 (4,56)	421	13 667,91 (7,62)	687	13 566,25 (6,27)
maluku dan Papua	30	506,32 (0,32)	67	1 386,90 (0,77)	85	251,30 (0,12)
Jumlah	1 652	156 126,16 (100,00)	5 100	179 465,87 (100,00)	7 511	216 230,85 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jawa ke luar Pulau Jawa. Namun hingga tahun 2015 Pulau Jawa masih menjadi primadona para investor domestik. Tercatat pada tahun 2014 sebesar 62,17 persen dari total investasi domestik terserap di Pulau Jawa dengan nilai investasi mencapai Rp 97.057,09 miliar yang tersebar di 914 proyek. Nilai investasi yang terserap di Pulau Jawa pada tahun 2015 investasi terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp 103.758,36 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 6,90 persen dibanding tahun 2014. Pulau Jawa semakin menunjukkan kinerjanya di tahun 2016, dimana mampu menyerap investasi domestik hingga 58,43 persen dengan nilai investasi mencapai Rp 126.353,98 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 21,78 persen dari tahun 2015.

Menengok perkembangan nilai investasi domestik di pulau-pulau lainnya, pada tahun 2015 hanya pulau Kalimantan saja yang mengalami penurunan nilai investasi yaitu dari Rp 21.419,54 milyar menjadi Rp 20.007,12 miliar atau turun 6,59 persen, sementara jumlah proyek mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 143 proyek menjadi 433 proyek. Pada tahun 2015 Pulau Sumatera berada di posisi kedua setelah Pulau Jawa, begitu juga di tahun 2016 dengan nilai investasi sebesar Rp 39.823,62 miliar (18,42 persen) yang tersebar di 1.415 proyek. Sementara, Pulau Kalimantan berada diposisi ketiga, investasi yang terserap di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan di tahun 2016, dengan nilai investasi mencapai Rp 33.588,42 miliar atau meningkat 67,88 persen. Hal yang berbeda untuk beberapa pulau diantaranya Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan jumlah proyek yang cukup besar, namun dari sisi nilai investasi yang terserap justru mengalami penurunan yaitu sebesar 8,52 persen (Bali dan Nusa Tenggara), 0,74 persen (Sulawesi), dan 81,88 persen (Maluku dan Papua).

Gambar 8.2
Nilai Investasi PMDN Yang Terealisasi Menurut Pulau (persen), Tahun 2016



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Penanaman Modal Asing (PMA)

Investasi asing yang masuk ke Indonesia dalam bentuk penanaman modal dapat bersifat positif dan negatif bagi pembangunan. Investasi akan bersifat positif jika investasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dapat menggerakkan atau meningkatkan sektor-sektor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi asing dapat bersifat negatif apabila terjadi penambahan/peningkatan permintaan konsumsi, dalam bentuk peningkatan impor, dimana pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh adanya PMA, maka akan terjadi defisit neraca perdagangan. Dalam hal ini berarti, kehadiran PMA memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap negara tuan rumah.

Perkembangan investasi asing yang masuk ke Indonesia menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebanyak US\$ 29.275,9 juta yang tersebar di 17.738 proyek. Nilai investasi asing ini lebih tinggi atau naik sebesar 2,62 persen jika dibanding tahun 2014 yang mencapai US\$ 28.529,7 juta dan tersebar di 8.885 proyek. Pada tahun 2016 investasi asing yang masuk di Indonesia mengalami penurunan nilai investasi menjadi US\$ 28.964,1 juta atau turun sekitar 1,07 persen, namun untuk jumlah proyek

Tabel 8.3. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor (Juta US\$), Tahun 2014–2016

Sektor	2014		2015		2016	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	425	2 326,2 (8,15)	868	2 219,2 (7,58)	1 182	1 759,6 (6,07)
Pertambangan	552	4 665,1 (16,35)	1 066	4 017,2 (13,72)	1 130	2 742,4 (9,47)
Industri	3 075	13 019,3 (45,63)	7 184	11 763,1 (40,18)	9 563	16 687,6 (57,61)
Listrik, Gas dan Air	118	1 248,8 (4,38)	350	3 028,9 (10,35)	748	2 139,6 (7,39)
Konstruksi	147	1 383,6 (4,85)	358	954,5 (3,26)	437	186,9 (0,65)
Perdagangan dan Reparasi Hotel & Restoran	2 746	1 379,9 (4,84)	4 757	1 275,2 (4,36)	7 566	1 558,2 (5,38)
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	228	3 000,9 (10,52)	493	3 289,9 (11,24)	620	750,2 (2,59)
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	255	1 168,4 (4,10)	858	2 433,6 (8,31)	1 151	2 321,5 (8,02)
Jasa Lainnya	1 339	337,5 (1,18)	1 804	294,3 (1,01)	2 924	818,2 (2,82)
Jumlah	8 885	28 529,7 (100,00)	17 738	29 275,9 (100,00)	25 321	28 964,1 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

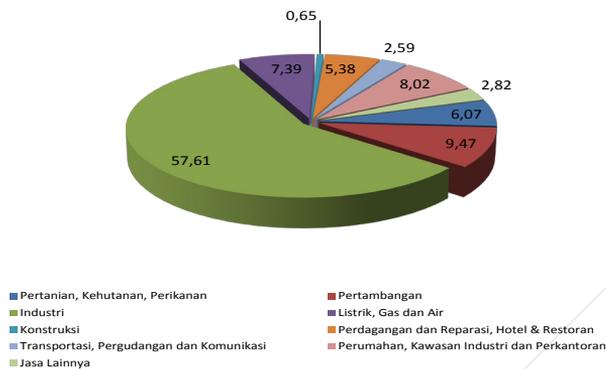
justru mengalami peningkatan sebesar 42,75 persen yaitu dari 17.738 proyek pada tahun 2015 meningkat menjadi 25.321 proyek pada tahun 2016.

Berdasarkan sektor, dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor industri masih menjadi sektor yang sangat diminati oleh para investor asing, dan menganggap bahwa sektor tersebut mampu memberikan keuntungan. Sektor lain yang cukup diminati oleh investor asing adalah sektor pertambangan, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, dan sektor listrik, gas dan air. Selain itu sektor yang mulai dilirik oleh investor asing dan menjanjikan ke depannya adalah sektor pertanian.

Sektor industri sebagai sektor yang cukup diminati investor asing dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang fluktuatif dalam penyerapan investasi, dimana pada tahun 2014 mampu menyerap investasi asing hingga 45,63 persen dari total investasi atau sebesar US\$ 13.019,3 juta yang tersebar di 3.075 proyek. Kinerja sektor industri pada tahun 2015 mengalami penurunan dan hanya mampu menyerap sekitar 40,18 persen saja dari total investasi asing yang masuk, atau sekitar US\$ 11.763.1 juta atau turun sebesar 9,65 persen dari tahun lalu. Pada tahun 2106 mencapai US\$ 16.687, 6 juta menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun lalu sekitar 41,86 persen. Tingginya nilai investasi asing yang terserap di sektor industri pada tahun 2016 tersebar di 9.563 proyek.

Selain sektor industri investor asing sangat berminat menanamkan modalnya di sektor pertambangan, namun dalam tiga tahun terakhir nilai investasi asing yang terserap di sektor tersebut terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sektor pertambangan mampu menyerap investasi asing sebesar US\$ 4.665,1 juta yang tersebar di 552 proyek. Pada tahun 2015 sektor pertambangan hanya mampu menyerap investasi sebesar US\$ 4.017,2 juta atau turun sekitar 13,89 persen. Penurunan investasi asing yang terserap di sektor industri terus berlanjut pada tahun 2016 menjadi US\$ 2.742,4 juta atau turun 31,73 persen yang tersebar di 1.130 proyek. Selanjutnya, sektor

Gambar 8.3
Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Sektor (persen), 2016



yang cukup menjanjikan keuntungan bagi investor adalah sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, dimana pada tahun 2015 investasi asing yang terserap tercatat sebesar US\$ 2.433,6 juta atau sekitar 8,31 persen dari total investasi asing yang masuk. Pada tahun 2016 sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran mampu menarik investasi asing sebesar US\$ 2.321,5 juta yang tersebar di 1.151 proyek meskipun terjadi penurunan sekitar 4,60 persen dari investasi tahun lalu.

Untuk mendukung pertumbuhan investasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres No 13 dan 78 tahun 2010 dan No 12 tahun 2011 untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan mengingat akselerasi investasi belum sepenuhnya didukung perkembangan pada sisi infrastruktur yang merata, terutama infrastruktur di wilayah timur Indonesia yang masih minim. Selain itu, percepatan pembangunan ekonomi berbasis kawasan juga sudah mulai digulirkan dengan membentuk enam koridor spesifik, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.

Belum meratanya pembangunan infrastruktur Indonesia terlihat dari investasi yang terserap menurut wilayah. Baik investasi domestik maupun investasi asing sebagian besar masih didominasi di kawasan Pulau Jawa, hal ini karena Pulau Jawa mempunyai daya Tarik bagi investor dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Investasi asing yang masuk di Pulau Jawa pada tahun 2015 menurun 0,02 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu dari US\$ 15.436,7 menjadi US\$ 15.433,0 juta. Berbanding terbalik dengan jumlah proyek justru terjadi peningkatan dari 6.202 proyek pada tahun 2014 naik menjadi 12.177 proyek atau meningkat 96,34 persen.

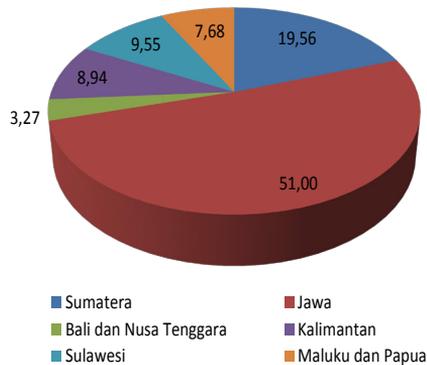
Tabel 8.4. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Disetujui Pemerintah Menurut Pulau (Juta US \$), Tahun 2014–2016

Sektor	2014		2015		2016	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Sumatera	884	3 844,6 (13,48)	1 884	3 732,8 (12,75)	2 964	5 665,3 (19,56)
Jawa	6 202	15 436,7 (54,11)	12 177	15 433,0 (52,72)	17 060	14 772,4 (51,00)
Bali dan Nusa Tenggara	806	993,4 (3,48)	1 309	1 265,1 (4,32)	2 171	947,9 (3,27)
Kalimantan	571	4 673,6 (16,38)	1 195	5 842,9 (19,96)	1 630	2 588,7 (8,94)
Sulawesi	282	2 055,7 (7,21)	834	1 560,4 (5,33)	1 084	2 765,2 (9,55)
maluku dan Papua	140	1 525,8 (5,35)	339	1 441,9 (4,93)	412	2 224,5 (7,68)
Jumlah	8 885	28 529,7 (100,00)	17 738,0	29 275,9 (100,00)	25 321	28 964,1 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Gambar 8.4
Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Pulau (persen), 2016



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Investasi asing yang terserap di Pulau Kalimantan sebesar US\$ 5.842,9 juta, sementara yang terserap di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencapai US\$ 1.265,1 juta pada tahun 2015. Jika dibanding tahun 2014 investasi asing di Pulau Kalimantan dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara masing-masing mengalami peningkatan, sebesar 25,02 persen dan 27,35 persen. Besarnya nilai investasi asing yang terserap di Pulau Kalimantan tersebar di 1.195 proyek sedangkan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara tersebar di 1.309 proyek. Walaupun Pulau Sumatera mengalami penurunan dalam penyerapan investasi asing pada tahun 2015 sebesar 2,91 persen, namun masih menduduki posisi ketiga dalam hal penyerapan nilai investasi yaitu sebesar US\$ 3.732,8 juta yang tersebar di 1.884 proyek.

Kinerja daerah dalam menarik investasi asing di tahun 2016 cukup baik, dimana beberapa pulau menunjukkan peningkatan, kecuali Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Investasi asing yang masuk ke Pulau Sumatera menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan yakni mencapai 51,77 persen atau sekitar US\$ 5.665,5 juta, sedangkan investasi asing yang terserap di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami penurunan yang sangat signifikan mencapai 25,07 persen atau hanya mampu menyerap US\$ 947,9 juta.

Bursa Efek Indonesia (BEI)

Memasuki tahun 2016, secara makro kondisi perekonomian diharapkan lebih kondusif. Stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah melalui beberapa paket kebijakan pada akhir 2015 baru akan terasa dampaknya pada 2016. Proyek infrastruktur mulai bergerak, seperti jalan tol, listrik, dan jalur kereta api. Sektor pertambangan batu bara diharapkan akan tertolong dengan berbagai proyek pembangkit listrik. Begitu juga sumber-sumber minyak baru seperti di Masela dan Mahakam mulai akan berproduksi.

Di sektor pariwisata, pemerintah mulai melakukan upaya untuk menjadikan sektor ini sebagai salah satu andalan devisa. Pembangunan 10

kawasan pariwisata unggulan, misalnya, diharapkan akan menggerakkan roda perekonomian domestik. Sumber devisa sektor pariwisata yang saat ini ada di posisi nomor empat diprediksi akan mampu mengalahkan sektor perkebunan dan pertambangan.

Kondisi ini perlu disambut positif oleh para pelaku industri pasar modal seperti kalangan emiten, calon emiten, Anggota Bursa, dan investor baik institusi maupun perorangan. Apalagi, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter mulai menurunkan tingkat suku bunga acuan. Tingkat suku bunga diyakini akan semakin rendah.

Selain pengaruh dari ekonomi makro, secara internal manajemen BEI juga melakukan berbagai langkah terobosan untuk meningkatkan minat investasi di pasar modal. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tidak pernah berhenti. BEI berharap, ketika kondisi ekonomi lebih baik, maka investor kembali memburu saham-saham yang dianggap favorit. Dan ini terbukti pada tahun 2016 IHSG bisa naik kembali dan menembus batas psikologis 5.000.

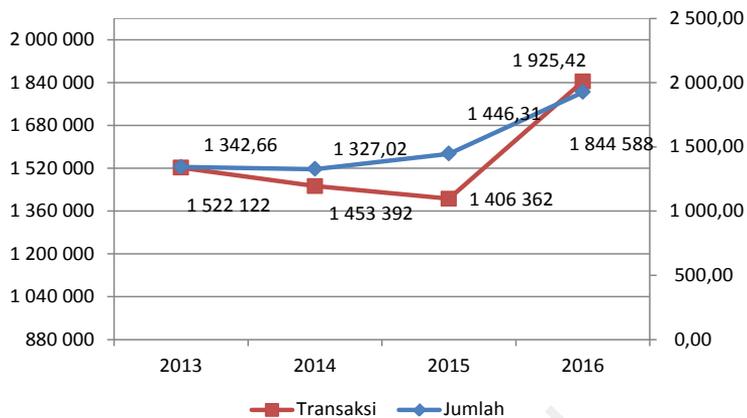
Perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh di tengah pemulihan ekonomi global, telah mampu mendorong tingginya arus modal masuk ke bursa saham domestik. Dari sisi jumlah saham yang diperdagangkan disepanjang tahun 2013-2016, secara umum mengalami peningkatan jumlah saham yang diperdagangkan, kecuali pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,16 persen dari 1.342,66 miliar lembar pada tahun 2013 menjadi 1.327,02 miliar lembar saham pada tahun 2014. Memasuki tahun 2015 jumlah saham yang diperdagangkan menunjukkan peningkatan sebesar 8,99 persen menjadi 1.446,31 miliar lembar saham. Dari jumlah saham yang diperdagangkan di tahun 2014 diperoleh nilai transaksi mencapai Rp 1.453,39 triliun atau turun sekitar 4,52 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 dari saham yang diperdagangkan diperoleh nilai transaksi sebesar Rp 1.406,36 miliar dan mengalami penurunan sekitar 3,24 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 baik jumlah saham yang diperdagangkan maupun nilai transaksi menunjukkan kinerja yang membaik, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah saham yang diperdagangkan dan nilai transaksinya, yaitu sebesar 1.925,42 miliar lembar saham dengan nilai transaksinya sebesar Rp 1.844,59 miliar.

Tabel 8.5. Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2013–2016

Akhir Periode	Jumlah Saham yang Diperdagangkan (Miliar lembar)	Nilai Transaksi (Miliar Rupiah)	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	Jumlah Emiten	Emisi Saham (miliar lembar)	Nilai Emisi (miliar rupiah)
2013	1 342,66	1 522 122	4 274,18	603	8 978,03	642,52
2014	1 327,02	1 453 392	5 226,95	621	9 139,28	676,82
2015	1 446,31	1 406 362	4 593,01	636	54 759,43	3 132,53
2016	1 925,42	1 844 588	5 296,71	650	293 358,48	3 212,64

Sumber: BEI dan SEKI

Gambar 8.5
Jumlah dan Nilai Transaksi Saham di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2013-2016



Sumber : Bursa Efek Indonesia, SEKI

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dihitung setiap hari dimana terjadi transaksi, dengan menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di lantai bursa. Indeks Harga Saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga-harga saham. Sebagai besaran statistik, indeks harga saham juga sering digunakan untuk menggambarkan dan meramalkan kecenderungan pasar.

Seiring dengan masih tumbuh positif perekonomian domestik dan ditopang oleh kondisi makro ekonomi yang terjaga serta kebijakan moneter yang cenderung longgar dan semakin baik kinerja keuangan emiten dari hasil yang dilaporkan, kepercayaan pelaku pasar semakin kuat. Kinerja positif di pasar saham, terlihat pada pergerakan IHSG yang berfluktuatif dari tahun 2013-2016. Akhir tahun 2013 IHSG di tutup pada level 4.274,18 dan diakhir tahun 2014 IHSG meningkat pada level 5.226,95. IHSG menurun diakhir penutupan tahun 2015 sebesar 12,13 persen, yaitu mencapai 4.593,01. Namun kembali mengalami peningkatan sebesar 15,32 persen pada penutupan tahun 2016 menjadi 5.296,71.

Banyaknya jumlah emiten yang terdaftar di BEI menunjukkan tren yang terus meningkat selama 2013-2016. Tahun 2013, jumlah emiten tercatat sebanyak 603 emiten dan terus bergerak naik menjadi 621 pada tahun 2014, berlanjut menjadi 636 emiten di tahun 2015. Pada tahun 2016, ada tambahan emiten sekitar 14 sehingga total menjadi 650 emiten. Kehadiran emiten baru mengindikasikan pasar saham masih menjadi alternatif penting bagi dunia usaha untuk mengakses dana segar dan menopang ekspansi usaha (Berita, 2015).

Bertambahnya jumlah emiten, diikuti pula dengan emisi saham yang diperdagangkan yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dari 8,98 triliun lembar pada tahun 2013 menjadi 9,14 triliun lembar pada tahun 2014.

Jumlah emisi saham menunjukkan peningkatan yang sangat fantastis pada tahun 2015 dan 2016 dengan penambahan masing masing sebesar 499,17 persen dan 435,72 persen menjadi 54,76 triliun lembar dan 293,36 triliun lembar. Hal ini dikarenakan adanya emiten baru yang menginvestasikan dananya dengan cara membeli saham yang mereka anggap lebih aman. Nilai emisi juga mencatatkan adanya pertumbuhan setiap tahun selama 2013-2016. Pada tahun 2013 nilai emisi saham tercatat sebesar Rp 642,52 triliun dan tahun 2014 meningkat menjadi Rp 676,82 triliun atau naik 5,34 persen. Kenaikan nilai emiten tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu mencapai 362,83 persen menjadi Rp 3.132, 53 triliun.

Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia

Pasar modal Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi bagi investor negara-negara maju. Masuknya modal/investasi asing menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan manfaat besar seperti penciptaan lapangan kerja, penambahan pajak, transfer teknologi, dan tumbuhnya sektor turunan lain. Namun di sisi lain, investasi asing dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan, baik ekonomi maupun sosial. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi, sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa investasi asing harus tetap di bawah kekuatan kendali negara, sehingga segala aktivitas bisnis dan operasi mereka selalu bisa dikontrol oleh negara.

Namun isu yang marak dan menimbulkan keresahan saat ini adalah semakin derasnya modal asing yang masuk ke Indonesia yang dikhawatirkan berdampak negatif. Aliran modal yang masuk dalam bentuk penanaman modal langsung (PMA) dan investasi asing di pasar modal terus meningkat. Bila kekuatan modal asing mendominasi perekonomian nasional, maka secara perlahan para investor asing pun akan menguasai secara langsung sumber-sumber ekonomi nasional, terutama kekayaan sumber daya alam.

Tabel 8.6. Jumlah dan Nilai Perdagangan Saham yang Dilakukan oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2013–2016

Akhir Periode	Volume		Nilai (Miliar rupiah)	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
2013	269 630	276 152	629 454	650 101
2014	275 988	281 644	611 016	568 419
2015	239 364	262 216	596 329	618 918
2016	290 055	327 492	688 492	672 323

Sumber: Bapepam,

Investor asing pada umumnya berinvestasi dalam bentuk saham. Karena itu, perdagangan saham di Indonesia tidak terlepas dari peran investor asing yang melakukan transaksi jual beli saham. Tahun 2013-2016, volume saham yang dibeli investor asing lebih rendah dibandingkan volume saham yang dijual, pada tahun 2015 volume saham yang dibeli lebih rendah jika dibanding tahun 2014, atau turun sebesar 13,27 persen. BEI mencatat volume saham yang dibeli oleh pihak asing pada tahun 2016 sudah mendekati 300.000 juta lembar atau tepatnya sebanyak 290.055 juta lembar saham dengan nilai mencapai Rp 688.492 miliar. Sementara itu, saham yang dijual oleh pihak asing sepanjang tahun 2016 mencapai 327.107 juta lembar saham dengan nilai mencapai Rp 672.918 miliar. Sehingga sampai akhir tahun 2016 nilai saham asing yang masuk ke lantai bursa mencapai Rp 37.052 miliar, terjadi peningkatan sekitar 39,01 persen jika dibandingkan tahun 2015.

Terlihat bahwa pihak asing masih mendominasi dengan kuat terutama pada investasi langsung dalam bentuk penanaman modal. Semestinya persentase investor lokal harus lebih tinggi untuk dapat bersaing dan menahan gempuran *profit taking* asing. Diharapkan pemerintah harus mulai dapat membatasi investasi asing yang masuk. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dibidang investasi harus dapat membatasi investasi asing dan bukan kebijakan investasi yang membuka lebar-lebar pintu investasi asing karena dinilai akan menempatkan Indonesia di bawah dominasi ekonomi asing. Seharusnya Indonesia menjadikan investasi asing sebagai pendukung atau pelengkap saja, bukan sebagai penopang utama sistem perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menilai masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pemerintah, lembaga keuangan, para pemilik saham, dan emiten untuk meningkatkan kinerja perdagangan saham di tahun 2017 mendatang. Ada dua pekerjaan rumah untuk pasar modal Indonesia. Pertama, jumlah perusahaan yang menawarkan saham ke publik (*Initial Public Offering/IPO*) yang belum sesuai target di tahun ini. Kedua, keikutsertaan investor dan emiten yang belum tersebar dengan merata di Indonesia. Pasalnya, saat ini, investor dan emiten di pasar modal Indonesia masih terpusat di Ibukota DKI Jakarta saja. Padahal, keikutsertaan investor dan emiten di daerah, dapat memaksimalkan roda ekonomi untuk terus berputar di tahun depan guna mengejar target pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah dan kabinet kerja harus membuka akses bahkan menjemput bola untuk menawarkan dan mendorong saudara kita di daerah untuk menjadi investor, bukan hanya sebagai emiten. (Jakarta, CNN Indonesia).

<http://www.bps.go.id>

PARIWISATA 9

KEDATANGAN ✈️ 2016

KEBANGSAAN

JUMLAH

Tiongkok	1 556 771
Malaysia	1 541 197
Singapura	1 515 701

PERKEMBANGAN WISATAWAN KEBANGSAAN TIONGKOK

2012	2013	2014	2015	2016
726 088	858 140	1 052 705	1 249 091	1 556 771



Wisatawan kebangsaan Tiongkok mendominasi dan jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari tahun 2012

INFORMASI

<http://www.bps.go.id>

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan kekayaan budaya yang besar sebagai modal bagi sektor pariwisata. Pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor yang menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi negara dan penyumbang devisa bagi Indonesia. Pariwisata menjadi prioritas nasional dalam RPJM 2015-2019. Secara bertahap dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun pembangunan pariwisata di prioritaskan dan diberi target pencapaiannya. Sebagai penghasil devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, karena sektor pariwisata mampu membuka lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Namun sektor pariwisata Indonesia masih memiliki permasalahan seputar promosi, sumber daya manusia (SDM) dan infrastuktur. Berbagai literatur ekonomi, menjelaskan bahwa promosi sangat erat kaitannya dengan keputusan konsumen untuk mengunjungi destinasi wisata. Promosi pariwisata Indonesia masih kurang efektif, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Hal ini berbanding terbalik dengan Singapura, Thailand dan Malaysia yang menjadikan promosi sebagai salah satu motor utama untuk meningkatkan industri.

Jika dilihat anggaran yang disediakan untuk belanja promosi wisata di negara tetangga cukup tinggi. Belanja promosi wisata di Singapura sebesar US\$ 278 juta, Malaysia sebesar US\$ 300 juta, Thailand sekitar US\$ 213 juta. Sedangkan Indonesia anggaran yang disediakan untuk promosi wisata baru sekitar US\$ 49,6 juta. Anggaran promosi pariwisata Indonesia masih rendah, hal yang wajar promosi pariwisata Indonesia belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan pariwisata.

Pariwisata merupakan *services industry*, *hospitality industry* dan *image industry*, maka peranan kualitas SDM menjadi sangat penting. Kualitas SDM yang cakap dan trampil harus diperhatikan agar mampu memberikan kepuasan kepada wisatawan baik dalam bentuk pelayanan pada industri pariwisata maupun sikap masyarakat lokal (*host*) yang ada di Daerah Tujuan Wisata (DTW). Masalah yang tidak kalah penting lainnya adalah infrastruktur. Infrastuktur utama dan pendukung sektor pariwisata (transportasi darat dan laut, teknologi, informasi dan komunikasi, listrik dan air bersih) di Indonesia masih sangat rendah. Padahal, menurut berbagai literatur ekonomi, infrastruktur adalah salah satu yang menentukan bergerak atau tidaknya semua sektor perekonomian, termasuk sektor pariwisata. Kelemahan infrastruktur tersebut juga pada akhirnya berdampak pada aksesibilitas dan mahalnya biaya ke destinasi pariwisata. Hal inilah yang menjadikan pariwisata Indonesia tidak bisa berakselerasi lebih cepat dibandingkan negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Mexico. <http://www.kompasiana.com/alexandersirait/menyelesaikan-hambatan-untuk-wujudkan-mimpi-sektor-pariwisata-sebagai-sektor-unggulan-menjadi-kenyataan>

Target pemerintah untuk kunjungan wisman pada tahun 2017 sebanyak 15 juta orang. Untuk mencapai target tersebut ada tiga program prioritas

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang akan diimplementasikan tahun 2017 yaitu *digital tourism*, *homestay* (pondok wisata), dan konektivitas udara. Untuk meningkatkan kunjungan wisman secara signifikan *digital tourism* menjadi strategi yang harus dilakukan untuk merebut pasar global khususnya pada 12 pasar fokus yang tersebar di 26 negara. Program pertama dari *digital tourism* dengan meluncurkan ITX (*Indonesia Tourism Exchange*) yang merupakan *digital market place platform* dalam ekosistem pariwisata atau pasar digital yang mempertemukan *buyers* dan *sellers* dimana nantinya semua *travel agent*, akomodasi, atraksi dikumpulkan untuk dapat bertransaksi. Selain itu juga telah diluncurkan *War Room M-17* di kantor Kemenpar sebagai pusat pemantauan berbasis teknologi digital, dimana *War Room M-17* ini untuk memantau 4 aktivitas utama yakni: pergerakan angka-angka pemasaran mancanegara dan pemasaran nusantara, tampilan big data berisi keluhan, kritik, saran, dan semua testimoni baik negatif maupun positif.

Program selanjutnya adalah pembangunan *homestay* sebagai program pembangunan 'desa wisata', dimana target tahun 2017 membangun sebanyak 20.000 *homestay*. Sebagai *quick win* pada triwulan I tahun 2017 akan dibangun 1.000 *homestay* di 10 destinasi prioritas. Selain itu mengingat sekitar 75 persen kunjungan wisman ke Indonesia menggunakan modal transportasi udara maka pembangunan konektivitas udara sangat diutamakan untuk mencapai target tahun 2017. Kemenpar melakukan strategi 3A (*Airlines-Airport & Air Navigation-Authorities*) yang diawali dengan melakukan nota kesepahaman (MoU) kerjasama dengan perusahaan penerbangan Indonesia dan asing yaitu PT Angkasa Pura I & II dan AirNav Indonesia dalam upaya menambah penerbangan langsung melalui pembukaan rute baru, pemberian *incentive airport charge* dan pengalokasian *prioritas slot* di sejumlah bandara internasional di Indonesia. <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3402>

Pada tahun 2016, daya saing pariwisata Indonesia menunjukkan peningkatan peringkat dalam *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) *World Economic Forum* (WEF). Peringkat Indonesia melonjak hingga 8 tangga, dari peringkat 50 besar dunia menerobos ke posisi 42 dunia. Makna daya saing pariwisata ini sangat penting untuk mendorong *turisme* di tanah air. Melalui Formula "3C", yaitu *confidence*, *credibility* dan *calibration* pariwisata Indonesia dapat terus berkembang. Pertama, *confidence*, otomatis level bangsa ini naik, secara internal kita makin percaya diri, bahwa bangsa kita mampu bersaing di level dunia. Kedua, *credibility* bangsa Indonesia mulai baik, secara eksternal, Indonesia semakin diakui, dipercaya, kredibel, bangsa lain semakin tahu bahwa '*Wonderful Indonesia*' memang hebat. Ketiga, *calibration*, dengan membandingkan fakta lapangan dengan standar dunia. Setelah dikalibrasi dan dipotret dengan kriteria dan standar dunia, ternyata pariwisata Indonesia patut diperhitungkan. Ini pencapaian positif, sebab standar yang sama juga dipakai untuk memotret dan mengukur indikator dari semua negara.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Masuk/Bandara

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang datang melalui seluruh pintu masuk selama tahun 2016 mencapai 12,02 juta. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 15,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar 10,41 juta kunjungan. Dari 12,02 juta kunjungan wisman ke Indonesia, 10,57 juta kunjungan di antaranya melalui 19 pintu utama, sedangkan 1,45 juta sisanya di luar pintu utama. Di luar pintu utama termasuk melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang jumlahnya mencapai 0,37 juta dan lainnya 1,08 juta. Angka kunjungan wisman 2016 tersebut sudah melebihi target pemerintah yang ditetapkan sebesar 12 juta wisman.

Jumlah kunjungan wisman paling banyak masuk melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Hang Nadim Batam. Jumlah wisman yang masuk ke Indonesia berdasarkan data yang diolah dari Dokumen Imigrasi, pada tahun 2016 yang terbesar melalui bandara Ngurah Rai Bali mencapai 4,88 juta wisman atau sekitar 46,22 persen dari total wisman yang datang ke Indonesia. Bandara Ngurah Rai, Bali, masih menjadi

Tabel 9.1. Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Melalui 19 Pintu Masuk Utama (orang), Tahun 2011–2017

Tahun	Bandara					Jumlah
	Soekarno Hatta (Jakarta)	Ngurah Rai (Bali)	Juanda (Surabaya)	Hang Nadim (P. Batam)	Lainnya	
2011	1 933 022	2 788 706	185 815	1 161 581	1 580 607	7 207 885
2012	2 053 850	2 902 125	197 776	1 219 608	1 671 103	7 569 381
2013	2 240 502	3 241 889	225 041	1 336 430	1 758 267	8 327 219
2014	2 246 437	3 731 735	217 193	1 454 110	1 317 510	8 966 985
2015	2 455 279	3 952 354	208 836	1 638 834	1 232 442	9 487 745
2016	2 603 195	4 885 062	231 455	1 510 203	1 849 616	10 570 287
Januari	175 251	348 337	12 558	116 990	82 913	736 049
Februari	185 013	370 127	16 296	130 135	147 273	806 074
Maret	223 329	358 006	19 026	131 598	151 561	840 144
April	201 077	369 893	18 916	131 325	155 818	834 861
Mei	199 024	396 684	19 168	139 473	139 750	865 419
Juni	162 181	407 809	15 325	127 104	122 411	805 651
Juli	240 135	485 332	22 010	109 839	146 760	968 216
Agustus	284 659	440 121	19 908	105 786	155 155	970 021
September	243 178	444 452	20 619	120 780	153 845	946 437
Oktober	253 223	425 549	21 629	119 800	184 879	939 877
November	231 914	398 383	23 866	112 771	185 906	878 839
Desember	204 211	440 369	22 134	164 602	223 345	978 699
2017*						
Januari	206 533	456 484	18 019	135 456	168 791	933 116
Februari	198 952	448 943	12 641	100 635	148 468	863 509
Maret	229 485	425 203	17 477	133 088	174 013	933 656

Catatan : * Angka sementara

Sumber : Kementerian Pariwisata

pintu utama kunjungan wisman, Bali masih menjadi tempat favorit berlibur bagi para wisman. Pada tahun 2016 jumlah wisman yang masuk melalui bandara Ngurah Rai mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,59 persen.

Berikutnya wisman yang masuk melalui bandara Soekarno Hatta mengalami peningkatan sekitar 6,02 persen yaitu sebanyak 2,60 juta wisman (24,63 persen dari total wisman). Sementara wisman yang datang melalui bandara Hang Nadim justru mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 7,85 persen (1,51 juta wisman). Penurunan wisman lebih disebabkan karena faktor seperti isu terorisme, kabar penangkapan teroris di Batam, karena aksi teror dan surat kaleng serta isu mengenai virus Zika. Menyebarnya virus Zika di Singapura juga menjadi faktor penurunan wisman, dimana Singapura merupakan pintu masuk bagi wisman ke Batam sehingga wisman akan menghindari Singapura dan tidak mampir ke Batam. Apalagi setiap negara ada *travel advisor* atau peringatan untuk tidak ke Singapura. *Batamnews.co.id*



Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama lima tahun terakhir selalu menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 7,65 juta orang, dan mengalami peningkatan terus hingga mencapai 10 juta lebih wisman pada tahun 2015. Bila dibandingkan dengan jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2014, jumlah kunjungan wisman selama tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 5,81 persen. Kenaikan jumlah kunjungan wisman tahun 2015 terjadi di sebagian pintu masuk utama. Kedatangan wisman melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali mengalami peningkatan sebesar 5,91 persen sedangkan Hang Nadim Batam mengalami peningkatan sebesar 12,70 persen. Keadaan sebaliknya terjadi di Bandara Juanda Surabaya. Jumlah wisman yang masuk melalui Bandara Juanda Surabaya tercatat mengalami penurunan sebesar 3,85 persen.

Pada semester pertama 2016 jumlah kedatangan wisman ke Indonesia terjadi penurunan pada bulan Juni, sedangkan pada semester kedua penurunan wisman terjadi pada bulan September sampai dengan November. Penurunan di bulan Juni dikarenakan datangnya bulan Ramadhan dimana turis muslim lebih mengurangi perjalanan wisatanya. Penurunan wisman bulan September dan Oktober lebih disebabkan karena terdapat penurunan kunjungan wisman dari Eropa dan negara-negara Timur Tengah lain. Sementara penurunan bulan November disebabkan karena banyak wisman yang menunda kunjungannya ke Indonesia pada November dan memilih untuk datang pada Desember atau jelang pergantian tahun. Tren penurunan juga terjadi tahun lalu karena musim sibuk untuk berliburan (*peak season*) itu bukan di bulan November, tapi di bulan Desember.

Pada tahun 2017 triwulan I (Januari–Maret), jumlah kunjungan wisman telah mencapai 2,73 juta wisman, mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 14,61 persen dibanding kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang berjumlah 2,38 juta wisman. Pada tahun 2017 Pemerintah menargetkan wisatawan mancanegara sebanyak 15 juta orang. Kemenpar optimis akan mampu untuk mendatangkan wisman ke Indonesia sesuai target, karena pemda dan *Stake holder* melihat di tahun 2017 ada banyak *event*. Sejumlah *event* besar yang terjadi pada semester I 2017 yang diharapkan dapat mendatangkan atau mempengaruhi masuknya jumlah wisman ke Indonesia, yaitu *Bali Beyond Travel Fair* (BBTF) 2017 yang kembali digelar di *Nusa Dua Bali Convention Center* dimana *event* ini merupakan salah satu *event* cukup besar dan bergengsi dalam bursa pariwisata. *Event* ini selain untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bali maupun Indonesia, juga sebagai ajang promosi wisata. *Calender of Event Pesona Wisata Manado* atau lebih tren dengan *Mari Jo Ka Manado*, *Calender Event of Toba* dan *Event* di Perbatasan (*crossborder area*), dimana berbagai *event* digelar untuk menghidupkan wilayah perbatasan dengan berbagai festival.

Berdasarkan pintu masuk utama kedatangan wisman, jumlah kunjungan wisman yang masuk melalui bandara Ngurah Rai (Bali) di tiga bulan pertama sudah mencapai 1.330.994 orang. Sementara itu, kedatangan wisman melalui Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) sebanyak 634.970 orang, dan pintu masuk bandara Hang Nadim (P. Batam) sebanyak 369.179 orang wisman.

Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan

Dilihat berdasarkan kebangsaan sebagian besar wisman yang datang ke Indonesia sepanjang tahun 2012-2014 berasal dari negara Singapura, Malaysia dan Australia. Namun dua tahun terakhir 2015-2016 sebagian besar wisman yang datang ke Indonesia berasal dari Singapura, Malaysia dan Tiongkok. Jumlah wisman dari ketiga negara tersebut secara total berjumlah 4,61 juta orang atau sekitar 40,05 persen dari total wisman yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2016.

Jika sebelumnya wisman asal Singapura adalah yang terbanyak berkunjung ke Indonesia, tetapi pada tahun 2016 wisman asal Tiongkok tercatat paling banyak yaitu mencapai 1,56 juta orang. Sementara wisman yang berasal dari Singapura hanya sebanyak 1,52 juta orang. Jumlah wisman yang berasal dari Malaysia merupakan terbanyak kedua setelah Tiongkok, yaitu sebanyak 1,54 juta orang, sedangkan turis asal Australia yang datang ke Indonesia tahun 2016 mencapai 1,30 juta orang.

Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya wisman Tiongkok ini adalah kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Tiongkok, Australia serta Jepang ada di top 5 wisman terbanyak yang datang ke Indonesia ada dalam *list* BVK. Perubahan strategi pemasaran menjadi digital juga dinilai ampuh mendongkrak kunjungan wisman Tiongkok. Seperti diketahui, di 2016 ini, Kemenpar menggandeng Baidu dan Ctrip untuk membantu pemasaran pariwisata. *Searching engine*-nya atau *look*-nya pakai Baidu. Sementara *book* dan *pay company*-nya pakai Ctrip. Dua kekuatan raksasa itu dirangkul jadi satu. Dua-duanya terbesar di Tiongkok.

Baidu yang biasa disebut *Google*-nya Tiongkok itu sanggup meng-*create* banyak program yang ujungnya mempromosikan destinasi wisata Indonesia dari hilir ke hulu. Dari *branding*, *advertising* sampai ke *selling*. *Go digital* menjadi tuntutan dalam merebut pasar global terutama wisman Tiongkok. Gaya hidup wisatawan dalam mencari informasi destinasi, memperbandingkan antar produk, memesan paket wisata, dan berbagi informasi kini telah mereka lakukan secara *digital*.

Faktor lain yang juga menjadi pendukung adalah keberanian mendorong penerbangan langsung dari kota-kota sumber wisman di Tiongkok ke destinasi unggulan di Indonesia. Sekarang, sudah banyak *charter flight* dari Tiongkok ke Indonesia. Sekarang, Manado seperti tak pernah henti menerima kunjungan wisman asal Tiongkok. Bila sebelumnya hanya ada satu penerbangan Silk Air per hari dari Singapura ke Manado, sekarang sudah ada Lion Air, Sriwijaya dan Citilink penerbangan dari Tiongkok-Manado. Dan hasilnya ada 10.000 turis dari enam kota di Tiongkok yang bisa langsung terbang ke Manado dalam sebulan. <http://tagpariwisata.com/ini-alasan-wisman-tiongkok-meningkat-pesat-ke-indonesia/>

Selain Tiongkok, negara di kawasan Asia Timur yang terus digarap juga diharapkan terus meningkat jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia adalah negara Jepang dan Korea. Sebagai negara maju di kawasan Asia, Jepang dan Korea tentunya menjadi pasar yang harus diberi perhatian pemerintah. Oleh karena itu kedua negara tersebut menjadi fokus pasar utama pariwisata Indonesia. Pada tahun 2016 wisman dari Jepang yang berkunjung ke Indonesia mencapai 545.392 orang sedangkan wisman dari Korea tercatat sebanyak 386.789 wisman.

Tabel 9.2. Wisatawan yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan, Tahun 2012–2016

Negara	Wisman (orang)				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Malaysia	1 269 089	1 380 686	1 418 256	1 431 728	1 541 197
Singapura	1 324 706	432 060	1 559 044	1 594 102	1 515 701
J a p a n	463 486	497 399	505 175	528 606	545 392
Korea, Rep.	328 989	351 154	352 004	375 586	386 789
Taiwan	217 708	247 146	220 328	223 478	252 849
Tiongkok	726 088	858 140	1 052 705	1 249 091	1 556 771
Australia	952 717	983 911	1 145 576	1 090 025	1 302 292
Amerika Serikat	217 599	236 375	246 397	269 062	316 782
Jerman	158 212	173 470	184 463	201 202	243 873
Belanda	152 749	161 402	168 494	172 371	200 811
Inggris	219 726	236 794	244 594	286 806	352 017
Lainnya	2 013 393	3 243 592	2 338 375	2 808 718	3 304 801
Jumlah	8 044 462	8 802 129	9 435 411	10 230 775	11 519 275

Sumber : Statistik Indonesia, 2017

Terkait dengan harapan dari berbagai pihak agar sektor pariwisata dapat terus menarik perhatian dan meningkatkan kunjungan dari wisman dari berbagai negara, sekaligus dapat memberikan pemasukan devisa yang semakin besar, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan visa kunjungan singkat kepada beberapa negara. Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani enam paket kebijakan ekonomi yang salah satunya yaitu memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan dari beberapa negara. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), yang selama 6 presiden sebelumnya hanya 15 negara, kemudian berubah menjadi 45 negara, lalu bertambah jadi 90, dan kini sudah 169 negara.

Akomodasi Pariwisata

Salah satu sarana pendukung dari sektor pariwisata adalah akomodasi. Yang dimaksud dengan akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya. Usaha akomodasi adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran.

Jumlah usaha penyedia akomodasi jangka pendek di Indonesia pada tahun 2016 tercatat sebanyak 18.829 usaha dengan jumlah kamar tersedia mencapai 527.176 kamar. Hal ini berarti terdapat tambahan sebanyak 476 usaha dan 19.975 kamar atau masing-masing mengalami peningkatan sebesar 2,59 persen dan 3,94 persen dibandingkan tahun 2015. Dari usaha akomodasi tersebut, 2.387 usaha atau sekitar 12,68 persen adalah hotel-hotel yang diklasifikasikan sebagai hotel berbintang dengan kamar sebanyak 233.007

Tabel 9.3. Banyaknya Usaha, Kamar, dan Tempat Tidur pada Usaha Akomodasi Dirinci Menurut Klasifikasi Akomodasi, Tahun 2015 dan 2016

Klasifikasi Akomodasi	Usaha		Kamar		Tempat Tidur	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Berbintang	2 197	2 387	217 474	233 007	322 590	346 959
- Bintang 5	172	183	37 950	39 118	52 689	55 035
- Bintang 4	422	453	63 978	68 425	95 086	102 454
- Bintang 3	739	839	65 920	72 951	99 785	110 268
- Bintang 2	496	528	32 332	34 596	48 631	52 262
- Bintang 1	368	384	17 294	17 917	26 399	26 940
Akomodasi Lainnya	16 156	16 442	289 727	294 169	421 643	428 284
- Non Bintang (Melati)	10 387	10 149	235 738	233 390	349 390	345 919
- Pondok Wisata	2 910	2 940	23 790	24 115	30 442	31 720
- Penginapan Remaja	425	599	5 402	8 882	7 960	12 578
Villa	1 131	1 204	9 027	8 844	11 397	11 030
Jasa Akomodasi Lainnya	1 303	1 550	15 770	18 938	22 454	27 037
Jumlah	18 353	18 829	507 201	527 176	744 233	775 243

Sumber : Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia, 2015 dan 2016

kamar. Jumlah hotel berbintang tahun 2016 ini bertambah sebanyak 190 usaha dibandingkan tahun 2015, atau meningkat sekitar 8,65 persen. Penambahan jumlah usaha ini salah satunya adalah karena adanya perubahan status dari hotel non bintang menjadi hotel berbintang dan ada pembangunan hotel berbintang yang baru. Sementara itu usaha akomodasi jangka pendek lainnya tercatat sebanyak 16.442 usaha dengan jumlah kamar sebanyak 294.169 kamar.

Jumlah hotel berbintang terbanyak selama kurun waktu 2016 adalah hotel bintang tiga yaitu sebanyak 839 usaha atau 35,15 persen dengan jumlah kamar sebanyak 72.951 kamar. Kemudian diikuti hotel bintang dua sebanyak 528 usaha atau 22,12 persen dengan jumlah kamar 34.596. Sedangkan pada urutan yang ketiga adalah hotel bintang empat yaitu sebanyak 453 usaha atau 18,98 persen dengan jumlah kamar sebanyak 68.425 kamar.

Sementara itu, usaha akomodasi jangka pendek lainnya sebagian besar adalah hotel dengan klasifikasi melati. Pada tahun 2016 jumlah hotel dengan klasifikasi melati sebanyak 10.149 usaha (61,73 persen) dengan jumlah kamar sebanyak 233.390 kamar, kemudian diikuti pondok wisata sebanyak 2.940 usaha (18,16 persen) dengan jumlah kamar sebanyak 24.115 kamar.

Dari seluruh jumlah usaha penyedia akomodasi jangka pendek di tahun 2016, tersedia sebanyak 775.243 tempat tidur. Pada hotel-hotel berbintang tersedia sebanyak 346.959 tempat tidur atau 44,75 persen. Tempat tidur yang tersedia pada hotel-hotel kelas melati sebanyak 345.919 buah (44,62 persen) dan sisanya 82.365 tempat tidur atau 10,62 persen disediakan pada akomodasi lainnya.

Jika dilihat menurut provinsi, yang memiliki usaha akomodasi untuk hotel berbintang dengan jumlah kamar terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebanyak 39.806 kamar atau sebanyak 17,08 persen dari seluruh kamar hotel berbintang. Akomodasi yang berada pada urutan selanjutnya adalah Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat dimana masing-masing memiliki kamar sebanyak 33.599 kamar (14,42 persen) dan 29.053 kamar (12,47 persen).

Tabel 9.4. Banyaknya Usaha, Kamar, dan Tempat Tidur pada Hotel Bintang Dirinci Menurut Provinsi, Tahun 2015 dan 2016

Provinsi	Usaha		Kamar		Tempat Tidur	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Aceh	17	20	1 278	1 503	2 137	2 579
Sumatera Utara	111	116	9 988	10 732	15 448	16 418
Sumatera Barat	60	61	3 611	3 653	5 924	6 015
Riau	55	58	4 912	5 206	7 481	7 832
Jambi	29	31	1 973	2 187	2 727	2 885
Sumatera Selatan	61	64	4 506	4 781	6 443	6 800
Bengkulu	8	9	410	523	663	786
Lampung	10	18	962	1 954	1 413	2 847
Kep. Bangka Belitung	32	42	2 009	2 528	2 934	3 653
Kepulauan Riau	88	88	10 994	11 393	15 494	15 836
DKI. Jakarta	228	232	39 011	39 806	53 999	55 293
Jawa Barat	283	314	26 303	29 053	42 181	46 013
Jawa Tengah	204	217	16 202	17 246	25 353	26 878
DI. Yogyakarta	89	94	8 763	9 256	13 709	14 432
Jawa Timur	143	158	15 790	17 014	23 902	26 393
Banten	54	58	5 684	5 939	8 341	8 844
B a l i	281	317	31 596	33 599	44 657	49 549
Nusa Tenggara Barat	63	75	3 996	4 525	5 860	6 721
Nusa Tenggara Timur	21	23	1 293	1 646	2 327	2 652
Kalimantan Barat	31	36	2 983	3 821	4 151	5 264
Kalimantan Tengah	8	12	699	1 051	1 049	1 548
Kalimantan Selatan	48	49	3 335	3 584	4 939	5 254
Kalimantan Timur	49	51	5 398	5 468	8 152	8 048
Kalimantan Utara	7	10	373	461	600	710
Sulawesi Utara	29	35	2 757	2 576	4 192	3 752
Sulawesi Tengah	8	8	742	766	1 037	1 182
Sulawesi Selatan	78	93	5 392	6 475	7 631	9 420
Sulawesi Tenggara	19	18	1 326	1 295	1 862	1 959
Gorontalo	8	8	470	471	758	750
Sulawesi Barat	7	7	364	374	579	587
Maluku	23	22	1 176	1 110	1 698	1 566
Maluku Utara	3	3	318	313	523	492
Papua Barat	15	15	1 009	1 014	1 591	1 477
Papua	27	25	1 851	1 684	2 835	2 524
Indonesia	2 197	2 387	217 474	233 007	322 590	346 959

Sumber : Statistik Hotel dan Akomodasi lainnya di Indonesia, 2015 dan 2016

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap

Fasilitas akomodasi yang baik juga sangat mendukung perkembangan kemajuan pariwisata Indonesia. Salah satu akomodasi yang sangat berperan penting dalam kemajuan tingkat pariwisata di tanah air adalah fasilitas menginap bagi para wisman seperti hotel baik hotel berbintang maupun hotel tidak berbintang. Untuk melihat tingkat perkembangan sektor pariwisata dapat diukur dari beberapa indikator yang mempengaruhinya, yaitu dengan melihat perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel dan Rata-rata Lama Menginap Wisatawan.

Tabel 9.5. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Menurut Provinsi (persen), Tahun 2012–2016

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016 ^x
Aceh	45,03	44,57	50,56	47,95	46,21
Sumatera Utara	45,14	45,31	50,59	56,12	54,44
Sumatera Barat	50,48	54,05	52,65	49,85	53,33
Riau	46,52	41,76	43,42	45,09	48,72
Jambi	47,11	48,39	46,58	44,08	50,73
Sumatera Selatan	51,41	47,46	46,90	51,57	53,80
Bengkulu	40,74	46,56	48,71	53,20	57,92
Lampung	58,37	54,03	57,11	48,83	52,10
Kep. Bangka Belitung	44,86	41,71	40,19	39,21	39,72
Kepulauan Riau	48,42	49,17	48,18	49,42	48,28
DKI Jakarta	56,37	55,68	58,27	62,47	63,98
Jawa Barat	45,92	48,22	48,60	46,20	56,42
Jawa Tengah	48,58	49,92	46,89	46,13	44,38
DI Yogyakarta	55,45	56,48	57,28	59,38	56,04
Jawa Timur	47,44	46,22	50,81	55,56	58,68
Banten	37,83	52,60	48,77	57,31	52,60
Bali	58,63	59,22	59,88	61,08	61,46
Nusa Tenggara Barat	47,46	51,05	49,23	41,84	42,90
Nusa Tenggara Timur	40,62	39,48	40,81	46,44	52,24
Kalimantan Barat	54,19	54,27	49,48	49,33	51,52
Kalimantan Tengah	53,81	60,92	57,74	54,84	54,46
Kalimantan Selatan	52,71	52,65	50,66	46,55	43,73
Kalimantan Timur	59,47	61,24	56,73	57,14	49,24
Kalimantan Utara ¹	-	51,58	42,00
Sulawesi Utara	54,07	52,91	53,42	59,69	61,98
Sulawesi Tengah	63,55	69,77	53,82	59,29	59,85
Sulawesi Selatan	49,60	53,93	48,79	46,09	42,75
Sulawesi Tenggara	52,24	49,42	37,63	39,24	39,56
Gorontalo	74,09	56,12	41,98	40,63	49,52
Sulawesi Barat	42,93	34,44	31,35	38,65	44,73
Maluku	33,55	41,28	38,35	37,49	39,14
Maluku Utara	35,11	35,81	44,06	41,44	45,79
Papua Barat	52,48	51,78	49,38	42,85	45,99
Papua	50,69	49,81	49,18	52,29	58,49
Indonesia	51,55	52,22	52,56	53,92	54,34

Catatan : ^x Angka sementara

¹ Data tahun 2013-2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : Statistik Indonesia 2017

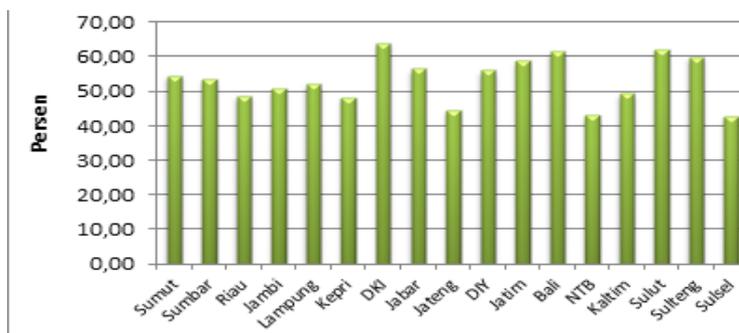
Selama kurun waktu 2011-2015, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di tanah air secara total selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. TPK hotel berbintang selama lima tahun terakhir selalu berada di atas 50 persen. Pada tahun 2012 TPK hotel berbintang mencapai 51,55 persen, TPK tahun 2013 sebesar 52,22 persen dan terus meningkat hingga tahun 2016 yaitu mencapai 54,34 persen. Provinsi yang memiliki TPK tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 61,98 persen, sementara Provinsi Bali mencapai 61,46 persen dan TPK terendah terjadi di Provinsi Maluku 39,14 persen.

Peningkatan TPK hotel berbintang ini tidak terlepas dari meningkatnya TPK hotel berbintang di sebagian besar provinsi di Indonesia. Tercatat TPK Hotel berbintang di 23 provinsi pada tahun 2016 mengalami peningkatan, sementara 11 provinsi lainnya mengalami penurunan. Peningkatan TPK hotel berbintang tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 22,12 persen, lalu diikuti Provinsi Gorontalo dan Jambi masing-masing sebesar 21,88 persen dan 15,09 persen. Sementara dari 11 provinsi yang mengalami penurunan TPK hotel berbintang, yang tertinggi penurunannya terjadi di provinsi Kalimantan Utara turun sebesar 18,57 persen, dan penurunan terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah 0,69 persen.

Tabel 9.5 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2016 tercatat ada sebanyak 11 provinsi dengan angka TPK hotel berbintang di atas angka nasional. Angka TPK tertinggi tercatat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 63,98 persen, diikuti Provinsi Sulawesi Utara 61,98 persen dan Provinsi Bali 61,46 persen, sedangkan 8 provinsi lainnya mencatat angka TPK berkisar antara 54,44 persen sampai 59,85 persen. Sisanya sebanyak 23 provinsi yang mencatat angka TPK hotel berbintang di bawah angka nasional. Angka TPK hotel berbintang terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Maluku sebesar 39,14 persen diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara 39,56 persen, sedangkan 21 provinsi lainnya mencatat angka TPK antara 39,72 persen sampai 53,80 persen.

Rata-rata lama menginap bagi tamu asing maupun tamu domestik merupakan indikator lain untuk mengetahui perkembangan sektor akomodasi. Selama periode 2012-2016 rata-rata lama menginap baik tamu asing maupun domestik pada hotel berbintang cenderung berfluktuasi. Jika dilihat secara nasional rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang pada tahun 2012 mencapai 1,93 hari, kemudian naik pada tahun 2013 menjadi 1,98 hari. Rata-rata lama menginap kembali mengalami peningkatan tahun 2014 yaitu menjadi 2,15 hari, kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing menjadi 1,94 hari dan 1,83 hari. Selama 5 tahun terakhir pencapaian tertinggi rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang terjadi pada tahun 2014.

Gambar 9.2
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Hotel Berbintang
di 17 Provinsi (persen), Tahun 2016



Tabel 9.6. Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Menurut Provinsi
(hari), Tahun 2012–2016

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016 [*]
Aceh	1,86	1,89	2,32	1,90	1,68
Sumatera Utara	1,54	1,54	1,76	1,66	1,58
Sumatera Barat	1,44	1,68	1,92	1,45	1,41
Riau	1,80	1,80	1,96	1,59	1,58
Jambi	1,71	2,10	1,99	1,75	1,91
Sumatera Selatan	1,76	1,76	2,09	1,87	1,73
Bengkulu	1,73	2,00	1,96	1,86	1,52
Lampung	1,65	1,67	2,06	1,49	1,75
Kep. Bangka Belitung	1,93	1,92	2,02	1,85	1,79
Kepulauan Riau	1,70	1,72	2,05	1,88	1,96
DKI Jakarta	1,99	1,94	2,25	2,05	1,89
Jawa Barat	1,59	1,69	1,67	1,57	1,89
Jawa Tengah	1,56	1,50	1,56	1,51	1,40
DI Yogyakarta	1,78	1,70	1,90	1,70	1,65
Jawa Timur	1,78	1,70	1,90	1,87	1,74
Banten	1,22	1,42	1,62	1,67	1,61
Bali	3,03	3,28	3,47	3,06	2,97
Nusa Tenggara Barat	2,66	2,83	2,94	2,23	1,78
Nusa Tenggara Timur	2,59	2,02	2,13	2,03	2,07
Kalimantan Barat	1,83	1,88	1,85	1,75	1,67
Kalimantan Tengah	1,75	1,78	1,77	1,66	1,47
Kalimantan Selatan	1,84	1,72	1,70	1,32	1,52
Kalimantan Timur	2,30	2,42	2,10	2,04	1,61
Kalimantan Utara ¹	-	1,96	1,52
Sulawesi Utara	2,12	2,26	2,50	1,96	2,16
Sulawesi Tengah	1,58	1,68	1,86	2,17	1,94
Sulawesi Selatan	1,87	1,86	1,84	1,97	1,54
Sulawesi Tenggara	2,22	1,99	1,87	1,70	1,67
Gorontalo	2,07	1,97	1,99	1,45	1,19
Sulawesi Barat	2,06	1,57	1,38	1,47	1,79
Maluku	2,33	2,56	2,05	2,02	2,06
Maluku Utara	1,71	2,17	2,46	2,34	2,48
Papua Barat	2,41	2,32	2,33	2,30	1,92
Papua	3,00	3,00	2,52	3,10	2,01
Indonesia	1,93	1,98	2,15	1,94	1,83

Catatan : * Angka sementara

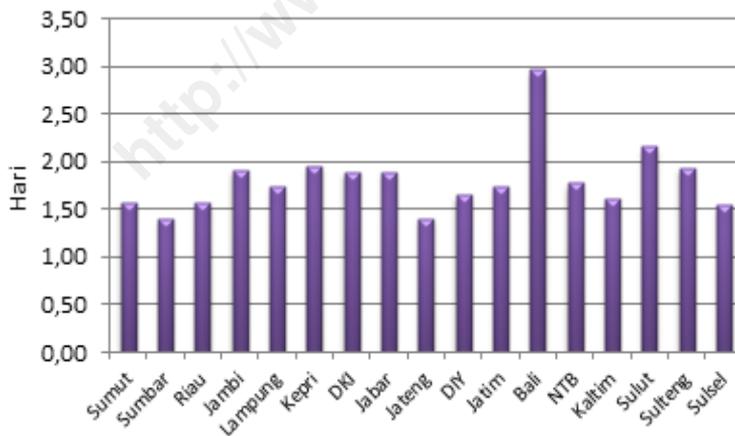
¹ Data tahun 2013-2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : Statistik Indonesia 2017

Penurunan rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang tahun 2015 tidak lepas dari penurunan rata-rata lama menginap yang terjadi di 24 provinsi di Indonesia. Penurunan tertinggi rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang terjadi di Provinsi Papua yaitu turun selama 1,09 hari, dari 3,10 hari tahun 2015 menjadi 2,01 hari pada tahun 2016. Penurunan yang cukup tinggi berikutnya terjadi di Nusa Tenggara Barat 0,45 hari, Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan masing-masing mengalami penurunan 0,44 hari dan 0,43 hari. Sementara provinsi yang menunjukkan peningkatan rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang terjadi di 10 provinsi diantaranya Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Barat masing-masing naik 0,32 hari, sedangkan sisanya mengalami kenaikan berkisar antara 0,04 hari sampai 0,26 hari.

Jika dilihat menurut provinsi, pada tahun 2016 terdapat hanya 12 provinsi yang mencatatkan rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang di atas angka nasional, sementara 22 provinsi lainnya masih berada di bawah angka nasional. Bali masih memiliki daya tarik pariwisata yang sangat memikat para wisatawan. Pada tahun 2016, rata-rata lama tamu menginap pada hotel berbintang di Provinsi Bali mencapai 2,97 hari, atau tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

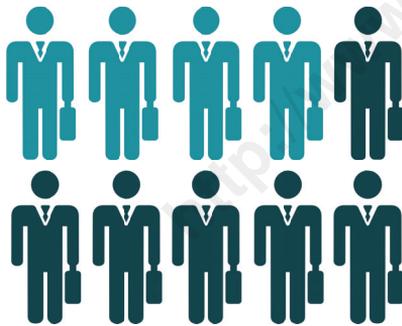
Gambar 9.3
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia Pada Hotel Berbintang di 17 Provinsi (hari), Tahun 2016



<http://www.bps.go.id>

KONDISI KETENAGAKERJAAN 10

KUALITAS TENAGA KERJA DI INDONESIA MASIH RENDAH



4 dari 10 pekerja
Indonesia lulusan
SD ke bawah



<http://www.bps.go.id>

Kesempatan kerja merupakan akar bagi nilai indikator pembangunan ekonomi. Lapangan kerja yang memadai akan mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, kondisi tersebut juga akan menyempitkan kesenjangan pendapatan antarindividu. Oleh karena itu, tersedianya lapangan kerja baru adalah gambaran tercapainya pembangunan ekonomi. Apalagi dalam rangka menghadapi bonus demografi pada 2020 nanti, pemerintah tak hanya berupaya meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga terus meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan. Bonus demografi adalah suatu keadaan dimana jumlah penduduk produktif (berumur 15-24 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk nonproduktif (berumur di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Untuk mengoptimalkan kondisi tersebut, penduduk angkatan kerja harus terserap dalam pasar tenaga kerja dengan baik (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2017).

Menurut Borjas (2010), terdapat tiga pemeran dalam pasar tenaga kerja, yaitu pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Pekerja merupakan pemeran utama dalam pasar tenaga kerja dan berorientasi pada manfaat atau balas jasa yang diterima. Kemudian, perusahaan mempunyai kewenangan untuk mempekerjakan dan memberhentikan pekerja. Perusahaan sangat berprinsip pada perolehan keuntungan sebesar-besarnya. Yang terakhir, pemerintah sangat berperan dalam membuat peraturan mengenai pajak dan aturan dasar tentang ketenagakerjaan.

Sebagai pemeran utama, pekerja atau sumber daya manusia (SDM) mempunyai peran penting dalam hal waktu dan energi di dunia pasar tenaga kerja. Dalam teori klasik Adam Smith, sumber daya manusia adalah faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu negara. Teori tersebut didasarkan adanya peran sumber daya manusia yang baik akan mampu mengelola sumber daya lainnya secara optimal dan bermanfaat bagi kehidupan. Dari situ dapat dikatakan bahwa SDM adalah elemen utama dibandingkan elemen lainnya (modal, teknologi, dan uang). Manusia adalah elemen yang mengendalikan elemen lainnya dan yang berpengaruh dalam pengelolaan yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran.

Meski demikian, tercapainya sasaran dalam dunia kerja sangat bergantung pada kualitas dari sumber daya manusia. SDM yang andal akan meningkatkan persaingan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Kompetensi SDM di Indonesia ini juga telah menjadi fokus bagi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia demi menunjang pembangunan nasional di segala bidang.

Angkatan Kerja sebagai Modal Pembangunan

Sumber daya manusia yang produktif adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun dan ke atas) yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Penduduk usia kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang aktif bekerja, sementara tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan, dan golongan lainnya.

Penduduk usia kerja di Indonesia terus bertambah jumlahnya setiap tahunnya. Kondisi ini sangat berkaitan dengan akan adanya bonus demografi di tahun 2020 mendatang. Terlebih lagi selama tahun 2013-2016, jumlah angkatan kerja meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 1,44 persen setiap tahunnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja terlihat signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu dari 122,38 juta orang menjadi 125,44 juta orang. Peningkatan tersebut juga terjadi pada Februari 2017 yang mencapai hingga 131,54 juta orang. Di sisi lain, jumlah bukan angkatan kerja sedikit mengalami penurunan, dari 63,72 juta orang di tahun 2015 menjadi 63,65 juta orang di tahun 2016. Pada Februari 2017, jumlah penduduk bukan angkatan kerja juga terus menurun hingga 59,04 juta orang.

Besarnya jumlah angkatan kerja ini dapat menjadi modal pembangunan. Penduduk yang produktif akan mendorong perekonomian negara dengan cepat. Namun demikian, hal tersebut harus didukung dengan adanya lapangan kerja yang memadai. Sebaliknya, respon yang tidak tepat terhadap pertumbuhan angkatan kerja akan menjadi beban demografi bagi pemerintah. Jumlah pengangguran yang meningkat akan berdampak tidak hanya bagi perekonomian, tetapi juga bagi keadaan sosial dan politik.

Angkatan kerja di Indonesia didominasi oleh laki-laki, sedangkan bukan angkatan kerja di Indonesia didominasi oleh perempuan. Pada tahun 2016, dari total angkatan kerja, sebanyak 77,36 juta orang (61,67 persen) adalah laki-laki. Sementara itu, jumlah bukan angkatan kerja laki-laki sebanyak 17,02 juta orang atau hanya 26,73 persen dari total bukan angkatan kerja. Kaum laki-laki lebih cenderung untuk masuk ke golongan angkatan kerja, dimana dari 10 penduduk laki-laki usia kerja, 8 diantaranya termasuk ke angkatan kerja. Sementara itu, porsi kaum perempuan

Tabel 10.1. Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013– 2017

Tahun	Jenis Kelamin	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
2013 (Agustus)	L	70 335 241	4 508 503	74 843 744	14 931 437
	P	42 425 831	2 902 428	45 328 259	44 863 921
	L+P	112 761 072	7 410 931	120 172 003	59 795 358
2014 (Agustus)	L	71 463 307	4 362 787	75 826 094	15 475 420
	P	43 164 719	2 882 118	46 046 837	45 643 853
	L+P	114 628 026	7 244 905	121 872 931	61 119 273
2015 (Agustus)	L	72 150 588	4 660 004	76 810 592	16 053 422
	P	42 668 611	2 900 818	45 569 429	47 667 474
	L+P	114 819 199	7 560 822	122 380 021	63 720 896
2016 (Agustus)	L	72 943 627	4 411 543	77 355 170	17 016 982
	P	45 468 346	2 620 232	48 088 578	46 635 992
	L+P	118 411 973	7 031 775	125 443 748	63 652 974
2017 (Februari)	L	74 766 752	4 238 564	79 005 316	16 125 277
	P	49 772 097	2 766 698	52 538 795	42 918 530
	L+P	124 538 849	7 005 262	131 544 111	59 043 807

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

yang masuk dalam angkatan kerja tercatat lebih rendah, dimana dari 10 penduduk perempuan usia kerja, hanya 5 diantaranya masuk ke dalam golongan angkatan kerja.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja antara lain dipengaruhi faktor kultural. Peran perempuan dalam mengurus keluarga dan rumah tangga menjadi salah satu penyebab banyaknya jumlah perempuan di golongan bukan angkatan kerja. Selain itu, faktor struktural juga mendorong kondisi tersebut, dimana masih ada beberapa anggapan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Dengan demikian, banyak perempuan yang hanya berada di rumah untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan tugas untuk mencari nafkah menjadi tanggung jawab kaum laki-laki.

Jumlah penduduk yang bekerja bertambah setiap tahunnya, dari 112,76 juta orang (2013) menjadi 118,41 juta orang (2016), sementara jumlah pengangguran menurun dari 7,41 juta orang (2013) menjadi 7,03 juta orang (2016). Secara persentase, kemampuan pasar dalam menyerap tenaga kerja terlihat membaik secara perlahan. Pada tahun 2015, sekitar 93,82 persen angkatan kerja telah mendapatkan pekerjaan dan kemudian meningkat menjadi 94,39 persen pada tahun 2016.

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menerapkan paket-paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Beberapa paket tersebut adalah pembenahan izin investasi yang lebih cepat dan sederhana agar menarik para investor masuk ke Indonesia. Pemerintah juga meningkatkan kemudahan bagi wirausahawan atau industri padat karya untuk mengakses perbankan dengan menurunkan tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tidak hanya itu, mereka juga diberikan keringanan dalam hal pajak. Upaya-upaya tersebut dilakukan pemerintah guna mendorong kesempatan kerja yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pekerjaan yang layak (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2016).

Kondisi ketenagakerjaan juga dapat dianalisis dari beberapa indikator, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TPAK berguna untuk mengetahui persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk produktif secara ekonomi. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Kemudian, TKK menggambarkan kesempatan penduduk usia kerja untuk terserap pada pasar kerja.

TPAK di Indonesia mengalami penurunan yang terus menerus selama tahun 2013-2015, tetapi kembali meningkat pada tahun 2016. TPAK Indonesia pada tahun 2013 adalah 66,77 persen, turun menjadi 65,76 persen pada tahun 2015. Akan tetapi, TPAK pada tahun 2016 sedikit mengalami peningkatan menjadi 66,34 persen. Semakin tingginya TPAK menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian negara semakin meningkat. Peningkatan *labour supply* ini juga terus terjadi hingga Februari 2017 yang mencapai 69,02 persen.

Tabel 10.2. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013–2017

Jenis Kelamin	2013 (Agustus)	2014 (Agustus)	2015 (Agustus)	2016 (Agustus)	2017 (Februari)
TPAK					
Laki-Laki	83,37	83,05	82,71	81,97	83,05
Perempuan	50,26	50,22	48,87	50,77	55,04
Total	66,77	66,60	65,76	66,34	69,02
TPT					
Laki-Laki	6,02	5,75	6,07	5,70	5,36
Perempuan	6,40	6,26	6,37	5,45	5,27
Total	6,17	5,94	6,18	5,61	5,33
TKK					
Laki-Laki	93,98	94,25	93,93	94,30	94,64
Perempuan	93,60	93,74	93,63	94,55	94,73
Total	93,83	94,06	93,82	94,39	94,67

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan kerja di Indonesia, BPS

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK untuk laki-laki cenderung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013, TPAK laki-laki tercatat sebesar 83,37 persen dan menurun menjadi 81,97 persen pada tahun 2016. Di sisi lain, TPAK perempuan mengalami peningkatan dari 50,26 persen (2013) menjadi 50,77 persen (2016). Hal ini menunjukkan adanya dorongan bagi kaum perempuan untuk masuk dan ingin terlibat dalam pasar tenaga kerja. Pemikiran *stereotip* dan budaya *maskulin* sudah mulai memudar. Kaum perempuan sudah banyak yang berperan aktif dalam pembangunan nasional. Di dewasa ini, perempuan tidak hanya sebagai komponen pendukung keluarga, tetapi juga sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan produktivitas nasional dan perekonomian negara. Meski demikian, TPAK perempuan ini masih jauh berada di bawah TPAK laki-laki.

Pasokan tenaga kerja yang terus meningkat harus diikuti dengan terciptanya lapangan kerja baru. Jika pasokan tenaga kerja yang banyak tidak ditangani dengan baik, jumlah penganggur akan membengkak. Jumlah pengangguran di Indonesia cukup fluktuatif. Pada tahun 2013, jumlah pengangguran ada sebanyak 7,41 juta orang, kemudian menurun menjadi 7,24 juta orang (2014), tetapi meningkat menjadi 7,56 juta orang (2015), dan menurun kembali menjadi 7,03 juta orang (2016). TPT di Indonesia juga menurun dari 6,17 persen (2013) menjadi 5,61 persen (2016). Pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terus meningkat telah mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perkembangan TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama. TPT keduanya mengalami penurunan di tahun 2016. Akan tetapi, penurunan TPT perempuan lebih signifikan menurun dibandingkan TPT laki-laki. TPT laki-laki menurun dari 6,07 persen (2015) menjadi 5,70 persen (2016). Di sisi lain, TPT perempuan menurun dari 6,37 persen (2015) menjadi 5,45 persen (2016). Kondisi ini cukup menarik karena TPT perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPT laki-laki. Padahal selama tahun 2013-2015, TPT perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki.

Peluang kesempatan kerja ini juga terlihat dari indikator TKK. TKK di Indonesia mengalami peningkatan dari 93,82 persen (2015) menjadi 94,39 persen

(2016). Angka tersebut berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja, 94 atau 95 orang diantaranya telah terserap dalam pasar kerja. Meningkatnya nilai TKK ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia semakin membaik. Peluang seseorang yang termasuk ke dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar.

Selama tahun 2013-2015, TKK perempuan selalu lebih rendah dibandingkan TKK laki-laki. Akan tetapi, pada tahun 2016, TKK perempuan melebihi TKK laki-laki, yaitu sebesar 94,55 persen untuk perempuan dan 94,30 untuk laki-laki. Meski demikian, kesenjangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan tidak terlihat secara signifikan. Kesetaraan gender sudah sangat digalakkan dalam dunia kerja, sehingga kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam perekonomian.

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi tempat tinggal, persentase penduduk usia kerja yang berpotensi aktif secara ekonomi di wilayah perdesaan lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Fakta tersebut ditunjukkan dengan lebih besarnya TPAK di perdesaan. TPAK di daerah perdesaan pun mengalami peningkatan yang lebih terlihat dibandingkan peningkatan TPAK di daerah perkotaan. TPAK di perdesaan meningkat dari 67,95 persen (2015) menjadi 69,21 persen (2016). Di sisi lain, peningkatan TPAK di perkotaan tidak cukup berarti, yaitu dari 63,88 persen (2015) menjadi 63,94 persen (2016).

Selanjutnya, perkembangan TPT di daerah perkotaan dan perdesaan memiliki pola yang sama dengan perkembangan TPT secara agregat. Selama periode 2013-2017, TPT perkotaan secara umum cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2013, TPT perkotaan tercatat sebesar 7,31 persen dan turun menjadi 6,50 persen di tahun 2017. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa lapangan kerja di daerah perkotaan mampu menyerap tenaga kerja yang ada cukup baik.

Tidak berbeda dengan daerah perkotaan, TPT di daerah perdesaan juga memperlihatkan hal yang sama. TPT perdesaan menurun dari 5,08 persen (2013)

Tabel 10.3. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2013–2017

Daerah Tempat Tinggal	2013 (Agustus)	2014 (Agustus)	2015 (Agustus)	2016 (Agustus)	2017 (Februari)
TPAK					
Perkotaan	64,20	64,47	63,88	63,94	66,33
Perdesaan	69,42	68,80	67,95	69,21	72,32
Jumlah	66,77	66,60	65,76	66,34	69,02
TPT					
Perkotaan	7,31	7,12	7,31	6,60	6,50
Perdesaan	5,08	4,81	4,93	4,51	4,00
Jumlah	6,17	5,94	6,18	5,61	5,33
TKK					
Perkotaan	92,69	92,88	92,69	93,40	93,50
Perdesaan	94,92	95,19	95,07	95,49	96,00
Jumlah	93,83	94,06	93,82	94,39	94,67

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

menjadi 4 persen (2017). Tingkat pengangguran di wilayah perdesaan yang lebih rendah bukan berarti tingkat kemiskinan di perdesaan juga lebih rendah. Tingkat kemiskinan di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya tenaga kerja di perdesaan yang terserap pada sektor pertanian dengan upah yang rendah.

Lapangan kerja yang kurang produktif dan keterampilan penduduk perdesaan yang minim mendorong adanya migran ke daerah perkotaan dan menjadi buruh migran/TKI di luar negeri untuk melepaskan dari kemiskinan di perdesaan. Kondisi tersebut turut menjadi penyebab rendahnya pengangguran di desa (*economy.okezone.com*, 2017). Meski demikian, pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan potensi ketenagakerjaan di desa. Hal ini sesuai dengan Nawacita poin ketiga, yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'. Kementerian ketenagakerjaan telah merancang Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk mengelola potensi-potensi ketenagakerjaan di desa, terutama desa kantong buruh migran. Program tersebut bertujuan untuk menekan minat warga desa untuk bekerja di luar negeri dan akan mengasah kompetensi penduduk desa melalui pelatihan. Dengan demikian, angkatan kerja di desa akan memperoleh keahlian baru dan dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha secara mandiri (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2016).

Pengangguran yang berkurang menunjukkan kesempatan kerja yang membaik. TTK di daerah perkotaan meningkat dari 92,69 persen pada tahun 2013 menjadi 93,40 persen pada tahun 2016. Begitu pula di daerah perdesaan, TTK meningkat dari 94,92 persen pada tahun 2013 menjadi 95,49 persen pada tahun 2016. Berbagai macam upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja telah mampu dengan baik dalam merespon pertumbuhan angkatan kerja. Upaya pemerintah yang telah dilakukan antara lain menyelenggarakan pelatihan kerja/profesi, menjalin sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, memberi kemudahan akses informasi mengenai lowongan pekerjaan, menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi, serta lainnya.

Variasi Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi

Kondisi ketenagakerjaan juga harus diperhatikan untuk setiap wilayah. Kesenjangan antarwilayah harus dikurangi untuk mengurangi penyebab kemiskinan. Setiap daerah memiliki potensi ketenagakerjaan yang berbeda. Persentase penduduk usia kerja yang dapat aktif secara ekonomi tertinggi pada tahun 2016 adalah Provinsi Bali, yaitu sebesar 77,24 persen. Padahal posisi ini sebelumnya diduduki oleh Provinsi Papua selama tiga tahun berturut-turut (tahun 2013-2015), sedangkan TPAK Papua tahun 2016 adalah 76,70 persen. Meski demikian, pada Februari 2017 TPAK tertinggi kembali diperoleh Papua dengan TPAK sebesar 77,30 persen. Di sisi lain, provinsi dengan TPAK terendah pada tahun 2016 adalah Jawa Barat, yaitu sebesar 60,65 persen. Posisi tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya dengan TPAK Jawa Barat sebesar 60,34 persen.

Selama tahun 2013-2016, jumlah provinsi dengan TPAK di atas angka nasional terus bertambah. Pada tahun 2013, terdapat 13 provinsi dengan TPAK di atas angka nasional, lalu meningkat menjadi 22 provinsi pada 2016, dan 24 provinsi pada Februari 2017. Provinsi-provinsi dengan TPAK di bawah angka nasional perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan persentase yang terlalu jauh di bawah angka nasional menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal potensi tenaga kerja.

Tabel 10.4. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, Tahun 2013–2017

Provinsi	TPAK					TKK					TPT				
	2013 (Agt)	2014 (Agt)	2015 (Agt)	2016 (Agt)	2017 (Feb)	2013 (Agt)	2014 (Agt)	2015 (Agt)	2016 (Agt)	2017 (Feb)	2013 (Agt)	2014 (Agt)	2015 (Agt)	2016 (Agt)	2017 (Feb)
Aceh	62,24	63,06	63,44	64,26	65,59	89,88	90,98	90,07	92,43	92,61	10,12	9,02	9,93	7,57	7,39
Sumatera Utara	70,62	67,07	67,28	65,99	69,13	93,55	93,77	93,29	94,16	93,59	6,45	6,23	6,71	5,84	6,41
Sumatera Barat	62,92	65,19	64,56	67,08	70,42	92,98	93,50	93,11	94,91	94,20	7,02	6,50	6,89	5,09	5,80
Riau	63,44	63,31	63,22	66,25	68,42	94,52	93,44	92,17	92,57	94,24	5,48	6,56	7,83	7,43	5,76
Jambi	62,68	65,58	66,14	67,54	70,84	95,24	94,92	95,66	96,00	96,33	4,76	5,08	4,34	4,00	3,67
Sumatera Selatan	66,75	68,85	68,53	71,59	72,12	95,16	95,04	93,93	95,69	96,20	4,84	4,96	6,07	4,31	3,80
Bengkulu	67,59	68,28	70,67	72,69	74,59	95,39	96,53	95,09	96,70	97,19	4,61	3,47	4,91	3,30	2,81
Lampung	64,84	66,98	65,60	69,61	71,63	94,31	95,21	94,86	95,38	95,57	5,69	4,79	5,14	4,62	4,43
Kep. Bangka Belitung	65,38	65,45	66,71	68,93	70,35	96,35	94,86	93,71	97,40	95,54	3,65	5,14	6,29	2,60	4,46
Kepulauan Riau	65,92	65,94	65,07	65,93	73,47	94,37	93,31	93,80	92,31	93,56	5,63	6,69	6,20	7,69	6,44
DKI Jakarta	67,79	66,61	66,39	66,91	70,18	91,37	91,53	92,77	93,88	94,64	8,63	8,47	7,23	6,12	5,36
Jawa Barat	62,82	62,76	60,34	60,65	64,60	90,84	91,55	91,28	91,11	91,51	9,16	8,45	8,72	8,89	8,49
Jawa Tengah	70,43	69,68	67,86	67,15	70,20	93,99	94,32	95,01	95,37	95,85	6,01	5,68	4,99	4,63	4,15
D.I. Yogyakarta	69,29	71,05	68,38	71,96	72,00	96,76	96,67	95,93	97,28	97,16	3,24	3,33	4,07	2,72	2,84
Jawa Timur	69,78	68,12	67,84	66,14	68,93	95,70	95,81	95,53	95,79	95,90	4,30	4,19	4,47	4,21	4,10
Banten	63,55	63,83	62,24	63,66	67,23	90,46	90,93	90,45	91,08	92,25	9,54	9,07	9,55	8,92	7,75
Bali	74,93	74,90	75,51	77,24	76,87	98,17	98,10	98,01	98,11	98,72	1,83	1,90	1,99	1,89	1,28
Nusa Tenggara Barat	65,42	66,62	66,54	71,57	72,62	94,70	94,25	94,31	96,06	96,14	5,30	5,75	5,69	3,94	3,86
Nusa Tenggara Timur	68,15	68,91	69,25	69,18	72,82	96,75	96,74	96,17	96,75	96,79	3,25	3,26	3,83	3,25	3,21
Kalimantan Barat	69,53	69,92	69,68	69,32	72,03	96,01	95,96	94,85	95,77	95,78	3,99	4,04	5,15	4,23	4,22
Kalimantan Tengah	68,50	68,55	71,11	71,30	73,64	97,00	96,76	95,46	95,18	96,87	3,00	3,24	4,54	4,82	3,13
Kalimantan Selatan	69,31	69,46	69,73	71,57	73,41	96,34	96,20	95,08	94,55	96,47	3,66	3,80	4,92	5,45	3,53
Kalimantan Timur	63,50	64,10	62,39	67,79	65,45	92,05	92,62	92,50	92,05	91,45	7,95	7,38	7,50	7,95	8,55
Kalimantan Utara	-	-	63,45	62,40	68,33	-	-	94,32	94,77	94,83	-	-	5,68	5,23	5,17
Sulawesi Utara	59,41	59,99	61,28	65,11	68,78	93,21	92,46	90,97	93,82	93,88	6,79	7,54	9,03	6,18	6,12
Sulawesi Tengah	65,56	66,76	67,51	72,28	73,87	95,81	96,32	95,90	96,71	97,03	4,19	3,68	4,10	3,29	2,97
Sulawesi Selatan	60,32	62,03	60,94	62,92	64,28	94,90	94,92	94,05	95,20	95,23	5,10	5,08	5,95	4,80	4,77
Sulawesi Tenggara	65,91	66,87	68,35	73,47	73,05	95,62	95,57	94,45	97,28	96,86	4,38	4,43	5,55	2,72	3,14
Gorontalo	61,46	62,83	63,65	67,89	70,44	95,85	95,82	95,35	97,24	96,35	4,15	4,18	4,65	2,76	3,65
Sulawesi Barat	66,83	71,05	70,27	71,90	70,68	97,65	97,92	96,65	96,67	97,02	2,35	2,08	3,35	3,33	2,98
Maluku	61,93	60,91	64,47	64,51	66,08	90,09	89,49	90,07	92,95	92,23	9,91	10,51	9,93	7,05	7,77
Maluku Utara	64,35	63,87	66,43	66,19	69,48	96,20	94,71	93,95	95,99	95,18	3,80	5,29	6,05	4,01	4,82
Papua Barat	66,69	68,29	68,68	70,05	70,20	95,60	94,98	91,92	92,54	92,48	4,40	5,02	8,08	7,46	7,52
Papua	77,70	78,66	79,57	76,70	77,30	96,85	96,56	96,01	96,65	96,04	3,15	3,44	3,99	3,35	3,96
Indonesia	66,77	66,60	65,76	66,34	69,02	93,83	94,06	93,82	94,39	94,67	6,17	5,94	6,18	5,61	5,33

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Bali masih menjadi provinsi dengan peluang kesempatan kerja tertinggi di Indonesia selama empat tahun berturut-turut (2013-2016). TKK Bali di tahun 2016 cenderung sama jika dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu sebesar 98,17 persen (2013) dan 98,11 persen (2016). Peningkatan TKK Bali terjadi pada Februari 2017 yang mencapai 98,72 persen. Angka TKK tersebut menunjukkan bahwa dari 100 angkatan kerja di Bali, 98 atau 99 orang diantaranya telah memiliki pekerjaan. Dengan TPAK tertinggi, Bali mampu menyerap tenaga kerja dengan baik. Kondisi ini menunjukkan efektifnya langkah-langkah yang telah dilakukan Disnakertrans Provinsi Bali dalam upaya menekan angka pengangguran. *Job fair* adalah salah satu langkah konkret yang telah dilakukan Disnakertrans Provinsi Bali. Kegiatan tersebut dapat menjadi penghubung bertemunya pencari tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja. Para pencari tenaga kerja akan lebih mudah mendapatkan informasi kesempatan kerja. Selain itu, Disnakertrans Bali juga akan mengupayakan adanya lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2016).

Di sisi lain, provinsi dengan TKK terendah berganti-ganti dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015, Maluku dan Aceh adalah provinsi dengan TKK terendah, yaitu 90,07 persen. Kemudian di tahun 2016, posisi tersebut bergeser ke Pulau Jawa, tepatnya Provinsi Banten dengan TKK sebesar 91,08 persen. Selanjutnya pada Februari 2017, provinsi dengan TKK terendah adalah Kalimantan Timur, yaitu sebesar 91,45 persen.

Sementara itu, sebagian besar provinsi mengalami penurunan pada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur justru cenderung meningkat, khususnya selama periode 2014-2017. TPT Kalimantan Timur meningkat dari 7,38 persen pada tahun 2014 menjadi 8,55 persen pada tahun 2017. Tingkat pengangguran yang tinggi di Kalimantan Timur tidak terlepas dari lapangan usaha yang mendominasi di provinsi tersebut, yaitu industri pertambangan dan penggalian.

Potret Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan. Akselerasi pembangunan ekonomi dapat terealisasi jika didukung dengan kualitas SDM yang baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja Indonesia juga akan menjadi modal bagi Indonesia untuk bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Isu kualitas tenaga kerja ini juga telah menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta penguatan daya saing tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja global.

Namun kenyataannya, kualitas tenaga kerja masih menjadi tantangan di Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar atau lebih rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja berdampak pada ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran yang tersedia dan pada gilirannya membuat dunia usaha sulit menyerap tenaga kerja yang ada. Tantangan lain adalah adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia usaha dan keterampilan tenaga kerja yang tersedia. Dengan demikian, posisi pekerjaan tersebut banyak yang ditempati oleh

pekerja dengan kemampuan di bawah kualifikasi. Kompetensi tenaga kerja yang hanya lulusan SD ini juga berkonsekuensi angkatan kerja akan lebih banyak terserap di industri padat karya.

Meski demikian, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Persentase tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013, tenaga kerja lulusan SD atau ke bawah menurun dari 47,72 persen menjadi 47,07 persen pada tahun 2014, kemudian menurun menjadi 44,27 persen pada tahun 2015, dan terus menurun hingga 42,20 persen pada tahun 2016. Untuk Februari 2017, persentasenya cenderung stabil, yaitu sebesar 42,22 persen.

Di sisi lain, persentase tenaga kerja dengan pendidikan SMA/ sederajat atau ke atas cenderung mengalami peningkatan. Selama tahun 2015-2016, tenaga kerja lulusan SMA/ sederajat meningkat sebesar 3,08 persen dan tenaga kerja lulusan Diploma I/II/III meningkat sebesar 7,32 persen. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada persentase tenaga kerja dengan pendidikan universitas, yaitu meningkat sebesar 12,49 persen. Peningkatan kualifikasi tenaga kerja tersebut menunjukkan peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, sehingga mereka memiliki nilai daya saing di pasar ASEAN dan internasional. Kualitas yang tinggi juga akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas.

Penguatan daya saing tenaga kerja ini juga terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai macam strategi. Strategi-strategi tersebut antara lain harmonisasi standar dan sertifikasi kompetensi, pengembangan program kerja sama, dan perluasan skala ekonomi terhadap sektor atau subsektor dengan produktivitas tinggi. Selain melalui pendidikan formal, pemerintah juga berupaya meningkatkan keahlian tenaga kerja dengan meningkatkan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah dan swasta, serta melalui program pemagangan kerja. Selain menciptakan lapangan kerja, pemerintah juga mendorong lahirnya wirausahawan baru dengan memberikan program pelatihan kewirausahaan dan memberikan bantuan sarana usaha (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2017). Dengan adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, produktif, dan dapat bersaing di pasar global.

Tabel 10.5. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2013–2017

Tingkat Pendidikan	2013 (Agustus)	2014 (Agustus)	2015 (Agustus)	2016 (Agustus)	2017 (Februari)
SD ke bawah	47,72	47,07	44,27	42,20	42,22
SMP	18,24	17,75	18,03	18,04	18,16
SMA	24,69	25,39	26,69	27,52	27,35
Diploma I/II/III	2,60	2,58	2,69	2,88	2,96
Universitas	6,75	7,21	8,32	9,36	9,31

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Nasional, BPS

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Masih Dominan dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja di Indonesia tersebar di seluruh jenis lapangan usaha. Sebagian besar tenaga kerja terserap ke lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meskipun demikian, kontribusi lapangan usaha ini terhadap perekonomian nasional bukanlah yang terbesar. Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada tahun 2016 adalah tertinggi kedua, yaitu 13,45 persen (www.bps.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi bukan berarti memiliki produktivitas yang tinggi pula.

Persentase tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013, persentase penduduk yang bekerja pada sektor tersebut adalah 34,78 persen, kemudian menurun menjadi 34,00 persen (2014), lalu menurun cukup signifikan menjadi 32,88 persen (2015), dan terus menurun menjadi 31,90 persen (2016). Bahkan penurunan terus terjadi sampai Februari 2017, yaitu sebesar 31,86 persen. Penurunan penyerapan tenaga kerja ini beriringan dengan adanya pergeseran struktur perekonomian, disamping adanya perlambatan laju Produk Domestik Bruto (PDB) lapangan usaha ini. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan PDB lapangan usaha ini adalah 4,24 persen dan terus melambat hingga 3,25 persen pada tahun 2016. Perlambatan pertumbuhan

Tabel 10.6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2013–2017

Lapangan Pekerjaan	2013 (Agt)	2014 (Agt)	2015 (Agt)	2016 (Agt)	2017 (Feb)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,78	34,00	32,88	31,90	31,86
B. Pertambangan dan Penggalian	1,26	1,25	1,15	1,24	1,09
C. Industri Pengolahan	13,79	13,63	13,53	13,41	13,72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,18	0,22	0,24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,19	0,23	0,20	0,29
F. Konstruksi	5,63	6,35	7,15	6,74	5,75
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,61	18,27	18,59	18,20	18,67
H. Transportasi dan Pergudangan	4,10	4,02	4,02	4,20	3,96
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,76	4,20	4,56	5,28	5,69
J. Informasi dan Komunikasi	0,48	0,50	0,47	0,58	0,68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,33	1,32	1,45	1,46	1,44
L. Real Estate	0,17	0,23	0,25	0,30	0,27
M,N. Jasa Perusahaan	1,09	1,11	1,19	1,21	1,16
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,24	3,20	3,51	4,21	4,03
P. Jasa Pendidikan	4,48	4,74	4,88	5,14	5,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	1,16	1,27	1,48	1,48
R,S,T,U. Jasa lainnya	5,79	5,66	4,68	4,23	4,53

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (diolah), BPS

PDB dan menurunnya penyerapan tenaga kerja menunjukkan semakin menurunnya eksistensi dan peran pertanian, kehutanan, dan perikanan di era global ini.

Kemudian, lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak kedua adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diikuti industri pengolahan. Persentase penyerapan tenaga kerja di kedua lapangan usaha tersebut cenderung stabil. Lapangan usaha perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor menyerap sebesar 18,20 persen tenaga kerja pada tahun 2016 dan lapangan usaha industri pengolahan menyerap sebesar 13,41 persen tenaga kerja di tahun yang sama.

Selama tahun 2013-2016, peningkatan persentase tenaga kerja tertinggi ada pada lapangan usaha real estate, yaitu sebesar 19,94 persen per tahun. Lapangan usaha dengan peningkatan persentase tenaga kerja tertinggi kedua adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu dengan peningkatan sebesar 11,94 persen per tahun. Keberlanjutan lapangan usaha ini memang sangat baik. Bidang pariwisata juga telah menjadi perhatian bagi pemerintah dalam perannya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan pariwisata di Indonesia mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru di sektor penyedia akomodasi dan makan minum.

Upah Pekerja

Upah adalah balas jasa, dapat berupa uang atau barang dan diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Upah mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja pekerja. Upah yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan akan mendorong pekerja untuk bekerja lebih giat lagi. Penghargaan terhadap prestasi pekerja juga dapat diwujudkan dalam upah yang akan diterimanya. Upah yang diberikan seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu, kesejahteraan pekerja dapat terjamin.

Perlindungan pekerja dalam hal upah dilakukan melalui kebijakan upah minimum. Upah minimum adalah sistem pengupahan agar nilai upah yang diterima cukup dan layak untuk menghidupi kehidupan bagi setiap pekerja dan keluarganya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum merupakan standar minimum yang dijadikan acuan oleh pelaku usaha untuk memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usahanya. Selain itu, upah minimum juga dapat menjadi alat proteksi bagi perusahaan untuk menjaga produktivitas pekerja.

Kebijakan mengenai upah minimum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Formula penghitungan Upah minimum telah diatur dalam Peraturan Menteri dengan mempertimbangkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dengan inflasi nasional sebesar 3,02 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen pada tahun 2016, penghitungan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 diperoleh sebesar 8,25 persen. Namun tidak serta merta semua provinsi melaksanakan apa

**Tabel 10.7. Rata-Rata UMP (ribu rupiah) dan Pertumbuhan UMP (persen),
Tahun 2006–2017**

Tahun	Rata-Rata UMP	Pertumbuhan UMP (%)
2006	602,70	18,71
2007	673,26	11,71
2008	743,17	10,38
2009	841,53	13,24
2010	908,82	8,00
2011	988,83	8,80
2012	1 088,90	10,12
2013	1 355,33	24,47
2014	1 579,56	16,54
2015	1 776,17	12,45
2016	1 967,57 ¹	10,78
2017	2 074,24	5,42

Catatan : ¹ Angka revisi

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi

yang telah diputuskan dalam pelaksanaan pengupahan oleh pemerintah. Tercatat bahwa 30 provinsi yang telah mengikuti PP Pengupahan, 4 provinsi diantaranya melaksanakan penyesuaian pertahapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan 4 sisanya tidak mengikuti PP Nomor 78 tahun 2015. Keempat provinsi yang belum mengikuti PP 78/2015 adalah Kalimantan Selatan, NTT, Papua, dan Aceh (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2016).

Rata-rata UMP 2017 untuk 34 Provinsi diperoleh sekitar 2,07 juta rupiah. Rata-rata UMP tersebut sudah mencakup tiga provinsi yang pada tahun 2016 tidak menetapkan UMP dan pada tahun 2017 menetapkan UMP, yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rata-rata UMP 2017 tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,42 persen. Meski demikian, jika dilihat berdasarkan provinsi hampir semua provinsi mengalami kenaikan UMP 2017 dengan kisaran 8-18 persen. Rata-rata kenaikan UMP secara nasional tahun 2017 adalah sebesar 8,9 persen.

Provinsi dengan UMP 2017 tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 3.355.750,-. Sementara itu, UMP 2017 terendah adalah Provinsi Yogyakarta dengan UMP sebesar Rp 1.337.645,-. Kemudian, kenaikan UMP 2017 tertinggi adalah Provinsi Aceh, dengan kenaikan sebesar 18,01 persen, sedangkan kenaikan UMP 2017 terendah ada di Provinsi NTT, yaitu sebesar 7,02 persen.

UMP ini merupakan kebijakan standar minimum upah yang harus diberikan kepada pekerja/buruh. Besaran upah yang diberikan, bergantung pada perusahaan dan produktivitas pekerja. Pada tahun 2016, rata-rata upah yang diterima pekerja adalah Rp 2,28 juta. Nilai tersebut meningkat setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 14,37 persen per tahun.

Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, rata-rata upah yang diterima pekerja perkotaan selalu lebih besar dari yang diterima pekerja perdesaan dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio rata-rata upah antara

daerah perkotaan dan perdesaan bernilai lebih besar dari satu. Selama tahun 2014-2017, rasio tersebut cukup fluktuatif, yaitu sebesar 1,53 persen (2014), kemudian meningkat menjadi 1,58 persen (2015), dan menurun kembali menjadi 1,50 persen (2016). Akan tetapi rasio upah tersebut meningkat kembali menjadi 1,60 persen pada Februari 2017. Tingginya upah di daerah perkotaan mendorong terjadinya migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Fenomena tersebut akan berujung pada tumbuhnya pekerjaan informal dan bahkan pengangguran.

Sebagian besar pekerja menerima upah sebesar satu juta rupiah atau lebih. Persentasenya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 60,50 persen (2014) menjadi 63,33 persen (2015), dan meningkat cukup signifikan menjadi 75,56 persen (2016). Sementara itu, persentase pekerja dengan upah Rp 200.000 – Rp 599.999 dan Rp 600.000 – Rp 999.999 menurun cukup tajam/signifikan, yang terjadi pada tahun 2015 ke tahun 2016. Persentase pekerja yang mendapatkan upah Rp 200.000 – Rp 599.999 menurun tajam dari 17,67 persen menjadi 9,26 persen dan persentase pekerja yang menerima upah Rp 600.000 – Rp 999.999 dari 16,07 persen turun menjadi 13,86 persen. Penurunan yang tajam pada pekerja dengan kelompok upah yang kecil menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja mulai meningkat.

Selanjutnya, kesejahteraan pekerja di daerah perdesaan perlahan juga meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata upah pekerja dan persentase pekerja perdesaan yang menerima satu juta rupiah terus meningkat.

Tabel 10.8. Distribusi Pekerja* Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Tahun 2014–2017

Daerah Tempat Tinggal	Upah (Rp)				Rata- Rata Upah (Rp)
	< 200 000	200 000 - 599 999	600 000 - 999 999	> 999 999	
Tahun 2014 (Agt)					
Perkotaan	1,93	14,21	16,31	67,55	2 003 700
Perdesaan	2,77	22,56	26,21	48,46	1 307 027
Perkotaan+Perdesaan	2,24	17,29	19,97	60,50	1 746 304
Tahun 2015 (Agt)					
Perkotaan	2,42	14,65	13,45	69,48	2 132 961
Perdesaan	3,89	23,34	20,96	51,81	1 346 632
Perkotaan+Perdesaan	2,93	17,67	16,07	63,33	1 859 170
Tahun 2016 (Agt)					
Perkotaan	1,03	6,91	11,44	80,62	2 600 683
Perdesaan	1,85	13,33	18,06	66,77	1 734 064
Perkotaan+Perdesaan	1,33	9,26	13,86	75,56	2 284 115
Tahun 2017(Feb)					
Perkotaan	0,47	8,33	10,68	80,52	2 795 540
Perdesaan	1,01	17,10	16,58	65,31	1 744 755
Perkotaan+Perdesaan	0,66	11,43	12,76	75,15	2 424 489

Catatan: *Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Pada tahun 2016, sudah lebih dari 60 persen atau tepatnya sebesar 66,77 persen pekerja perdesaan menerima upah minimal satu juta rupiah. Padahal pada tahun 2014, pekerja perdesaan yang menerima upah minimal satu juta rupiah hanya sebesar 48,46 persen. Namun demikian, persentase tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Persentase pekerja daerah perkotaan yang menerima upah minimal satu juta rupiah pada tahun 2016 ada sebesar 80,62 persen.

Jika dianalisis berdasarkan jenis kelamin, rata-rata upah yang diterima pekerja laki-laki lebih tinggi daripada rata-rata upah yang diterima perempuan. Rasio antara rata-rata upah pekerja laki-laki dan rata-rata upah pekerja perempuan cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir. Rasio tersebut meningkat dari 1,16 (2015) menjadi 1,23 (2016). Kemudian pada Februari 2017, rasio tersebut masih meningkat hingga 1,27. Angka rasio upah antara pekerja laki-laki dan perempuan yang terus meningkat menunjukkan masih adanya kesenjangan atau diskriminasi untuk memberikan balas jasa bagi pekerja laki-laki dan perempuan.

Meski pertumbuhan upah pekerja perempuan sedikit lebih cepat daripada pekerja laki-laki, laju pertumbuhan tersebut belum mampu menyamakan dengan nilai upah pekerja laki-laki. Selama tahun 2014-2016, laju pertumbuhan rata-rata upah pekerja perempuan adalah 15,19 persen per tahun, sedangkan laju pertumbuhan rata-rata upah pekerja laki-laki adalah 14,18 persen per tahun. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut belum signifikan, sehingga terjadi kesenjangan upah yang masih lebar antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Pada tahun 2016,

Tabel 10.9. Distribusi Pekerja* Menurut Upah dan Jenis Kelamin (persen), Tahun 2014–2017

Jenis Kelamin	Besar Upah (Rp)				Rata-Rata Upah (Rp)
	< 200 000	200 000 - 599 999	600 000 - 999 999	> 999 999	
Tahun 2014 (Agt)					
Laki-Laki	1,17	12,27	19,70	66,86	1 868 203
Perempuan	4,50	27,85	20,52	47,13	1 490 202
Laki-Laki+Perempuan	2,24	17,29	19,97	60,50	1 746 304
Tahun 2015 (Agt)					
Laki-Laki	2,18	14,31	15,71	67,81	1 944 251
Perempuan	4,56	24,94	16,85	53,65	1 675 269
Laki-Laki+Perempuan	2,93	17,67	16,07	63,33	1 859 170
Tahun 2016 (Agt)					
Laki-Laki	0,64	5,43	11,28	82,65	2 435 619
Perempuan	2,73	17,01	19,07	61,19	1 977 207
Laki-Laki+Perempuan	1,33	9,26	13,86	75,56	2 284 115
Tahun 2017 (Feb)					
Laki-Laki	0,44	6,99	10,26	82,31	2 615 859
Perempuan	1,10	20,03	17,62	61,25	2 053 394
Laki-Laki+Perempuan	0,66	11,43	12,76	75,15	2 424 489

Catatan: * Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian
 Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

rata-rata upah yang diterima pekerja laki-laki sebesar Rp 2,44 juta, sedangkan rata-rata upah yang diterima pekerja perempuan sebesar Rp 1,98 juta. Perbedaan upah tersebut dapat dikarenakan beberapa faktor, seperti kurangnya penghargaan bagi pekerja perempuan, posisi perempuan pada pekerjaan yang bernilai rendah, pandangan perempuan sebagai pembantu ekonomi, dan kecenderungan perempuan berada dalam sektor yang informal (*International Labour Office*, 2015).

Meski demikian, kesejahteraan pekerja tidak hanya dilihat dari upah saja tetapi juga dilihat dari jaminan sosial. Jaminan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dapat memberikan berbagai manfaat bagi keberlangsungan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Jaminan sosial ini mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat akan pentingnya manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2017). Dengan demikian, perlindungan pekerja dalam hal jaminan sosial ini dapat menyentuh seluruh lapisan pekerja baik sektor formal maupun informal.

Pertumbuhan Ekonomi tidak Diiringi dengan Penciptaan Lapangan Kerja yang Memadai

Tersedianya lapangan kerja yang memadai telah menjadi sasaran strategis pembangunan nasional. Angkatan kerja yang terserap dengan optimal dapat mendukung kegiatan pembangunan. Pertumbuhan angkatan kerja yang seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja jelas dapat menurunkan angka pengangguran. Kondisi tersebut akan berujung pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

Ketersediaan lapangan kerja yang baru erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi akan mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan antara kedua indikator ini dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Selama tahun 2014-2016, elastisitas kesempatan kerja di Indonesia hanya sebesar 0,38 persen. Angka elastisitas kesempatan kerja yang di bawah satu persen tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum mampu memperluas kesempatan kerja. Angka tersebut berarti setiap satu persen kenaikan PDB hanya mampu meningkatkan 0,38 persen kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja di tahun tersebut masih sangat kecil, angka ini hanya sedikit meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2013-2015, elastisitas kesempatan kerja di Indonesia hanya sebesar 0,22 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum diiringi dengan menciptakan kesempatan kerja yang luas.

Elastisitas kesempatan kerja ini juga dapat dianalisis berdasarkan lapangan usaha. Dari 17 lapangan usaha, sepuluh diantaranya memiliki nilai elastisitas kesempatan kerja di bawah satu persen. Bahkan, sebanyak tiga lapangan usaha

Tabel 10.10. Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha, Tahun 2014–2016

Kategori Lapangan Usaha	Rata-Rata Laju		Elastisitas Kesempatan Kerja
	Pertumbuhan PDB (%)	Kesempatan Kerja (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,55	3,51	-0,44
B. Pertambangan dan Penggalian	1,21	-1,20	-1,00
C. Industri Pengolahan	0,81	4,31	0,19
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,76	3,12	4,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,05	5,32	0,76
F. Konstruksi	4,69	5,79	0,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,46	3,26	0,45
H. Transportasi dan Pergudangan	3,83	7,21	0,53
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,91	4,62	3,01
J. Informasi dan Komunikasi	9,49	9,28	1,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,97	8,75	0,80
L. Real Estate	15,48	4,21	3,68
M,N. Jasa Perusahaan	6,32	7,53	0,84
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,66	3,91	4,26
P. Jasa Pendidikan	5,88	5,57	1,06
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,84	5,84	2,54
R,S,T,U. Jasa lainnya	-12,15	7,94	-1,53
Jumlah	1,64	4,36	0,38

Catatan : Data PDB Tahun 2016 adalah Angka Sangat Sementara
Sumber : Diolah dari data sakernas dan PDB

memiliki nilai elastisitas kesempatan kerja yang negatif, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; dan jasa lainnya. Sementara itu, terdapat tujuh lapangan usaha dengan angka elastisitas kesempatan kerja yang bernilai di atas satu persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di lapangan usaha tersebut telah mampu menciptakan lapangan kerja baru. Lapangan usaha dengan nilai elastisitas kesempatan kerja tertinggi selama tahun 2014-2016 adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, yaitu sebesar 4,26 persen. Satu hal yang perlu dicermati dari tabel tersebut adalah bahwa sektor yang menyerap tenaga kerja, memiliki elastisitas kesempatan kerja yang sangat rendah.

Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia

Pemerintah tak pernah berhenti untuk fokus dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Daya saing terus diupayakan untuk meningkat dan telah tercantum di berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya Nawa Cita. Peningkatan daya saing SDM akan menopang pertumbuhan perekonomian negara. Dengan begitu, Indonesia dapat maju dengan cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lainnya.

Produktivitas dan daya saing telah menjadi prioritas utama Pemerintahan Jokowi-JK. Keunggulan sumber daya manusia dapat terlihat dari kemampuannya dalam memproduksi. SDM yang berdaya saing dan terampil akan memenuhi tuntutan dunia usaha dan tuntutan global yang terus berkembang. Oleh karena itu, sasaran meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia terus dilakukan dengan berbagai kebijakan, salah satunya perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.

Berbagai upaya yang telah lama dilakukan oleh pemerintah ini telah mencapai hasil yang diinginkan. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia terus

Tabel 10.11. Produktivitas Menurut Provinsi (juta rupiah per pekerja), Tahun 2012– 2015

Provinsi	2012	2013 ^r	2014 ^r	2015
Aceh	63,35	65,85	66,27	65,72
Sumatera Utara	70,93	77,20	88,75	95,89
Sumatera Barat	63,02	71,27	75,63	81,85
Riau	232,72	245,01	269,76	255,41
Jambi	80,10	93,02	97,12	100,05
Sumatera Selatan	70,70	79,53	82,90	90,03
Bengkulu	42,41	48,75	52,25	55,67
Lampung	53,27	58,88	62,88	69,64
Kep. Bangka Belitung	77,54	84,32	93,30	97,75
Kepulauan Riau	180,71	202,54	221,61	242,96
DKI Jakarta	283,89	331,36	379,82	419,86
Jawa Barat	60,61	67,21	72,09	81,16
Jawa Tengah	45,64	50,40	55,90	61,70
DI Yogyakarta	40,53	45,03	47,46	53,61
Jawa Timur	64,57	70,70	79,76	87,25
Banten	72,54	80,60	88,27	99,04
Bali	52,38	59,95	68,81	76,21
Nusa Tenggara Barat	34,24	36,22	39,00	48,32
Nusa Tenggara Timur	25,89	29,14	31,55	34,44
Kalimantan Barat	48,70	54,61	59,45	65,69
Kalimantan Tengah	66,02	72,91	77,86	82,45
Kalimantan Selatan	58,20	63,28	68,49	72,78
Kalimantan Timur	342,60	356,46	349,62	352,45
Kalimantan Utara	-	-	-	235,26
Sulawesi Utara	65,65	73,64	82,19	91,27
Sulawesi Tengah	56,89	64,43	69,80	81,06
Sulawesi Selatan	66,73	76,66	84,95	98,05
Sulawesi Tenggara	65,05	71,24	75,78	81,63
Gorontalo	43,20	48,22	52,58	57,81
Sulawesi Barat	39,55	46,29	49,45	55,40
Maluku	40,21	46,20	52,61	52,43
Maluku Utara	42,96	47,12	52,73	55,19
Papua Barat	136,44	147,41	153,82	165,38
Papua	75,93	78,77	82,56	90,96
Indonesia	77,09	85,19	93,23	101,47

Catatan: ^r Angka revisi sesuai data PDB terbaru

Data PDB tahun 2014 adalah angka sementara dan data PDB tahun 2015 adalah angka sangat sementara

Sumber: Diolah dari Sakernas dan PDB

meningkat. Produktivitas merupakan tingkat produksi yang mampu dihasilkan oleh seorang tenaga kerja setiap tahunnya. Capaian produksi tersebut dapat tergambar melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2012, produktivitas tenaga kerja di Indonesia sebesar 77,09 juta rupiah per pekerja. Angka tersebut terus meningkat dengan laju pertumbuhan 9,59 persen setiap tahunnya hingga tahun 2015. Pada tahun 2013, produktivitas pekerja meningkat menjadi 85,19 juta per pekerja, kemudian meningkat lagi menjadi 93,23 juta per pekerja (2014), dan terus meningkat hingga 101,47 juta per pekerja (2015). Kondisi tersebut menandakan bahwa kompetensi, kualitas, dan daya saing tenaga kerja di Indonesia terus meningkat. Dengan demikian, mereka mampu menghasilkan nilai barang dan jasa yang meningkat pula dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jika dianalisis menurut provinsi, seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan produktivitas dari tahun 2012 ke tahun 2015. Provinsi dengan laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 13,93 persen setiap tahunnya. Bahkan, DKI Jakarta juga merupakan provinsi dengan nilai produktivitas tenaga kerja tertinggi selama dua tahun berturut-turut, yaitu 379,82 juta per pekerja (2014) dan 419,86 juta per pekerja (2015). Sebagai provinsi Ibukota Indonesia, tenaga kerja di DKI Jakarta memiliki daya saing yang tinggi dibuktikan dengan kemampuannya dalam memproduksi.

Di sisi lain, provinsi dengan laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja terlambat adalah Kalimantan Timur, yaitu sebesar 0,95 persen setiap tahunnya. Meski demikian, nilai produktivitas tenaga kerja di provinsi ini merupakan tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, yaitu sebesar 352,45 juta per pekerja (2015). Sementara itu, nilai produktivitas tenaga kerja terendah diduduki oleh Nusa Tenggara Timur selama hampir lima tahun berturut-turut sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Pada tahun 2015, produktivitas tenaga kerja di provinsi tersebut hanya sebesar 34,44 juta per pekerja. Meski begitu, angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan di atas angka nasional, yaitu sebesar 9,98 persen per tahun.

Selain dianalisis berdasarkan provinsi, produktivitas tenaga kerja juga dapat dilihat secara sektoral. Lapangan usaha real estate masih menjadi lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi, meskipun angkanya cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016, produktivitas lapangan usaha real estate tercatat sebesar 979,06 juta rupiah per pekerja.

Sementara itu, lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja terendah adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Pada tahun 2016, produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut hanya sebesar 37,01 juta rupiah per pekerja. Meski demikian angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 15,82 persen dibandingkan tahun 2015. Fakta tersebut menandakan bahwa lapangan usaha ini berusaha untuk bangkit dan meningkatkan kualifikasi serta kualitas tenaganya.

Kemudian, peningkatan produktivitas yang cukup signifikan terdapat pada lapangan usaha jasa lainnya. Selama tahun 2013-2016, produktivitas tenaga kerja di lapangan usaha ini meningkat sebesar 25,44 persen per tahun.

**Tabel 10.12. Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha
(juta rupiah per pekerja), Tahun 2013–2016**

Kategori Lapangan Usaha	2013	2014 ^f	2015 ^f	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,51	36,17	41,21	44,18
B. Pertambangan dan Penggalian	737,86	724,35	669,30	608,19
C. Industri Pengolahan	129,10	142,61	155,64	160,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	510,01	562,71	652,19	549,89
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38,98	35,11	31,96	37,01
F. Konstruksi	142,69	143,12	143,41	161,39
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	60,10	142,61	71,92	75,90
H. Transportasi dan Pergudangan	81,10	562,71	125,30	130,20
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68,22	35,11	65,21	57,94
J. Informasi dan Komunikasi	633,44	647,98	749,95	657,12
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	247,49	270,04	278,44	300,98
L. Real Estate	1 345,84	1 104,29	1 129,95	979,06
M,N. Jasa Perusahaan	117,29	130,53	139,32	147,23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	101,83	110,43	111,72	95,99
P. Jasa Pendidikan	60,99	62,98	69,22	68,73
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75,30	82,09	84,21	75,53
R,S,T,U. Jasa lainnya	21,48	25,22	35,50	42,40

Catatan: ^f Angka revisi sesuai data PDB terbaru

Data PDB Tahun 2015 adalah angka sementara dan Data PDB tahun 2016 adalah angka sangat sementara

Sumber: Diolah dari Sakernas dan PDB

Produktivitas tenaga kerja yang meningkat pada lapangan usaha ini disebabkan karena terus menurunnya jumlah pekerjanya sedangkan nilai PDB terus mengalami peningkatan. Jumlah tenaga kerja di lapangan usaha ini mengalami penurunan sebesar 8,49 persen per tahun.

Tenaga Kerja Informal Masih Mendominasi Ketenagakerjaan Indonesia

Banyaknya angkatan kerja berdampak pada banyaknya pasokan tenaga kerja. Akan tetapi, kesempatan kerja yang tersedia belum mampu menyerap penawaran kerja yang tinggi. Jika hal itu terus terjadi, pengangguran akan terus meningkat. Jumlah pekerja informal di Indonesia terus mengalami peningkatan di tiga tahun terakhir. Jumlah pekerja informal meningkat dari 66,31 juta orang (2015) menjadi 68,20 juta orang (2016), dan terus meningkat hingga 72,67 juta orang pada Februari 2017. Di sisi lain, jumlah pekerja formal juga terus bertambah. Selama 2013-2016, laju pertumbuhan jumlah pekerja formal sebesar 3,73 persen setiap tahunnya. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut belum mampu mengejar jumlah pekerja informal. Pada tahun 2016, jumlah pekerja formal hanya 50,21 juta orang.

Kurangnya lapangan kerja formal mendorong tenaga kerja masuk ke sektor informal. Tidak memperoleh pekerjaan formal membuat tenaga kerja berpikir untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Banyak dari mereka yang mulai membuka usaha sendiri yang termasuk ke dalam sektor informal. Meski pekerjaan informal ini juga berkontribusi dalam penurunan angka pengangguran, pekerja informal ini harus ditekan dan digeser menuju ke pekerja formal. Hal ini tidak terlepas untuk peningkatan aspek perlindungan pekerja dan perbaikan kondisi kerja. Terlebih lagi, sektor informal yang identik dengan upah yang tidak tetap dan rendah, tidak terlindungi oleh asuransi, teknologi sederhana, dan cenderung tidak terorganisasi. Dengan demikian pekerjaan di sektor informal biasanya memiliki prospek yang kurang terjamin.

Meskipun demikian, secara persentase selama tahun 2013-2016, pekerja sektor formal terus mengalami peningkatan. Persentase pekerja formal meningkat dari 39,90 persen pada tahun 2013 menjadi 42,40 persen pada tahun 2016. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, peningkatan pekerja formal terjadi baik pada pekerja laki-laki maupun perempuan. Selama periode 2013-2016, persentase pekerja formal laki-laki meningkat dari 42,98 persen menjadi 45,05 persen, sementara persentase pekerja formal perempuan

Tabel 10.13. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, Tahun 2013–2017

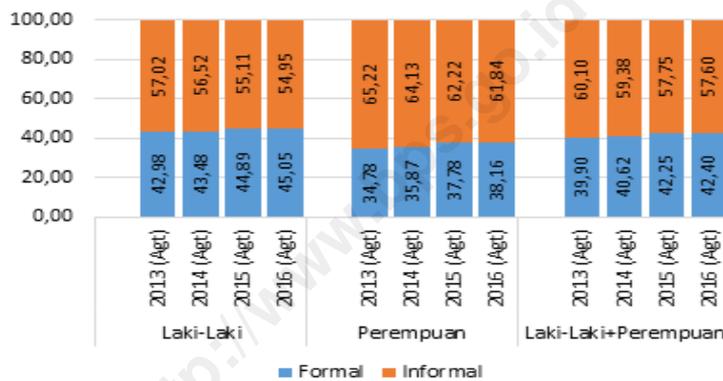
Jenis Kelamin	Formal	Informal
Tahun 2013 (Agt)		
Laki-Laki	30 228 652	40 106 589
Perempuan	14 757 764	27 668 067
Laki-Laki+Perempuan	44 986 416	67 774 656
Tahun 2014 (Agt)		
Laki-Laki	31 073 842	40 389 465
Perempuan	15 485 035	27 679 684
Laki-Laki+Perempuan	46 558 877	68 069 149
Tahun 2015 (Agt)		
Laki-Laki	32 386 435	39 764 153
Perempuan	16 120 295	26 548 316
Laki-Laki+Perempuan	48 506 730	66 312 469
Tahun 2016 (Agt)		
Laki-Laki	32 859 246	40 084 381
Perempuan	17 348 541	28 119 805
Laki-Laki+Perempuan	50 207 787	68 204 186
Tahun 2017 (Feb)		
Laki-Laki	33 686 981	41 079 771
Perempuan	18 179 676	31 592 421
Laki-Laki+Perempuan	51 866 657	72 672 192

Sumber : Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional

meningkat dari 34,78 persen menjadi 38,16 persen pada periode yang sama. Fakta ini memperlihatkan bahwa pekerja informal masih mendominasi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja di sektor formal. Hal ini juga berimbas pada rendahnya upah yang diterima pekerja perempuan. Namun demikian, banyak diantaranya yang memilih bekerja di sektor informal karena fleksibilitas waktunya. Perempuan dihadapkan oleh berbagai tanggung jawab dan nilai sosial. Selain itu, bekerja di sektor informal juga menjadi sarana sosialisasi bagi kaum perempuan dan sebagai strategi bertahan dalam kondisi krisis (Aritonang, 2012).

Gambar 10.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2013-2016



Sumber: Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional

<http://www.bps.go.id>

PENUTUP 11



<http://www.bps.go.id>

Berdasarkan uraian dari masing-masing bab dalam publikasi Laporan Perekonomian Indonesia, gambaran mengenai kondisi perekonomian dunia dan Indonesia di tahun 2016 dan di tahun 2017 yang sedang berjalan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Di tengah-tengah menurunnya harga komoditas dunia membuat tingkat pertumbuhan ekonomi dunia hanya mampu tumbuh sebesar 3,1 persen atau mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,4 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tidak terlepas dari melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan negara berkembang yang masing-masing hanya tumbuh sebesar 1,7 persen dan 4,1 persen.
- Pada tahun 2017 IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia masih akan bisa mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,5 persen. IMF memproyeksikan bahwa pada tahun 2017 perekonomian negara maju dan berkembang juga akan meningkat masing-masing menjadi 2,0 persen dan 4,5 persen.
- Di tengah-tengah kondisi perekonomian global yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang belum kuat, rendahnya harga komoditas global dan ketidakpastian keuangan dunia yang tinggi, perekonomian Indonesia ternyata mampu bertahan tetap tumbuh cukup tinggi di atas lima persen, yaitu tumbuh sebesar 5,02 persen.
- Pengaruh terbesar bagi ekonomi Indonesia di 2016, yaitu perlambatan ekonomi Tiongkok. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, perlambatan di Tiongkok memberi pengaruh pada kegiatan ekspor Indonesia yang mengalami penurunan. Karena itu pola ekspor Indonesia pun harus mulai diubah, dari barang mentah menjadi barang jadi/barang konsumsi. Terkait dengan harga minyak dunia yang masih rendah, secara otomatis berimbas pada harga komoditas lain yang ikut turun menjadi rendah. Indonesia sendiri mulai berusaha untuk mengurangi ketergantungan kepada komoditas impor.
- Dari sisi perdagangan luar negeri, pada tahun 2016 Indonesia mencatatkan adanya penurunan nilai ekspor dan impor. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia pada tahun 2016 mencapai US\$ 145,19 miliar atau turun sebesar 3,44 persen dari ekspor tahun 2015 yang sebesar US\$ 150,37 miliar. Ekspor migas hanya US\$ 13,11 miliar, turun dari tahun lalu yang mencapai US\$ 18,57 miliar, sedangkan ekspor non-migas mencapai US\$ 132,08 miliar atau turun tipis dari tahun lalu yang mencapai US\$ 131,79 miliar. Sementara itu, nilai impor Indonesia pada tahun 2016 mencapai US\$ 135,65 miliar atau turun 4,93 persen dibanding pada tahun 2015. Impor migas pada tahun 2016 mencapai US\$ 18,74 miliar, atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 24,61 miliar, sedangkan nilai impor non-migas hanya US\$ 116,91 miliar, juga turun dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 118,08 miliar.

- Dilihat pada tahun dari sisi neraca perdagangan luar negeri tercatat adanya surplus neraca perdagangan dan bahkan mengalami peningkatan surplus bila dibandingkan dengan tahun 2015. Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan adanya surplus sebesar US\$ 7,67 miliar, kemudian meningkat menjadi US\$ 9,53 miliar pada tahun 2016.
- Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada 2016 sebesar 3,02 persen, tingkat inflasi ini menjadi yang terendah sejak 2010. Penyumbang terbesar angka inflasi tahun 2016 adalah kelompok bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau masing-masing sebesar 1,21 persen dan 0,91 persen.
- Di awal tahun 2017, inflasi month to month hampir menyentuh angka satu persen yaitu 0,97 persen. Namun demikian, pada Maret 2017 terjadi deflasi sebesar 0,02 persen dengan kelompok bahan makanan sebagai penyumbang deflasi terbesar di bulan tersebut. Untuk mencapai target pada inflasi tahunan nasional sebesar 4,0 persen dibutuhkan penanganan khusus di tingkat daerah, sinergi antar daerah, dan koordinasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat. Peran pengendalian stabilitas harga di tingkat daerah salah satunya berada pada Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
- Sementara itu dari sisi investasi, Jumlah investasi yang ditanamkan oleh masyarakat ataupun perusahaan domestik sepanjang tahun 2016 mencapai Rp. 216.230,85 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 20,49 persen, Selanjutnya, investasi asing yang masuk ke Indonesia pada tahun 2016 mencapai US\$ 28.964,1 juta atau turun sekitar 1,07 persen dibanding tahun 2015.
- Perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh di tengah pemulihan ekonomi global, telah mampu mendorong tingginya arus modal masuk ke bursa saham Indonesia. Dari sisi jumlah saham yang diperdagangkan disepanjang tahun 2016, baik jumlah saham yang diperdagangkan maupun nilai transaksi menunjukkan peningkatan dari tahun 2015. Jumlah saham yang diperdagangkan dan nilai transaksinya, yaitu sebesar 1.925,42 miliar lembar saham dengan nilai transaksinya sebesar Rp. 1.844,59 miliar.
- Kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat juga berpengaruh pada kondisi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor keuangan. Hal ini tentunya harus diantisipasi sehingga sektor keuangan Indonesia tetap dalam kondisi stabil.
- Perkembangan suku bunga domestik masih sesuai dengan arah kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Pada awal tahun 2016 Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI *Rate* di level 7,25 persen atau lebih rendah dari BI *rate* di akhir tahun 2015 yang sebesar 7,50 persen. BI *Rate* terus turun hingga bulan Juni 2016 menjadi 6,50 persen berlaku efektif sejak 17 Juni 2016.

- Memasuki bulan Agustus 2016, BI memperkenalkan reformulasi suku bunga acuan dari *BI Rate* menjadi *BI 7-day Repo Rate* (*BI 7-day RR Rate*). Suku bunga acuan ini mulai berlaku efektif pada 19 Agustus 2016. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Selain itu, Bank Indonesia juga akan menjaga koridor suku bunga yang simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (*DF Rate*) dan batas atas koridor (*LF Rate*) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas *BI 7-Day RR Rate*.
- BI memutuskan *BI 7-day RR Rate* pada bulan Agustus 2016 sebesar 5,25 persen. Pada bulan berikutnya, BI memutuskan untuk menurunkan *BI 7-day RR Rate* sebesar 25 bps menjadi 5,00 persen pada bulan September 2016 dan kembali turun sebesar 25 bps dari 5,00 persen menjadi 4,75 persen. Mendekati akhir tahun 2016, BI memutuskan untuk mempertahankan *BI 7-day RR Rate* selama dua bulan yaitu bulan November dan Desember 2016 yaitu tetap sebesar 4,75 persen.
- Selama tahun 2016, penguatan nilai tukar rupiah terjadi pada tiga triwulan pertama 2016, namun memasuki triwulan terakhir mengalami pelemahan. Pada awal triwulan I tahun 2016 nilai tukar berada di level Rp 13.846 dan bergerak terus menguat hingga akhir triwulan I 2016, nilai tukar rupiah berada di level Rp 13.276 per US\$ atau mengalami penguatan sebesar 3,76 persen dibanding nilai tukar rupiah pada akhir triwulan IV tahun 2015 yang sebesar Rp 13.795 per US\$. Penguatan nilai tukar rupiah tetap berlanjut pada awal triwulan II 2016 berada diposisi Rp 13.204 per US\$ dan terus menguat hingga akhir Juni 2016 yang berada di level Rp 13.180. Pada akhir Juni ini nilai tukar rupiah berhasil menguat 0,72 persen (*qtq*) dibanding akhir triwulan I 2016.
- Memasuki triwulan III 2016, penguatan nilai tukar rupiah masih berlanjut. Pada bulan Juli 2016 posisi nilai tukar rupiah berada di level Rp 13.094 per US\$ atau menguat sebesar 0,70 persen dibanding bulan sebelumnya. Walaupun sempat terdepresiasi pada Agustus 2016, nilai tukar rupiah kembali meningkat menjadi Rp 12.998 per US\$ atau menguat sebesar 1,38 persen dibanding akhir triwulan II 2016. Penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi dari awal tahun hingga triwulan III 2016 tidak berlanjut ke akhir tahun 2016. Pada triwulan IV 2016, rupiah justru mendapat tekanan dan mengalami depresiasi karena adanya faktor eksternal. Nilai tukar rupiah pada akhir triwulan IV 2016 tercatat di level Rp 13.436 per US\$ atau terdepresiasi sebesar 3,37 persen (*qtq*) dibanding triwulan III 2016.
- Posisi nilai tukar rupiah terhadap US\$ pada akhir Januari 2017 berada di level Rp 13.343 per US\$ dan mengalami sedikit penguatan hingga akhir Maret 2017 ke level Rp 13.321 per US\$. Hal ini menunjukkan bahwa rupiah menguat sebesar 0,86 persen (*qtq*) terhadap akhir Desember 2016.
- Pemerintah terus menjaga fundamental ekonomi baik makro, moneter, maupun fiskal. Salah satu hal yang penting yang dilakukan adalah mengoptimalkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

(APBN) karena anggaran pembangunan yang ada menjadi salah satu faktor penyokong pertumbuhan di tahun 2016.

- Tahun ini pemerintah telah membangun fondasi yang kuat dalam politik anggaran. Pemerintah juga telah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak dan listrik untuk program yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Yang tidak kalah penting, pemerintah telah mengubah haluan pembangunan menjadi Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, yaitu memulai pembangunan dari daerah terdepan dan tertinggal. Maka sejak tahun 2015 pemerintah mulai mengalokasikan anggaran dana desa yang tujuan untuk membangun fasilitas umum di desa yang dapat membuat desa menjadi lebih maju.
- Di sisi lain, penyerapan juga mulai digenjot mulai dari awal tahun ini. Pada akhir tahun 2016 lanjut diawal tahun 2017, beberapa proyek pekerjaan infrastruktur telah dimulai, antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Perhubungan. dimana distribusi penyerapannya akan terlihat di semester I tahun ini.
- Target penerimaan Negara pada APBNP 2016 mencapai Rp 1.786,22 triliun, atau meningkat 18,45 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengeluaran untuk Belanja Negara pada APBNP 2016 mencapai Rp 2.082,95 triliun lebih tinggi dari APBNP 2015 yang mencapai Rp 1.806,52 triliun atau naik sekitar 15,30 persen. Dalam RAPBN 2017 pemerintah menargetkan Pendapatan Negara sebesar Rp 1.737,63 Triliun dan anggaran untuk belanja Negara ditargetkan mencapai Rp 2.070,47 triliun. Penerimaan negara dan Pengeluaran negara di RAPBN 2017 mengalami penurunan dibanding APBNP 2016 masing-masing turun sekitar 2,72 persen dan 0,60 persen.
- Penduduk bekerja pada Agustus 2016 ada sebanyak 118,41 juta orang atau bertambah 3,06 juta orang dibanding keadaan Agustus 2015. Jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2017 (Februari) tercatat sebanyak 124,54 juta orang.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 6,18 persen pada 2015 menjadi 5,61 persen pada 2016. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 65,76 persen di tahun 2015 menjadi 66,34 persen di tahun 2016. Angka TPAK di tahun 2017 (Februari) tercatat lebih tinggi dari tahun lalu yaitu sebesar 69,02 persen, sedangkan angka TPT 2017 tercatat lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 5,33 persen.
- Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah minimum merupakan standar minimum yang dijadikan acuan oleh pelaku usaha untuk memberikan upah dan menjadi perlindungan pekerja dalam hal upah minimum. Kebijakan mengenai upah minimum telah pula diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Pada tahun 2016 rata-rata upah yang diterima pekerja

adalah Rp 2,28 juta. Sesuai dengan inflasi tahun 2016 sebesar 3,02 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen, perhitungan kenaikan UMP 2017 diperoleh sebesar 8,25 persen. Namun tidak serta merta semua provinsi melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam pengupahan oleh pemerintah. Tercatat baru 30 provinsi yang telah mengikuti PP pengupahan dan 4 sisanya tidak mengikuti PP 78/2015 adalah Provinsi Kalimantan Selatan, NTT, Papua dan Aceh.

- Provinsi dengan UMP 2017 tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 3.355.750. Sementara itu, UMP 2017 terendah adalah Provinsi DI. Yogyakarta dengan UMP sebesar Rp 1.337.645. Kenaikan UMP 2017 tertinggi adalah Provinsi Aceh, dengan kenaikan sebesar 18,01 persen, sedangkan kenaikan UMP 2017 terendah adalah Provinsi NTT, yaitu sebesar 7,02 persen.
- Pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah sektor maritim. Sektor ini diharapkan kedepannya menjadi sektor unggulan. Potensi yang ada dari sektor kelautan dan perikanan selama ini belum tergalai secara optimal. Pemerintahan Kabinet Kerja berupaya menghidupkan kembali ruh Indonesia sebagai negara maritim, dengan mempertimbangkan aspek kelestarian dan keberlanjutan.
- Total produksi perikanan pada tahun 2017 ditargetkan dapat menembus angka 29,40 juta ton, yang terbagi menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya masih dominan dibandingkan perikanan tangkap, capaian produksi perikanan budidaya tahun 2016 sebesar 16,68 juta ton, masih dibawah target pemerintah sebesar 19,46 juta ton. Tahun 2016, produksi perikanan tangkap baru menembus angka 6,83 juta ton, menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sebesar 2,29 persen. Produksi perikanan tangkap di tahun 2016 lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 juta ton.
- Pada tahun 2017, produksi perikanan budidaya ditargetkan mencapai sebesar 21,9 juta ton, namun dengan curah hujan yang cukup tinggi, diperkirakan dapat menurun produksi perikanan budidaya di tahun 2017 maka guna mengantisipasi penurunan yang tajam, KKP menyiapkan komoditas yang kebal terhadap curah hujan, seperti ikan lele dan nila. Untuk produk perikanan tangkap pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 6,6 juta.
- Dari sisi ekspor, produk perikanan Indonesia menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan ekspor perikanan yang disebabkan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan moratorium izin eks kapal asing untuk beroperasi di perairan Indonesia sejak November 2014. Tahun 2017, KKP mematok target ekspor produk perikanan mencapai US\$ 7,62 miliar. Optimisme ini didukung peningkatan produksi perikanan dan pasar ekspor yang semakin terbuka lebar. Untuk menembus target ekspor tahun ini, pemerintah berencana menggelar lima pameran internasional di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Belgia, dan Dubai (Putra, 2017).

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang masuk melalui 19 pintu masuk utama selama tahun 2016 mencapai 10,57 juta. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar 9,49 juta kunjungan. Sedangkan wisman yang masuk ke Indonesia melalui pintu masuk lainnya di tahun 2016 sebesar 1,45 juta orang sehingga total wisman di tahun 2016 mencapai 12,02 juta orang. Jumlah tersebut sudah melebihi dari target pemerintah di tahun 2016 sebesar 12 juta wisman. Target pemerintah untuk kunjungan wisman pada tahun 2017 sebanyak 17 juta orang.
- Sebagai salah satu negara tujuan wisata maka harus didukung dengan penyediaan akomodasi jangka pendek. Jumlah penyedia akomodasi di Indonesia pada tahun 2016 tercatat sebanyak 18.829 usaha dengan jumlah kamar tersedia mencapai 527.176 kamar. Hal ini berarti terdapat tambahan sebanyak 476 usaha dan 19.975 kamar atau masing-masing mengalami peningkatan sebesar 2,59 persen dan 3,94 persen dibandingkan tahun 2015. Dari usaha akomodasi tersebut, 2.387 usaha atau sekitar 12,68 persen adalah hotel-hotel yang diklasifikasikan sebagai hotel berbintang dengan kamar sebanyak 233.007 kamar. Sementara itu usaha akomodasi jangka pendek lainnya tercatat sebanyak 16.442 usaha dengan jumlah kamar sebanyak 294.169 kamar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. (2015). Kebijakan Konektivitas Maritim di Indonesia. *Jurnal Politica*.
- ADB. 2016. *Asian Development Outlook 2016: Asia's Potential Growth*. Manila, Filipina
- ADB. 2017. *Asian Development Outlook 2017: Transcending The Middle-Income Challenge*. Manila, Filipina
- Aritonang, P. H. (2012). Makna Kerja Perempuan Pekerja di Sektor Informal. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ariyanti, F. (2017, Mei 5). Liputan6. Diambil kembali dari Pengangguran Paling Banyak Ada di Kalimantan Timur: <http://bisnis.liputan6.com/read/2942363/pengangguran-paling-banyak-ada-di-kalimantan-timur>
- Bank Indonesia. 2016. Laporan Perekonomian Indonesia 2015. Jakarta
- Bank Indonesia. 2017. Laporan Perekonomian Indonesia 2016. Jakarta
- Bank Indonesia. 2016. Laporan Kebijakan Moneter Triwulanan 2016 (Berbagai Edisi). Jakarta
- Bank Indonesia. 2016. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bulanan 2016 (Berbagai Edisi). Jakarta
- Bank Indonesia. 2016. Tinjauan Kebijakan Moneter Bulanan 2016 (Berbagai Edisi). Jakarta
- Bank Indonesia. 2016. Uang Beredar (M2) dan Faktor yang Memengaruhinya Bulanan 2016 (Berbagai Edisi). Jakarta
- Bank Indonesia. 2017. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bulanan 2017 (Berbagai Edisi). Jakarta
- Bank Indonesia. 2017. Tinjauan Kebijakan Moneter Bulanan 2017 (Berbagai Edisi). Jakarta
- Bank Indonesia. 2017. Uang Beredar (M2) dan Faktor yang Memengaruhinya Bulanan 2017 (Berbagai Edisi). Jakarta
- BKPM, Investasi di Indonesia, 2016
- BPS. 2016. Berita Resmi Statistik Bulanan Berbagai Edisi 2016. Jakarta
- BPS. 2016. Indikator Ekonomi Bulanan Berbagai Edisi 2016. Jakarta
- BPS. 2016. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Berbagai Edisi 2016. Jakarta
- BPS. 2017. Berita Resmi Statistik Bulanan Berbagai Edisi 2017. Jakarta
- BPS. 2017. Indikator Ekonomi Bulanan Berbagai Edisi 2017. Jakarta
- BPS. 2017. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Berbagai Edisi 2017. Jakarta
- BPS, Statistik Indonesia 2017
- BPS, Statistik Hotel dan Akomodasi lainnya di Indonesia, 2015 dan 2016
- Borjas, G. J. (2010). *Labor Economics Fifth Edition*. Singapura: McGraw-Hill International Edition.
- Chand, S. (2016). *9 Major Effects of Inflation-Explained!* Diambil kembali dari Your Article Library: <http://www.yourarticlelibrary.com/macro-economics/inflation-macro-economics/9-major-effects-of-inflation-explained/31091/>
- Chandra, A. A. (2017, Februari 1). Kenaikan Tarif STNK Picu Inflasi Tinggi di Januari 2017. Diambil kembali dari detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3410795/kenaikan-tarif-stnk-picu-inflasi-tinggi-di-januari-2017>
- Fajriah, L. R. (2017, Januari 25). Enam Langkah Strategis Pemerintah dan BI Jaga Inflasi 2017. Diambil kembali dari SINDONEWS.com: <https://ekbis.sindonews.com/read/1174053/33/enam-langkah-strategis-pemerintah-dan-bi-jaga-inflasi-2017-1485329840>
- Gilarso, T. (2004). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Gusstiawan Raimanu. 2016. Analisis Daya Saing Indonesia Tahun 2016-2017: Sebuah Analisis Kebijakan Manajemen. Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Tadulako
- Idris, A. (2016). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Deepublish.
- IMF. 2016. *World Economic Outlook April 2017: Too Slow For Too Long*. Washington
- IMF. 2017. *World Economic Outlook April 2017: Gaining Momentum*. Washington
- International Labour Office. 2015. *Global Wage Report 2014/15: Wages and income inequality*. Jenewa: ILO.
- Kementerian Pariwisata RI, 2107, Statistik Wisatawan Mancanegara.
- Ketenagakerjaan RI. (2017, Mei 22). Hadapi Bonus Demografi, Pemerintah Terus Tingkatkan Kualitas Lapangan Kerja. Diambil kembali dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: <http://kemnaker.go.id/berita/berita->

naker/hadapi-bonus-demografi-pemerintah-terus-tingkatkan-kualitas-lapangan-kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Perdagangan. (2017). Ekspor Nonmigas Januari-Mei 2017 Tumbuh 20,1 %, Terbaik dalam Lima Tahun Terakhir. Siaran Pers. Jakarta.

Prof.Dr.Ir.H.Tridoyo Kusumastanto, M. (n.d.). Pengembangan Sumberdaya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21. Retrieved Juni 16, 2017, from <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridiyo%20kusumastanto.pdf>

Putra, M. F. (2017, Januari 1). Ekspor Perikanan 2017 Ditargetkan Naik Dua Kali Lipat. Retrieved Juni 9, 2017, from Katadata: <http://katadata.co.id/berita/2017/01/01/target-ekspor-perikanan-tahun-2017-sebesar-76-miliar-dolar>

Suryowati, E. (2016, Mei 2). Penurunan Harga Energi Dorong Deflasi April. Diambil kembali dari Kompas.com: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/02/143000726/Penurunan.Harga.Energi.Dorong.Deflasi.April>

Trading Economics. (2016, Desember). Kamboja - Indikator Ekonomi. Diambil kembali dari Trading Economics: <https://id.tradingeconomics.com/cambodia/indicators>

United Nation. 2017. Monthly Bulletin of Statistics March 2017. Issue No. 1149 Vol. LXXI No. 3. Department of Economic and Social Affairs Statistics Division. New York

(2015, November 13). Retrieved Maret 14, 2017, from <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>

World Economic Forum. 2016. The Global Competitiveness Report 2016-2017. Geneva, Switzerland

<https://ekbis.sindonews.com/read/1170429/35/ekonomi-jerman-tumbuh-tercepat-dalam-lima-tahun-1484224669>.

<https://sekolahforex.id/carney-brexit-bukan-lagi-ancaman-utama-bagi-perekonomian-inggris>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3404657/ekonomi-global-di-2017-ketidakpastiannya-sangat-besar>

<http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/eN47d0rK-imf-prediksi-inflasi-indonesia-capai-4-5-di-2017>

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/06/140000526/adb.prediksi.pertumbuhan.ekonomi.indonesia.5.1.persen.tahun.ini>

<http://www.harianterbit.com/hantereekonomi/read/2017/04/06/80677/0/21/ADB-Prediksi-Inflasi-Indonesia-2017-Capai-42-Persen>

<http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-march-2017>

http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/4_LPI2016-Bagian-II.pdf

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf

<https://bps.go.id>

<http://www.beritasatu.com/makro/381862-sri-mulyani-jelaskan-alasan-penghematan-anggaran-negara.html>

<http://finansial.bisnis.com/read/20170206/9/626193/inilah-kelima-faktor-pemicu-pertumbuhan-ekonomi-2016>

<https://www.btnproperti.co.id/blog/ekonomi-indonesia-tahun-2016-tumbuh-sebesar-5-02-yoy-1238.html>

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/18/provinsi-riau-menyumbang-pertumbuhan-tertinggi-di-pulau-sumatera>

<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro-produk-domestik-bruto-indonesia/item253>

<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/22/153044426/ini.tantangan.ekonomi.indonesia.2017.versi.bank.dunia>

<http://bisnis.liputan6.com/read/2691037/9-tantangan-ekonomi-indonesia-di-2017>

NK APBN 2016.pdf

NK RAPBN 2017.pdf

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046,
E-mail : bpsHQ@bps.go.id Homepage : <http://www.bps.go.id>

ISSN 1858-0963

